



# **Kelampauan, Kekinian dan Hari Depan**



# Kelampauan, Kekinian dan Hari Depan

Sumbangan Pemikiran  
Sarjana Ekonomi Indonesia  
1955 - 2025

Diterbitkan oleh  
**Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 2025**

## **Kelampauan, Kekinian dan Hari Depan Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955 - 2025**

Copyright © Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia  
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penanggung Jawab  
Yoga Affandi

Koordinator Penulisan  
Donni Fajar Anugrah

Penulis  
Agus Setiawan

Editor  
Kasijanto Sastrodinomo

Kontributor  
Yoga Affandi, Donni Fajar Anugrah, Rita Krisdiana,  
Mirza Ardi Wibawa

Desainer/Tata Artistik  
Iwan Gunawan, Indah Tjahjaulan

Kulit Muka  
Iwan Gunawan

Foto Kulit Muka  
Dokumentasi arsip ISEI

Penerbit  
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia  
Jalan Daksa IV/9, Kebayoran Baru  
Jakarta 12110

Katalog Data Terbitan Perpustakaan Nasional  
ISBN

# Daftar Isi

## **Kata Pengantar**

1. Perry Warjiyo - Ketua Umum ISEI 2018-2027 **vii**
2. Boediono - Wakil Presiden RI (2008 - 2014) **ix**

## **Prolog**

**xiii**

- Bab 1 | **Menggagas Ekonomi Bangsa: Warisan Para Pendahulu** **1**  
Wasiat Hatta  
Ekonomi Nasional dan Modal Asing  
Rencana Pembangunan dan Tegangan Politik  
Silang Pandang Ekonomi Terpimpin
- Bab 2 | **Rintisan: Jejak Para Penaja** **25**  
Lahir dari Semangat Intelektual  
Sumber Daya Utama  
Bertahan dari Goyangan  
Periode Krusial
- Bab 3 | **Transisi: Menyusun Kembali Sendi Ekonomi** **51**  
Menyongsong Transisi  
Amanat Pembangunan  
Suar dari Kampus  
Lawatan dan Diplomasi  
Stabilisasi dan Rehabilitasi  
Kongres Palembang  
Kongres di Tretes  
Pleno di Rapat
- Bab 4 | **Pembangunan: Mencari Jalan Pemerataan** **93**  
Orde Pembangunan  
Pemerataan Pembangunan  
Kritik dan Apresiasi  
Mendorong Ekspor Nonmigas  
Sidak dan Gebrak  
Mengawal Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis  
Konferensi Usaha Kecil

Bab 5   <b>Reformasi: Memadamkan Krisis</b>	<b>125</b>
Ekonomi Indonesia dalam Reformasi	
Tuntutan Reformasi	
Membangun Pondasi Baru	
Mengembalikan Semangat	
Kontribusi ISEI untuk Kebijakan	
Kongres di Kawanua	
Bab 6   <b>Pasca Krisis: Menghadapi Disrupsi</b>	<b>185</b>
Di Ambang Krisis dan Stagnansi	
Membincangkan Sistem Ekonomi	
Revitalisasi UMKM	
Industri Manufaktur	
Menjadikan ISEI Lebih Relevan	
Pariwisata untuk Pembangunan	
Bab 7   <b>Globalisasi: Tantangan Milenium Baru</b>	<b>231</b>
Membaca Tantangan Baru	
Meniti Arus Global	
Empat Strategi	
Menuju Kongres di Surakarta	
Lima Tantangan Emas	
<b>Epilog</b>	<b>265</b>
<b>Daftar Acuan</b>	<b>269</b>

# Kata Pengantar

Perry Warjiyo | Ketua Umum ISEI 2018 - 2027



Waktu adalah tolak ukur yang dapat mencerminkan kemajuan atau perubahan dalam keteraturan. Beriring usia yang ke-70 tahun, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menerbitkan buku berjudul *Kelampauan Kekinian dan Hari Depan: Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955 - 2025*. Pada momentum ini, sarjana ekonomi Indonesia memiliki historiografinya, menghubungkan keterikatan intelektual maupun emosional, dari satu pemikiran ke pemikiran lain dalam garis waktu.

Dengan berdirinya ISEI tahun 1955, telah terbit suatu zaman baru bagi ekonomi-politik Indonesia. Berada di alam kedaulatan baru setelah Konferensi Meja Bundar, gejala nasionalisasi juga merambah ke berbagai bidang ekonomi. ISEI yang baru lahir menghadapi tekanan politik dan arah ekonomi yang masih begitu muda. Belajar dari Ketua Umum ISEI pertama, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan menuntut usaha terus-menerus untuk mengatasi dan meluruskan kesenjangan dan ketidakseimbangan struktural. Jalan itu, menurut Prof. Sumitro tidak hanya membutuhkan teknik analisis, namun juga pemahaman sejarah.

Setiap periode dalam sejarah ISEI mencerminkan komitmen dan kemampuan organisasi ini untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Pada era Orde Baru, Reformasi dan masa kini, ISEI mengambil peran aktif dalam memberikan masukan kebijakan ekonomi nasional, yang sebagian besar berhasil menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat ke masa mendatang, ISEI dan para anggotanya harus mampu mengidentifikasi tren serta megatren yang memengaruhi perekonomian dan masyarakat global. Teknologi digital, perubahan iklim, perubahan demografi, dan ketidakpastian global merupakan tantangan besar, tetapi juga peluang yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi jika ditangani dengan kebijakan yang tepat dan berwawasan ke depan.

Pada era ini, pendekatan berbasis data dan pemahaman terhadap dinamika lintas disiplin akan menjadi kunci dalam memecahkan masalah-masalah baru yang timbul di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Kita membutuhkan sinergi antara ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan agar kebijaksanaan yang kita lahirkan melalui pemikiran tidak hanya cerdas secara strategi tetapi juga adil secara sosial. Buku yang diterbitkan ini, *Kelampauan, Kekinian, dan Hari Depan: Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955–2025*, diharapkan menjadi titik tolak bagi generasi mendatang untuk belajar dari perjalanan dan pemikiran para pendahulu kita. Semoga karya ini dapat memperkuat kesadaran antara kesinambungan sejarah dan relevansi ekonomi dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini, khususnya kepada para ekonom yang dengan tekun mencurahkan gagasan dan pengalamannya demi kemajuan ISEI dan perekonomian Indonesia. Semoga ISEI terus menjadi wadah intelektual yang menginspirasi dan menggerakkan kita untuk membangun masa depan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan bermartabat bagi bangsa Indonesia.

Perry Warjiyo

# Kata Pengantar

**Boediono | Wakil Presiden RI (2008 - 2014)**



Sejarah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah intelektual bangsa Indonesia. Perjalanan kelembagaan yang berusia 70 tahun ini, telah banyak memercikkan pemikiran para tokoh, serta mewadahi berbagai gagasan dalam merespon dinamika perekonomian Indonesia. Selama 70 tahun itu pula, ISEI mengiringi lintasan sejarah ekonomi - melewati kronik politik; dan menjajaki strategi membangun negeri. Oleh karena itu, buku ini memiliki pesan utama untuk menapaki kembali jalan panjang ekonomi Indonesia dan kaum intelektualnya selama 70 tahun ISEI berdiri. Sejatinnya, perjalanan sejarah kaya akan petunjuk bagi kita untuk melangkah ke depan dengan lebih cerdas. Sebaliknya, pandangan ahistoris yang menganggap masa lalu kita begitu kelam dan penuh kegagalan harus dihindari. Pengalaman kita di masa silam mengandung banyak pelajaran berharga bagi langkah kita ke depan. Ia dapat memberi petunjuk kepada kita mengenai apa yang seharusnya - dan tidak seharusnya dikerjakan.

Saat pembentukan organisasi ISEI tahun 1955 oleh Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer (1950-1957) dan multipartai. Kedanti partisipasi politik

terjadi secara luas, namun masih kurang efektif dalam menyelesaikan situasi defisit ganda, yang mencekik sektor fiskal dan neraca perdagangan. Instabilitas kabinet dan strategi kebijakan yang inkonsisten menyebabkan ekonomi tidak dapat tumbuh dengan baik. Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), jargon ‘politik sebagai panglima’ menyebabkan ekonomi terpinggirkan, inflasi tak terkendali, serta kemunduran ekonomi makin parah. Pelajaran dari dua era ini jelas: kebijakan ekonomi yang rasional tidak mungkin diterapkan dalam situasi politik yang tidak kondusif. Pada masa itu, ISEI membuktikan integritasnya dengan tetap berdiri pada fondasi intelektualitas.

Kemudian, masa Orde Baru memberikan arah berbeda. Kebijakan ekonomi yang rasional dan konsisten dapat terlaksana, menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan sosial yang signifikan. Tim ekonomi yang terbentuk pada masa itu menjadi salah satu unsur keberhasilan. Pada masa Orde Baru, ISEI mulai mengembangkan organisasinya baik secara kelembagaan (ditandai pembukaan ISEI cabang daerah), juga dalam peningkatan kontribusi melalui rumusan-rumusan kebijakan ekonomi. Namun, sistem terpusat dan kurangnya mekanisme checks and balances mulai memperlihatkan kelemahan jelang akhir periode, ketika masalah yang tersimpan di bawah permukaan akhirnya mengemuka menjadi krisis ekonomi. Dalam catatan ini, Orde Baru mengajarkan pentingnya kebijakan ekonomi yang rasional sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan yang sangat terpusat tanpa dibatasi kontrol yang memadai akan menimbulkan risiko.

Era Reformasi muncul sebagai respons atas pengalaman masa lalu, terutama setelah krisis ekonomi yang menyingkap persoalan struktural di masa Orde Baru. Demokrasi dan pluralisme menjadi jawaban politik kita, namun dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan baru untuk menemukan keseimbangan antara dinamika politik yang pluralis dan kebutuhan akan kebijakan ekonomi yang efektif. Stabilitas ekonomi dan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi terbukti menjadi tantangan tersendiri dalam sistem politik yang lebih

demokratis ini. Secara holistik, tugas utama kita adalah merancang strategi dan program yang dapat mempersiapkan bangsa ini untuk segera menjadi pemain unggul di kancah global. Di sinilah sebaiknya energi para anggota ISEI difokuskan. Perbedaan pendapat di antara kita pasti akan muncul, dan itu hal yang wajar serta sehat. Akan tetapi, di tengah perbedaannya tersebut kita tidak boleh terjebak dalam dogma atau ideologi kaku yang menutup pikiran dan menghalangi toleransi terhadap pandangan lain—terhadap kemungkinan bahwa pandangan orang lain bisa saja benar. Satu hal yang pasti: kita harus selalu mengutamakan kepentingan nasional.

Pelajaran-pelajaran sejarah ini memberi kita panduan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Pertanyaan utama yang harus kita jawab bersama adalah: Apakah demokrasi yang kita terapkan saat ini dapat menjamin kebijakan ekonomi yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat? Dan lebih jauh, apakah ada komponen dari kebijakan ekonomi masa lalu yang masih relevan untuk kita adopsi dan kembangkan, atau sebaliknya, komponen yang harus kita hindari agar tidak mengulangi kesalahan yang sama?

Semoga refleksi atas perjalanan sejarah ekonomi kita yang diceritakan dalam buku *Kelampauan Kekinian dan Hari Depan: Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955 - 2025* ini dapat dapat memberi inspirasi untuk terus memperkuat hubungan antara kebijakan politik dan ekonomi, sehingga kesejahteraan bangsa dapat terus meningkat di masa depan.

Selamat membaca,

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh



# Prolog

Pertama-tama buku ini dirancang sebagai sketsa sejarah atau episode perkembangan sebuah organisasi profesi keilmuan, yakni Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), sejak awal didirikan pada 1955 hingga jelang tujuh puluh tahun pada 2025. Dengan kata lain, buku ini adalah risalah kenangan organisasi yang merekam beberapa aspek perkembangannya. Patut dicatat bahwa ISEI merupakan organisasi profesi keilmuan dalam ilmu-ilmu sosial pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka dari penjajahan. Artinya pula ISEI lahir dari alam pikiran yang independen—layaknya credo organisasi profesi keilmuan.

Atas dasar itu pula, fokus perhatian buku ini diarahkan pada aspek pemikiran para pendiri, anggota, ataupun sarjana ekonomi pada umumnya mengenai berbagai isu perekonomian di Tanah Air. Dengan begitu, buku ini bisa disebut sebagai sejarah pemikiran praktis ekonomi, dalam arti berkenaan dengan sumbang saran gagasan dalam mencari jawaban atau jalan keluar atas permasalahan ekonomi. Berbicara tentang pemikiran dengan sendirinya berbicara tentang aktor pemikirnya. Maka, fokus utama yang lain dari buku ini dengan sendirinya tertuju kepada para tokoh di balik pemikiran itu yang tak lain adalah pendiri, pemimpin serta anggota ISEI. Mereka adalah akademisi, birokrat dan profesional yang, sejak kelahiran organisasi, telah banyak berkontribusi merumuskan kebijakan ekonomi dan moneter negara.

Salah seorang tokoh yang harus disebut di sini ialah Sumitro Djojohadikusumo, penggagas dan pendiri ISEI. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor bidang ekonomi di Negeri Belanda selagi negeri sendiri masih dalam jajahan. Bukan suatu kebetulan jika Sumitro memilih belajar ekonomi karena ia lahir dari lingkungan yang bergumul dengan masalah perekonomian—ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri Bank Negara

Indonesia setelah kemerdekaan. Ketika mendirikan ISEI, Sumitro belum lama dikukuhkan sebagai guru besar dan sebagai dekan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Hal itu menjelaskan mengapa terjadi relasi khusus—dirasa atau tidak—antara ISEI dan FEUI. Kampus di Salemba itu merupakan “sumber” lahirnya sarjana ekonomi di tengah langkanya tenaga terdidik dalam bidang ekonomi selepas penjajahan. Hampir seluruh alumni fakultas itu, menjadi anggota ISEI. Kelak, pada masa Orde Baru, kampus itu pula yang mengantarkan para teknokrat andal sebagai arsitek ekonomi penggerak pembangunan nasional.

Tokoh penting lain yang harus disebut di sini tentu saja Mohammad Hatta. Seperti Sumitro, Hatta adalah sarjana ekonomi lulusan Negeri Belanda. Dilihat dari segi umur ataupun kelulusan pendidikan, Hatta adalah senior ekonom Indonesia. Bisa dimengerti ketika ISEI didirikan, Hatta, kala itu sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, diminta Sumitro duduk dalam kepengurusan sebagai Ketua Kehormatan—bahkan dalam kepengurusan yang berbeda pada tahun-tahun selanjutnya. Namanya kemudian disematkan sebagai nama piagam penghargaan ISEI bagi tokoh ekonomi Indonesia terpilih sejak 1985. Arti penting kehadiran Hatta dalam pemikiran ekonomi Indonesia ialah bahwa ia meletakkan fondasi bagaimana ekonomi Indonesia seyogianya dibangun berdasar budaya atau kepribadian Indonesia. Asas koperasi adalah buah pikir Hatta yang fundamental dalam konteks perekonomian Indonesia yang hingga kini masih diperhitungkan sebagai bagian dari berbagai landasan kebijakan ekonomi di Tanah Air.

Kelahiran ISEI tentu tidak lepas dari dinamika perkembangan sejarah modern Indonesia, khususnya sejarah ekonomi. Salah satu tonggak historiografi ekonomi modern Indonesia ialah kebijakan Sistem Tanam Paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Inilah episode sejarah Indonesia yang paling merugikan dan menyengsarakan bagi rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, kebijakan itu bersifat eksploitatif terhadap sumber daya

manusia dan sumber daya alam Indonesia secara terstruktur dan masif. Berbagai tanaman komoditas ekspor Hindia Belanda yang laku keras di pasar Eropa memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial. Tidak hanya berhasil mengisi kas pemerintah yang kosong akibat peperangan menghadapi Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–30), *batig slot* atau laba besar yang berhasil diraup pemerintah kolonial mencapai ratusan juta gulden. Sebaliknya, rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang menjadi objek penerapan sistem itu, mengalami proses pemiskinan yang berdampak pada kelaparan.

Kebijakan kolonial yang menyengsarakan rakyat pribumi tersebut—yang terus berlanjut dalam berbagai bentuk dalam abad berikutnya—lambat laun melahirkan kesadaran pada kaum terpelajar pribumi, yang mulai tampil seiring dengan Politik Etis yang digagas kelompok “humanis” Belanda, untuk membela nasib bangsanya yang terjajah. Masalah ekonomi rakyat menjadi isu menonjol sepanjang masa kolonial. Namun, seperti terjadi dalam sejarah, tidak banyak, jika bukan tidak ada sama sekali, tokoh atau pemikir ekonomi yang tampil pada masa itu. Mohammad Hatta yang baru kembali dari studi di Negeri Belanda pada 1932, ternyata ditangkap dan diasingkan pemerintah kolonial karena aktivitas politiknya yang non-kooperatif terhadap Belanda. Sempat menulis artikel ekonomi dari pengasingan, namun dalam posisi seperti itu jelas membatasi ruang gerak bagi Hatta.

Latar historis yang paling “dekat” dengan kelahiran ISEI adalah peristiwa yang terjadi selepas Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) awal 1950. Kendati telah memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, hasil Perjanjian KMB dinilai merugikan pihak Indonesia baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dari sisi politik, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi negara serikat. Dari segi ekonomi dan keuangan, pemerintah Indonesia harus menghormati dan mengizinkan perusahaan Belanda tetap beroperasi di Indonesia. Berbagai perusahaan Belanda yang pada umumnya telah berdiri sejak masa kolonial bergerak di berbagai sektor yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dominasi perusahaan Belanda tersebut menunjukkan

secara kasatmata bahwa kendati telah berhasil merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia belum mampu melepaskan diri dari penjajahan ekonomi pihak Belanda. Kondisi tersebut diperparah dengan kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia diharuskan membayar utang eks pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Belanda sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan terhadap pemerintahan Indonesia serikat.

Ironisnya, di tengah masalah perkonomian yang sulit itu, sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ekonomi dan moneter masih sangat terbatas. Selain diperlukan demi upaya peningkatan taraf ekonomi rakyat, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi untuk mengelola berbagai perusahaan negara, lembaga-lembaga ekonomi serta perbankan, dan untuk membangun institusi bank sentral. Pada titik ini, pemikiran akan pentingnya membangun fakultas ekonomi untuk menghasilkan sumber daya manusia kompeten yang sesuai kebutuhan dirasa makin mendesak. Maka, seperti telah disebutkan, FEUI dibuka pada 1950.

Dinamika politik dalam negeri pada masa Demokrasi Parlementer (1950–59) ikut memengaruhi perekonomian bangsa. Ketidakstabilan pemerintahan Indonesia diwarnai persaingan ideologi yang dianut partai-partai politik besar pada saat itu yang mengakibatkan kabinet jatuh-bangun sehingga program pembangunan ekonomi tidak berjalan semestinya. Di tengah situasi perekonomian yang tidak menguntungkan menjelang pemilihan umum pertama, Sumitro Djojohadikusumo mendirikan ISEI pada 14 Januari 1955. Organisasi profesi tersebut didirikan dengan tujuan memajukan bidang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para sarjana ekonomi di Indonesia. Langkah Sumitro mendirikan ISEI boleh dikatakan “revolusioner” karena kehadiran organisasi ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap upaya untuk mengatasi berbagai masalah konkret bidang ekonomi seperti kemiskinan yang saat itu menjadi masalah utama pemerintah.

ISEI lahir pada saat rakyat Indonesia terbagi menjadi pendukung ideologi berbeda yang direpresentasikan oleh partai-partai politik sehingga pada masa-masa awal kehadirannya, organisasi ini juga kerap menjadi sasaran kritik dan hujatan para pendukung ideologi kiri. Hal itu karena para ekonom yang bernaung dalam ISEI dinilai memiliki pemikiran yang berafiliasi dengan liberalisme di bidang ekonomi. Dalam konteks Perang Dingin, polarisasi terjadi pada hampir semua sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi sehingga keberhasilan Partai Komunis Indonesia dalam mengambil hati kalangan masyarakat bawah kian menambah tekanan hingga melahirkan tuntutan pembubaran ISEI. Tuntutan yang digalang oleh kelompok kiri tersebut tidak pernah terealisasi, sebaliknya justru memberikan sebuah pengalaman berharga bagi ISEI dalam mengarungi perjalanan organisasi di tengah pergulatan politik. Pengalaman tersebut setidaknya dapat memberikan teladan kepada para ketua dan pengurus ISEI berikutnya akan pentingnya konsistensi sikap dan independensi organisasi dari pengaruh eksternal yang dapat membahayakan keberadaannya.

Pada masa-masa selanjutnya, ISEI membuktikan sebagai *survivor* yang mampu bertahan dan tetap bergerak dalam situasi apa pun. Pada masa Orde Baru, ISEI seperti menemukan “khitah”-nya yang sejati sebagai organisasi yang ikut memikirkan dan membangun ekonomi ataupun negeri pada umumnya. Begitu pula pada masa globalisasi yang kerap menimbulkan disrupsi, ISEI mampu mengarunginya dengan percaya diri. Beruntung, ISEI pada saat ini menemukan aktor yang tepat, yakni Perry Warjiyo untuk menakhodainya di tengah pusaran masa selanjutnya. Pada saat naskah buku ini sedang ditulis, Perry Warjiyo, melalui Kongres ISEI di Surakarta, Jawa Tengah, terpilih untuk ketiga kalinya memimpin para bestari ekonomi.

## **Isi Buku Ini**

Buku ini bertujuan menjelaskan perkembangan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi berikut pemikiran atau gagasan ekonom Indonesia terutama para ketua umum ISEI. Selain itu, buku ini juga menjelaskan

kontribusi ISEI dalam berbagai program yang pernah dijalankan pengurus ISEI sebagai upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia di sepanjang episode sejarah Indonesia. Sebelum buku ini terbit, ISEI telah menerbitkan buku ISEI: The First Fifty Years 1955–2005 yang ditulis oleh Vidya Dahlan dan Lukman Hakim (diterbitkan oleh Lembaga Penerbit FEUI, 2005). Isi buku itu menggambarkan kronologi perkembangan ISEI selama lima puluh tahun pertama melalui kesaksian para ketua-ketua umum pada masa itu. Dirancang sebagai *coffee table book*, buku tersebut disertai koleksi foto-foto langka yang menarik.

Walau demikian, karya ini perlu dilengkapi uraian aspek lain tentang sumbangsih dengan karya lain yang dapat menjelaskan kontribusi pemikiran dan sumbangsih gagasan dari masing-masing periode kepengurusan ISEI termasuk pemikiran para mantan ketua umum serta sejumlah aspek internal organisasi termasuk proses pemilihan ketua umum ISEI melalui kongres dan seminar nasional. Dengan demikian, terdapat celah untuk melengkapi karya ini melalui karya baru yang ditulis dengan menggunakan perspektif historis yang lebih komprehensif.

Karya yang kini ada di tangan para pembaca berjudul *Kelampauan, Kekinian dan Hari Depan: Sumbangan Pemikiran Sarjana Ekonomi Indonesia 1955–2025* diharapkan memberi sentuhan tambahan yang sekiranya belum dimuat dalam buku sebelumnya, terutama pada sisi jiwa zaman untuk menjelaskan dinamika perjalanan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi. Berbeda dengan karya sebelumnya, karya ini juga memuat penyelenggaraan Seminar Nasional dan Kongres ISEI yang pada lazimnya juga digunakan sebagai ajang pemilihan Ketua Umum ISEI yang baru serta sejumlah sidang pleno yang diselenggarakan di antara dua kongres. Penyelenggaraan kongres dan sidang-sidang pleno ISEI patut direkonstruksi karena pada kedua peristiwa tersebut, pemikiran para ekonom dan peserta seminar berupaya untuk menjawab berbagai permasalahan serta tantangan ekonomi dan moneter yang tengah dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yakni heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik, pengumpulan data baik primer maupun sekunder meliputi arsip, dokumen dan surat kabar sezaman yang berhasil diperoleh di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Koleksi Arsip Bank Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selain itu surat kabar sezaman juga diperoleh di Museum Pers Indonesia di Surakarta berikut karya-karya yang merupakan biografi dan autobiografi sejumlah mantan ketua umum ISEI. Tidak kalah penting adalah sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah mantan ketua umum ISEI antara lain dengan Emil Salim (1972–79), Marzuki Usman (1993–2000), Bambang Sudibyo (2000–03), Burhanuddin Abdullah (2003–09), Darmin Nasution (2009–15) dan Muliaman Hadad (2015–18). Begitu pula wawancara dilakukan dengan mantan Sekretaris Umum, yakni Prijono Tjiptoherijanto (1987–93), Aviliani (2009–15), Yoga Affandi (2022 - 2024) dan Sekretaris Eksekutif Firman Parningotan (2018–24).

Buku ini terdiri dari tujuh bab yang berisi garis besar sebagai berikut. Bab 1 merupakan saripati pemikiran ekonomi generasi awal setelah Indonesia merdeka, terutama Mohammad Hatta dan Sumitro Djojohadikusumo. Keduanya dapat dilihat memberi wawasan tentang dasar perekonomian Indonesia terutama pada masa-masa awal kemerdekaan. Bab 2 meriwayatkan berdirinya ISEI serta dinamika internal dan eksternal organisasi ini di tengah persaingan ideologi pada masa “demokrasi liberal” di Indonesia. Bab 3 memaparkan perjalanan sejarah ISEI pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Inilah masa ketika ISEI ikut berperan besar dalam proses pembangunan di Indonesia melalui para pemimpinnya yang duduk dalam pemerintahan.

Bab 4 masih mencakup periode pemerintahan Orde Baru dan melanjutkan program yang dijalankan oleh pengurus ISEI sebelumnya, antara lain penyelenggaraan seminar nasional dan pemberian

Penghargaan Hatta yang dimulai pada 1985. Bab 5 mengetengahkan situasi ekonomi dan politik Indonesia jelang peristiwa Reformasi 1998 seiring dengan kejatuhan pemerintahan Orde Baru. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai upaya dan saran-saran pemikiran ISEI dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia sebagai imbas dari krisis moneter dan ekonomi melalui sejumlah seminar nasional dan sidang pleno. Bab 6 menjelaskan mengenai perjalanan sejarah ISEI memasuki periode Reformasi; antisipasi pemerintah dalam menangani krisis moneter pasca krisis ekonomi global. Terakhir, Bab 7, menguraikan pemikiran dan pandangan ISEI terkait berbagai tantangan perubahan dan masalah ekonomi yang berpotensi akan dihadapi Indonesia pada masa mendatang. Secara khusus juga dibahas peran ISEI dalam memulihkan situasi ekonomi setelah pandemi Covid-19 berikut berbagai program terutama penerbitan buku-buku kajian kebijakan publik sebagai kontribusi ISEI memberikan alternatif pemecahan masalah ekonomi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Penerbitan buku ini juga diiringi dengan penerbitan *coffee table book* ISEI berjudul Membangun Ekonomi Negeri yang secara kronologis melukiskan ikhtisar sejarah organisasi ini berikut profil para ketua umum ISEI yang dilengkapi dengan foto dan ilustrasi penunjang. Diharapkan kedua buku ini akan saling melengkapi dalam merekonstruksi perjalanan sejarah ISEI sekaligus memberikan semangat baru bagi lulusan fakultas ekonomi dan juga bagi pengurus pusat ISEI dan daerah dalam membangun dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat Indonesia.

## **Catatan tentang Ejaan**

Ejaan yang digunakan dalam penulisan buku ini berdasar pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PUEBI, 2005) yang menggantikan Ejaan yang Disempurnakan (1972). Beberapa perkecualian terjadi pada ejaan penulisan nama orang.

Menurut konvensi, penulisan ejaan nama orang mengikuti apa yang biasa digunakan pemilik nama. Dalam buku ini tersua ejaan nama Sukarno yang merupakan perubahan dari Soekarno (kemungkinan sejak berlakunya Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik, 1947); begitu pula Soemitro Djojohadikusumo dalam literatur masa kolonial telah diubah menjadi Sumitro Djojohadikusumo setidaknya pada terbitan ulang disertasinya (1953) dan buku-buku selanjutnya. Sementara itu, ejaan nama Presiden Soeharto tetap dipertahankan sesuai aslinya.

Penulisan imbuhan/awalan dari kata asing pasca- digabung dengan kata dasar yang mengikutinya, misal pascakrisis; tetapi diberi tanda hubung (-) manakala diikuti kata turunan, misal pasca-kolonialisme. Contoh lain: nonpribumi digabung; tapi non-pemerintahan memakai tanda hubung karena diikuti kata turunan.



# Menggagas Ekonomi Bangsa

## Warisan Para Pendahulu



Walaupun terbatas, sumbangan pemikiran akademis para sarjana dan pengamat ekonomi Indonesia mengenai masalah perekonomian Tanah Air telah beredar ketika negeri ini masih dalam jajahan Hindia Belanda. Bahkan, justru kondisi kehidupan terjajah yang sangat memprihatinkan itulah yang menggugah kesadaran para intelektual ekonomi, ataupun disiplin lain, untuk bersuara dan bertindak. Artinya, pemikiran para bestari itu terbaca sebagai refleksi moral atas situasi zaman “gelap” yang dilihat, diketahui dan dirasakan, serta kepedulian untuk menyelesaikannya.

Keterbatasan sumbangan pemikiran ekonomi orang Indonesia pada masa kolonial bisa dipahami sebagai keterbatasan jumlah orang Indonesia itu sendiri yang terdidik dalam ilmu ekonomi. Keterbatasan jumlah itu makin mengecil karena kesempatan belajar ilmu ekonomi pada waktu itu harus ditempuh di Negeri Belanda dan hanya dapat diikuti kalangan pribumi tertentu menurut kriteria pemerintah jajahan yakni kaum priayi atau (calon) *ambtenaar* yang, setelah lulus dan kembali ke Hindia Belanda, wajib mengabdikan kepada birokrasi kolonial. Jumlah rata-rata mahasiswa Indonesia yang belajar di Negeri Belanda antara tahun 1920 dan 1940 adalah 20 orang per tahun. Bagian terbesar dari mereka belajar ilmu hukum, indologi, teknik, dan ekonomi di berbagai perguruan tinggi ternama di Negeri Belanda terutama di Universitas Leiden.<sup>1</sup>

1 Koentjaraningrat dan Bachtiar 1975: 4; lihat juga Paauw 1978, tentang universitas generasi pertama di Indonesia; tentang mahasiswa Indonesia belajar di Negeri Belanda, lihat Poeze, Van Dijk, Van der Meulen 1986: 163.

Dengan demikian, para mahasiswa Indonesia sebelum Perang Dunia yang belajar di Negeri Belanda tersebut merupakan kelompok masyarakat (pribumi) yang terpilih; terbukti dari angka putus ajar (*dropout*) yang rendah dan, sebaliknya, sejumlah besar dari mereka bahkan mencapai jenjang doktor.<sup>2</sup> Para mahasiswa itu bukan hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan melainkan juga berkesadaran penuh pada keadaan tanah airnya yang terjajah bangsa asing—meski bangsa ini memberi beasiswa kepada mereka. Para mahasiswa itu sangat *concern* pada cita-cita nasionalisme serta hak-hak manusia. Melalui berbagai organisasi—antara lain Perhimpunan Indonesia yang dibentuk oleh Mohammad Hatta dan kawan-kawan—dan terbitan publikasi, mereka memancarkan suar-suar gagasan tentang kebangsaan dalam segala aspeknya, termasuk soal ekonomi dalam hal ini.<sup>3</sup>

Di tanah jajahan, sementara itu, pendidikan tinggi baru didirikan pada perempat pertama abad ke-20 sejalan dengan pemberlakuan Politik Etis pemerintah kolonial yang ingin “membalas budi” kepada anak negeri terjajah. Tiga sekolah tinggi pertama yang dibuka pada waktu itu ialah Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hoogeschool*, 1920) di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshoogeschool*, 1924) di Batavia, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran (*Geneeskundige Hoogeschool*, 1927) di Batavia. Jelas, tidak tersua pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi saat itu. Pengetahuan tentang ekonomi, dan ilmu sosial yang lain seperti sosiologi dan etnologi, “dititipkan” sebagai mata kuliah di Sekolah Tinggi Hukum.<sup>4</sup>

Perguruan tinggi ekonomi di Indonesia baru dibuka setelah kemerdekaan yakni sebuah fakultas ekonomi di Makassar dalam *Nood Universiteit* yang didirikan pada 1946, berubah menjadi *Universiteit van Indonesië* (1947), oleh administrasi Belanda NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang ingin berkuasa kembali di Indonesia.

---

2 Koentjaraningrat dan Bachtiar 1975: 4.

3 Koentjaraningrat dan Bachtiar 1975: 4; Poeze, Van Dijk, Van der Meulen, khususnya Bab 4 dan Bab 5.

4 Koentjaraningrat dan Bachtiar 1975: 6.



Pertemuan organisasi Perhimpunan Indonesia di Leiden, Belanda, antara tahun 1924 - 1927 | Sumber: KITLV

Artinya, UvI (termasuk fakultas ekonominya) bukan representasi perguruan tinggi nasional apalagi seluruh pengajarnya terdiri dari profesor Belanda. Pada 1950, UvI diambil alih pemerintah Indonesia dan disulih menjadi Universitas Indonesia menyusul pembentukan Fakultas Ekonomi Djakarta pada tahun yang sama—yang lalu digabung menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.<sup>5</sup>

5 Tentang perkembangan FEUI lebih terperinci, lihat antara lain Panitia Penerbitan Buku 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990); Nurdin dan Iskandar (2000); Siregar (2007); lihat juga Bab 2 buku ini.

Dengan demikian, pembukaan UI menandai kelahiran perguruan tinggi negeri nasional setelah Indonesia merdeka, bersama Universitas Gadjah Mada (1949) di Yogyakarta dan Universitas Nasional (swasta, 1946) di Jakarta. Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, ketiga perguruan tinggi tersebut merupakan tempat persemaian tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi yang diasuh sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Khusus FEUI, di bawah Sumitro Djojohadikusumo, dekan pertama, terbukti melahirkan ekonom terdidik andal yang berperan sebagai pengampu ilmu ekonomi modern dan perencana pembangunan di Indonesia. Sumitro pula yang mendirikan organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai “rumah besar” bagi para ekonom memikirkan pembangunan ekonomi Tanah Air.

Harus dicatat pula bahwa sebelum pembentukan lembaga pendidikan tinggi ekonomi di Indonesia terwujud, sumbangan pemikiran sarjana ekonomi anak negeri tetap memancar. Mohammad Hatta, sebagai contoh, tetap menyuarakan gagasannya melalui tulisan di surat kabar sejak kembali dari studi di Negeri Belanda pada 1932—artinya Indonesia saat itu masih dalam jajahan. Tulisan Hatta yang ia kerjakan sewaktu dalam pengasingan di Digul merupakan gagasan mendasar tentang bentuk usaha ekonomi, yakni koperasi, yang dipandanginya sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Substansi tulisan ini layaknya wasiat yang diwariskan Hatta yang tetap relevan hingga kini dan diabadikan dalam kelembagaan ekonomi Indonesia.

Secara konsisten, Hatta tetap berkontribusi dalam menggagas pembangunan ekonomi bangsa hingga jelang akhir hayatnya. Bersama perkembangan waktu, tampil ekonom terdidik lain seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Sjafruddin Prawiranegara yang terus menggali banyak aspek lain dalam permasalahan ekonomi Indonesia. Pada usia Republik yang masih tergolong muda, mereka telah mendiskusikan topik-topik tentang perekonomian nasional, modal asing, “ideologi” ekonomi, dan pembangunan.

---

6 Sebagian gagasan Hatta ini dinukilkan kembali dalam bagian selanjutnya bab ini.

## Wasiat Hatta

Semasa dalam pengasingan di Digul karena dibuang oleh pemerintah kolonial lantaran aktivitas politiknya sebagai tokoh pergerakan, Mohammad Hatta menulis aspek ekonomi dan politik. Kala itu, 1932, sebelum diasingkan bersama Sjahrir, Hatta belum lama kembali ke Tanah Air dari studinya di Handels Hoogeschool (kemudian berubah menjadi Economische Hoogeschool; sekarang Erasmus Universiteit) di Negeri Belanda. Dalam artikelnya bertajuk “Ke Arah Indonesia Merdeka” yang dimuat dalam koran *Daulat Ra'jat*, ia menjelaskan gagasan pokok tentang perekonomian sosialis yang bebas dari kapitalisme internasional.<sup>7</sup>

Dalam tulisannya itu, Hatta menekankan arti penting pemerintahan rakyat atau demokrasi. Ia mengingatkan, demokrasi Barat seharusnya mengandung nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan seperti yang digelorakan Revolusi Prancis 1789.<sup>8</sup> Menurutnya, ketiga slogan tersebut tidak terwujud secara bersamaan karena Revolusi Prancis bertujuan memerdekan individu dari ikatan feodalisme kekuasaan otokrasi. Akan halnya kemerdekaan individu dalam kehidupan ekonomi melahirkan semangat *laissez faire, laissez passer* yang bermakna “merdeka berbuat, merdeka berjalan” yang dalam prosesnya memunculkan ekonomi kapitalis dengan landasan persaingan bebas.

Tentang demokrasi Barat, Hatta berkomentar, “Kita mengetahui bagaimana sifat perseorangan Barat itu (individualisme) merusak pergaulan hidup, memutar satu asas yang baik seperti kedaulatan rakyat menjadi perkakas pemakan rakyat.”<sup>9</sup> Ia menolak penerapan demokrasi Barat untuk membangun Indonesia merdeka.

Di kemudian hari setelah Indonesia merdeka, Hatta seperti menyambung secara konsisten tentang apa yang dipikirkan sebelumnya. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Hatta menyampaikan pidato dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta

<sup>7</sup> Lihat Suleman 2010: 16.

<sup>8</sup> Hatta 1966: 22.

<sup>9</sup> Hatta 1953: 111.

(3 Februari 1946); antara lain ia berbicara mengenai substansi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup> Menurutnya, perekonomian suatu negeri umumnya ditentukan oleh tiga hal yakni kekayaan tanahnya, kedudukan sebuah negara terhadap negara lain dalam lingkungan internasional, dan sifat serta kecakapan rakyat dan cita-citanya.<sup>11</sup> Namun lanjutnya, Indonesia masih membutuhkan satu pasal lagi yakni sejarahnya sebagai tanah jajahan. Pandangan bahwa sejarah menjadi salah satu variabel penting dalam menata perekonomian bangsa Indonesia ke depan menjadi kian bermakna jika dikaitkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.

Kekayaan Indonesia yang tecermin dari kandungan sumber daya alam, baik yang berada di bawah tanah berupa tambang maupun yang berada di atas permukaan tanah berupa kesuburan berikutan sumber air yang melimpah, tidak berbanding lurus dengan kehidupan dan perekonomian rakyatnya. Pada titik ini, Hatta seperti menggarisbawahi bahwa sejarah berperan dalam menjelaskan mengapa kontradiksi tersebut terjadi. Kemiskinan yang menerpa rakyat Indonesia tak lepas dari penjajahan dan pendudukan bangsa lain. Dalam praktik, penjajahan mengeksploitasi sumber alam dan sumber daya manusia terjajah bagi kepentingan dan keuntungan penjajah sendiri.

Pada dasarnya Pasal 33 UUD 1945 memuat kerangka operasional dari nilai-nilai dasar perekonomian nasional yang akhirnya bermuara pada Demokrasi Ekonomi yang di dalamnya terdapat tiga pelaku ekonomi yakni koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Bung Hatta mendefinisikan koperasi berdasarkan perilaku sosial masyarakat Indonesia terutama dengan menonjolkan budaya tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama. Semangat tolong-menolong menunjukkan sikap *genuine* masyarakat Indonesia terutama saat dalam suasana penjajahan yang membuat bagian terbesar rakyat pribumi terlilit utang.<sup>12</sup> Kondisi itu terjadi di tengah ketidakberdayaan

---

10 Swasono (peny.) 1985: 1–13.

11 Hatta dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 34, Jilid 1.

12 Amalia dan Bratakusumah 2023: 67.



Pemandangan sebuah pasar di Indonesia tahun 1947 | Sumber: KITLV

rakyat untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi di negeri sendiri. Situasi makin sulit karena sebagian pribumi yang hidup berkecukupan justru melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga tinggi terhadap sesama bangsa.

Kekayaan alam Indonesia dikeruk melalui praktik monopoli selama masa kompeni dagang Belanda VOC bercokol dan dilanjutkan dengan kolonialisme di Kepulauan Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda bahkan memperlakukan Indonesia sebagai sebuah *onderneming* atau perkebunan besar untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia dengan dasar ekonomi ekspor. Menurut Hatta, politik ekonomi ekspor kandas ketika kapitalisme liberal berangsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat. Kerja sama ekonomi antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat dalam kerangka Uni



Kilang Minyak di Balikpapan direbut kembali perusahaan-perusahaan Barat setelah Perang Dunia II | Sumber: KITLV

Indonesia–Belanda pada awal 1950, pada kenyataannya menjadikan Indonesia sebagai daerah ekonomi industri Belanda.

Setelah merdeka, pembangunan ekonomi Indonesia, menurut Hatta, harus tetap didasarkan pada cita-cita tolong-menolong dengan perangkat teknologi yang lebih modern. Menurut pandangannya, saat itu Indonesia menghadapi tiga masalah dalam membangun perekonomian yakni, pertama, soal ideologi terkait dengan struktur

ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong; kedua, tindakan yang perlu dijalankan dengan segera pada masa selanjutnya; dan, ketiga, koordinasi dalam mengatur pembangunan (ekonomi) di Indonesia agar sejalan dan berlanjut dengan pembangunan di seluruh dunia.<sup>13</sup>

Tampak sebagai sebuah antitesis dari ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu, pemikiran Hatta menekankan pada ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yaitu koperasi.<sup>14</sup> Prinsip saling-bantu dan mendahulukan kepentingan orang lain menjadi hal penting dalam mendidik anggota koperasi. Selain itu, anggota koperasi harus memiliki rasa tanggung jawab moral dan sosial. Kedua hal itu penting ditumbuhkan dalam setiap jiwa anggota koperasi dan sebaliknya, jika hal itu tidak terjadi, maka koperasi juga tak akan berkembang seperti yang diharapkan.

Hattamenekankan, perekonomian rakyat yang ditumbuhkembangkan dari usaha kecil hendaknya mengambil bentuk koperasi. Jika koperasi dimulai dari sektor ekonomi kecil, di sisi lain mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, pemerintah berperan dalam membangun berbagai sarana dan prasarana berikut infrastruktur untuk menunjang perekonomian dalam skala nasional seperti pembangunan pusat-pusat tenaga listrik, instalasi penyedia air bersih, saluran pengairan, jalan raya dan berbagai jenis produksi bagi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, pemerintah sekaligus menangani perusahaan besar dan perusahaan untuk kepentingan publik.

## **Ekonomi Nasional dan Modal Asing**

Hingga awal dekade 1950 sejak kemerdekaan dideklarasikan, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam upaya

---

13 Hatta dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 36–7, Jilid 1.

14 Istilah “*asas kekeluargaan*” berasal dari perguruan Taman Siswa, yang melukiskan kedekatan guru dan murid bagai sebuah keluarga. Mengacu pada istilah itu, suatu koperasi hendaknya dijalankan secara tolong-menolong di antara para anggotanya seperti hubungan antaranggota dalam keluarga. Lihat Taman Siswa 1982: 68.

memperbaiki kondisi perekonomian bangsa terutama karena hancurnya pusat-pusat produksi akibat Perang Asia Timur Raya dan revolusi nasional yang berlangsung selama kurang-lebih empat tahun. Selain itu, berbagai prasarana dan sarana penunjang aktivitas ekonomi—jembatan, jalan raya, transportasi—mengalami kerusakan parah. Kondisi itu memaksa sebagian masyarakat kembali menggunakan sungai sebagai jalur alternatif transportasi yang berdampak samping pada maraknya penyelundupan.

Pada aspek lain, peningkatan jumlah uang yang beredar memicu inflasi sebagai akibat peningkatan defisit anggaran yang didanai pinjaman pemerintah dari Bank Indonesia. Meningkatnya inflasi membuat neraca pembayaran melemah. Tugas berat menanti pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi perekonomian di tengah dominasi perusahaan milik Belanda dan Amerika Serikat yang justru bercokol makin kuat setelah perundingan KMB. Keberadaan perusahaan asing tidak lepas dari kebijakan tentang modal asing yang dikeluarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda melalui Undang-Undang Agraria (1870). Sejak itu modal asing dari Eropa “merasuki” sektor perkebunan kemudian berkembang dan merambah ke sektor lain terutama pertambangan dan perbankan.<sup>15</sup>

Arus modal asing sempat terhenti ketika pecah Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang versus sekutu Barat. Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia secara instan untuk keperluan perang mereka sehingga perekonomian Indonesia makin terpuruk. Kekalahan Jepang dalam perang tersebut, yang diikuti perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuka peluang bagi pemerintahan nasional baru mulai memikirkan

---

15 Masuknya modal asing ke Indonesia yang diinvestasikan dalam industri perkebunan bisa dilacak dari praktik Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa pada masa kolonial abad ke-19. Secara politik, sistem itu melemah ketika kelompok oposisi dan gerakan anti-imperialisme internasional di Negeri Belanda “ganti memaksa” pemerintah kolonial membatasi praktik tersebut seiring datangnya periode yang lebih liberal sejak 1870. Namun, faktanya sistem tersebut baru berakhir pada 1919 ketika penanaman paksa kopi di wilayah pesisir dihentikan. Lihat Abdullah 2006: 69.

pembangunan ekonomi yang, tak terhindarkan, akan mengundang masuknya modal asing. Akan tetapi, tidak mudah melakukan hal itu karena terjadi perbedaan pandangan di antara elite politik dan ekonomi.

Di tengah kesulitan menghimpun modal dan perlunya kebijakan buka pintu bagi investasi asing, pemikiran ekonomi yang berkembang di banyak kalangan nasionalis condong “berwarna” sosialis. Umumnya, mereka menolak kapitalisme—yang biasa diasosiasikan dengan modal asing—karena sistem itu lekat dengan praktik ekonomi kolonial. Kecenderungan pemikiran mereka justru ingin mengalihkan modal asing menjadi modal pribumi meski pelaksanaannya bisa sangat rumit karena para ekonom, terutama yang duduk dalam pemerintahan, umumnya tidak memiliki visi, misi dan pemikiran yang sama dalam memandang modal asing tersebut.

Sebagian dari ekonom, perumus dan pelaksana kebijakan dalam sektor ekonomi-keuangan memilih pendekatan pragmatis. Umumnya, mereka bisa menerima dan menyetujui aktivitas perusahaan asing karena menyadari modal dari luar negeri diperlukan untuk pengembangan potensi sumber daya alam (Indonesia) dalam rangka pembangunan industri modern. Di pihak lain, kelompok ekonom dan praktisi yang menentang masuknya modal asing menginginkan perubahan struktural yang mendasar. Pada titik ini, Sumitro Djojohadikusumo (dari Partai Sosialis Indonesia), Sjafruddin Prawiranegara (Partai Masyumi), dan Mohammad Hatta yang profesional-netral, patut dicatat karena ketiganya telah menyumbang gagasan penting dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara, alumni *Rechtshoogeschool* di Batavia (1939), modal asing masih diperlukan untuk pengembangan ekonomi nasional. Setelah Indonesia merdeka, Sjafruddin menjabat sebagai Menteri Keuangan (1946), Menteri Kemakmuran (1947), dan sebagai Perdana Menteri (1948); berlanjut menjadi Menteri Keuangan (1949–50) dan Gubernur Bank Indonesia pada 1953. Pada masa Revolusi, Sjafruddin memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat, saat



Sjafruddin Prawiranegara (1911 - 1989) | Sumber: Istimewa

Yogyakarta—sebagai ibu kota negara sementara—jatuh ke tangan pasukan Belanda selama masa Agresi Militer Belanda II.<sup>16</sup>

Dalam Muktamar VI Partai Masyumi di Jakarta (24–30 Agustus 1952), Sjafruddin menyatakan selama modal nasional belum cukup untuk membiayai pembangunan, modal asing diperlukan untuk mendirikan industri-industri baru dengan tetap mengacu pada asas *mutual profit* bagi Indonesia dan perusahaan asing.<sup>17</sup> Selain itu, pembangunan industri

<sup>16</sup> Poesponegoro dan Notokusanto (ed.) 2008: 260.

<sup>17</sup> Muktamar Masyumi VI mengesahkan Program Perjuangan Partai yang mencakup bidang-bidang Kenegaraan, Perekonomian, Keuangan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Politik Luar Negeri dan Irian Barat. Program Perekonomian meliputi

harus beriringan dengan konsepsi Ekonomi Terpimpin yang berlaku pada waktu itu. Menurutnya, istilah “ekonomi nasional” atau “modal nasional” sebagai istilah ekonomi harus ditafsirkan lebih luas daripada “warga negara” apalagi “warga negara asli.”

Lebih lanjut Sjafruddin menjelaskan bahwa tafsiran yang lebih luas tersebut dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar sehingga perbedaan antara “modal asing” dan “modal nasional” sesungguhnya hanya penting untuk pengiriman kapital atau keuntungan ke luar negeri berhubung dengan adanya peraturan devisa.<sup>18</sup> Modal asing harus diberi kesempatan untuk keluar kembali dan mengirimkan seluruh atau sebagian keuntungan yang diperolehnya, sementara modal nasional pada prinsipnya tidak diberi hak untuk keluar atau mengirimkan keuntungannya ke luar negeri. Pandangan itu didukung Mohammad Natsir yang juga melihat bahwa modal asing masih diperlukan untuk membangun perekonomian nasional kendati sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diprioritaskan. Natsir menyadari berbagai perusahaan asing yang menghasilkan produk dalam skala besar—terutama di bidang perdagangan, angkutan dan perbankan—masih berperan dominan.<sup>19</sup>

Di sisi lain, mengenai modal asing tersebut, Sumitro Djohadikusumo memiliki pandangan berbeda. Ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir (1951–52),<sup>20</sup> Sumitro membuat program Urgensi Industrialisasi untuk mengembangkan industri rakyat. Kepada pengusaha pribumi diberi kesempatan mengembangkan pusat-pusat industri kecil, antara lain

---

sejumlah aspek: Ekonomi Terpimpin, Nasionalisasi, Industrialisasi, Modal Asing, Kaum Tani, Kaum Nelayan, Agraria dan *Middenstand* Indonesia. Lihat Hakiem 2021: 55.

18 Prawiranegara (2005a) dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 51, Jilid 3.

19 Prawiranegara (2005a) dalam Soesastro, dkk. (ed.) 2005: 275.

20 Setelah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Sumitro duduk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo (1952–54) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–56); ia berupaya menciptakan lapangan kerja dengan program fiskal Keynesian menurut versinya. Sekembali dari pengelanaan di luar negeri, Sumitro bergabung dalam pemerintahan Orde Baru. Lihat Rahardjo 2017: vii; lihat juga Bab 2 buku ini.

melalui kebijakan monopoli impor kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Melalui kebijakan itu, koperasi batik dapat mengumpulkan modal dari keuntungan distribusi bahan baku mori yang diimpor dari Negeri Belanda dan Jepang.<sup>21</sup>

Namun, sebagai Menteri Industri dan Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan I, Sumitro mengundang masuk modal asing sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu.<sup>22</sup> Kebijakan membuka pintu bagi modal asing sebenarnya telah diluncurkan pada masa Kabinet Ampera melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Walau begitu, Sumitro tetap berpendirian bahwa industrialisasi harus dilaksanakan melalui kapitalis domestik yang lebih autarkis yakni kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan yang hanya dapat dilakukan di dalam sebuah negara.

Dalam pemikiran Sumitro, kebijakan autarkis bertujuan mencegah penyebaran pengaruh politik, ekonomi dan militer dari luar ke dalam negeri. Walau bertentangan dengan perdagangan internasional yang bersifat liberal, kebijakan itu dipandang dapat melindungi kedaulatan negara yang masih dalam kondisi lemah dalam ketiga aspek tersebut—yakni politik, ekonomi dan militer. Menurutinya, campur tangan pemerintah dalam suatu kebijakan akan membawa kemajuan sosial dan menjamin kepentingan umum. Sementara, campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi bisa dimengerti sebagai reaksi terhadap prinsip *laissez faire*.<sup>23</sup>

21 Rahardjo 2017: xvii.

22 Kebijakan membuka pintu bagi modal asing sebenarnya telah diluncurkan pada masa Kabinet Ampera melalui Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing.

23 Intinya, teori *laissez-faire* (abad ke-18) menentang intervensi pemerintah dalam urusan bisnis. Secara harfiah, istilah ini bermakna “biarkan anda melakukan” sehingga makin sedikit keterlibatan pemerintah dalam bisnis dan perekonomian yang juga berarti berlakunya persaingan bebas, makin baik pula dunia usaha yang pada akhirnya akan membuat perekonomian masyarakat pun makin baik secara keseluruhan. Secara umum *laissez-faire* berkonotasi pada aspek kebebasan individu yang absolut, seperti kebebasan berusaha bagi setiap individu, kebebasan kontraktual dan, pada sisi lain, mengurangi fungsi serta kontrol pemerintah. Lihat Kaluma 2009: 2.

Dilihat dari situasi perekonomian dan struktur masyarakat Indonesia dekade 1950 dan 1960, pandangan Sumitro cukup relevan mengingat ketimpangan kondisi dan persentase ekonomi di tengah masyarakat terlihat kasatmata. Hal itu membuat pembagian pendapatan dari semua kelompok masyarakat tidak tersebar secara merata. Situasi itu menguatkan pandangan bahwa ekonomi sebuah negara harus dipimpin oleh aparaturnya dengan seluruh perangkat yang dimilikinya sehingga pembagian hasil produksi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara lebih adil.

Dari sekian kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam kurun 1950-an, masalah modal asing cukup menarik perhatian di tengah seruan dan upaya nasionalisasi atas perusahaan asing terutama milik Belanda. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap modal asing dimulai dari pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing pada 1953. Undang-undang itu mengalami revisi dan amandemen pada 1956 hingga akhirnya Kabinet Karya yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menyetujui menerbitkan Undang-Undang Nomor 78/1958 tentang Penanaman Modal Asing pada 1958.<sup>24</sup>

Undang-undang tersebut secara berangsur berhasil menarik perhatian investor luar negeri. Namun, menurut Sumitro, modal asing yang masuk ke Indonesia harus memenuhi sejumlah syarat. Syarat itu ialah harus ada partisipasi minimum modal domestik milik orang Indonesia dalam pelaksanaan investasi; harus ada keikutsertaan minimum orang Indonesia dalam manajemen proyek investasi; investor asing wajib melatih tenaga kerja Indonesia, dan wajib mempekerjakan sebanyak mungkin orang Indonesia; selain harus menjalin hubungan kerja dengan baik. Terakhir, investor asing wajib menginvestasikan kembali sebagian dari keuntungan proyeknya di Indonesia.

Kewajiban bagi perusahaan asing mempekerjakan orang Indonesia merupakan imbal-balik strategis di tengah kurangnya lapangan kerja di Tanah Air. Tenaga kerja, menurut Sumitro, adalah seluruh orang yang

<sup>24</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1970: 514.

bersedia dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Kalangan itu meliputi mereka yang bertugas untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran dan mereka yang bertugas untuk menyambut biaya atau imbalan atau pendapatan.<sup>25</sup>

Kebutuhan akan lapangan kerja di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 1940–50 tidak setinggi kurun sebelumnya karena bangsa Indonesia masih sibuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun, dalam rentang waktu antara 1950 hingga 1960 pertumbuhan penduduk melonjak cukup signifikan yakni mencapai 97,1 juta jiwa.<sup>26</sup> Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa keberadaan perusahaan asing di Indonesia kala itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat.

## **Rencana Pembangunan dan Tegangan Politik**

Dari segi ekonomi ataupun politik, hasil perundingan KMB lebih menguntungkan pihak Belanda daripada Indonesia. Sebagai contoh, dalam kesepakatan yang tertuang dalam Financieel Economische Overeenkomst perusahaan milik Belanda dibolehkan kembali beroperasi di Indonesia; De Javasche Bank difungsikan sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat; sementara Indonesia harus menanggung pembayaran utang selama perang.<sup>27</sup> Secara politik, sejumlah negara bagian yang dibentuk Belanda tetap berdiri legal dalam negara Indonesia yang, melalui perundingan itu, direkayasa menjadi federasi.

Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, pembangunan ekonomi terkesan berjalan di tempat, ditandai dengan banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai. Polarisasi tajam ideologis antara Islam, nasionalis, dan komunis dalam konstelasi politik nasional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif. Sebagai contoh kasus, Rencana

25 Siregar 2021: 62.

26 Majid 2021: 52.

27 Setiawan, Krisdiana, Akbar 2023: 205.



Pembangunan di Jakarta sekitar awal dekade 1960-an | Sumber: KITLV

Pembangunan Lima Tahun (RPLT) periode 1956/60 sebetulnya telah disiapkan Biro Perancang Nasional (BPN) pada 1952 di bawah pimpinan Djuanda Kartawidjaja, tapi baru disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada 11 November 1958 yang memiliki daya surut hingga 1 Januari 1956.<sup>28</sup>

Akibat situasi politik dan ekonomi, prioritas dan sasaran Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun terpaksa diubah pada 1957 setelah diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Biaya

28 Poesponegoro dan Notosusanto (ed.) 2008: 337.

RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah dengan harapan harga barang dan upah buruh tidak akan berubah selama lima tahun.<sup>29</sup> Namun, harapan itu sirna imbas depresi besar di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957/58. Dampaknya, pendapatan negara berkurang karena harga ekspor bahan mentah menurun. Seiring dengan itu, upaya Indonesia membebaskan Irian Barat dari genggaman Belanda ikut mendorong nasionalisasi perusahaan milik negeri itu. Pada saat yang sama, ketegangan antara pusat dan daerah memberatkan pelaksanaan RPLT meski hal itu bisa diredakan sementara waktu dengan penyelenggaraan Munap.

Selanjutnya, Perdana Menteri Djuanda memberi kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan agar menjadi rancangan yang menyeluruh dan berjangka panjang. Namun, pelaksanaan pembangunan terhambat oleh birokrasi dan administrasi terutama dalam penentuan prioritas. Sejumlah kasus yang diperkirakan sebelumnya berpotensi memperburuk hubungan pusat dan daerah, terutama masalah gerakan separatis PRRI dan Permesta, terbukti melahirkan konflik militer. Pemerintah pusat memang berhasil menumpas kedua gerakan itu melalui operasi militer, tapi biaya yang dibutuhkan sangatlah besar.

Ketidakstabilan situasi politik dan meningkatnya anggaran yang digunakan dalam pelbagai operasi militer tersebut mengakibatkan meningkatnya defisit dan menurunnya kecenderungan angka ekspor. Persentase defisit sejak 1950 adalah 20% dan meningkat hingga 100% pada 1960. Sementara itu, ketegangan antara Indonesia dan Belanda terus meningkat lantaran masalah perebutan Irian Barat yang belum tuntas. Utang luar negeri juga kian bertambah karena pemerintah memutuskan membeli senjata modern dari Uni Soviet untuk melaksanakan operasi Trikora merebut Irian Barat.

Situasi politik memanas yang berkelindan dengan masalah perekonomian negara tak urung memengaruhi kehidupan kampus berbagai perguruan tinggi, terutama FEUI di Jakarta. Setidaknya sejak

<sup>29</sup> Poesponegoro dan Notosusanto (ed.) 2008: 337.

WA INDONESIA SIAP MELAKSANAKAN SETIAP -  
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO



Soekarno dan Mahasiswa menunjukkan kehidupan intelektual dan politik |  
Sumber: Istimewa

masa kampanye Pemilihan Umum 1955 mahasiswa telah menjadi target sasaran “pembinaan” partai-partai politik. Dalam peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia (1957), Bahder Djohan, Presiden [sekarang rektor] UI menyerukan kepada mahasiswa agar hati-hati bertindak dan tidak abai pada apa yang didengar, dibaca dan diketahui, yang mungkin saja bisa memengaruhi ketentrangan jiwa mahasiswa ataupun kehidupan kampus umumnya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> *Antara* 1957: 11, No. 33/B, 2 Februari.

Bahder Djohan juga menunjukkan sikap kritisnya terhadap masalah hubungan pusat dan daerah terutama soal PRRI dan Permesta. Menurutnya, pertentangan antara pusat dan daerah seharusnya dapat diselesaikan dengan mempertemukan kedua pihak dan mencari jalan keluar dengan cara-cara damai. Ia bahkan menawarkan diri sebagai juru runding. Namun, ternyata tawaran itu ditolak pemerintah pusat yang, malahan, melancarkan operasi militer dan melakukan pemboman atas Kota Padang. Bahder Djohan memprotes tindakan pemerintah itu dengan cara mengundurkan diri dari jabatan Presiden Universitas Indonesia.<sup>31</sup>

## **Silang Pandang Ekonomi Terpimpin**

Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi, pertama, pembubaran Dewan Konstituante; kedua, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945; ketiga menghapus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950. Selain itu, keempat, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan demikian, dekrit itu bisa dilihat sebagai penegasan ulang bahwa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan beserta konstitusi awalnya, dan meninggalkan bentuk negara federasi beserta konstitusinya pula.

Pemberlakuan Dekrit berimplikasi pada menguatnya otoritas Presiden Sukarno dalam menjalankan pemerintahannya. Makin terbuka ruang bagi perluasan ajaran berikut penerapan berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang ia gariskan. Di bidang ekonomi, berlaku kebijakan yang disebut Ekonomi Terpimpin sejalan dengan sistem politik Demokrasi Terpimpin gagasan Presiden Sukarno. Sistem Demokrasi Terpimpin merupakan konsepsi yang sebelumnya dicetuskan oleh Presiden pada 1957.<sup>32</sup> Ekonomi Terpimpin pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara berperan memimpin ekonomi nasional melalui pembentukan jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-

31 Oemarjati 1992: 241.

32 Rahardjo 1992: 37.

sektor ekonomi utama. Sistem ini merupakan respons atas kegagalan perekonomian negara pada dekade 1950 yang mengadopsi praktik ekonomi negara-negara sosialis.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, Ekonomi Terpimpin (kadang diterjemahkan “ekonomi berencana”) secara konseptual dapat terjadi baik di negara sosialis maupun negara liberal.<sup>34</sup> Di Indonesia, pandangan ini mengacu pada perubahan sistem pemerintahan yang semula menerapkan sistem Demokrasi Liberal sejak 1950 hingga 1959. Pada periode itu, pemerintahan parlementer yang mengalami tujuh kali pergantian kabinet telah beberapa kali merumuskan dan merancang rencana ekonomi kendati dalam prosesnya tidak sepenuhnya terlaksana.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan Ekonomi Terpimpin, yang populer dengan istilah Sosialisme ala Indonesia, ditegaskan melalui Ketetapan MPRS tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.<sup>35</sup> Selain itu, melalui Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia (1961) pada bagian Ekonomi, Produksi dan Distribusi dijelaskan bahwa *retooling* di bidang ekonomi ditempuh dengan menjadikan ekonomi sektor negara memegang posisi komando sesuai dengan Ekonomi Terpimpin.<sup>36</sup>

Secara umum Ekonomi Terpimpin dirancang untuk dilaksanakan selama 30 tahun. Rencana 8 Tahun pertama adalah tahap awal dari satu tujuan untuk mencapai ekonomi nasional yang demokratis menuju masyarakat sosialis ala Indonesia. Pemerintah membentuk perusahaan negara, yayasan dan koperasi sebagai instrumen ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah mendirikan sejumlah perusahaan perkebunan baru yaitu Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, Perusahaan Perkebunan Serat Negara, Perusahaan Perkebunan Negara Aneka

33 Boediono 2016: 94–6.

34 Lewis 1965: 10–3.

35 Lihat Ketetapan MPRS Nomor II/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969.

36 Lihat Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia Nomor 1/Kpts./Sd/61 Tanggal 19 Januari 1961; Amrullah 2022: 146.

Tanaman, Perusahaan Perkebunan Karet Negara dan Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Karung Goni. Secara aktif pemerintah melakukan strukturisasi dan restrukturisasi usaha dan perusahaan perkebunan negara antara 1960 hingga 1965.<sup>37</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan Demokrasi Terpimpin ataupun Ekonomi Terpimpin mendapat kritik keras dari sejumlah tokoh ekonom terkemuka. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, Presiden Sukarno telah menghancurkan kepercayaan yang diberikan sejarah dan nasib kepadanya karena telah dengan rendahnya mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai negarawan dan pendiri negara yang tulus.<sup>38</sup> Kritik yang dilontarkan dari luar negeri itu disebarakan melalui pamflet yang jangkauan dan peredarannya terbatas sehingga tidak cukup lantang untuk menentang kebijakan Ekonomi Terpimpin di tengah gegap gempita anti-Barat pemerintahan Sukarno.

Selain Sumitro, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta melayangkan kritik terbuka terhadap penerapan sistem Demokrasi Terpimpin. Menurutnya, Sukarno sejak awal telah melanggar konstitusi dan demokrasi yang tengah berkembang yang dapat mengarah kepada bentuk diktator. Hal itu mengacu pada UUD 1950 (RIS) bahwa presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu gugat serta mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet.<sup>39</sup>

Perlawanan pemikiran terhadap Ekonomi Terpimpin juga datang dari kalangan akademisi terutama para guru besar dan pengajar pada sejumlah perguruan tinggi. Munculnya perlawanan tersebut berkaitan dengan politik nasionalisasi Universitas Indonesia sejak awal 1950-an yang meliputi aspek visi dan misi, staf pengajar, bahasa pengantar dan kurikulum. Seiring dengan proses nasionalisasi perusahaan milik

---

37 Gunanegara (2019: 56).

38 Djojohadikusumo dalam Feith dan Castles (ed.) 1988: 129; awalnya, tulisan Djojohadikusumo ini terbit pada 1959.

39 Hatta dalam Feith dan Castles (ed.) 1988: 126. Awalnya tulisan Hatta ini ditulis dalam *Panji Masyarakat*, 1960.

Belanda dan masalah Irian Barat yang belum kunjung usai, semangat anti-Belanda juga dilakukan dengan cara mengurangi tenaga pengajar asing terutama orang Belanda. Pengiriman tenaga pengajar Indonesia ke luar negeri pun dialihkan ke Amerika Serikat yang saat itu banyak menyediakan program beasiswa.<sup>40</sup>

Para pengajar ekonomi yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana di luar negeri, terutama lulusan University of California, cenderung berbeda pendapat bahkan terlihat sebagai antitesis atas pemikiran Ekonomi Terpimpin. Seperti halnya sistem perekonomian di negara-negara Barat, terutama di Amerika Serikat, para ekonom tersebut menekankan berjalannya mekanisme pasar sebagai alat alokasi sumber daya yang efisien. Namun, perlawanan atau kritik para intelektual ekonomi itu mungkin kurang efektif dalam penyebarannya karena kebanyakan berupa artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah kampus yang terbatas peredarannya.

---

40 Abdullah, Abdurrachman, Gunawan (ed.) 2012: 196.



# Rintisan

## Jejak Sang Penaja

**P**eriodo Perang Kemerdekaan dalam sejarah Indonesia—sering pula disebut masa revolusi (1945–50)—merupakan saat-saat berat bagi perekonomian Indonesia. Selain belum mampu memulihkan sektor ekonomi setelah penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang berakhir, bangsa Indonesia dihadapkan pada kedatangan Belanda-NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bersama tentara Sekutu yang memenangkan Perang Dunia.

Berdalih ikut menjaga *status quo* pascaperang, nyatanya Belanda-NICA malah menyulut konflik bahkan peperangan baru melawan Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai perang kemerdekaan tersebut. Berbagai strategi dilancarkan NICA untuk memenangkan perang, antara lain melakukan blokade ekonomi. Tindakan itu menimbulkan kesulitan bagi rakyat Indonesia dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan kian mempersulit pemerintah Indonesia untuk mengangkat taraf perekonomian rakyat. Selain hancurnya pusat-pusat produksi sebagai dampak perang, kesulitan bahan pangan juga mengakibatkan munculnya wabah penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat yang hidup dalam sanitasi terbatas.

Perundingan damai Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, pada 1949 antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia mengakhiri konflik antara kedua negara. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang diubah bentuknya menjadi negara serikat, tapi bentuk negara ini hanya berlangsung sekitar setahun. Timbul kesadaran kuat

pada bangsa Indonesia bahwa negara federal itu hanyalah rekaan Belanda agar mereka terus berkuasa di Indonesia. Maka tepat pada 17 Agustus 1950, seperti saat proklamasi kemerdekaan lima tahun sebelumnya, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Nyatanya, pengakuan atas kedaulatan dan kembali pada negara kesatuan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam politik, contohnya, eksperimen sistem parlementer melahirkan ketidakstabilan kabinet akibat pertarungan antara partai politik pendukung versus penentang pemerintah. Pergolakan dan gerakan separatisme di beberapa daerah yang tidak puas dengan kebijakan politik pusat telah menguras energi, memakan korban jiwa, dan keuangan negara. Perekonomian nasional, sementara itu, jauh dari kemampuannya untuk bangkit. Sebaliknya, berbagai perusahaan milik Belanda tetap bercokol di Indonesia.

## **Lahir dari Semangat Intelektual**

Di tengah situasi politik serta perkembangan ekonomi yang tidak stabil dan cenderung menurun, sejumlah ekonom Tanah Air mendeklarasikan berdirinya Ikatan Sarjana Ekonomi pada 14 Januari 1955. Perkumpulan ini merupakan organisasi profesi keilmuan pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Sesuai dengan namanya (kemudian disempurnakan menjadi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI), organisasi tersebut mengarahkan perhatian pada aspek perekonomian; bertujuan memajukan ekonomi melalui pemikiran, meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sarjana ekonomi Indonesia.

Pendirinya, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), bertindak sebagai ketua pertama. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor ekonomi dari *Nederlandsche Economische Hoogeschool*, Rotterdam, Negeri Belanda (1943). Pemuda kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, itu kemudian dikenal sebagai intelektual, pendidik, diplomat dan birokrat. Ia guru besar pada Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (FEUI, 1952–2000). Tugas diplomatik yang pernah diembannya antara lain sebagai Wakil Ketua Misi Indonesia pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota delegasi dalam Konferensi Meja Bundar (1947–50), serta Kuasa Usaha pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (1950). Sebagai birokrat, Sumitro pernah menduduki berbagai jabatan menteri yakni Menteri Perekonomian (1950–51), Menteri Keuangan (1952–53; 1955–56), Menteri Perdagangan dan Industri (1968–73), serta Menteri Negara Riset (1973–78).

Visi ISEI ialah memberi kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian nasional dengan didukung oleh penguatan sinergi bersama pengampu kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu, misi yang diemban ialah memperkuat peran organisasi dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme serta peningkatan kerja sama di tingkat nasional dan internasional.<sup>1</sup>

Profil ISEI direpresentasikan dalam lambang organisasi berupa seuntai padi menguning yang diikat dalam satu bondot dikelilingi lingkaran berbentuk segi lima. Di atas untaian padi tertera tulisan 'Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia'. Warna dasar lambang ISEI ialah abu-abu terang. Untaian padi menguning dalam satu ikatan bermakna bahwa para sarjana ekonomi Indonesia diikat dalam satu wadah. Untaian padi yang merunduk melambangkan sikap dan perilaku bernas sarjana ekonomi Indonesia dan sikap sederhana, tidak menonjolkan diri, serta lebih mengutamakan pengabdian dan memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam Mukadimah disebutkan bahwa ISEI berupaya meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi di tingkat pusat dan daerah yang dapat diterapkan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, ISEI ikut serta dalam pemikiran dan pembaharuan kerja sama

---

1 Visi dan misi ini dirumuskan dalam kepengurusan ISEI 2021–24. Lihat: <https://isei.or.id/tentang-kami/profil>.



Logo ISEI Tahun 1955 | Sumber: Majalah Ekonomi nomor 1 edisi Maret 1959)

perekonomian regional dan global menyempang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia.

Memperhatikan visi dan misi serta profil simbolik ISEI, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelahiran organisasi tersebut didorong oleh semangat intelektual kaum terpelajar Indonesia setelah kolonialisme berakhir. Hal ini mengingatkan pada gejala umum di negara-negara berkembang bahwa berdirinya organisasi modern biasanya dimotori para cerdas-pandai berpendidikan modern. Setidaknya sejak awal abad ke-20 dalam sejarah Indonesia, sebagai contoh klasik, tampil para priayi dan kaum terpelajar pribumi yang tergugah ingin memajukan peradaban serta terdorong membebaskan negerinya dari impitan beban ekonomi dan kultural kolonial.

Semangat intelektual tersebut tecermin dalam program dan kegiatan organisasi yang berbasis pemikiran seperti konferensi, seminar dan penerbitan majalah ilmiah. Namun, berhubung situasi sosial-politik pada masa awal perkembangan ISEI belum memungkinkan, kegiatan itu tidak terlaksana. Meski demikian, sebagai pendiri organisasi, Sumitro



Logo ISEI Pusat Terkini | Sumber: Koleksi ISEI

meyakini bahwa ISEI dapat mencapai tujuannya secara konsisten dalam bidang keilmuan (ekonomi) dengan menyelenggarakan konferensi atau seminar dan menerbitkan publikasi ilmiah.<sup>2</sup>

### **Sumber Daya Utama**

Mengacu pada Anggaran Dasar ISEI, tujuan pokok organisasi ialah menghimpun sarjana ekonomi dalam suatu ikatan guna membaktikan diri kepada negara, nusa dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Para sarjana ekonomi tersebut, bahkan mahasiswa yang masih berkuliah, merupakan sumber daya utama anggota ISEI. Walau demikian keanggotaan ISEI pada dasarnya terbuka bagi individu

- 2 Selanjutnya, sejak masa Orde Baru, ISEI menggelar kongres setiap tiga tahun bersamaan dengan pemilihan ketua baru. Selain itu, dilaksanakan dua kali sidang pleno dalam setiap durasi (tiga tahun) kepengurusan. Dalam setiap kongres dan sidang pleno itu diadakan seminar ilmiah berskala nasional atau internasional membahas topik aktual perekonomian yang disampaikan oleh anggota ISEI dari berbagai daerah (lihat uraian dalam bab-bab selanjutnya).
- 3 *Forum Ekonomi*, 16–26, 1985.



Gedung ADHUC STAT, tempat pertama perkuliahan FEUI (sekarang gedung BAPPENAS | Sumber: Empat Dasawarsa FEUI (1990)

termasuk sarjana dari disiplin ilmu lain yang berminat serta berkomitmen terhadap pemajuan dan pengembangan ekonomi Indonesia.<sup>4</sup>

Pada awal pembentukan ISEI, jumlah sarjana ekonomi di Indonesia 46 orang, ditambah 80 mahasiswa yang sedang menyelesaikan kuliahnya.<sup>5</sup> Namun, tak semua sarjana tersebut tercatat sebagai anggota ISEI. Diperkirakan hanya 20 orang di antaranya merupakan anggota terdaftar. Hingga awal 1959 anggota ISEI berjumlah lebih dari 200 sarjana yang berasal dari disiplin ekonomi dan ilmu lain. Dicapai hanya

4 Hanya saja, menurut Sumitro, anggota khusus ISEI yang berasal dari profesi (keilmuan) lain tidak memiliki hak pilih dalam keanggotaan karena dinilai tidak memiliki dasar kepakaran di bidang ekonomi. Lihat "Bond van economen," *Het nieuwsblad voor Sumatra*, 18 Januari 1955.

5 *Het nieuwsblad voor Sumatra*, 18 Januari 1955.

berselang dua tahun sejak pembentukannya, perkembangan jumlah anggota tersebut dapat dikatakan cukup pesat.

Jelas kiranya, perkembangan keanggotaan ISEI berkorelasi dengan keberadaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi di suatu daerah. Di sini, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta dapat disebut sebagai “ekosistem” terdekat dengan keberadaan fisik ISEI ataupun spiritnya. Tanpa melebih-lebihkan, FEUI bisa dikatakan sebagai “sumber” utama asal pemimpin dan anggota ISEI sejak awal perkembangannya.

Sebelum FEUI dibuka, perguruan tinggi ilmu ekonomi terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu fakultas di lingkungan Universiteit van Indonesië yang didirikan setelah kedatangan tentara NICA pada 1946. Selanjutnya, UvI berubah menjadi Universitas Indonesia pada 1950, menyusul kemudian pembentukan Fakultas Ekonomi Djakarta pada tahun yang sama. Fakultas itulah yang bermetamorfosis menjadi FEUI. Mahasiswa angkatan pertama berasal dari berbagai sekolah menengah atas/ sederajat seperti Hogere Burgerschool, dan Algemene Middelbare School yang merupakan warisan kolonial serta Sekolah Menengah Tinggi. Selain itu terdapat sejumlah mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi di Jakarta dan Makassar. Jumlah mahasiswa angkatan pertama Fakultas Ekonomi Djakarta sekitar 300 orang; sebagian dari mahasiswa pindahan langsung duduk di tingkat lanjut bahkan ada di antaranya meneruskan ke tingkat doktoral.<sup>6</sup>

Langsung ataupun tidak langsung, posisi Sumitro sebagai dekan definitif pertama FEUI pada 1950 berdampak pada keanggotaan ISEI. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga akademis di kampusnya, Sumitro mengirim sejumlah dosen FEUI melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat, atas beasiswa dari Ford Foundation. Angkatan pertama terdiri dari Soemardi Reksopoetranto, Widjojo Nitisastro, Julius E. Ismael, Barli Halim, Teuku

6 Lihat misalnya Panitia Penerbitan Buku 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1990; Nurdin dan Iskandar 2000; Siregar 2007.



Lukisan Diri Sarbini Sumawinata, Ketua Umum ISEI 1957 - 1964 | Sumber: Koleksi ISEI

Umar Ali, Wahyu Sukotjo, dan Suhadi Mangkusuwondo berangkat pada 1956. Sementara itu, University of California mengirim Leon A. Mears, Hans Schmitt dan Leonard Doyle mengajar di FEUI.<sup>7</sup>

Pengiriman dosen ekonomi ke luar negeri tersebut terus berlanjut. Hasilnya, tenaga-tenaga pengajar itu berkembang menjadi ekonom akademis dan teknokrat andal, terutama pada era Orde Baru, semisal Widjojo Nitisastro (antara lain sebagai Menteri Negara/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Ali Wardhana (Menteri Keuangan), Mohammad Sadli (Menteri Pertambangan), Emil Salim (Menteri Negara Lingkungan Hidup), dan lain-lain. Sebagian dari mereka menjadi ketua atau anggota ISEI. Upaya Sumitro mengembangkan kualitas tenaga pengajar ataupun pendidikan ekonomi bahkan meluas

<sup>7</sup> Setelah gelombang pertama berjalan, makin banyak mahasiswa Indonesia dikirim belajar ke Amerika. Antara 1956–65 Ford Foundation menginvestasikan 5 juta dolar AS sebagai biaya program pelatihan bagi seratus ekonom Indonesia melanjutkan studi magister dan doktor di universitas terbaik di Amerika. Lihat Bresnan 2006: 71; lihat juga Salim 1997: 45 tentang relasi sosial antar-mahasiswa Indonesia di Amerika.

ke perguruan tinggi lain di luar FEUI. Sebagian dari mereka menjadi pemimpin atau anggota ISEI di daerahnya. Peran Sumitro dalam hal ini dipandang sebagai faktor yang menambah bobot keanggotaan ISEI.

Dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada dekade 1950 yang kurang stabil—antara lain munculnya gejolak daerah—memengaruhi situasi internal ISEI. Hanya memimpin sekitar dua tahun, Sumitro akhirnya undur dari kursi ISEI karena keterlibatannya dalam gerakan separatis Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Gerakan itu sendiri merupakan ekspresi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat. Meskipun keterlibatan Sumitro dalam gerakan itu merupakan urusan pribadi, dikhawatirkan berdampak terhadap organisasi.

Sejak awal 1957, Sumitro, telah meninggalkan Jakarta. Ia berada di Kota Padang—“pusat” PRRI—bersama sejumlah dosen muda yang terlibat dalam proyek bantuan FEUI kepada beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat khususnya Universitas Andalas. Dari Padang, Sumitro melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, Bengkalis dan menyamar menjadi kelasi kapal menuju Singapura. Tujuan Sumitro berikutnya ialah Saigon yang juga ia lakukan secara menyamar sebagai kelasi kapal. Selanjutnya ia menuju Manila untuk melakukan kontak dengan pihak Permesta.<sup>8</sup> Sejak kepergiannya ke Padang, Sumitro tidak kembali ke Jakarta hingga beberapa waktu setelah pemerintahan beralih ke tangan Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto.<sup>9</sup>

## **Bertahan dari Goyangan**

Sarbini Sumawinata, fungsionaris kecil, menggantikan Sumitro. Ia lahir pada 20 Agustus 1918 di Madiun, Jawa Timur, mengenyam

8 Aning 2007: 222.

9 Selama di luar negeri, Sumitro bertemu para pendukungnya antara lain Midian Sirait, Soni Harsono, Mustafa Pamuncak dan Wibisono Kasman. Kunjungannya ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat serta Jepang bertujuan memperluas jaringan dan menjalin hubungan dengan kalangan intelijen negara lain untuk membangun kekuatan perjuangan melawan komunis di Indonesia. Lihat Esmara 2000: 243–44; lihat juga Nurdin dan Iskandar 2000: 57.

pendidikan di Technische Hogeschool di Bandung. Pada 1952 ia melanjutkan pendidikan di Centraal Plan Bureau, Negeri Belanda, dan Harvard University di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat pada 1954 untuk belajar ekonomi.<sup>10</sup> Pada saat ISEI didirikan, Sarbini menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) hingga diberhentikan oleh Wakil Perdana Menteri Soebandrio pada 1965—kemungkinan karena tekanan politik kelompok kiri. Sebelum itu, sejak 1959, Sarbini diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa di FEUI.

Periode kepemimpinan Sarbini merupakan masa sulit bagi ISEI ataupun ekonom pada umumnya. Pemerintahan Presiden Sukarno memobilisasi kekuatan sosial-politik, termasuk sarjana ekonomi, demi kekuasaan politiknya. Ekonom akademis anggota ISEI berhadapan dengan ekonom pro-pemerintah. Berkelindan dengan situasi memanas politik internasional, perang dingin negara-negara Barat versus Timur, Presiden Sukarno menegaskan bahwa tugas revolusioner “kita” ialah menghancurkan sisa-sisa imperialisme dan feodalisme ekonomi serta memobilisasi sumber daya alam untuk membangun ekonomi sosialisme Indonesia. Tugas suci “pemuda demokratis internasional” selanjutnya, menurut Sukarno, ialah mengalahkan imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme serta membela perdamaian.<sup>11</sup>

Dengan pandangan itu, tidak mengejutkan apabila Presiden Sukarno hanya sedikit berkepentingan terhadap kelompok ekonom akademis atau anggota ISEI. Presiden lebih meyakini gagasannya sendiri tentang Ekonomi Terpimpin yang dipandang akan mengangkat rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Akan tetapi, gagasan itu ditentang oleh banyak ekonom akademis atau pihak lain yang berseberangan terhadap konsep Ekonomi Terpimpin. Selain ekonom senior seperti Hatta dan Sumitro, antitesis terhadap gagasan Ekonomi Terpimpin ala Sukarno dilancarkan oleh akademisi yang kembali dari tugas belajar di Amerika Serikat pada 1960-an terutama yang berafiliasi dengan FEUI dan aktif dalam ISEI.

<sup>10</sup> Anwar 2004: 186.

<sup>11</sup> Partai Komunis Indonesia 1963: 185.



Lukisan Diri Sarbini Sumawinata, Ketua Umum ISEI 1957 - 1964 | Sumber: Koleksi ISEI

Kritik terhadap sistem Ekonomi Terpimpin datang antara lain dari Mohammad Sadli. Melalui artikelnnya, Sadli menyatakan perlunya menegasikan unsur politik dalam penentuan kebijakan pembangunan.<sup>12</sup> Tak ketinggalan Sarbini menulis mengenai pentingnya faktor kebebasan sebagai kerangka dasar pembangunan ekonomi. "Kebebasan . . . tidak saja berupa kebebasan untuk menyatakan kritik, khususnya tentang keadaan perekonomian, tetapi yang lebih penting adalah . . . kebebasan dalam berbagai kegiatan ekonomi," tulisnya.<sup>13</sup>

Sewaktu Sarbini memimpin, ISEI tidak mengadakan seminar atau konferensi karena kelangkaan biaya. Pihak swasta yang biasa mensponsori kegiatan khawatir akan memicu kemarahan pihak penguasa dan berimbas pada kegiatan bisnis mereka. Akhirnya, ISEI hanya menggelar pekan olahraga. Walau demikian, anggota ISEI

12 *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, No. 3, Maret 1960.

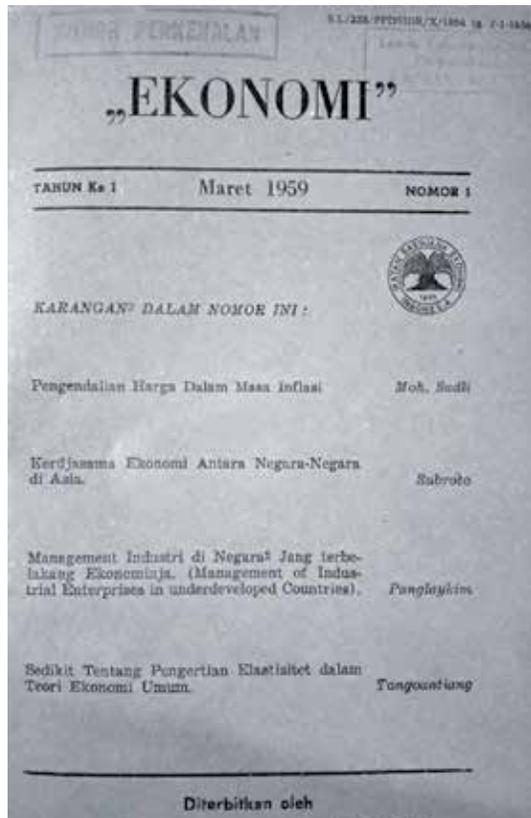
13 Pemikiran Sarbini saat itu boleh dikata sangat maju mengingat kesadaran sosial mengenai hubungan antara kebebasan atau demokrasi dengan kemajuan ekonomi baru berkembang pada dekade 1990-an. Lihat Abdullah, Abdurrachman, Gunawan (ed.) 2012: 198.

ataupun akademisi kampus tetap melancarkan gagasannya melalui berbagai cara, antara lain penerbitan jurnal atau majalah. Di sini patut disebut upaya ISEI menerbitkan *Ekonomi*, jurnal ilmiah berkala tiga bulanan sejak 1959.

Penerbitan *Ekonomi* merupakan pencapaian penting ISEI selama kepemimpinan Sarbini dalam upaya mengembangkan dan menjaga kebebasan berpikir dan berpendapat. Publikasi itu juga bisa dilihat sebagai pemenuhan keinginan Sumitro yang belum terwujud ketika ia mengawali kepemimpinan ISEI. Dikelola oleh dewan redaksi yang terdiri dari Pang Lay Kim (ketua), Subroto dan Tangoantiang, sasaran pembaca *Ekonomi* adalah orang-orang partikelir atau pekerja swasta dan kantor pemerintah serta mahasiswa, selain anggota ISEI. Penerbitan jurnal itu tampak mencerminkan suasana masanya: berbentuk sederhana, berukuran standar, dicetak di atas kertas koran halus dengan mesin cetak semimanual *handpress*, dan tanpa kantor tetap.<sup>14</sup>

Namun, kesederhanaan wujud *Ekonomi* tak mengurangi kemantapan bobot isinya. Dalam edisi perdana (Maret 1959), dimuat susunan pengurus ISEI sehingga dapat diketahui publik meski terbatas. Susunan pengurusnya ialah Mohammad Hatta (Ketua Kehormatan), Sarbini Sumawinata (Ketua, Kepala Biro Pusat Statistik, dosen FEUI), Koo Liong Bing (Wakil Ketua, Direktur Central Trading Co.), Mohammad Sisman (Sekretaris I, pegawai tinggi Kementerian Keuangan, dosen FEUI), Nugroho (Sekretaris II, Direktur Akademi Statistik, dosen FEUI), Njoo Tjiang Bik (Bendahara, dosen muda FEUI), serta tiga komisaris yakni Tjoa Soe Tjong (Bagian Umum, Direktur NV Kian Gwan), Bambang Sentanu (Urusan Ceramah, pegawai tinggi Kementerian Keuangan), dan Pang Lay Kim (Penerbitan, dosen muda FEUI).

14 Alamat redaksi terbagi dua yakni di Jalan Gunung Sahari (alamat Badan Penerbit PT Pembangunan; kemungkinan tempat jurnal dicetak), dan di Jalan Lamandau, Kebayoran Baru, kantor redaksi (rumah Pang Lay Kim). Harga langganan *Ekonomi* dibayarkan di muka sebesar Rp35,00/tahun untuk umum dan Rp50,00/tahun bagi anggota ISEI dan mahasiswa. Tidak diketahui lebih lanjut perkembangan jurnal tersebut; koleksi yang ditemukan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, ialah Tahun I, Nomor 1, 2/3, dan 4 (1959); dan Tahun III Nomor 3 (1961).



Halaman depan Majalah Ekonomi tahun 1959 | Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Susunan kepengurusan ISEI tersebut memperlihatkan komposisi personel organisasi dengan kompetensi bervariasi. Sebagai sebuah organisasi profesi, kepengurusan ISEI sejak awal merupakan kombinasi antara pelaku ekonomi atau pebisnis, akademisi dan pejabat pemerintahan yang memungkinkannya memberikan wacana pemikiran dan menjalankan kebijakan di tingkat pemerintahan dalam ruang lingkup terbatas.

Fungsi terpenting *Ekonomi* ialah merekam dan menyebarluaskan beragam gagasan dan pemikiran penulis ataupun organisasi kepada khalayak. Dalam kata pengantar edisi perdana jurnal itu, Mohammad Hatta, sebagai Ketua Kehormatan ISEI, menyatakan bahwa *Ekonomi* merupakan wadah untuk mengeluarkan pendapat mengenai berbagai masalah ekonomi sekaligus bentuk tanggung jawab sarjana dan warga negara. Sarjana ekonomi diharapkan berkontribusi membangun Tanah Air khususnya dalam pembangunan ekonomi. Majalah *Ekonomi* juga terbuka bagi siapa pun yang peduli terhadap masalah ekonomi di Indonesia dan dengan rasa tanggung jawab mereka menuliskan pandangannya untuk membantu mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi.

Tidak lupa, dalam tulisan pengantar tersebut, Hatta mengingatkan bahwa ilmu ekonomi hendaknya tidak “mengisolasi” diri sebagai ilmu ekonomi semata melainkan harus bisa bekerja bersama ilmu lain yang relevan untuk memahami realitas. Disebutkan, dalam alam pikiran ilmiah, ilmu ekonomi dapat dipisah dari ilmu lain berdasarkan obyek pengetahuannya yang tersendiri. Namun, tidak demikian dalam “alam yang lahir” atau kenyataan sosial. Dalam masyarakat, lanjut Hatta, yang disebut ekonomi tidak pernah terpisah dari masalah-masalah yuridis, fisik, psikis, etik, teknik, dan sebagainya. Maka, simpulnya, pembicaraan tentang pelaksanaan berbagai “muslihat ekonomi” niscaya bertalian dengan bidang ilmu lain di luar ilmu ekonomi.

Pandangan Hatta tersebut boleh dikata masih jarang dibicarakan pada masa itu. Cabang-cabang ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi, tampak berjalan sendiri-sendiri pada dasar epistemologisnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika wawasan Hatta dikatakan progresif. Ia mengisyaratkan bahwa batas-batas antarilmu secara ketat sesungguhnya tidak relevan lagi di tengah makin berkembangnya ilmu-pengetahuan dan makin rumitnya permasalahan sosial. Dalam bahasa kekinian, Hatta telah mengingatkan pentingnya ancangan (*approach*) multi-disipliner dalam memahami masalah sosial-ekonomi atau pembangunan pada umumnya.

Sementara itu, menurut Sarbini dalam kata pengantar penerbitan yang sama, *Ekonomi* merupakan media penghubung untuk memperdalam pengetahuan ekonomi dan mempererat kerja sama antara pengurus, anggota dan yang berada di luar organisasi. Sarjana ekonomi, tulis Sarbini, sudah seharusnya mengetahui seluas-luasnya persoalan ekonomi Indonesia untuk memperkaya pengetahuannya. Apalagi, dalam situasi masa transisi, bangsa Indonesia menghadapi perubahan dalam hampir semua bidang kehidupan baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi.

Dalam ekonomi, terjadi proses perubahan dari perekonomian kolonial ke perekonomian nasional; atau perubahan dari perekonomian ekspor ke perekonomian yang bebas dari goncangan konjunktur dunia; perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Menurut Sarbini, perubahan merupakan keniscayaan. Soalnya ialah bagaimana perubahan tersebut dicapai; bukan sekadar mengganti “pekerjaan tangan” dengan peralatan mekanik atau pabrik besar, tapi perubahan yang mampu mengubah pandangan hidup. Ditegaskan, masyarakat industri bukanlah sekadar masyarakat yang penuh dengan pabrik dan peralatan modern, melainkan masyarakat berkebudayaan baru. Dicontohkan, soal *saving* ‘tabungan’ dan *investment* ‘investasi’, sejauh itu belum menjadi budaya kuat di kalangan umumnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Padahal, kedua faktor itu inheren dan menjadi syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi.

Berkaitan dengan aspek budaya tersebut, Sarbini memberi catatan kritis tentang unsur “kepribadian” dalam upaya mencapai masyarakat adil-makmur. Jika kepribadian dimaknai semata-mata sebagai nilai-nilai warisan leluhur, tulisnya, “saya yakin bahwa kita tidak akan pernah mencapai masyarakat yang makmur.” Jalan mencapai masyarakat yang makmur, tidak bisa lain, adalah meningkatkan produksi secara terus-menerus. Artinya, simpul Sarbini, “kita harus melepaskan pula sebagian besar dari kepribadian kita.”

Selain kata pengantar dari ekonom senior, secara substantif *Ekonomi* menyajikan gagasan para penulis khususnya anggota ISEI. Beberapa



Perekonomian yang tumbuh di masyarakat Indonesia (sekitar tahun 1967) |  
Sumber: KITLV

penulis jurnal itu merupakan tokoh ISEI atau figur ekonom ternama di kemudian hari seperti Subroto, Mohammad Sadli, Widjojo Nitisastro, Panglaykim [sebelumnya Pang Lay Kim], dan lain-lain. Dalam setiap edisi, *Ekonomi* memuat tulisan tentang pelbagai masalah ekonomi Indonesia dan menawarkan pemecahannya secara akademis. Di tengah langkanya penerbitan intelektual kala itu, dan juga sulitnya mengadakan konferensi atau seminar, *Ekonomi* telah tampil sebagai suar gagasan yang mencerahkan dari dan bagi ekonom ataupun khalayak pembaca umumnya.

Artikel Mohammad Sadli, “Pengendalian Harga dalam Masa Inflasi” (*Ekonomi*, I [1], Maret 1959), bisa diambil sebagai contoh tulisan yang sangat relevan dengan situasi masanya. Seturut judulnya, artikel itu menjelaskan tentang inflasi yang melanda Indonesia pada paruh

terakhir kurun 1950-an. Menurut Sadli, inflasi terjadi karena adanya kelebihan permintaan efektif terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga umum. Jika kelebihan permintaan tersebut dibiarkan maka mekanika harga akan mencari keseimbangan antara penawaran dan permintaan baru pada tingkat harga yang lebih tinggi. Masalahnya terletak pada penyebab inflasi yang terus bekerja terutama pada defisit anggaran belanja.

Artikel Sadli berkorelasi dengan situasi perekonomian Indonesia pada akhir dekade 1950-an saat defisit anggaran pemerintah melambung tinggi. Anggaran belanja pemerintah pada 1958 berjumlah 25.425 juta rupiah sementara penerimaan negara diperkirakan hanya 23.028 juta rupiah. Banyak dana untuk membiayai operasi militer guna mengatasi pergolakan daerah sehingga defisit anggaran belanja saat itu diperkirakan 9.500 juta rupiah. Pemerintah telah mengajukan anggaran tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatasinya. Selain itu, angka inflasi dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah uang yang beredar. Pada 1957, jumlah peredarannya mencapai 5.519,9 juta rupiah kemudian bertambah menjadi 18.913,4 juta rupiah pada akhir tahun.<sup>15</sup>

Masih dalam situasi keterbatasan diskusi publik, ISEI berupaya menyumbang gagasan dalam perumusan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar pembangunan ekonomi prakarsa pemerintah. Namun, upaya itu praktis gagal sebab, seperti diperkirakan, proses perumusan Dekon kental diwarnai motif politik. Hal itu pula mengakibatkan muatan politik makin mengemuka di tubuh Dewan Perancang Nasional dalam merumuskan Rencana Pembangunan Semesta Nasional Pertama (1960–69).

Situasi itu mendorong unsur politik kiri kian merasuki perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi makro makin tidak kondusif terutama setelah Presiden Sukarno dengan lantang menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Moneter Internasional. Bersamaan itu, pemerintah melancarkan politik

15 Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1959: 176–77.



Mulyatno Sindhudarmoko, Ketua Umum ISEI 1964 - 1966 | Sumber: Koleksi ISEI

konfrontasi terhadap Malaysia yang, dituduh Sukarno, merupakan “proyek neokolonialisme” Barat (Inggris) yang harus diganyang. Politik konfrontasi itu menelan biaya besar sehingga menyebabkan defisit anggaran. Dampaknya, terjadi hiperinflasi yang diikuti melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Anggota ISEI yang berafiliasi dengan FEUI merasakan bahwa tekanan politik kelompok kiri juga terjadi di lingkungan kampus. Mereka menuntut pembubaran FEUI atas tuduhan bahwa kampus itu telah menjadi sarang kaum kontrarevolusi antek “nekolim”—akronim neokolonialisme. Situasi panas kian memuncak menjelang Kongres III ISEI di Jakarta ketika kelompok kiri—terutama anggota Himpunan Sarjana Indonesia, organ PKI—menekan ISEI untuk mengubah format kongres menjadi ‘Musyawarah Besar Sarjana dan Ahli Ekonomi’. Tujuannya agar unsur PKI, melalui ormas buruh dan tani *onderbouw*-nya, bisa menjadi peserta kongres sehingga dapat “menyusupkan” aspirasinya dalam penyusunan konsep atau strategi ekonomi nasional.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Siregar 2007: 35.

Kedudukan Sarbini baik sebagai Kepala BPS maupun Ketua ISEI tak luput dari upaya pendongkelan kelompok kiri. Sejak memimpin PKI pada awal dekade 1960, Aidit menilai institusi BPS sangat strategis untuk dikuasai dan karena itu harus berada di bawah kendali partainya. Melalui bermacam percobaan, PKI berupaya mengganti posisi Sarbini dengan Sakirman, insinyur kader PKI; tapi upaya itu gagal. Bahkan Sarbini, seolah “menantang” di depan lawannya, mengatakan bahwa saat itu tidak ada kader PKI di lingkungan BPS.

Namun tekanan lain datang dari menteri-menteri kelompok kiri agar Sarbini suka rela mengundurkan diri dari kursi kepala BPS. Barulah pada sekitar tiga pekan sebelum tragedi pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan PKI meletus, Sarbini menerima surat pemberhentian yang menyatakan bahwa ia dibebastugaskan dari jabatan Kepala BPS. Sementara, PKI sendiri tidak berhasil mengendalikan BPS karena untuk waktu yang lama tidak ada pejabat baru yang diangkat sebagai Kepala BPS. Wakil Kepala BPS semasa Sarbini ditunjuk sebagai penjabat badan itu.

Posisi Sarbini sebagai Ketua ISEI, sementara itu, digoyang untuk digantikan Carmel Budiardjo, anggota PKI alumnus FEUI. Sarbini berhasil mempertahankan posisinya berkat dukungan sekelompok ekonom dari Universitas Gadjah Mada dan alumni *Nederlandsche Economische Hogeschool*—almamater Sumitro di Negeri Belanda. Namun, Sarbini yang telah memimpin ISEI sekitar tujuh tahun (dan karena itu mungkin pula ia merasa “lelah”) menimbang Mulyatno Sindhudarmoko sebagai calon penggantinya. Mulyatno merupakan anggota HSI, namun di mata Sarbini, Kepala Biro Ekonomi di kantor Sekretariat Negara itu terlalu rasional untuk menjadi seorang komunis tulen.

Dalam Kongres III ISEI (1964) di Kampus FEUI Salemba, Mulyatno Sindhudarmoko akhirnya terpilih sebagai ketua menggantikan Sarbini. Perkiraan Sarbini benar, Mulyatno yang ditengarai sebagai bagian dari golongan kiri lantaran keanggotaannya dalam HIS ternyata tidak menunjukkan gelagat membawa ISEI ke dalam kontrol kaum komunis.

Nyatanya, selama kepemimpinannya Mulyatno kerap menolak mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan ekonom yang diprakarsai PKI, bahkan bila kegiatan itu didukung dan dihadiri oleh Presiden Sukarno.

## **Periode Krusial**

Politik “demokrasi terpimpin” di bawah komando Presiden Sukarno tak lepas dari suasana memanas setelah operasi militer terhadap separatisme PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. Dalam pada itu, kelompok kiri semakin unjuk gigi terhadap lawan-lawan politiknya. Selain itu, Presiden Sukarno tidak menyukai ISEI yang dianggapnya bersikap kritis terhadap kepemimpinannya. Dalam pandangannya, ISEI sangat dipengaruhi Partai Sosialis Indonesia terutama saat dipimpin Sarbini. Untuk menghindari persekusi lebih lanjut dari kelompok kiri itu, ISEI memutuskan memilih Mulyatno, seorang birokrat dan dianggap tidak berafiliasi kepada kelompok tertentu meskipun ia anggota HIS.<sup>17</sup>

Berjalan selama dua tahun (1964–66), masa kepemimpinan Mulyatno menjadi periode krusial ketika PKI dan kelompok kiri melakukan berbagai agitasi kepada lawan politiknya. Dalam isu ekonomi, kelompok tersebut mencela dan menyudutkan kapitalisme, liberalisme dan ekonomi pasar. Sumitro selaku pendiri ISEI dianggap sebagai penganjur pemikiran liberal kepada mahasiswa dan alumni FEUI ataupun kepada khalayak luas. Kelompok kiri mendesak agar ISEI dibubarkan dan Sumitro dikeluarkan dari organisasi itu. Meski begitu, ISEI mampu bertahan dari intervensi politik lawan ataupun pantauan dari pihak berwajib.

Ditengah persaingan ideologi, Mulyatno menengarai kelompok orang yang mencoba mendirikan organisasi tandingan yang akan berafiliasi dengan ideologi yang berseberangan dengan ISEI. Menghadapi situasi itu, ia lebih senang melihat anggota ISEI berkembang sebagai

---

<sup>17</sup> Dahlan dan Hakim 2005: 24.



Soekarno dalam Sebuah Pidato menyuarakan politik Konfrontasi dengan Malaysia dan Negara-negara Barat sekitar tahun 1963 | Sumber: Istimewa

individu daripada mewakili organisasi.<sup>18</sup> Ia sendiri sebelumnya lebih banyak bergiat di pemerintahan seiring dengan penggabungan Kantor Perencanaan Negara dengan Sekretariat Negara. Di kantor yang baru itu, Mulyatno menjabat Kepala Biro Ekonomi dan Keuangan. Ketika Djuanda Kartawidjaja diangkat menjadi Perdana Menteri pada 1957, Mulyatno ditunjuk menjadi asisten pribadi dan tetap mempertahankan posisinya di Sekretariat Negara.

Pada waktu itu, ISEI mengusulkan penghapusan pasar gelap, pengendalian inflasi dan peningkatan ekspor. Namun, usul

<sup>18</sup> Dahlan dan Hakim 2005: 15.

menghapuskan pasar gelap dan mengembalikan ekonomi pasar tidak menyenangkan penguasa saat itu.<sup>19</sup> Sebenarnya usul itu muncul berdasarkan asas Ekonomi Terpimpin yang menggantikan ekonomi pasar yang ditandai pengendalian harga dan pendistribusian barang-barang secara palsu. Sebagai contoh, bahan mentah tertentu untuk industri tekstil dijajah; hanya pemilik pabrik tekstil yang dapat mengakses ke barang-barang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah.<sup>20</sup> Menurut Ketua ISEI, ide tersebut sebenarnya merupakan konsep baik karena para produsen akan diyakinkan dengan ketersediaan bahan mentah yang dapat diperoleh dengan dengan cepat dan tidak mahal. Di balik ide itu ada upaya menyingkirkan makelar sehingga bisa memangkas biaya distribusi.

Hal lain yang menjadi perhatian ISEI selama masa Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin ialah Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) yang bertugas membeli mata uang asing yang diperoleh para eksportir karena mereka harus menjualnya kepada LAAPLN. Selanjutnya, lembaga itu menjual kembali kepada importir di bawah tarif yang telah ditetapkan. Meski begitu, eksportir tidak menjual seluruh hasil mata uang asing yang mereka peroleh kepada LAAPLN. Dengan demikian, penghasilan dari hasil ekspor berada di LAAPLN, pasar gelap domestik dan bank-bank luar negeri. Menurut Ketua ISEI, LAAPLN harus menghapus pengaturan nilai tukar. ISEI menganjurkan para eksportir dan importir untuk menentukan harga yang menurut mereka adil dan wajar.

Kendati dalam pusaran situasi kontestasi politik yang cukup keras, ISEI di bawah kepemimpinan Mulyatno berhasil menggelar Seminar tentang Berdikari.<sup>21</sup> Penyelenggaraan seminar, seturut proposal panitia, dilatarbelakangi dorongan rasa tanggung jawab sarjana

---

19 Dahlan dan Hakim 2005: 18.

20 Dahlan dan Hakim 2005: 17.

21 Putusan penyelenggaraan Seminar ISEI tentang Berdikari diambil dalam rapat Pengurus Besar ISEI pada 7 dan 15 Juli 1965. Lihat arsip Tata Tertib tentang Seminar Berdikari Ekonomi ISEI, ANRI/Meneg Ekuin RA 23a No. 2346 (Koleksi ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]).

ekonomi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam ISEI, untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran guna menanggulangi persoalan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Seminar merupakan tindak lanjut atas amanat Presiden Sukarno mengenai “Panca Azimat Revolusi” terutama prinsip “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) dalam pembangunan nasional. Empat “azimat” lainnya ialah Pancasila, Manipol/Usdek, Nasakom, dan Trisakti. Bersama prinsip Berdikari, kelima “azimat” tersebut, ujar Presiden Sukarno dalam berbagai kesempatan berpidato, merupakan pedoman pelaksanaan revolusi dalam pembangunan di segala bidang.

Seminar dihelat selama sepekan (17–22 September 1965), dibuka oleh Presiden Sukarno di Istana Negara dan dihadiri pejabat tinggi negara. Rencana itu memberi kesan bahwa Seminar Berdikari merupakan peristiwa akbar yang pernah digelar organisasi profesi pada waktu itu. Kepesertaan seminar ialah sarjana ekonomi anggota ISEI dan sarjana ekonomi lain yang berminat menjadi anggota ISEI dengan hak dan kewajiban sama. Ketentuan peserta yang inklusif itu mengisyaratkan bahwa ISEI membuka diri bagi publik, khususnya sarjana ekonomi, untuk bergabung dalam organisasi itu. Bahwa seminar tersebut merupakan *event* besar yang sangat penting juga ditunjukkan oleh pidato radio Nahar Zahiruddin, Ketua ISEI Cabang Jakarta Raya, yang menjelaskan detail rancangan seminar melalui siaran Radio Republik Indonesia Stasiun Jakarta dua hari sebelum acara.<sup>22</sup>

Sesuai dengan rencana, pembukaan Seminar tentang Berdikari dilangsungkan di Istana Negara. Presiden Sukarno menyampaikan pidato dan arahan sekaligus membuka resmi seminar. Selanjutnya, sidang-sidang paripurna seminar dilaksanakan di aula Kantor Bappenas [sekarang]. Setelah mengikuti amanat dan arahan Presiden, seluruh peserta seminar, melalui siaran pers, menyatakan mendukung tanpa *reserve* seluruh isi dan jiwa “amanat-gemblengan” Presiden dan menjadikannya sebagai pedoman pokok pembahasan seminar dan

---

22 Arsip Press Release ISEI No. 8/1965, ANRI/Meneg Ekuin RA 23a No. 2346 (Koleksi ANRI).

mengerahkan segala kekuatan serta potensi untuk mengamalkan amanat-gemblengan tersebut beserta segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.<sup>23</sup>

Di antara pejabat tinggi pemerintah yang tampil sebagai pemrasaran adalah Menteri Perkebunan Frans Seda. Ia menganjurkan agar amanat Presiden Sukarno digunakan sebagai pedoman dalam seminar dan agar para sarjana ekonomi menjadi insan politik karena eratnya hubungan antara ekonomi dan politik. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun, Presiden Sukarno telah mengubah arah rencana itu karena tidak sesuai dengan tujuan pembangunan model sosialisme Indonesia. Menurutnya, perencanaan pembangunan bukan hanya menyangkut soal-soal mikroekonomi, melainkan harus diarahkan pada tercapainya masyarakat baru. Dengan demikian perencanaan harus memiliki kaitan antara satu sektor dengan lainnya. Ia mencontohkan pembangunan industri yang harus dilihat dalam kerangka memperluas dan mendorong pertanian.<sup>24</sup>

Pembicara lain, Menteri Koordinator Urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharto, berharap seminar akan membantu sarjana ekonomi anggota ISEI menjadi golongan yang yakin akan kebenaran berdikari dan mendasarkan aktivitas kesehariannya atas keyakinan itu. Prinsip Berdikari mendesak agar Indonesia secepat mungkin dapat mengatasi kekurangan dan kelemahannya; misalnya dalam teknik dan keterampilan dalam suatu proses produksi. Menurutnya jika bangsa Indonesia kurang memiliki keterampilan atau keahlian maka biaya produksi dan distribusi akan lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju yang telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efisien. Prinsip berdikari, lanjutnya, hanya dapat dilaksanakan dengan usaha, perhitungan dan perencanaan yang jauh lebih saksama daripada perencanaan tanpa asas berdikari. Prinsip ini menuntut tampilnya pimpinan ekonomi yang tegas dengan

23 Arsip Press Release ISEI No. 11/1965, ANRI/Meneg Ekuin RA 23a No. 2346 (Koleksi ANRI).

24 Arsip Press Release ISEI No. 10/1965, ANRI/Meneg Ekuin RA 23a No. 2346 (Koleksi ANRI).

mengoptimalkan sumber daya manusia, peralatan dan beban yang tersedia.

Penyelenggaraan Seminar Berdikari bisa menimbulkan spekulasi bahwa ISEI, sadar atau tidak, menjadi bagian dari penggalangan politik kelompok kiri—apalagi seminar berlangsung hanya sekitar satu minggu sebelum peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan PKI. Namun, faktanya, hingga peristiwa itu berakhir tragis, tampaknya tidak menimbulkan efek berarti bagi ISEI. Bahkan tak lama setelah percobaan makar itu gagal, ISEI ikut pawai dalam rapat umum dalam rangka Musyawarah Kerja Nasional Sekretariat Bersama Golongan Karya di Istana Olahraga Bung Karno, Senayan (9 Oktober 1965). Pawai besar yang diikuti berbagai organisasi sarjana itu juga disaksikan langsung Presiden Sukarno di depan Istana Negara.

Dalam memoar kenangannya jauh di kemudian hari, Mulyatno menegaskan bahwa ia seperti pendahulunya, Sarbini, tetap menjaga independensi ISEI dari upaya tarikan politik pihak mana pun. “Misi saya ialah memastikan ISEI tetap bertahan dari gangguan penguasa,” ujarnya.<sup>25</sup> Mulyatno resmi mengakhiri kepemimpinannya dalam ISEI berbarengan dengan lahirnya tatanan politik baru di Tanah Air pada 1966.

---

25 Dahlan dan Hakim 2005: 15.



# Transisi

## Menyusun Kembali Sendi Ekonomi

**I**ndonesia pada 1966 memasuki suasana peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru—begitu biasa disebut. Peralihan itu tercatat sebagai masa transisi yang sangat keras dalam sejarah Indonesia akibat pemberontakan kaum komunis, Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S/PKI, yang berniat merebut kekuasaan sah.

Upaya makar yang memakan ribuan korban jiwa itu digagalkan oleh militer Indonesia. Di balik gejolak politik itu, pemerintahan Orde Lama—yang jatuh setelah tragedi—mewariskan kondisi perekonomian yang terpuruk. Buruknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh salah kelola sangat parah yang membuat kehancuran ekonomi yang jarang terjadi di negara mana pun dalam sejarah dunia modern.<sup>1</sup> Selain penurunan ekspor, cadangan devisa Indonesia merosot tajam hingga mencapai titik nol pada 1965. Sebaliknya, angka inflasi melejit hingga 650% pada 1966. Lebih dari 50% penduduk perdesaan di Jawa kala itu berada di bawah garis subsisten alias sangat miskin. Seorang demograf, Nathan Keyfitz, melukiskan kondisi penduduk Jawa waktu itu dalam keadaan “sesak napas karena kekurangan lahan [pertanian].”<sup>2</sup>

Jelang transisi, pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno disibukkan berbagai masalah politik—antara lain pembebasan Irian Barat yang masih dikuasai Belanda dan konfrontasi

1 Pernyataan Heinz Arndt, Indonesianis asal Australia; dikutip Grant 1996: 110.

2 Dikutip Booth dalam Emerson (ed.) 2001: 188.



Pembangunan Tugu Monumen Nasional menjadi proyek ‘mercusuar’ |  
Sumber: KITLV

terhadap “proyek nekolim” Malaysia—yang menelantarkan pembangunan ekonomi. Agenda, rancangan dan pelaksanaan pembangunan masih dilakukan secara sporadis bahkan tanpa panduan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>3</sup> Biaya pembangunan masih mengandalkan harta pampasan dari Jepang yang, ironisnya, dipakai Sukarno untuk membangun proyek “mercusuar” di tengah kesulitan hidup rakyat. Guna mendanai proyek, pemerintah mencetak uang Rupiah yang juga digunakan membayar utang. Akibatnya, seperti telah disebutkan, inflasi melambung hingga ratusan persen, diikuti kebijakan pemotongan nilai Rupiah.<sup>4</sup>

3 Wuryandari, dkk. 2015: 148.

4 Wardhono, dkk. 2019: 18.

Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama juga terisolasi dari dunia luar lantaran kebijakan pintu tertutup pemerintah yang berakibat terhambatnya kemajuan pembangunan nasional. Asas kemandirian dalam pembangunan nasional pada masa Orde Lama dimaknai sebagai pembangunan tanpa peran-serta pihak asing termasuk pinjaman dan bantuan luar negeri. Tampaknya tidak ada “minat” pada pemerintahan Sukarno untuk memperoleh pinjaman atau bantuan keuangan bagi pembangunan dari Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia.

Hingga awal 1966, pemerintahan yang masih di tangan Sukarno terkesan tidak bersungguh-sungguh mengatasi masalah ekonomi dan politik yang kian gawat setelah pemberontakan G-30-S/PKI. Hal itu menyulut gerakan massa dari berbagai elemen masyarakat dan kesatuan aksi yang dipelopori mahasiswa dari berbagai kampus dan kota.<sup>5</sup> Secara spontan dan terencana, demonstrasi massa yang bermunculan sejak awal Oktober 1965, sebagai respons masyarakat terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas atas pemberontakan tersebut. Dalam demonstrasi akbar pada Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), salah satu kesatuan aksi menonjol waktu itu,<sup>6</sup> mencetuskan “tritura” atau tiga tuntutan rakyat yakni, pertama, pembubaran terhadap PKI dan ormas-ormasnya; kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur komunis; dan ketiga, penurunan harga kebutuhan pokok.<sup>7</sup>

Pemerintahan Orde Lama akhirnya jatuh, diawali dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan

---

5 Tentang situasi politik pada masa awal Orde Baru, lihat misalnya Lembaga Publikasi Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan Indonesia 1978; Wanandi 2014.

6 Kesatuan Aksi Mahasiswa dibentuk pada 25 Oktober 1965 atas “sponsor” seorang jenderal Angkatan Darat yang memantik terjalannya aliansi pelbagai front aksi yang melibatkan hampir seluruh golongan masyarakat seperti pelajar sekolah menengah, guru, alumni, buruh dan lain-lain. Lihat Mas’oed 1989: 55; Wanandi 2014.

7 Lihat Diposastro 1977; Samsudin 2004; Wanandi 2014.

Ketertiban untuk memulihkan keamanan. Soeharto menggunakan surat “sakti” tersebut untuk membubarkan PKI. Selanjutnya, melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS; 21 Juni – 5 Juli 1966), jabatan Sukarno sebagai presiden seumur hidup dicabut; kewenangan eksekutif Soeharto dikukuhkan; sedangkan PKI dan seluruh ajaran komunisme/marxisme resmi dibubarkan dan dilarang.

## **Menyongsong Transisi**

Dalam suasana masa transisi yang terasa “dramatis” tersebut, ISEI menggelar Kongres IV di Bandung (Maret 1966), mengangkat tema ‘Pelaksanaan Ketetapan MPRS tentang Pembaharuan Landasan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan’.<sup>8</sup> Kongres dihadiri utusan cabang dari berbagai daerah di Indonesia dan wakil fakultas-fakultas ekonomi dari pelbagai perguruan tinggi. Selain memilih ketua umum baru, kongres membahas permasalahan ekonomi, organisasi dan pendidikan umum perekonomian sebagai upaya menggugah *economic development mindedness* di kalangan masyarakat.

Dalam kongres tersebut terpilih ketua umum ISEI yang baru, Mohammad Sadli, menggantikan Mulyatno Sindhudarmoko yang telah selesai masa kepengurusannya. Sadli—lahir di Sumedang, Jawa Barat (1922)—adalah insinyur lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (1952). Sempat mengajar di alma-maternya, tapi kemudian “ditarik” Sumitro Djojohadikusumo menjadi asistennya di FEUI pada 1953. Ia lalu melanjutkan studi ke Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat (Master of Science, 1956); dan belajar ilmu ekonomi di University of California, Berkeley (1957). Terakhir, Sadli meraih gelar Doktor di FEUI pada 1963; disusul pengukuhannya sebagai guru besar di kampus yang sama.

Terpilihnya Sadli sebagai ketua umum ISEI bersamaan tempo dengan transisi pimpinan nasional dari Presiden Sukarno kepada

---

8 *Warta Perdagangan*, Vol. 19, 1965.



Bentuk protes masyarakat terhadap inflasi dan krisis ekonomi tahun 1966 | Sumber: KITLV

Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera/ Menteri Utama Hankam.<sup>9</sup> Pada saat dipilih menjadi ketua ISEI, Sadli berstatus resmi sebagai pengajar FEUI. Ia mulai merambah ranah birokrasi ketika diangkat sebagai penasihat ekonomi presiden di bawah koordinasi ekonom senior Widjojo Nitisastro. Selanjutnya, pada 1967 Sadli mengepalai sebuah tim teknis yang menjadi cikal bakal Badan Koordinasi Penanaman Modal.<sup>10</sup> Badan ini bertugas mempromosikan peluang investasi di Indonesia sekaligus melakukan koordinasi dengan investor.<sup>11</sup> Berikutnya, Sadli berturut-turut menjadi anggota kabinet sebagai Menteri Tenaga Kerja (1973) dan Menteri Pertambangan

9 Terbentuknya kabinet tersebut berdasar Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1970: 353.

10 Manning, Soesastro, Ikhsan (ed.) 2002: 8.

11 Suharyanto, Sasmito, Kusmuljono 2004: 64.

(1978); lalu kembali mengajar di kampus. Pada 1983 ia duduk di kursi Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri. Selama dekade 1990-an Sadli dikenal luas sebagai pengamat ekonomi dan penulis di media massa nasional.

Di bawah kepemimpinan Sadli, sikap ISEI ialah mendukung pemerintah Orde Baru yang tengah gencar melaksanakan program prioritas pembangunan. Pada waktu itulah individu anggota ISEI ataupun secara kelembagaan banyak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Begitu erat hubungan antara ISEI dan birokrasi pemerintahan pada masa itu sehingga seorang ketua ISEI bisa “berkelindan” sebagai pejabat tinggi negara pada saat bersamaan, dan ada kalanya sulit dibedakan kapasitas pada kedua posisi gandanya itu. Ketua-ketua (umum) ISEI pada masa Orde Baru, terutama sejak 1971, biasanya berstatus menteri atau calon menteri, dan yang setara, dalam bidang ekonomi dan industri. Para ketua itu sebagian dipilih dari kelompok ekonom yang dikoordinasi oleh Widjojo Nitisastro yang dikenal sebagai arsitek utama kebijakan ekonomi Orde Baru.

Selama memimpin ISEI, Sadli aktif mendorong anggota untuk bersama-sama hadir dan berbicara dalam seminar, lokakarya dan semacamnya. Dalam berbagai forum itu para anggota dapat saling bertukar pikiran mengenai masalah-masalah ekonomi dan pembangunan selaras dengan atmosfer yang berkembang pada waktu itu. Hal itu bisa mempererat hubungan antaranggota yang, meski dari atau dalam “dunia” yang sama, tetap memperlihatkan heterogenitas. Kebanyakan anggota aktif terdiri dari akademisi dan pejabat pemerintahan, sementara jumlah anggota dari sektor swasta relatif sedikit.

Tidak bisa dimungkiri pula bahwa nuansa politis dan ideologis sisa-sisa orde terdahulu masih terasa samar “berembus” dalam organisasi pada suasana transisi. Terhadap hal itu, Sadli tetap berkomitmen menjadikan ISEI sebagai organisasi profesi yang mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah ataupun elemen lain dalam masyarakat.



Mohammad Sadli, Ketua Umum ISEI 1966 - 1972 | Sumber: KITLV

## **Amanat Pembangunan**

Pada pembukaan Kongres ISEI di Bandung, Ketua Presidium Kabinet Ampera Letnan Jenderal Soeharto menyampaikan sambutan tertulis. Ia mengemukakan pentingnya rencana ekonomi yang *workable*, memungkinkan dikerjakan. Kongres diharapkan menemukan hakikat dan mempertegas amanat Ketetapan MPRS Nomor XXIII/1966 mengenai pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Selain itu, Kongres diharapkan menyusun rencana praktis dalam pengendalian inflasi, peningkatan produksi pangan dan sandang, peningkatan ekspor, perpajakan yang tepat untuk kondisi saat itu serta pengaturan penanaman modal asing.<sup>12</sup>

Ketua Presidium juga menyinggung masalah *mismanagement* dalam pengurusan ekonomi yang memunculkan “kapitalis-kapitalis baru

<sup>12</sup> Anwar 2022: 30.

di antara para manajer yang berkuasa” yang, hakikatnya, hanya memperlebar ketidakmerataan dalam distribusi di kalangan masyarakat serta penyalahgunaan kekuasaan dan milik negara. Mengutip Ketetapan MPRS tersebut,<sup>13</sup> Soeharto mengungkapkan penyebab kemerosotan ekonomi yakni terjadinya penyelewengan atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; tiadanya pengawasan efektif dari lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi; pengabaian prinsip-prinsip ekonomi rasional; salah kelola; pemborosan birokrasi dan korupsi serta tidak stabilnya situasi politik di Tanah Air sebagai dampak dari peristiwa G-30-S/PKI.

Cara mengatasi permasalahan, Soeharto melanjutkan, ialah dengan menghentikan segala bentuk penyelewengan atas UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Di samping itu, mengefektifkan kembali fungsi lembaga perwakilan rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan terutama di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Prioritas utama harus diberikan kepada pengurusan ekonomi rakyat di atas kepentingan politik, tentunya dengan penerapan prinsip ekonomi harus rasional dan realistis; organisasi, administrasi dan birokrasi pemerintahan disempurnakan terutama yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Sekaligus, pemberantasan terhadap korupsi, pemborosan dan penyelewengan. Akhirnya perlu diciptakan suasana politik yang stabil dan memberi kesempatan kerja bagi upaya perbaikan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengharapkan kontribusi ISEI bisa lebih besar demi mengurangi tekanan hidup yang dialami masyarakat. Ironisnya pada saat bersamaan banyak pejabat, khususnya tingkat atas, melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Sri Sultan menyinggung soal angka inflasi yang sangat tinggi. Inflasi menjadi gejala yang harus diwaspadai karena berdampak luas pada semua aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, administratif maupun

---

13 Lihat kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.

politis, yang tidak cukup diatasi hanya dengan konsepsi dan saran melainkan harus diikuti dengan tindakan.

Pada bagian akhir sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX—juga merujuk ketetapan MPRS tersebut di atas—menekankan bahwa para sarjana ekonomi memiliki peran dalam upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis sesuai dengan kondisi saat itu.<sup>14</sup> Ia berharap para sarjana ekonomi dapat mengerahkan segala kemampuan berpikir dan daya kreasi untuk melaksanakan peran tersebut. Sarjana ekonomi, lanjut Sri Sultan, harus berani mengingatkan pemerintah, pemimpin, usahawan dan pelaku ekonomi yang menyeleweng dan tidak konsekuen dengan ketetapan Majelis.

Akhirnya, Sri Sultan berharap ISEI menjadi suatu forum perjuangan yang dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan pembangunan serta berharap Kongres menjadi titik awal perjuangan itu. Ia menyarankan agar selain membicarakan masalah internal organisasi, peserta kongres dapat menjadikan ISEI sebagai organisasi yang mampu beroperasi langsung dalam kehidupan nyata ekonomi Indonesia.

Selaku tuan rumah, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Mashudi, yang juga Wakil Ketua MPRS, memberi sambutan sekaligus membuka Kongres. Dalam pidatonya, ia berharap agar ekonomi tidak hanya merupakan “ilmu murni” melainkan juga sebagai “ilmu terapan” yang bermanfaat bagi masyarakat. Sudah sewajarnya, ilmu ekonomi dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat. Walau demikian, penting adanya jaminan demokrasi ekonomi yang tidak memberi tempat bagi *free fight liberalism* atau etatisme yang menjuruskan negara ke arah sistem komunisme dan monopoli. Demi mencapai sistem ekonomi yang berwatak sosialis itu perlu diciptakan pemenuhan timbal-balik yang saling menguntungkan antara sektor industri di kota dan pertanian di desa sehingga jurang pemisah antara keduanya bisa dipersempit. Motif

---

14 Majelis Permusyawaratan Rakyat 1972: 53.

“cari untung” harus ditinggalkan kecuali keuntungan secukupnya bagi keberlangsungan hidup produsen.

Pembicara penting lain yang tampil dalam Kongres ialah mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Sebagai ekonom kawakan, ia menyoroti soal urgensi keseimbangan upah dan keperluan hidup buruh yang, dalam penilaiannya, merupakan syarat utama memperbaiki perekonomian.<sup>15</sup> Dengan mencapai keseimbangan itu, pemerintah dapat membebaskan diri dari “penyakit” yang bisa menghancurkan perekonomian bangsa seperti korupsi, salah kelola, dan sebagainya. Untuk memberi penghasilan yang seimbang kepada buruh, lanjutnya, pemerintah perlu mencetak uang lebih banyak guna meningkatkan gaji mereka meski berpotensi memicu inflasi. Hatta mengingatkan situasi sosial yang rawan bergejolak pada waktu itu disebabkan oleh ketimpangan pendapatan antara segolongan kecil anggota masyarakat berpenghasilan melimpah, sementara sebagian besar warga yang lain hidup dalam kemiskinan.

Menurut Bung Hatta, perekonomian Indonesia kurun 1960-an tengah mengalami kemerosotan dalam berbagai sektor. Dalam situasi muram itu, rakyat mengharap bantuan dan panduan para sarjana ekonomi. Namun, umumnya sarjana ekonomi Indonesia waktu itu terkendala situasi politik yang membatasi kemampuan mereka melaksanakan langkah perbaikan dan pembangunan ekonomi. Tidak ada salahnya, menurut Hatta, sarjana ekonomi terjun ke dalam dunia politik—bukan dalam artian “politicking” yang sempit—agar dapat menerapkan konsep dan pengetahuannya demi memperbaiki keadaan. Sebaliknya, politisi juga perlu memahami masalah-masalah ekonomi sehingga menghindari kemungkinan kacau dalam membuat kebijakan.

Akhirnya, Hatta mengingatkan soal tindakan yang harus diambil dalam jangka pendek, antara lain pemeliharaan atas infrastruktur terutama jalan raya, jalur sungai, dan bendungan. Selama beberapa tahun waktu itu tidak pernah dilakukan pemeliharaan prasarana. Dalam keadaan rusak, berbagai infrastruktur tersebut justru menghambat

15 *Warta Perdagangan* 1966: 25.

aktivitas ekonomi. Sungai-sungai yang terus mendangkal dibarengi dengan pembabatan hutan yang tidak terkendali bisa mengakibatkan banjir yang merugikan perekonomian. Dalam amatan Hatta, salah satu faktor yang menghambat perbaikan ekonomi adalah perilaku kaum *vested-interest* yang mempersulit perubahan cara berpikir masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan ekonomi bangsa.

Sementara itu, dalam ceramah di depan peserta Kongres, Menteri Perdagangan Frans Seda mengupas panjang-lebar permasalahan ekonomi umum.<sup>16</sup> Menurutinya, ekonomi Indonesia dihinggapi sejumlah ciri atau gejala, yakni meningkatnya inflasi yang mengakibatkan tingkah laku ekonomis spekulatif yang, jika didasarkan pada perhitungan harga, akan terus meningkat. Selain itu, terjadi defisit *cash* dalam rumah tangga negara dan di kalangan perusahaan serta masyarakat yang menyebabkan pemerintah harus melaksanakan kebijakan uang ketat di tengah kuatnya arus inflasi. Situasi depresif dalam kegiatan ekonomi tersebut terjadi karena ketiadaan *economic expectations* yang cerah.

Kondisi diperparah oleh banyaknya penyelewengan di antara “oknum” penguasa dan aparatur pemerintah. Sedangkan kegiatan produktif masyarakat hanya dilakukan secukupnya untuk keperluan sesaat. Tidak ada minat masyarakat untuk memproduksi karena khawatir diambil alih pemerintah, pejabat atau penguasa. Ciri-ciri ekonomi tersebut, menurut Seda, mengakibatkan ketegangan dan kontradiksi yang meluas dalam banyak sektor ekonomi seperti harga, permodalan, perkreditan dan pendapatan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, kata Seda, perlu dilakukan koreksi terhadap beberapa jenis harga dan bidang kegiatan; koreksi dalam posisi dan perbandingan *real income* dalam berbagai kegiatan ekonomi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen perekonomian selain memberi sedikit kemantapan dalam *economic expectations* dari masyarakat. Metode untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah menjalankan *supply* dan *dropping* barang dalam jumlah yang esensial dan berkelanjutan. Selain itu patut

<sup>16</sup> *Warta Perdagangan* 1966: 29.

dilakukan koreksi terhadap harga dan pendapatan dengan terlebih dulu melakukan tinjauan terhadap barang-barang dan bidang kegiatan yang rentan inflasi. Pada saat bersamaan, koreksi dilakukan terhadap barang-barang dan bidang kegiatan yang terimbas *penalized* oleh inflasi. Sektor ekspor hasil bumi rakyat, misalnya, hampir dimatikan oleh inflasi dan *fixed exchanged-rate* selain hancurnya *opkoop system* dan infrastruktur.

Menurut Seda, stabilitas politik merupakan prasyarat bagi stabilitas ekonomi. Ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam realisasi Orde Baru yang berakibat langsung bagi stabilitas ekonomi ialah pendobrakan terhadap politik isolasi sepihak dalam hubungan internasional serta rehabilitasi hubungan internasional yang lebih sehat dan wajar namun tidak melupakan prinsip-prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Seda juga menekankan pentingnya mempertahankan poros persatuan rakyat, ABRI dan Presiden di dalam negeri tanpa PKI. Poros tersebut akan berhasil jika semua unsur pendukungnya secara konsekuen dapat membersihkan sisa-sisa G-30-S/PKI.

Untuk mengembalikan kegiatan ekonomi dan kepercayaan, Seda mengusulkan persoalan dekonsentrasi usaha yang berada di tangan negara harus ditinjau kembali dengan berpegang teguh pada ketentuan pertama Pasal 33 UUD 1945. Sentralisasi usaha pada waktu itu dianggap sebagai sumber inflasi dalam konteks perkreditan yang sangat besar pada perusahaan negara tanpa disertai kegiatan yang produktif dan meningkat. Selain itu harus dihilangkan sistem kontrol dan cara-cara kontrol yang berlebihan. Seda juga menyoroti kebijakan investasi, baik dalam maupun luar negeri, yang harus dirumuskan dengan tegas dan jelas.

## **Suar dari Kampus**

Tatkala jalanan di ibu kota sedang ramai gelombang demonstrasi massa pada awal 1966, sejumlah mahasiswa dan tokoh KAMI menggelar Pekan Ceramah dan Seminar Soal-soal Ekonomi dan Keuangan di Kampus UI Salemba (10–20 Januari). Beberapa bulan kemudian di

kampus yang sama diadakan Simposium Kebangkitan Semangat 66: Menjelajah Tracee Baru (6–9 Mei), berkolaborasi dengan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Tujuan kedua gelaran itu intinya sama yakni membahas keterpurukan ekonomi negeri dan bagaimana mencari sendi-sendi baru sebagai jalan keluarnya. Beberapa ekonom akademis kenamaan angkat bicara dalam acara-acara tersebut.

Dalam simposium, Widjojo Nitisastro, guru besar dan dekan FEUI, mengingatkan bahwa setelah pelimpahan kekuasaan eksekutif dari Sukarno kepada Soeharto, makin perlu disadari—terutama bagi pejabat pemerintah—bahwa ekonomi merupakan hal sangat penting dalam kehidupan bangsa.<sup>17</sup> Pernyataan itu sangat beralasan sebab sejak Indonesia merdeka hingga akhir Orde Lama terjadi semacam dikotomi tajam antara ekonomi dan politik yang condong mengunggulkan politik tapi mengabaikan sisi ekonomi sehingga upaya mengangkat kesejahteraan rakyat secara adil dan merata tak kunjung terwujud.

Widjojo memandang perlu introspeksi dan reorientasi kebijakan ekonomi negara. Pertama, sendi-sendi ekonomi negeri ini harus disusun kembali karena banyak yang rusak. Kedua, penyusunan sendi-sendi ekonomi yang baru harus diselenggarakan berdasar prinsip-prinsip ekonomi yang bermakna bahwa Indonesia harus bersikap rasional dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi yang tengah dihadapi. Sikap tersebut penting dan dibutuhkan untuk melihat suatu persoalan dan pemecahannya sekaligus merupakan inti dari prinsip atau asas ekonomi.

Pentingnya penggunaan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengatasi kemerosotan perekonomian Indonesia didasarkan pada dua hal pokok. Pertama, perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun terbengkalai karena dikalahkan oleh kepentingan lain—dalam hal ini politik. Kedua, prinsip-prinsip ekonomi dikesampingkan ketika terjadi berbagai masalah ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi terbengkalai karena diurus tidak secara rasional dan terlalu banyak didasarkan pada

---

17 Nitisastro dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 41.

semboyan dan slogan.<sup>18</sup> Widjojo menganalogikan kondisi ekonomi Indonesia waktu itu dengan gejala banjir. Menurutnya, apabila hutan ditebang tanpa batas, tanggul tidak terpelihara dan muara sungai dibiarkan mendangkal, maka logis banjir akan melanda.

Widjojo juga menganalogikan situasi perekonomian Indonesia dengan suatu negeri yang tengah mengalami musim kemarau panjang dan kering, sementara sistem irigasinya tidak bekerja karena tak dipelihara. Dengan kata lain, kegiatan yang bersifat produktif merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran rakyat. Walau demikian perlu upaya menghilangkan faktor penyebab yang melumpuhkan kegiatan produktif di Indonesia yakni menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia dan Singapura. Pasalnya, konfrontasi terhadap negara tetangga itu telah menguras energi bangsa dan diduga hanya memberikan keuntungan bagi para petugas negara dan penyelundup. Selain itu, negara harus mengembalikan kepastian hukum dengan menghapus berbagai macam peraturan yang tidak ditegakkan secara baik dan tidak melindungi sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sementara itu, dalam Pekan Ceramah Soal Ekonomi, Subroto, guru besar FEUI, menyatakan kondisi perekonomian Indonesia yang sangat parah harus segera diatasi. Ia mencontohkan keberhasilan atau kegagalan tindakan di bidang perdagangan internasional bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan stabilitas internal atau dalam negeri. Faktanya, rangkaian peraturan ekonomi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjelang akhir 1965 sama sekali tidak menunjukkan usaha untuk menstabilkan harga-harga dalam negeri dan tidak mampu menstimulus ekspor dan mengurangi impor.<sup>19</sup>

Dalam forum yang sama, Ali Wardhana, dosen senior FEUI, menyatakan bahwa politik keuangan pemerintah dalam Undang-Undang Anggaran Moneter 1966 sepiantas terlihat sesuai atau

18 Nitisastro dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 42.

19 Peraturan pemerintah yang dimaksud terutama Penetapan Presiden Nomor 27 dan 28 dan Undang-Undang Anggaran Moneter 1966. Lihat Subroto dalam Mustapadidjaja AR (ed.) 1966: 58.



Demonstrasi mahasiswa di Jakarta tahun 1966 merespons situasi ekonomi dan politik | Sumber: KITLV

seimbang. Namun hal itu sekadar *window dressing* karena langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang bermakna menstabilkan ekonomi dalam negeri justru mempersulit kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan upah buruh dan gaji pegawai negeri yang bertujuan mengangkat kesejahteraan menjadi tidak berarti; tidak hanya karena inflasi melainkan karena harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari naik mendahului dengan kelipatan yang lebih besar daripada kenaikan gaji dan upah.<sup>20</sup>

Menanggapi kritik para koleganya tersebut, Widjojo Nitisastro menyatakan bahwa tindakan ekonomi dan keuangan yang ditempuh pemerintah itu merupakan kebijakan yang tidak bijak. Berbagai tindakan tersebut hanya menambah kesulitan ekonomi yang sudah

20 Wardhana dalam Mustapadidjaja AR (ed.) 1966: 76–85.



Tokoh-tokoh ekonom dan ISEI (Emil Salim, Moh. Sadli, Ali Wardhana, Sarbini Sumawinata, dll.) | Sumber: Empat Dasawarsa FEUI

terjadi. Kendati mengkritik pemerintah, Widjojo menjamin suar-suar gagasan dari kampus merupakan bentuk kepedulian sivitas akademika terhadap nasib bangsa dan negara yang tengah menghadapi kesulitan besar.

## **Lawatan dan Diplomasi**

Tidak lama setelah pembentukan Kabinet Ampera (28 Juli 1966), Ketua Presidium Letnan Jenderal Soeharto menjelaskan program Dwidharma Catur Karya Kabinet dan strategi pembangunan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada 16 Agustus 1966.<sup>21</sup> Dalam sidang itu hadir perwakilan International

<sup>21</sup> Kelak pidato tahunan Presiden di depan parlemen sehari jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini menjadi konvensi atau tradisi baru dalam pemerintahan Orde Baru bahkan hingga kini.

Monetary Fund (IMF) dari Amerika Serikat atas undangan Menteri Keuangan. Kunjungan IMF bertujuan mendampingi tim ekonomi Indonesia mempersiapkan penanganan masalah ekonomi, pencarian dana investasi, dan menyusun kerangka pinjaman luar negeri. Juga untuk meyakinkan IMF bahwa Indonesia telah masuk dalam komunitas keuangan dunia.<sup>22</sup>

Selama di Jakarta, tim IMF bekerja bersama “skwad” ekonom Orde Baru terkemuka yakni Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto dan Emil Salim—dikenal sebagai teknokrat dan ekspone ISEI—yang bertugas merumuskan rincian rencana kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. Rencana itu diajukan kepada Dewan Stabilisasi Ekonomi yang dikomandani langsung Ketua Presidium Kabinet. Di antara rencana rehabilitasi dan pembangunan ekonomi yang disetujui oleh Dewan Stabilisasi Ekonomi ialah mengusahakan anggaran berimbang melalui peningkatan pajak dan pendapatan lain negara, mengadakan politik kredit yang ketat, menciptakan sistem ekonomi terbuka, mendorong ekspor dan menertibkan impor serta menguasai kredit dan menjadwalkan ulang utang lama luar negeri.<sup>23</sup>

Pada awal September 1966, Dewan Stabilisasi Ekonomi dipimpin Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Menteri Keuangan Frans Seda, Menteri Perdagangan Ashari dan Menteri Perindustrian M. Jusuf serta anggota DPRGR melakukan lawatan ekonomi ke beberapa negara yang dipandang dapat membantu membiayai pembangunan di Indonesia, dan melakukan perundingan penjadwalan pembayaran utang dengan negara kreditor. Tujuan pertama lawatan Sri Sultan dan rombongan ialah Inggris. Inggris mendapat tawaran mengelola kembali perkebunan yang diambil alih pemerintah Indonesia pada saat nasionalisasi pada 1950-an. Indonesia juga menawarkan skema peralihan dari utang menjadi investasi bagi negara yang tidak ingin mengelola kembali perkebunannya di Indonesia.

---

22 Mallarangeng 2002: 50.

23 Dibahas dalam rapat Dewan Stabilisasi Ekonomi, 31 Agustus 1966. Lihat Abdullah, Abdurrachman, Gunawan (ed.) 2012: 225–26.

PRESIDIUM KABINET AMPERA  
REPUBLIK INDONESIA

Salinan.

KEPUTUSAN PRESIDIDIUM KABINET AMPERA  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 93/U/KEP/11/1966.

KETUA PRESIDIDIUM KABINET AMPERA REPUBLIK INDONESIA,

1. bngg : Bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia  
guna menghadiri Paris Meeting yang akan diselenggarakan  
di Prantzia pada tanggal 15 Desember 1966, adapun Dele-  
gasi tersebut akan dipimpin oleh Saudara Pandeiki;
2. gimgnt : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/B.D;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 21619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/B.D;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/SSD;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 14  
Oktober 1964 No. An/D/118/1964;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/66 tanggal  
26 September 1966;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/66  
tanggal 14 Oktober 1966;
3. gng per- : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium  
studjuan Biro Lalu Lintas Deviasi;

M E M U T U S K A N :

1. ditetapkan :  
2. tngg : Menugaskan kepada Saudara M. A. PANDEIAKI Inspektur Djan-  
dara, Departemen Keuangan untuk memimpin Delegasi Indo-  
nesia guna menghadiri PARIS MEETING yang akan diadakan  
pada tanggal 15 Desember 1966 di Paris;  
Anggota-anggota Delegasi terdiri :  
1. Sdr. RACHMAT SALIH S.H., Gubernur Pengganti Bank  
Negara Indonesia Unit I,  
2. Sdr. Prof. Dr. WIDJOJO NITISARTO,  
3. Seorang dari Staf KERI Paris sebagai Sekretaris;
3. gng : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan  
berangkat dari Djakarta ke Paris pada tanggal 12 De-  
seMBER 1966 dengan menggunakan pesawat udara (first class)  
dengan catatan bahwa biaya perjalanan p.p. ditanggung  
oleh Pemerintah Republik Indonesia;
4. tngg : Setelah tiba dinegeri yang dituju mereka harus segera  
berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setem-  
pat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan  
dengan tugas mereka;
5. gng per- : Bahwa selama berada diluar negeri mereka akan menerima  
studjuan uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut  
golongan mesleg2 sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kelima : .....

Salinan Dokumen Keputusan Presidium Kabinet AMPERA untuk  
Mengirimkan Delegasi Indonesia ke Paris Club tahun 1966 | Sumber: ANRI

Dari Inggris, perjalanan dilanjutkan ke Prancis, Italia dan Jerman. Ketiga negara itu bersedia ikut serta dalam perundingan antara Indonesia dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang. Kota tersebut dipilih karena Jepang dianggap sebagai negara yang memahami situasi dan kondisi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia yang pernah diduduki Jepang selama Perang Asia Timur Raya merupakan salah satu negara yang menerima dana pampasan perang dari Jepang senilai 223 juta dolar Amerika.<sup>24</sup> Sekitar 12 tahun (1958–70), pemerintah Jepang membayar pampasan perang tersebut.

Bagi Jepang, Indonesia merupakan negara penting karena memiliki kekayaan besar bahan baku yang bermanfaat bagi industri Jepang. Berpenduduk besar, Indonesia, sebaliknya, menjadi pasar potensial bagi produk Jepang. Hal itu mendorong Jepang memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia melalui lembaga Official Development Assistance (ODA). Sejak 1954, Indonesia menerima bantuan ODA dalam bentuk pelatihan di bidang industri, komunikasi, transportasi, pertanian dan kesehatan.<sup>25</sup>

Pertemuan Tokyo—atau Tokyo Club—telah memerantarai delegasi Indonesia dan negara-negara kreditor. Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dipimpin oleh Hans Pandelaki, Inspektur Jenderal pada Departemen Keuangan, beranggotakan Widjojo Nitisastro, dan Rachmat Saleh, Gubernur pengganti Bank Negara Indonesia Unit I (sekarang Bank Indonesia). Delegasi Indonesia menjelaskan bahwa devisa ekspor dicadangkan untuk membayar utang tapi devisa tersebut juga dibutuhkan untuk mengimpor bahan baku, suku cadang dan sebagainya hingga keadaan ekonomi Indonesia lebih baik.

Di sisi lain, perwakilan IMF minta penjelasan terkait rencana stabilitas ekonomi yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. Para kreditor dalam perundingan Tokyo Club bersepakat memberi pinjaman sebesar 174 juta dolar kepada Indonesia. Kelak berbagai pertemuan antara delegasi Indonesia dan institusi keuangan dunia intensif memengaruhi

24 Subekti, Yuda A.R. 2014: 136.

25 Soesastro 1991: 5.

relasi antara kedua belah pihak. Secara institusional ataupun individual, relasi antara teknokrat dan perwakilan IMF serta Bank Dunia dari waktu ke waktu berjalan sangat baik. Kepala perwakilan IMF di Indonesia adalah seorang Turki, Kemal Siber, sementara kepala perwakilan Bank Dunia adalah Bernard Bell. Keduanya memiliki hubungan baik dengan Widjojo Nitisastro, Emil Salim dan Sumarlin. Presiden Soeharto pun memberi keamanan kerja bagi teknokrat terutama dari tekanan politik. Pihak militer Indonesia juga menerima program ekonomi yang disiapkan oleh para teknokrat tersebut.<sup>26</sup>

Keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Menteri Keuangan Frans Seda. Jelas pula harus dicatat kontribusi penting Widjojo Nitisastro dan Emil Salim yang berhasil menegosiasikan penjadwalan pembayaran pinjaman yang diwariskan pemerintah Orde Lama.<sup>27</sup> Melalui penjadwalan ulang pembayaran utang, negara-negara kreditor dapat meningkatkan peran dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan sistem keuangan internasional.

Hingga 30 Juni 1966, utang Indonesia mencapai 2,1 miliar dolar AS yang terdiri dari pinjaman pokok berikut bunganya. Sementara dalam periode 1969–78 *debt service payment* mencapai 200 juta dolar AS setiap tahun. Pada 1979, kenaikan *debt service payment* sangat signifikan hingga 300 juta dolar AS. Hal itu membuat pembangunan di Indonesia dan upaya pelunasan utang makin sulit karena penambahan pinjaman baru. Dengan tujuan menjadwal ulang utang-utang tersebut, pada Desember 1966 Presidium Kabinet Ampera mengirim delegasi untuk menghadiri Pertemuan Paris (Paris Club).<sup>28</sup>

---

26 Thee Kian Wie (ed.) 2003: 129.

27 Thee Kian Wie (ed.) 2003: 129.

28 Paris Club adalah sebuah forum informal yang dibentuk secara spontan pada 1950-an oleh negara-negara maju yang kemudian menjadi kreditor resmi. Aktivitas Paris Club mulai berjalan pada 1956 ketika pemerintah Argentina mengalami kesulitan membayar utang dan mengadakan pertemuan dengan sejumlah negara kreditor di Paris untuk melakukan negosiasi. Lihat Exotix Capital 2019: 65.



Delegasi Indonesia di Paris Club 1966 | Sumber: Repro buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Kunjungan ke Paris Club—kali pertama bagi Indonesia—dipimpin kembali Hans Pandelaki dengan anggota Rachmat Saleh, Widjojo Nitisastro dan seorang staf KBRI Paris sebagai sekretaris. Urgensi lawatan ialah karena jumlah utang Indonesia sangat besar yang hampir pasti tidak bisa dibayar saat jatuh tempo. Indonesia dan pihak Paris Club sepakat mengundang pihak ketiga, yaitu Herman Abs, seorang bankir dan pakar keuangan Deutsche Bank, dibantu staf Bank Dunia dan IMF untuk melakukan analisa proyeksi neraca pembayaran jangka panjang dan jangka pendek dengan mempertimbangkan dampak dari sejumlah rancangan penjadwalan kembali neraca pembayaran berikut prospek

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negosiasi Indonesia dan negara kreditur menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait restrukturisasi sebagai metode pembayaran utang.

## **Stabilisasi dan Rehabilitasi**

Menghadapi berbagai masalah ekonomi dan keuangan, pemerintah mencanangkan program pembangunan ekonomi jangka panjang yang didukung terbitnya Ketetapan MPRS tentang Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.<sup>29</sup> Menanggapi ketetapan majelis itu, ISEI melakukan konferensi (Juli 1966), mengusulkan tiga program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi berdurasi tiga setengah tahun kepada pemerintah. Ketiga program itu ialah, pertama, penyelamatan selama enam bulan yang bertujuan mengurangi tekanan inflasi; kedua program stabilisasi selama dua tahun untuk melanjutkan program penyelamatan sebelumnya namun dilakukan lebih intensif; dan ketiga, program satu tahun yang bertujuan merehabilitasi prasarana industri termasuk perbaikan jalan, pabrik dan perkebunan.

Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang diterapkan pemerintah terdiri dari penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi yang masing-masing tahap dicanangkan selesai dalam waktu enam bulan. Program tersebut mirip dengan usulan konferensi ISEI, bukan hal mengejutkan sebab semua staf pribadi urusan ekonomi Soeharto merupakan ekonom dan tokoh ISEI. Perbedaannya terletak pada rencana durasi program yang dirancang pemerintah yakni dua tahun untuk menyesuaikan batas waktu persiapan penyelenggaraan pemilihan umum seperti ditetapkan MPRS yakni 5 Juli 1968.<sup>30</sup>

29 Dalam upaya pengendalian inflasi dan kestabilan harga, Ketetapan MPRS Nomor XXIII/1966 mengamanatkan perimbangan harga yang sesuai dengan daya beli rakyat. Selain itu, ketetapan tersebut juga mengharuskan upaya sinkronisasi pembangunan ekonomi dengan penambahan tenaga kerja setiap tahun secara efektif. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia 1972: 53.

30 Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966. Lihat Komisi Pemilihan Umum Indonesia 2000: 46.

Pada 7–12 Maret 1967, MPRS menggelar Sidang Istimewa dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, ketua Majelis. Dari sidang bersejarah tersebut, terbit Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno beserta seluruh kekuasaan pemerintahan negara yang pernah diembannya.<sup>31</sup> Bersamaan dengan ketetapan itu, MPRS mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga terpilih presiden definitif melalui pemilihan umum.

Bagi Soeharto, pengangkatan atas dirinya menjadi Pejabat Presiden memberi keleluasaan mengukuhkan tim penasihat ekonominya sebagai perencana ataupun pelaksana program pembangunan. Seperti telah disebutkan, tim penasihat ekonomi itu terdiri dari ekonom-akademisi, yang diangkat dalam jabatan menteri atau posisi strategis lainnya dalam kabinet Soeharto. Widjojo Nitisastro diangkat sebagai Ketua Bappenas dan Emil Salim wakilnya; Subroto ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Penelitian Pemasaran dan Perdagangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas); Mohammad Sadli duduk sebagai Ketua Tim Teknis Penanaman Modal Asing; dan Sumitro Djojohadikusumo serta Ali Wardhana sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.<sup>32</sup>

Dari sisi ISEI, posisi sebagian anggotanya yang duduk dalam kabinet itu memberi prestise tersendiri bagi organisasi. Kesamaan pandangan mereka dengan pemerintah mengenai pembangunan perekonomian Indonesia berimplikasi pada citra ISEI sebagai organisasi yang strategis di negara yang sedang membangun. Di sisi lain, posisi prestisius ISEI tersebut dikhawatirkan bisa menghilangkan daya kritisnya terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin tidak tepat. Namun, kekhawatiran itu terjawab oleh kenyataan bahwa di kalangan anggota ISEI tetap tumbuh sikap kritis sebab, bagaimanapun, para ekonom teknokrat itu pada dasarnya adalah akademisi yang terlatih dalam perbedaan pandangan di antara sesamanya sekalipun.

31 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1972: 355.

32 Muhaimin 1991: 120–21; lihat juga Roeder 1969: 166.



Pertemuan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan Presiden Soeharto (kiri) di Bina Graha | Sumber: Tempo

Terbaca misalnya dalam pandangan Sarbini Sumawinata, mantan ketua ISEI, yang dikenal kritis terhadap sesama rekan ekonom ataupun terhadap kebijakan pemerintah meski ia sendiri pernah duduk di kursi birokrasi pemerintahan. Ia pernah mengkritik soal investasi asing dalam industrialisasi di Indonesia sejak pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (1967). Menurutnya, tidak semua sektor ekonomi perlu investasi asing secara besar-besaran dan tidak semua pabrik membutuhkan teknologi tinggi. Seharusnya pemerintah mengarahkan modal asing ke sektor-sektor usaha yang sekiranya tidak bisa dikembangkan sendiri oleh orang Indonesia, dan

di sisi lain melarang investor asing memasuki sektor-sektor usaha yang telah mampu dikuasai pengusaha dalam negeri. Perlakuan istimewa terhadap investor asing justru menyingkirkan perusahaan Indonesia dari kegiatan *manufacturing* skala kecil dan menengah seperti tekstil dan minuman ringan.

Menurut Sarbini, liberalisasi dalam industrialisasi sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun tanpa “jaring pengaman” hingga akhirnya pemerintah berkompromi untuk membatasi kebebasan investor asing melalui persyaratan patungan atau *joint-venture* bagi investasi baru dan keharusan memberi pelatihan bagi tenaga kerja lokal dan tindakan lain. Pada 1968, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri sebagai langkah melengkapi kebijakan liberalisasi ekonomi. Undang-undang itu bertujuan memberi keistimewaan yang sama kepada perusahaan dalam negeri seperti terhadap perusahaan asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Kebijakan pemerintah terkait stabilisasi dan rehabilitasi serta liberalisasi tersebut merupakan bagian dari proses terbentuknya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada pertemuan delegasi Indonesia dan negara-negara kreditor (23–24 Februari 1967).<sup>33</sup> Keberadaan IGGI memungkinkan Indonesia memperoleh dana pinjaman internasional berbunga relatif rendah secara berkelanjutan sehingga dapat menopang anggaran berimbang seperti yang telah dicanangkan. Pada 1968, defisit anggaran dapat dikatakan sudah nihil, sementara jumlah uang yang beredar berhasil ditekan hingga 120%. Selain itu angka inflasi juga berhasil diturunkan hingga 85%.

Kondisi tersebut diiringi dengan neraca perdagangan yang surplus hingga 41 juta dolar AS kendati transaksi defisit masih pada angka 339 juta dolar AS. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan hingga 4,8%.<sup>34</sup> Berbagai indikasi situasi dan kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung positif tersebut menguatkan alasan pemerintah untuk

33 Salman, Djumadiono, Mulyani 1995: 49.

34 Abdullah, Abdurrachman, Gunawan (ed.) 2012: 232–34.

segera melaksanakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Pertama (1969–74).

## **Kongres Palembang**

Pada 1969, ISEI kembali menyelenggarakan kongres; kali itu di Palembang, Sumatera Selatan (5–8 April). Sehari sebelumnya, Ketua Umum Mohammad Sadli menghadap Presiden Soeharto melaporkan rencana kongres dan bermaksud mendengar langsung dari kepala negara mengenai masalah kenegaraan yang patut mendapat perhatian kongres.<sup>35</sup> Presiden Soeharto berharap Kongres ISEI tidak lagi membahas siklus Pelita (Pembangunan Lima Tahunan) tapi lebih memusatkan perhatian pada pengamanan dan pengawasan terhadap program-program operasional Pelita. Walau demikian, tegas Presiden, pemerintah terbuka menerima saran dan kritik yang konstruktif terkait pelaksanaan Pelita.

Presiden Soeharto juga meminta agar para sarjana ekonomi terutama anggota ISEI memberi “tanda bahaya” apabila melihat gejala yang berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan Pelita sehingga pemerintah dapat bertindak cepat menyelamatkannya. Ketua Panitia Kongres, Suhadi Mangkusuwondo, guru besar FEUI, menjelaskan bahwa tanda bahaya itu tidak “dibunyikan” sendiri oleh ISEI melainkan dapat dilakukan oleh para anggota kepada pemerintah pusat dan daerah serta melalui pers. Sarjana-sarjana ekonomi di daerah adalah “evaluator” terhadap kebijakan baru pemerintah pusat ataupun daerah yang berdampak terhadap perkonomian setempat.

Kongres ISEI di Palembang membahas tiga tema pokok yakni pembelanjaan, segi institusional, dan pembangunan daerah. Di antara pandangan yang mengemuka ialah optimisme tentang surplus anggaran belanja sebesar 24 miliar Rupiah yang bakal tercapai, bahkan akan terlampaui, meski tetap dipertanyakan apakah pemakaian dana tersebut

---

35 *Kompas*, 5 April 1969.

benar-benar efisien untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.<sup>36</sup> Dalam amatan Suhadi, umumnya pembicara kongres optimistis bahwa pemasukan uang melalui penerimaan negara, kredit luar negeri dan mobilisasi dana dari sektor-sektor terorganisasi dalam masyarakat berjalan lancar. Namun, sebagian pembicara khawatir uang yang diotorisasi pemerintah tidak sampai pada sasaran yang sebenarnya. Bahwa prosedur baru dalam sistem otorisasi pembiayaan proyek merupakan sebuah langkah maju, tapi terbuka kemungkinan dana yang diotorisasi akan diselewengkan di tengah jalan dan kemungkinan penyimpangan lainnya.

Selanjutnya, anggota Dewan Riset Nasional itu menjelaskan bahwa kongres di Palembang belum membahas soal Repelita yang kedua. Adapun tentang pelaksanaan Pelita I tahun kedua, umumnya pembicara berpendapat bahwa arah perkembangan baik pada 1969/70 akan semakin baik pada tahun berikutnya. Utang Indonesia hingga Desember 1968 diperkirakan mencapai 3 miliar dolar AS, sedangkan jumlah bantuan untuk Repelita I 1969/70 hingga 1973/74 diperkirakan 833 miliar Rupiah yang dihitung berdasarkan nilai tukar pada akhir 1968. Jumlah tersebut terdiri dari bantuan program sebesar 393 miliar Rupiah dan bantuan proyek 440 miliar Rupiah. Dengan demikian hingga akhir Repelita I utang Indonesia akan mencapai hampir 5 miliar dolar AS.<sup>37</sup>

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru masih memerlukan proses untuk mengatasi berbagai kesulitan dan ketimpangan. Sjafruddin Prawiranegara, mantan Menteri Keuangan, menggambarkan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru sama peliknya dengan yang dihadapi negara-negara Eropa Barat setelah Perang Dunia II. Menurutnya, berbagai masalah politik yang cenderung diselesaikan melalui operasi militer seperti pemberontakan PRRI, perebutan Irian Barat yang masih dikuasai Belanda, dan

36 *Kompas*, 12 April 1969.

37 *Kompas*, 12 April 1969.

konfrontasi terhadap Malaysia yang diiringi dengan pengambilalihan aset perusahaan asing berdampak pada hancurnya berbagai fasilitas dan pusat-pusat produksi.

Di luar ekspor minyak terutama pada masa *oil boom* sebagai dampak Perang Korea (1950–53), nilai hasil ekspor komoditi yang lain dianggap kurang mencukupi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 20 juta jiwa sejak 1958 hingga 1966.<sup>38</sup> Pada 1955–65, jumlah pendapatan pemerintah rata-rata 151 juta Rupiah per tahun, sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata per tahun selama periode tersebut sebesar 359 juta Rupiah. Dengan demikian pengeluaran pemerintah lebih dari 100% dari rata-rata pendapatan.<sup>39</sup>

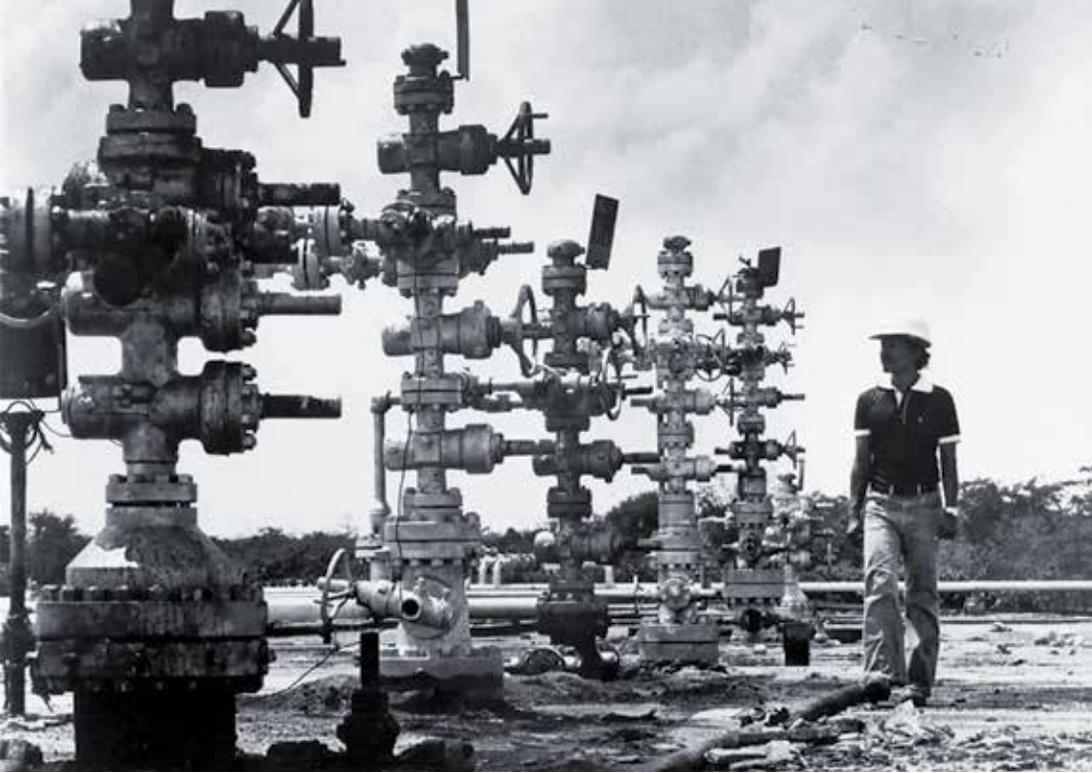
Dalam kesempatan lain, Sjafruddin Prawiranegara menyatakan perbaikan kondisi ekonomi-keuangan Indonesia tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara ekonomis-teknis, menambah atau mengurangi volume uang yang beredar atau menambah hasil ekspor/impor, melainkan dengan upaya memperbaiki keadaan sosial dan politik. Ia melihat hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki lebih dulu adalah mentalitas atau jiwa manusia Indonesia sebelum memperbaiki keadaan ekonomi yang kasat mata. Dengan kata lain, politik memperbaiki keadaan ekonomi-keuangan Indonesia harus dilakukan bukan hanya secara bersama-sama tapi juga dengan politik mempersatukan kembali bangsa Indonesia dan memperbaiki hubungan dengan negara lain khususnya negara-negara nonkomunis bahkan yang antikomunis.<sup>40</sup>

Berbicara dalam diskusi yang diadakan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia di Jakarta pada 1967, Sjafruddin tidak bermaksud mengatakan bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan di bidang

38 Pada 1955, jumlah penduduk Indonesia 85,4 juta jiwa; sementara menurut sensus 1961 berjumlah 97.085.348 jiwa. Pertambahan penduduk yang signifikan akan menjadi masalah jangka panjang jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah. Lihat Rahman 2023: 105.

39 Ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, namun setelah itu menurun drastis menjadi rata-rata 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama 1965–66. Lihat Tambunan 2015: 14.

40 Prawiranegara (2005b) dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 138–39, Jilid 3.



Masa Booming Minyak yang terjadi pada dekade 1970-an memberi dampak pada struktur ekonomi Indonesia | Sumber: Tempo

sosial-politik sama sekali, tapi ia mencatat dua hal yang menurutnya bersifat sangat negatif. Pertama, titik perhatian politik pemerintah masih difokuskan hanya pada pemberantasan sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI dengan terus mempropagandakan Pancasila sebagai falsafah negara sehingga belum terlihat upaya mempersatukan kembali seluruh komponen bangsa berdasar sila-sila kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kedua, pinjaman asing yang dikucurkan negara-negara kreditor kepada Indonesia, menurut Gubernur Bank Indonesia (1951) itu seharusnya dihapuskan dengan atau tanpa memberi pinjaman baru—apabila negara-negara pemberi pinjaman tersebut bertujuan membantu menjerahatkan rakyat Indonesia dan demi stabilitas serta perdamaian dunia yang juga merupakan kepentingan mereka.

Apabila utang tidak diputihkan, berarti negara-negara kreditor hanya menanggukkan tagihannya dan seolah “memberi kesempatan” kepada negara debitor—dalam hal ini Indonesia—untuk memperbaiki perekonomiannya hingga mampu mencicil pinjamannya.

Dalam pandangan Sjafruddin, bahaya *monetary approach* terhadap masalah inflasi ialah bahwa perbaikan itu kurang dapat dirasakan dan keadaan menjadi sangat labil meski lambat laun akan dicapai kemajuan. Kondisi itu, lanjutnya, akan membuka kesempatan kepada sisa-sisa kekuatan Orde Lama dan simpatisannya, termasuk kaum komunis, untuk menggerus dukungan terhadap Kabinet Ampera dan menyusun kembali kekuatannya.

Pada awal Orde Baru, pernah aktual istilah “demokrasi ekonomi” sebagai antitesis terhadap konsep Ekonomi Terpimpin yang dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan kurun 1959–65. Menurut Widjojo Nitisastro, demokrasi ekonomi bukan hal baru melainkan telah tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian itu tercantum gagasan tentang susunan perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan yang tidak mengenal pertentangan kelas. Dalam pelaksanaannya, produksi dikerjakan oleh seluruh lapisan di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat.<sup>41</sup>

Pada pokoknya, demokrasi ekonomi ditandai oleh prinsip-prinsip pintu terbuka, kebebasan berusaha, persaingan bebas, dan bersandar pada mekanisme pasar. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai agen pembangunan dan modernisasi, namun dalam situasi kebijakan ekonomi yang demikian, peranan pembangunan dikendalikan oleh pemegang dana dan modal yang umumnya berasal dari swasta domestik, pemerintah Indonesia, negara-negara yang memberi pinjaman, organisasi-organisasi internasional dan swasta asing.

Pada akhir Pelita I (1974), pertumbuhan sektor infrastruktur sebagai bagian dari paket rehabilitasi mencapai 21% yang kemudian diikuti oleh sektor kehutanan, keuangan dan industri. Namun, ironisnya sektor pertanian yang menjadi prioritas pada Pelita I justru hanya

41 Prawiranegara (2005b) dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 146, Jilid 3.

tumbuh 5,6%.<sup>42</sup> Meskipun tidak semua rencana yang telah disusun pada 1969 dapat diwujudkan pada 1974, namun stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan pada Pelita I telah memberikan pijakan kuat bagi pelaksanaan Repelita II.<sup>43</sup>

Pada kongres di Palembang, Sarbini Sumawinata memberi sejumlah catatan pada konsep Repelita I. Ia melihat konsep Repelita I memiliki kelemahan mendasar antara lain kurang teliti dalam perhitungan kuantitatif mengenai pengaruh sektor yang satu terhadap sektor yang lain secara timbal-balik. Selain itu, Repelita kurang mendapat dukungan yang memadai dalam anggaran rutin yang diperlukan untuk penertiban administrasi negara, dan pembiayaan rencana pembangunan seharusnya berasal dari dalam negeri. Kelemahan lain menurut Sarbini adalah persoalan pembangunan daerah yang secara konsepsional belum jelas.<sup>44</sup>

## **Kongres di Tretes**

Kepemimpinan Mohammad Sadli sebagai ketua umum ISEI digantikan oleh Emil Salim yang terpilih melalui kongres di Tretes, Pasuruan, Jawa Timur (14–17 Oktober 1971). Emil Salim tentu bukan “orang lain” bagi Sadli ataupun ISEI. Ia adik kelas Sadli dan menjadi anggota ISEI tak lama setelah meraih gelar Sarjana dari FEUI (1958). Emil melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat hingga mencapai gelar Doktor dengan disertasi berjudul *Institutional Structure and Economic Development* (1964), dan diangkat sebagai guru besar UI pada 1983.

Ekonom kelahiran Lahat, Sumatera Selatan (1930), itu juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan gagasan tentang Ekonomi

---

42 Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan pangan diprioritaskan pada bidang produksi dan konsumsi beras sehingga kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan. Hal itu membuat pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Lihat Booth dan McCawley (ed.) 1982: 29.

43 Abdullah, Abdurrachman, Gunawan (ed.) 2012: 239.

44 Sumawinata dalam Sjahrir 1989: 140–65.

Pancasila sebagai konsep kebijakan ekonomi.<sup>45</sup> Secara sederhana, Emil Salim menganalogikan Ekonomi Pancasila seperti pergerakan bandul jam dinding yang mengayun ke kiri dan ke kanan hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan. Bergerak ke kanan bermakna bebas mengikuti aturan pasar, sementara gerakan ke kiri berarti mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Dengan kata lain, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila adalah sistem “ekonomi campuran” antara kapitalis dan sosialis dengan segala variasinya.

Ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan, kegotongroyongan dan kerja sama. Nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya Indonesia kendati asas kekeluargaan juga melalui proses mekanis terutama dalam mendirikan dan menjalankan koperasi. Sementara dalam Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan cabang-cabang penting kebutuhan rakyat yang dikuasai oleh negara sehingga melahirkan Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat. Peranan negara yang tampak dominan dalam pengelolaan ekonomi sebagai pusat perencanaan dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun di sisi lain pemerintah Indonesia juga mengakui peranan swasta termasuk swasta asing yang mulai berkembang pada masa Ekonomi Terpimpin (1960–65) dan memainkan peran konglomerasi serta perusahaan multinasional selama masa pemerintahan Orde Baru (1966–98).

Sebagai ekonom akademis, Emil Salim melihat perlunya perubahan paradigma pemikiran ekonomi dari “ekonomi terpimpin” menuju ekonomi rasional sebagai hal mendesak. Jika semasa Orde Lama pemikiran ekonomi “dipimpin” oleh ideologi politik kepentingan, maka

---

45 Pertama kali beredar dalam artikel yang diterbitkan Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada 1965. Setahun kemudian, Mubyarto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, menggali lebih dalam istilah *Ekonomi Pancasila* sehingga memberi pijakan bagi pengembangan konsep Sistem Ekonomi Pancasila. Lihat Pratama 2018: 304–32.



Emil Salim (tengah) Ketua Umum ISEI 1972 - 1979. | Sumber: Empat Dasawarsa FEUI (1990)

dalam era baru harus dikembalikan pada “bahasa ekonomi” yang sebenarnya. Dicontohkan, aspek-aspek ekonomi semisal disiplin fiskal; pengurangan defisit anggaran; pengendalian inflasi; kredit pemerintah; pengiriman langsung mata uang asing sebagai pemasukan negara (yang diperoleh secara sah); dan studi kelayakan dalam perumusan kebijakan serta pengadaan tender adalah *the language of economics* yang harus ditanamkan di kalangan pejabat pemerintahan.

Sebagai nakhoda baru ISEI, Emil Salim memandang perlu melakukan diseminasi pemikiran ekonomi rasional, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, ke daerah-daerah di Tanah Air. Berkaitan dengan hal itu, ISEI perlu memiliki kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Komunikasi dan dialog secara teratur antara pusat dan daerah, kata Emil Salim, bisa menjadi sarana “cuci otak” bagi para

birokrat di daerah dari cara berpikir “komando” ala ekonomi terpimpin yang diubah dengan cara berpikir rasional. Keberadaan cabang ISEI di daerah juga tentu memberi manfaat positif bagi para pemangku kebijakan tempatan.

Pada 1973, Emil Salim menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan II. Tugas itu membuka peluang baginya mengunjungi berbagai daerah di Tanah Air sekaligus membentuk ISEI cabang di wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi Orde Baru serta mendirikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tingkat provinsi. Pembentukan Bappeda akan membuka bab baru dalam perencanaan pembangunan daerah karena lembaga itu akan bekerja sama dengan Bappenas untuk mengembangkan wawasan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kerja sama itu juga akan mendorong tokoh-tokoh daerah yang potensial tampil sebagai tokoh nasional seperti Jusuf Kalla dari Sulawesi Selatan, Madjid Ibrahim dari Aceh dan Harun Zain dari Sumatera Barat.

Semangat menuju pemikiran ekonomi rasional terlihat dalam paparan Suhadi Mangkusuwondo pada Sidang Pleno ISEI yang membahas kerangka makro Repelita II. Menurut Ketua I ISEI itu, perlu kerangka makro yang menunjukkan interdependensi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Idealnya, kerangka makro harus mencakup seluruh bidang, bukan hanya aspek produksi, konsumsi, perdagangan, keuangan, tapi juga mengenai kelahiran, kematian, kesempatan kerja dan pembagian pendapatan. Hubungan antara berbagai bidang itu sebaiknya dinyatakan secara kuantitatif dalam sebuah model makroekonomi yang komprehensif.<sup>46</sup>

Sasaran umum pembangunan ditentukan oleh masyarakat melalui wakil-wakil di MPR<sup>47</sup> yang mencakup peningkatan taraf hidup masyarakat; perluasan kesempatan kerja; perbaikan kesehatan;

46 Mangkusuwondo dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 205, Jilid 3.

47 Sejak pemerintahan Orde Baru terbentuk, sebutan lembaga MPR tanpa memakai kata keterangan ‘sementara’.

peningkatan pendidikan; pembagian pendapatan yang lebih merata; pembangunan daerah yang lebih seimbang, pembinaan golongan pengusaha nasional, peningkatan ketahanan nasional, dan seterusnya. Namun, menurut Suhadi, terdapat faktor pembatas yakni keperluan investasi yang meningkat, kemampuan menabung dalam negeri yang terbatas dan terjadi *supply bottlenecks* pada sektor tertentu sehingga bisa memperlambat pencapaian target pendapatan nasional bruto.

Mengakhiri makalahnya, Suhadi Mangkusuwondo mengingatkan bahwa tidak semua daerah di Indonesia akan mengalami perkembangan (ekonomi) sama cepatnya. Beberapa daerah waktu itu, yakni Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, ditengarai mengalami pertumbuhan yang lambat; sedangkan Jakarta Raya, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, adalah daerah-daerah yang cepat berkembang. Tanpa tindakan khusus dari pemerintah, lanjutnya, bisa timbul kesenjangan kemajuan yang makin besar di antara daerah. Akhirnya Suhadi menyarankan agar pemerintah dalam batas tertentu lebih banyak memberi perhatian pada daerah yang lambat perkembangannya tanpa mengorbankan laju pertumbuhan secara keseluruhan.

## **Pleno di Prapat**

Pada 1976, ISEI menyelenggarakan sidang pleno di Prapat, Sumatera Utara (27–29 Oktober).<sup>48</sup> Ketua Umum ISEI Emil Salim menjelaskan bahwa sidang pleno membahas perspektif ekonomi Indonesia, dialog ekonomi internasional Utara–Selatan dan kerja sama ekonomi ASEAN. Selain dihadiri anggota ISEI dari pengurus cabang se-Indonesia, sidang pleno diikuti peserta dari negara-negara ASEAN. Peserta terdiri dari

---

48 Pelaksanaan sidang pleno ini sejalan dengan putusan Kongres ISEI 1971 di Tretes yang menyatakan bahwa kongres diadakan paling sedikit sekali dalam tiga tahun, sementara sidang pleno diadakan paling sedikit satu kali di antara dua kongres. Putusan lain kongres tersebut ialah bahwa sarjana nonekonomi yang memiliki pengetahuan mendekati ilmu ekonomi tidak dapat dijadikan anggota rapat pleno. Walau demikian, berdasar pertimbangan praktis, pengurus cabang boleh menentukan hal lain jika dianggap perlu.

akademisi, pakar dan pelaku ekonomi yang, sebagian di antaranya, duduk dalam pemerintahan. Walau begitu, mereka diharapkan dapat berbicara lebih bebas terlepas dari kedudukan formalnya dalam pemerintahan.

Khusus terkait topik perspektif perekonomian Indonesia, Pleno membahas penelitian dan observasi Sumitro Djojohadikusumo tentang pembangunan Indonesia hingga 1985, terutama pada aspek ekonomi. Menurut Emil Salim, pembahasan diarahkan sebagai diskusi ilmiah mengenai perkembangan ekonomi, implikasi, dampak dan penanggulangannya baik pada aras nasional, regional maupun internasional. Dijelaskan pula kemungkinan merintis kerja sama dan pembentukan himpunan ahli ekonomi ASEAN. Presiden Soeharto menyambut baik Sidang Pleno ISEI di Prapat dan menegaskan bahwa masing-masing pemerintah di negara-negara ASEAN berupaya merintis kerja sama sedangkan realisasinya tergantung pada dukungan rakyat.

Dalam pidato pembukaan, Emil Salim menjelaskan bahwa meski perkembangan ekonomi internasional tidak terlalu menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ekonom asing menilai pendapatan nasional yang diraih Indonesia cukup memadai yakni 11,3% pada 1973, tumbuh meningkat 7,4% pada 1974 dan 8% pada 1975.<sup>49</sup> Pertumbuhan tersebut merupakan hasil investasi pada Pelita I dan II. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung posisi neraca pembayaran yang telah ditingkatkan sebagai hasil dari kenaikan harga minyak bumi dari semula 2,93 dolar AS per barel pada 1972 menjadi 12,60 dolar AS per barel pada 1975.

Kendati mengalami peningkatan, tingkat inflasi juga mengalami kenaikan seperti terlihat dalam Indeks Harga Jakarta pada 62 komoditas dan jasa. Angka tersebut mengalami kenaikan 27,3% pada 1973 menjadi 33,3% pada 1974 dan menurun 19,7% pada 1975.<sup>50</sup> Tingkat inflasi pada dekade 1960-an disebabkan oleh ekspansi keuangan yang terlalu

<sup>49</sup> Joint Publications Research Service 1976: 13.

<sup>50</sup> *Kompas*, 30 Oktober 1976.

cepat dan tidak ada keseimbangan alur komoditas. Tingkat ekspansi moneter masih tinggi tapi alur komoditas cukup seimbang. Tingkat inflasi yang tinggi dengan berbagai dampaknya terhadap distribusi, produksi dan aktivitas pemasaran serta penciptaan lapangan kerja masih akan menjadi masalah utama dalam perkembangan ekonomi masyarakat di masa akan datang.

Selain soal inflasi, Emil Salim menyinggung masalah kenaikan jumlah penduduk Indonesia. Menurutnya, jumlah populasi yang meningkat tak terkendali sejak 1950-an mendorong invasi penduduk muda dari pelbagai daerah yang mencari lapangan kerja. Tampak bahwa perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada aktivitas investasi negara dan perusahaan swasta untuk memecahkan masalah pengangguran. Di sisi lain, peningkatan peran perusahaan swasta belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Tajuk rencana *Kompas* berupaya meringkas simpulan Sidang Pleno ISEI di Prapat, antara lain ditulis bahwa tantangan pembangunan masa depan tidak mudah. Perlu penggalangan usaha bersama rakyat dan pemerintah sehingga penting melakukan diskusi terus-menerus. Pemikiran kolektif anggota ISEI menjadi penting sebagai bahan diskusi untuk memahami dan menghayati masalah pembangunan karena mencakup pokok permasalahan pembangunan yang kompleks. Selain itu, dalam masyarakat di negara-negara yang sedang membangun muncul pemikiran kritis yang terus-menerus mencari cara terbaik membangun ekonomi.

Strategi pendekatan dalam pembangunan ekonomi, seperti disampaikan Sumitro, hendaknya berorientasi pada penduduk karena komitmen pembangunan itu sendiri bertujuan memperbaiki kualitas kehidupan manusia Indonesia; bukan pada modal, teknologi atau model, dan sebagainya. Di sisi lain, terdapat hambatan nonteknis berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pola konsumsi tinggi dan kemauan politik. Upaya mengatasi berbagai hambatan itu diintegrasikan dalam keseluruhan kerangka pembangunan karena upaya yang telah dilakukan selama itu terkesan tamal-sulam atau reaktif.

Sidang Pleno ISEI di Prapat menarik perhatian banyak kalangan terutama karena temanya mengangkat ke permukaan mengenai apa yang selama itu lebih mudah dirasakan daripada dirumuskan. Selama sepuluh tahun sejak 1976, ISEI menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi 8% setahun, sementara pendapatan per kapita rakyat Indonesia hanya setengah dari pendapatan per kepala di Malaysia pada 1973 yakni 245 dolar AS. Hal itu disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 167 juta jiwa pada 1985.<sup>51</sup> Berdasarkan fakta tersebut, ISEI memperkirakan akan terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dan sumber kekayaan alam. Jika hal itu terjadi, harus diciptakan lapangan kerja produktif dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang lebih merata.

Selanjutnya, ISEI menyarankan sejumlah langkah yang harus ditempuh pemerintah. Salah satu yang terpenting ialah mencegah secara sistematis kebocoran keuangan negara dan pengekangan diri dari hasrat konsumsi yang berlebihan. Selain itu, penting diupayakan penerapan teknologi tepat guna, perluasan proyek-proyek padat karya, peningkatan pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan rendah dengan cara memperluas proyek-proyek Inpres (Instruksi Presiden), Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Masyarakat), penyaluran dan pemanfaatan modal. Semua langkah itu, menurut penilaian ISEI, layak dilaksanakan tapi masih perlu usaha lain yang lebih progresif.

Program Bimas dan Inmas mendapat tanggapan K. D. Thomas, ekonom dari La Trobe University, Victoria, Australia.<sup>52</sup> Dikatakan, program Bimas dan Inmas merupakan langkah yang sangat penting selama pelaksanaan pembangunan terutama untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan golongan penduduk berpenghasilan rendah. Namun, dalam prosesnya, Bimas dan Inmas tidak mampu menembus lapisan petani kecil yang hanya

51 Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat 1977: 8.

52 K. D. Thomas pertama kali datang dan tinggal di Indonesia pada 1955. Ia bekerja secara suka rela di Universitas Indonesia dan bergaul akrab dengan banyak ekonom Indonesia waktu itu. Jelang 1965, ia kembali ke Australia, tapi pada awal Pelita I Thomas kembali berkunjung ke Indonesia. Lihat *Kompas*, 11 November 1976.

memiliki sawah kurang dari setengah hektar. Saat itu, petani kecil berjumlah lebih dari 8 juta orang. Dengan demikian produksi sangat mungkin meningkat tapi hanya di kalangan sedikit petani. Selebihnya mereka tidak hanya tidak mampu meningkatkan produksinya tapi pendapatannya justru berkurang. Hal itu disebabkan oleh sekelompok kecil petani yang melaksanakan sistem *tebasan*, memborongkan panenannya kepada perantara yang mengambil pekerja upahan dari kampung lain. Pemborong bisa menyelesaikan pekerjaan panen dengan cepat karena menggunakan sabit, bukan ani-ani, yang memungkinkan banyak orang ikut bekerja dan mendapat bagian.

Selain berkurangnya pendapatan, petani miskin tidak bisa lagi menambah pendapatan melalui keikutsertaannya dalam pekerjaan panen dengan peralatan ani-ani. Seiring dengan itu ikatan sosial yang pernah tumbuh sangat kuat dan menjadi salah satu kekuatan desa menjadi semakin luntur. Secara sederhana, menurut Thomas, sementara Inmas dan Bimas meningkatkan produksi total, tapi pada saat bersamaan meningkatkan kemiskinan dan merusak hubungan sosial antardesa sehingga hal itu bukanlah suatu *development*.

Sidang Pleno ISEI juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi perlu terus ditingkatkan untuk menopang peningkatan produksi. Thomas mencontohkan penggunaan *huller*, penggilingan padi dan mekanisasi lain di pedesaan yang, menurutnya, hanya dapat ditanggung oleh sekelompok kecil petani kaya. Penerapan mekanisasi tersebut menghilangkan lapangan kerja bagi jutaan penumbuk padi tradisional yang menggunakan tenaga manusia. Secara umum, ia tidak menolak mekanisasi pedesaan, Bimas-Inmas, dan juga program keluarga berencana, sebagai sarana pembangunan tapi kurang tepat jika ketiganya dijalankan dalam konteks *growth*. Sebaliknya, ia menekankan perlunya mengubah struktur masyarakat pedesaan dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar langkah pembangunan dapat berjalan.

Terlepas dari kekurangan relatif yang biasa terjadi dalam suatu forum diskusi, Emil Salim menilai Sidang Pleno ISEI di Prapat berlangsung dalam atmosfer terbuka. Para peserta berupaya obyektif

mencurahkan pemikiran dari perspektif dan latar belakang masing-masing yang berbeda-beda. Sidang Pleno itu makin menyadarkan para ekonom bahwa tantangan pembangunan di Indonesia selanjutnya tidaklah mudah dan membutuhkan upaya bersama pemerintah dan rakyat. Dengan demikian diperlukan diskusi berkelanjutan dan mampu memahami serta hidup bersama dengan masalah pembangunan. Sidang Pleno di Prapat telah memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan dengan tepat arah dan problem pembangunan di Indonesia. Disadari pula, bagaimanapun terdapat faktor nonekonomi yang jika diabaikan dapat menyebabkan kegoncangan dalam perencanaan ekonomi. Faktor-faktor keadilan sosial, manajemen, kontrol, perbaikan, dan ketangguhan bangsa, layak mendapat perhatian para perencana ekonomi.

Sidang Pleno menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun akan meningkatkan rata-rata per kapita Indonesia dari 131 dolar AS pada 1973 hingga 245 dolar pada 1985. Hal itu disebabkan terutama oleh faktor jumlah penduduk dan fakta bahwa Indonesia baru memulai pembangunan pada 1969 ketika Pelita mulai dilaksanakan. Konsekuensinya Indonesia harus mengejar ketertinggalannya di wilayah yang cukup luas. Dalam dasawarsa berikutnya, jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dari 132 juta pada 1975 menjadi 167 juta pada 1985; berarti bertambah 35 juta jiwa.<sup>53</sup> Dengan pertumbuhan penduduk seperti itu, diperlukan perhatian besar terhadap masalah mendesak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pembangunan khususnya antara peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam. Selain itu, penting memberikan prioritas pada suplai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan air minum, pendidikan, kesehatan, fasilitas transportasi dan infrastruktur.

Penting diingat pola pembangunan ekonomi, arah investasi dan alokasi faktor produksi serta tingkat teknologi yang sebaiknya diarahkan pada pencapaian rata-rata pertumbuhan 8% per tahun selama satu dasawarsa (1975–85). Untuk mencapai rata-rata pertumbuhan itu

---

53 Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat 1977: 8.

dibutuhkan beberapa langkah. Pertama, memobilisasi tabungan melalui sistem perbankan sebagaimana melalui sistem pasar modal. Kedua, mengintensifkan pajak khususnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Ketiga, mengintensifkan tabungan usaha dengan memberikan premi kepada mereka yang berhasil mengumpulkan tabungan usaha-usaha besar. Keempat, secara sistematis berusaha keras mencegah penyalahgunaan uang, kebocoran dana, pemborosan modal, korupsi dan sebagainya. Kelima, memeriksa kecenderungan yang berlebihan dalam konsumsi. Hal itu harus dimulai dari para pemimpin pada semua tingkatan dalam masyarakat.

Sidang Pleno ISEI di Prapat juga memandang bahwa rendahnya pendapatan masyarakat telah membatasi mobilisasi sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, hal-hal seperti bantuan luar negeri dan modal asing tidak bisa dihindari. Hal paling penting adalah sumber-sumber daya asing seharusnya untuk memperkuat ekonomi nasional. Prinsip itu terjabarkan dalam kerangka umum kebijakan pembangunan yang secara sadar diarahkan menjadi kekuatan nasional, sebuah faktor dominan dalam rumah tangga ekonomi nasional. Dengan demikian, hal itu akan memperkuat keyakinan dan mengangkat harga diri sebuah bangsa yang merdeka.

Dalam konteks itu perlu diintensifkan upaya-upaya sektor swasta nasional. Peningkatan pendapatan negara telah memperbesar sektor pemerintahan, tapi hal itu tidak seharusnya memperlemah tujuan membina upaya-upaya sektor swasta nasional yang menjadi kendaraan untuk memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk meraih tujuan itu, penting diciptakan atmosfer dan situasi yang membuat semua pihak tanpa diskriminasi memiliki kesempatan yang sama memasuki lapangan bisnis sesuai dengan peraturan dan rasa keadilan. Dengan demikian perlu dibangun fasilitas institusi hukum dan sosial yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.



# Pembangunan

## Mencari Jalan Pemerataan

**P**rogram Pelita I (1969–74) yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru bertujuan memberikan landasan bagi pelaksanaan program pembangunan di perdesaan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi dan sekolah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian dilakukan dengan jalan pengadaan bibit tanaman, penyediaan pupuk serta bantuan teknis bagi petani. Selain perbaikan sektor pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, dalam Pelita I pemerintah berusaha memenuhi pengadaan perumahan rakyat melalui program Perumahan Umum Nasional dan perluasan lapangan kerja

Dalam Pelita II (1974–79), pemerintah memfokuskan pada upaya peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Upaya ini diiringi dengan program pengembangan sawah tadah hujan selain pemberian bantuan teknis dan peralatan pertanian bagi petani. Target utama Pelita II ialah tersedianya pangan dan sandang dengan mutu yang kian baik serta terjangkau oleh masyarakat. Pada Pelita II sektor pertanian diharapkan meningkat hingga 4,6% per tahun, sedangkan sektor-sektor industri 13%, pertambangan pada angka 10,1%; sektor perhubungan meningkat hingga 10%, sektor bangunan sekitar 9,2% dan sektor-sektor lain sekitar 7,7%.<sup>1</sup>

1 Capaian lain dari pelaksanaan Pelita (kurun 1967–91) ialah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dari hanya 7 dolar AS mencapai 570 dolar AS; seiring dengan itu angka penduduk miskin ikut berkurang. Pada 1976, jumlah penduduk miskin berkisar 40,09% dari total sekitar 135 juta jiwa, tapi pada 1987

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah inflasi yang dalam Sidang Pleno ISEI di Prapat mendapat perhatian para pembicara dan peserta. Menurut Sjahrir, ekonom senior, Orde Baru berhasil membangun berbagai bentuk transformasi struktural di bidang ekonomi sepanjang dua dasawarsa.<sup>2</sup> Bahkan menurut Sumitro Djojohadikusumo, selama pelaksanaan Pelita angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai kisaran 4,4% hingga 8,6%. Angka tertinggi justru dicapai pada pelaksanaan Pelita I yakni 8,6% sedangkan angka terendah pada pelaksanaan Pelita IV yang hanya mencapai angka 4,4%.<sup>3</sup> Secara umum laju pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai selama lebih dari dua dasawarsa Pemerintahan Orde Baru mencapai 6,02% dan merupakan angka yang sangat positif selama Pelita yang telah dan tengah berjalan. Kebijakan ekonomi Orde Baru tidak lepas dari pengaruh dan pandangan para pemikir dan ekonom ISEI yang juga menduduki jabatan strategis di bidang ekonomi dalam pemerintahan.

## **Orde Pembangunan**

Selama berlangsung mengemudikan pemerintahan, Orde Baru mengidentikkan diri sebagai “orde pembangunan” yang bermakna harus mampu menciptakan situasi politik yang kondusif bagi proses pembangunan. Sebaliknya, Orde Baru sebagai tatanan politik merupakan kesatuan struktur politik yang memancar ke arah pembaruan sosio-kultural, pembaruan struktur politik dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat korelatif fungsional, satu faktor dan lainnya saling bergantung dan saling memengaruhi.<sup>4</sup>

Kendati tidak sedikit pihak mengkritik rencana dan pelaksanaan pembangunan, tidak dimungkiri pembangunan pada masa

---

angka tersebut turun hingga menjadi 17,44% dari total 172 juta jiwa. Lihat: Lihat *Swasembada*, VII (9), Desember 1992, “Bonus Proyeksi Bisnis 1993.”

2 Sjahrir 1992: 140.

3 Djojohadikusumo 1989.

4 Departemen Pertahanan-Kepolisian 1975: 3.

pemerintahan Orde Baru memberikan perubahan dalam perekonomian yang dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Meski demikian, di sisi lain, proses pendewasaan berpolitik masyarakat kian melambat. Prioritas pembangunan ialah memaksimalkan produktivitas ekonomi dan karena itu memerlukan upaya serius untuk mempersempit ruang sosial dan meminimalisasi berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik sosial. Agar tujuan itu tercapai, pemerintah memerlukan aparat negara dengan rancangan kelembagaan yang mampu menjamin terciptanya mekanisme yang mampu meminimalisasi, bahkan meniadakan, konflik horizontal dan ideologis dengan mengutamakan konsensus dan ketertiban.

Melanjutkan pencapaian yang diraih pada Pelita II, pemerintah Orde Baru merancang Repelita III (1979–84) dengan penekanan pada tiga asas utama yakni distribusi hasil pembangunan yang lebih merata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pendapatan riil nasional pada Repelita III direncanakan meningkat 6,5% per tahun dengan percepatan pertumbuhan sektor industri dan transportasi. Selain itu, perincian sektoral anggaran pembangunan menunjukkan penurunan 14% pada sektor anggaran pertanian, dan peningkatan hingga 19% pada sektor industri, pertambangan dan energi. Sementara sektor transportasi dan pariwisata diharapkan mengalami peningkatan hingga 16%.

Hingga menjelang akhir Pelita III, sektor pertanian diperkirakan hanya akan mengalami sedikit kenaikan dari PDB. Berbagai kenaikan itu diharapkan dapat diiringi dengan pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan terutama pemerataan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain, di samping upaya perluasan lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah kemiskinan.

## **Pemerataan Pembangunan**

Pada 1979, ISEI menggelar Kongres VIII di Cisarua, Jawa Barat (15–17 Juni). Dalam pidato sambutan pembukaan, Presiden Soeharto kembali mengingatkan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.<sup>5</sup> Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa Repelita III tidak hanya melanjutkan pembangunan fisik seperti jalan, pelabuhan, irigasi, gedung sekolah, bangunan ibadah dan lain-lain, tapi juga menempatkan sarana pembangunan sebagai wahana bagi pemerataan pembangunan.

Terkait dengan keutamaan sarjana ekonomi, terutama yang tergabung dalam ISEI, Presiden menyatakan bahwa sarjana ekonomi memiliki bekal dan kemampuan berpikir rasional dalam memanfaatkan hal-hal langka untuk mencapai hasil sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sarjana ekonomi diharapkan dapat menerapkan metode berpikir ilmu ekonomi dalam berbagai masalah dan tantangan pembangunan lainnya, termasuk masalah-masalah nonekonomi.

Bagai gayung bersambut, Ketua Umum ISEI Emil Salim dalam pidato bertajuk “Tanggung Jawab Intelektual Sarjana Ekonomi dalam Pemerataan Pembangunan” antara lain mengatakan bahwa ISEI berkepentingan terus mengembangkan ilmu ekonomi karena hal itu merupakan wujud pembaktian diri sarjana anggota ataupun organisasi. ISEI menampilkan wajah kesarjanaan anggotanya yang tidak hanya berilmu tapi juga bertanggung jawab secara intelektual. Dikatakan selanjutnya bahwa sarjana ekonomi tidak tumbuh dalam kehampaan sosial, tapi hidup di tengah-tengah dan sebagai bagian dari masyarakat sehingga merupakan keharusan baginya untuk mengembangkan dan mengabdikan ilmunya sejalan dengan keperluan masyarakat. Perlu ditumbuhkan sosok sarjana ekonomi yang mampu menggunakan peralatan analisa bagi peningkatan produksi fisik dan

5 Prijono, dkk. 1981: 3.



Emil Salim dan Mohammad Hatta sekitar tahun 1971 | Sumber: Tempo

membangkitkan motivasi masyarakat untuk maju ke tingkat hidup yang lebih manusiawi.

Emil Salim menggarisbawahi soal kebijakan pembangunan dan pemerataan yang harus ditempuh melalui berbagai langkah. Pertama, pengalihan sumber alam disertai usaha penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Kedua, kesempatan memperoleh aset atau modal bagi kelompok masyarakat miskin. Ketiga, usaha meningkatkan kemampuan dan membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan. Keempat, pembangunan sosial mencakup kesehatan, perumahan, air minum dan sebagainya, serta menarik kelompok penduduk miskin dalam perikehidupan manusiawi. Menutup pidatonya, alumnus Berkeley itu mengulang kembali komitmen ISEI pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan melibatkan diri dalam gerakan besar pemerataan hasil pembangunan dan menghalau kemiskinan di Tanah Air.

Sementara itu, Ketua Kehormatan ISEI Mohammad Hatta mengamanatkan bahwa tugas terpenting dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ialah menjalankan peraturan Pasal 33 yang berkaitan dengan politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Hatta kembali menegaskan pentingnya mempelajari Pasal 33 tersebut, bahwa masalah nyata yang diurusnya adalah politik perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak dan bumi serta air dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut mantan Wakil Presiden pertama itu, cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 adalah meningkatkan kegiatan produksi semaksimal mungkin oleh pemerintah dengan bantuan modal luar negeri. Apabila rencana tersebut tidak berjalan, patut diberikan kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan pemerintah terutama soal jaminan agar kekayaan alam Indonesia seperti hutan dan kesuburan tanahnya tetap terpelihara. Tujuannya, modal asing tersebut dapat dimanfaatkan dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mengentaskan masalah pengangguran.

Mengenai pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia, Hatta mengingatkan berkali-kali agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun regulasi yang ditujukan kepada pengusaha asing pemegang konsesi eksploitasi hutan untuk selalu memperbarui kesuburan tanah dan hutan yang ditebang. Setiap batang pohon harus diganti dengan sedikitnya menanam tiga pohon baru. Di Kalimantan Timur, Hatta memberi contoh kasus, pemegang konsesi dibiarkan memabat hutan tanpa kendali; begitu pula di Riau ada pemegang konsesi meninggalkan wilayah konsesinya sebelum habis masa

---

6 Embrio gagasan ini pernah disampaikan Hatta dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta (1946); lihat kembali Bab 1 buku ini.



Mohammad Hatta sekitar tahun 1947 | Sumber: KITLV

berlakunya tanpa hirau pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan.

Dalam makalahnya bertajuk “Sistem Ekonomi Pancasila” yang disampaikan pada kongres di Cisarua, Emil Salim menyatakan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto melainkan harus pula memperhatikan dimensi kuantitatif dan kualitatif yang dijalankan. Pemerataan hasil pembangunan penting sebagai sasaran, tapi penting pula diingat bahwa cara pelaksanaan pembangunan juga harus mengandung unsur pemerataan dalam dirinya. Dengan begitu, cara masyarakat membangun tecermin dari sistem ekonomi yang ingin ditegakkan. Seiring dengan meningkatnya keinginan membangun yang semakin beragam dan bermakna kualitatif, semakin banyak pula masyarakat yang menaruh minat terhadap sistem ekonomi apa yang patut

dikembangkan di Indonesia. Dijelaskan, pembangunan ekonomi adalah hasil usaha penggabungan berbagai faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan. Laju pembangunan seiring sejalan dengan perkembangan berbagai faktor produksi. Semakin banyak berhasil faktor-faktor itu diolah dalam kegiatan ekonomi, semakin meningkat pula hasil pembangunan.

Melihat kembali ke belakang, Emil Salim menjelaskan bahwa selama lima puluh tahun terakhir, masyarakat Indonesia mengalami kegoncangan cukup besar dalam sistem ekonomi. Sebelum Perang Dunia II, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal sehingga praktis semua kegiatan ekonomi berada di tangan swasta terutama pada sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan pertambangan. Selain itu, pihak swasta mendominasi sektor produksi dan jasa yang merupakan hajat hidup orang banyak termasuk listrik, perusahaan kereta api, dan perbankan berikut pengendalian bank sentral. Di sisi lain, pemerintah membatasi diri pada fungsi tradisonalnya yakni sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban di samping membangun prasarana ekonomi yang tidak terlalu menarik bagi pihak swasta seperti jalan, jembatan dan pelabuhan. Menurut Emil Salim, sistem ekonomi pasar saat itu tidak jauh beda dengan sistem ekonomi liberal yang dianut masyarakat di Negeri Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi tersebut di Hindia Belanda sesuai dengan sistem yang berkembang di negara induknya.

Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, para pemimpin pergerakan nasional telah mengembangkan berbagai ide tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun setelah Indonesia merdeka. Saat itu, gagasan para pemimpin pergerakan umumnya mengarah pada paham sosialisme, baik sosialisme demokrat maupun sosialisme Marxis sebagai antitesis terhadap sistem ekonomi liberal. Kendati banyak tokoh pergerakan menimba ilmu di luar negeri, namun paham pemikiran tersebut tidak diambil alih begitu saja melainkan tetap disaring oleh jiwa nasionalisme yang kuat. Menurut Emil Salim, gagasan dan pemikiran ekonomi yang hidup di Tanah Air memiliki



Arifin Siregar Ketua Umum ISEI 1979 - 1987 | Sumber: Tempo

ciri khas tersendiri seperti konsepsi yang mendasari lahirnya sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kongres ISEI di Cisarua juga memilih ketua umum pengganti Emil Salim yang telah selesai masa kepengurusannya. Terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum baru (periode 1979–82) adalah Arifin Mohammad Siregar—ketika itu ia sedang menjabat sebagai salah seorang direktur di Bank Indonesia. Awalnya, doktor ekonomi lulusan Universitas Munster, Jerman Barat (1960), itu enggan menerima posisi ketua umum tersebut meski atas permintaan Widjojo Nitisastro dan Emil Salim lantaran kesibukan kerjanya di Bank Indonesia. Namun, khususnya terhadap Widjojo, Arifin menaruh respek tinggi sebab ekonom senior itulah yang selalu memberi dorongan semangat kepada para ekonom muda agar ikut berkiprah dalam pembangunan bangsa. Seperti tak bisa mengelak, Arifin akhirnya “dengan berat hati” menerima permintaan menjadi nakhoda baru ISEI.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Autobiografi Siregar 2017: 127–8.

Bagi ISEI, terpilihnya Arifin Siregar sebagai ketua umum tentu diakreditasi positif seperti halnya pimpinan lain sebelumnya. Lelaki kelahiran kampung Sidodadi di Medan, Sumatera Utara (1934), itu awalnya berkarier di luar negeri selepas studinya; antara lain sebagai ekonom di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Beirut, Lebanon; pindah ke kantor IMF sejak 1965 hingga tujuh tahun kemudian—ia orang Indonesia pertama yang secara personal melamar bekerja sebagai profesional di lembaga keuangan internasional tersebut. Tugas terakhirnya di IMF adalah sebagai *resident representative* di Laos, Asia Tenggara. Kembali ke Tanah Air pada 1971, Arifin bekerja di Bank Indonesia hingga terpilih menjadi Gubernur bank itu (1983–88); selanjutnya ia menjabat Menteri Perdagangan (1988–93). Di pengujung kariernya, Arifin diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (1993–97).

## **Deregulasi dan Devaluasi**

Sebagai pimpinan ISEI, Arifin Siregar kerap menyarankan kepada pemerintah agar menerbitkan kebijakan paket deregulasi. Pasalnya, menurut penilaiannya, banyak regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah ternyata justru menghambat kegiatan dunia usaha. Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada Juni 1983 (lazim disebut singkat Pakjun), sebagai contoh, pada dasarnya bertujuan mendorong ekspor selain minyak dan gas. Hal itu merupakan tindakan antisipatif pemerintah akibat menurunnya pemasukan atau devisa Indonesia dari kedua sektor tersebut.

Sejak 1974 hingga 1981, minyak bumi merupakan sektor andalan ekspor Indonesia yang menyumbang devisa terbesar. Pendapatan besar dari sektor itu tidak lepas dari meningkatnya harga minyak bumi Indonesia di pasaran internasional. Meningkatnya harga minyak bumi itu disebabkan oleh penerapan embargo minyak anggota negara-negara pengekspor minyak, Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), terutama negara-negara Arab pada 1973 terhadap negara-

negara Barat, Amerika Serikat dan Jepang. Negara-negara tersebut mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung dalam Perang Yom Kippur. Selain faktor perang, kenaikan harga minyak juga disebabkan oleh meletusnya Revolusi Iran yang dimotori kaum ulama garis keras pada 1978. Revolusi tersebut membuat Shah Reza Pahlevi, penguasa Iran yang didukung Amerika Serikat, terguling dari kekuasaannya.<sup>8</sup>

Setelah mendapatkan keuntungan karena situasi memanas di Timur Tengah, harga minyak bumi mengalami penurunan memasuki tahun 1982. Menurunnya harga minyak bumi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain, penggunaan energi alternatif oleh negara-negara yang terkena embargo minyak; pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat krisis energi 1979 yang mengakibatkan resesi ekonomi pada 1982. Resesi tersebut terutama melanda negara-negara maju yang mengakibatkan menurunnya permintaan minyak bumi dari negara-negara tersebut. Di sisi lain, negara-negara anggota OPEC tetap mempertahankan tingkat pasokan produksi pada 1986. Situasi itu mendorong terjadinya kelebihan suplai minyak bumi di pasaran dunia disusul meningkatnya produksi minyak bumi di negara-negara non-OPEC terutama Meksiko dan sejumlah negara Eropa. Jatuhnya harga minyak bumi berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga titik terendah yakni 2,3% pada 1982.<sup>9</sup>

Kejatuhan harga minyak yang diikuti resesi ekonomi dunia sangat memengaruhi perekonomian Indonesia termasuk program-program Pelita III. Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pemasukan utama negara untuk membiayai pembangunan. Guna mendukung sektor nonmigas menjadi sektor utama dalam mengatasi berkurangnya pemasukan negara akibat jatuhnya harga minyak bumi dan resesi ekonomi dunia serta menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah harus segera mengambil kebijakan di bidang moneter yakni mengatur peredaran uang dan tingkat bunga

---

8 Abdullah dan Lopian (ed.) 2012: 15, Jilid 8.

9 Djiwandono 2006: 22.



Arifin Siregar dan Sumitro Djojohadikusumo dalam sebuah acara Seminar ISEI (2000) | Sumber: Tempo

bank. Kebijakan itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral pemegang otoritas moneter di Indonesia.<sup>10</sup> Kendati dalam bayang-bayang penurunan laju pertumbuhan, ekonomi Indonesia periode 1981–85 justru mengalami kenaikan signifikan. Hal itu mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan meliputi devaluasi Rupiah, deregulasi, pengetatan pengeluaran pemerintah dan mendorong ekspor non-migas. Deregulasi, juga disarankan ISEI, dan penghematan pengeluaran pemerintah memberi peluang kepada sektor swasta untuk ambil peran dalam pembangunan.

Dengan diberlakukannya Pakjun 1983, diharapkan bank-bank di Indonesia terdorong menjalankan prinsip manajemen berorientasi pasar. Itu sebabnya mengapa Pakjun kerap disebut sebagai deregulasi perbankan yang berisi, antara lain, pelepasan pagu/batas tertinggi kredit; pembebasan suku bunga perbankan; peningkatan suku bunga

<sup>10</sup> Abdullah dan Tantri 2014: 105.

Tabungan Pembangunan Nasional; tetap berlakunya pagu tingkat dan kredit likuiditas Bank Indonesia untuk sektor yang menjadi prioritas dan kelonggaran atas pajak deposito. Pakjun 1983 merupakan deregulasi pertama yang memberi keleluasaan kepada bank dalam memberikan pelayanan sekaligus mengurangi campur tangan Bank Indonesia dalam implementasi kredit. Pagu kredit yang diberikan untuk bank atau variabel kuantitas diganti variabel harga dengan memberikan kebebasan bagi bank untuk menentukan suku bunganya sendiri. Dengan demikian, isi Paket Kebijakan Juni 1983 berkenaan dengan deregulasi untuk memberi kebebasan lebih kepada bank.

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Arifin Siregar menegaskan perlunya meninjau kembali semua kebijakan moneter. Ketika harga minyak bumi rata-rata turun lebih dari 5 dolar AS dan cadangan devisa turun hingga sekitar 3 miliar dolar AS, maka para pengelola bank harus berpikir keras termasuk harus berunding lebih giat untuk mencari pinjaman komersial dari luar negeri. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Rachmat Saleh, Bank Indonesia berhasil mendapat pinjaman sebanyak 1 miliar dolar AS dari perbankan internasional yang dipimpin lembaga keuangan Morgan Guaranty Trust di New York.

Dalam masa kepemimpinan Arifin Siregar, Bank Indonesia masih memerlukan tambahan pinjaman paling sedikit 1,5 hingga 2 miliar dolar AS. Menurunnya harga ekspor minyak bumi Indonesia membuat target penerimaan Pajak Perseroan Minyak (PPM) sebesar 8,8 triliun Rupiah tidak mungkin tercapai. Dalam APBN 1983/84, target PPM itu ditujukan pada produksi rata-rata dalam satu hari sebesar 1,4 juta barel, 900 ribu di antaranya diekspor dengan harga ekspor rata-rata setahun mencapai 34 dolar AS per barel. Walau demikian, pembeli minyak Indonesia di luar negeri hanya mampu menampung sebanyak 525 ribu barel sehari.<sup>11</sup> Tampaknya, hal itu membuat Arifin Siregar menilai perlunya meninjau kembali semua kebijakan moneter di Indonesia. Banyak pengusaha saat itu yakin akan terjadi devaluasi.

11 Pusat Data dan Analisa Tempo 2020: 41–3.

Pemerintah melakukan kebijakan devaluasi pada 30 Maret 1983 dan 12 September 1986. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sejak Indonesia merdeka hingga 12 September 1986, pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan devaluasi sebanyak enam kali (lihat Tabel).

Tabel Kebijakan Devaluasi

No.	Periode	Perubahan
1	20 Maret 1950 ( <i>sanering</i> ); dikenal dengan sebutan Gunting Sjafruddin	Nilai uang dipotong atau diturunkan menjadi setengahnya
2	13 Desember 1965 ( <i>sanering</i> )	Rp 1.000 menjadi Rp 1
3	23 Agustus 1971 (devaluasi 10%)	USD 1 = Rp 378 menjadi USD 1 = Rp 415
4	15 November 1978 (devaluasi 50,6%)	USD 1 = Rp 415 menjadi USD 1 = Rp 625
5	30 Maret 1983 (devaluasi 38%)	USD 1 = Rp 702 menjadi USD 1 = Rp 970
6	12 September 1986 (devaluasi 45%)	USD 1 = Rp 1.134 menjadi USD 1 = Rp. 1.644

Sumber: *Republika*, 14 Januari 1999.

Sejak awal 1983, terdapat tujuh kelompok kebijakan telah diambil pemerintah di bidang ekonomi. Pertama, kebijakan devaluasi 30 Maret 1983 dan penerapan devisa sistem nilai tukar mengambang terkendali. Kedua, penjadwalan kembali sejumlah proyek pembangunan besar yang menggunakan banyak komponen impor dengan tujuan penghematan devisa. Ketiga, deregulasi perbankan yang melepaskan tingkat bunga kredit kepada kekuatan pasar dan bukan lagi melalui penetapan pemerintah. Keempat, penerbitan undang-undang perpajakan baru yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan

bangunan sepanjang 1984 hingga 1986. Kelima, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang penyederhanaan ketentuan dan peraturan di lingkungan departemen dan lembaga pemerintah. Keenam, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 untuk menekan ekonomi biaya tinggi; fungsi dan peran Bea Cukai ditekan hingga mendekati titik nol, sementara fungsi pemeriksaan barang dalam lalu lintas ekspor-impor diserahkan kepada SGS; penyederhanaan juga dilakukan dalam lalu-lintas barang antarpulau. Ketujuh, kebijakan Paket 6 Mei 1986 untuk mendorong ekspor nonmigas dan sektor penanaman modal di samping kemudahan melakukan impor bahan baku dan penolong untuk barang ekspor yang bisa masuk tanpa bea.<sup>12</sup> Paket kebijakan itu juga bertujuan memberi kemudahan bagi para eksportir dan menyediakan kawasan berikat (*bonded zone*) guna menekan biaya.<sup>13</sup>

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi 12 September 1986, masyarakat ekonomi menunggu tindak lanjut kebijakan yang diumumkan pada 25 Oktober 1986 tersebut.<sup>14</sup> Pada dasarnya, kebijakan devaluasi 12 September terdiri dari empat pokok penting yakni kebijaksanaan penurunan biaya produksi; efisiensi perlindungan produksi dalam negeri; perluasan dan penyempurnaan fasilitas *swap*; dan kebijakan baru dalam bidang penanaman modal.

## **Kritik dan Apresiasi**

Di Cipanas, Jawa Barat, ISEI menyelenggarakan Kongres IX (27 Juli 1983). Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ali

12 *Mediakarya*, 31–52, 1986.

13 *Tempo*, 17 Mei 1986.

14 Sebelum dikeluarkan kebijakan devaluasi 12 September 1986, Presiden Soeharto bersama Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Ali Wardhana, dan Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar membahas perkembangan moneter pada 10 Maret 1986. Menurut Arifin Siregar, saat itu tidak alasan bagi pemerintah untuk melakukan devaluasi Rupiah mengingat posisi cadangan devisa Indonesia cukup kuat yakni sekitar 10,7 miliar dolar AS selain dana cadangan (*standby loan*) pinjaman luar negeri berjumlah 2,558 miliar dolar AS. Lihat: Dwipayana dan Sjamsuddin (ed.) 439–40.



Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro mendapat penghargaan Hatta dari ISEI. | Sumber: Repro "ISEI the First 50th Years"

Wardhana, Presiden Soeharto menekankan bahwa Kongres ISEI kala itu memiliki arti khusus karena diselenggarakan jelang akhir Repelita III sekaligus menyongsong Repelita IV. Saat-saat tersebut kian penting karena tiang-tiang kerangka landasan yang memadai harus segera ditegakkan baik di bidang industri maupun pertanian serta bidang lainnya. Selanjutnya, Presiden menyatakan bahwa dalam situasi resesi ekonomi dunia, Indonesia harus dapat mempertahankan momentum pembangunan. Tanpa kemampuan itu, stabilitas nasional, ketenangan sosial dan kriminalisasi tidak akan terpengaruh.

Dua ekonom senior, Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisaastro, tampak hadir dalam Kongres di Cipanas. Seperti sebuah reuni, kehadiran keduanya memberi kegembiraan bagi pengurus pusat ISEI ataupun peserta kongres pada umumnya. Bersama kedua pendekar ekonomi tersebut, berbagai masalah yang tengah dihadapi pemerintah dan rakyat Indonesia pada aras yang luas intensif didiskusikan.

Menurut Ketua Umum ISEI Arifin Siregar, salah satu hal yang menarik dari Kongres ISEI adalah pembahasan teori ekonomi, bukan hanya tentang soal-soal aktual seperti pada kongres-kongres sebelumnya. Arifin berujar bahwa tidak tepat apabila “ekonom ISEI” beranggapan teori-teori yang pada umumnya dikembangkan oleh para sarjana ekonomi di negara-negara maju dapat diterapkan begitu saja di Indonesia karena hampir semua teori ekonomi muncul sebagai jawaban atas masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat pada masanya. Arifin mengaitkan perkembangan dan penerapan ilmu ekonomi sebagai solusi untuk memecahkan berbagai masalah dengan situasi ekonomi dunia yang saat itu sedang dilanda resesi yang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan berbeda sebelumnya, Emil Salim (kala itu Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) dalam sebuah wawancara dengan *Prisma* mengenai perkembangan dan penerapan ilmu ekonomi, menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan kepada ilmu ekonomi.<sup>15</sup> Kritik tersebut bersumber pada teori-teori dan pendekatan yang terus-menerus ia ajarkan dan gunakan. Sebagai seorang ekonom, Emil Salim melihat tidak ada satu pun yang salah dalam teori ekonomi. Guru besar FEUI itu menyatakan bahwa ekonom hanyalah orang yang menangkap apa yang menjadi keinginan masyarakat, mempelajarinya dengan keseluruhan etik profesinya dan obyektivitas ilmunya serta melahirkan rumusan. Menurutnya, ekonom tidak pernah menyodorkan pilihannya untuk diterima masyarakat dan karena itu pula tidak perlu menyesali ilmu dan teori ekonomi.

---

15 Emil Salim, “Bukan Kesalahan Ilmu Ekonomi,” dalam *Prisma*, Januari 1980: 56.

Lebih lanjut, Emil Salim menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan manusia adalah fungsi dari konsumsi yang pada gilirannya adalah fungsi dari produksi yang dipengaruhi oleh nilai tukar atau harga. Model ekonomi tersebut menjelaskan hubungan kaitan antara variabel satu dengan yang lain dan hubungan fungsional, tanpa besar/kecil nilai yang diberikan kepada variabel dan berlaku secara universal di semua negara baik kapitalis, komunis, sosialis maupun fasis. Dalam memberikan nilai terhadap variabel tersebut harus diperhatikan lingkungan yang meliputi variabel itu. Emil Salim kemudian memberi contoh nilai variabel konsumen berdasarkan abstraksi kenyataan dari masyarakat penganut ajaran Mahatma Gandhi yang sangat berbeda dengan nilai variabel masyarakat kapitalis. Hal itu bermakna bahwa bobot asumsi dan hasil abstraksi dalam ilmu ekonomi tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa, melainkan berlangsung dalam masyarakat yang hidup dengan kebudayaan, ideologi, tradisi dan sistem nilai tertentu. Dengan demikian bobot asumsi dan kadar abstraksi itu bisa memberikan hasil yang berlainan meski menggunakan model teori yang sama.

Perkembangan ilmu ekonomi yang dinamis tidak lepas dari pengamatan pengurus ISEI yang sejak awal pembentukannya telah mencanangkan ikut berkontribusi secara akademis di tengah masyarakat dan di perguruan tinggi. Upaya menyumbang gagasan atau pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu ekonomi pada masa kepemimpinan Arifin Siregar diwujudkan nyata melalui peluncuran majalah *Forum Ekonomi* (mulai Desember 1981).<sup>16</sup> Penerbitan majalah ini bisa dilihat sebagai forum dialog sekaligus alat komunikasi, baik antaranggota ISEI, maupun dengan masyarakat dan pemerintah guna menyebarkan ilmu pengetahuan ekonomi yang kian berkembang. *Forum Ekonomi* diasuh pakar ekonomi antara lain dan tak lain adalah Arifin M. Siregar sebagai pemimpin umum, dan Bachrawi Sanusi, pengamat energi, sebagai pemimpin redaksi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Kompas*, 9 Desember 1981.

<sup>17</sup> Edisi perdana *Forum Ekonomi* antara lain memuat tulisan para “empu”: Sumitro Djojohadikusumo, “Perekonomian Dunia Dewasa Ini dan Pengaruhnya terhadap

Pada masa kepemimpinan Arifin Siregar, ISEI memberi penghargaan kepada ekonom yang dinilai berjasa luar biasa dan berkontribusi besar dalam mendorong (ilmu) ekonomi Indonesia melalui program pemberian Penghargaan Hatta pada 1985.<sup>18</sup> Nama penghargaan itu dipilih untuk mengenang jasa almarhum Mohammad Hatta yang juga mantan Ketua Kehormatan ISEI. Selain sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, Hatta adalah ekonom senior yang banyak berjasa di bidang ekonomi sejak masa revolusi. Ia juga sosok yang dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengurus ISEI mengadakan pemilihan untuk menentukan tokoh yang akan ditetapkan sebagai penerima Piagam Penghargaan Hatta dengan penuh pertimbangan terhadap sejumlah kandidat yang kesemuanya memiliki potensi. Setelah melalui timbangan mendalam bersama sesepuh ISEI, penghargaan pada kesempatan pertama diberikan kepada Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro.<sup>19</sup>

Penghargaan kepada Sumitro didasarkan kenyataan bahwa ekonom senior itu mumpuni dalam penguasaan teori dan berwawasan luas sebagai pemikir; berpengalaman sebagai pendidik dan pelaksana kebijakan serta pernah mendapat kepercayaan negara sebagai menteri pada dua departemen bidang ekonomi yaitu Departemen Perdagangan dan Industri serta Departemen Keuangan, selain sebagai Menteri Negara Riset Republik Indonesia. Di ranah internasional, Sumitro merupakan anggota *Group of Five Top Experts* yang membantu Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold dalam menyusun laporan *Commodity Trade and Economic Development*. Sebagai seorang pendidik, Sumitro berjasa besar dalam mendirikan dan mengembangkan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus menjadi dekan pertama di fakultas tersebut. Di sela-sela aktivitasnya dalam berbagai urusan

---

Perekonomian Indonesia"; Emil Salim "Ekonomi Orde Baru Hingga Kini"; Mohammad Sadli, "Beberapa Segi Masalah Energi: Global, Internasional dan Nasional"; Hidayat "Peranan dan Fungsi Pengusaha Kecil dalam Perekonomian Kota" dan tulisan lainnya.

18 *Kompas*, 28 Januari 1985

19 Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dalam *Forum Ekonomi* Edisi 16-26, 1985.

penting, Sumitro masih menyediakan waktu untuk menulis banyak buku, makalah dan artikel yang telah diterbitkan di dalam maupun di luar negeri.

Penghargaan kepada Widjojo Nitisastro dilandasi penilaian bahwa tokoh yang bersangkutan telah membuktikan diri sebagai perencana yang tangguh sekaligus pelaksana rencana yang konsisten. Tidak bisa dimungkiri, pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Repelita sejak 1966 hingga 1985 tidak lepas dari sumbangsih pemikiran dan dedikasi Widjojo. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai sosok ilmuwan dan pendidik yang setia pada integritas profesinya serta produktif menghasilkan berbagai karya dalam pengembangan disiplin ilmu ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Piagam Penghargaan Hatta diserahkan oleh Arifin Siregar, didampingi oleh Ibu Rahmi Hatta, langsung kepada Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro<sup>20</sup>

Dalam dua masa periode kepemimpinan Arifin Siregar sebagai ketua umum ISEI, berbagai kegiatan terutama sidang pleno dapat diselenggarakan dengan baik seiring dengan terjaganya hubungan baik ISEI dengan pemerintah serta situasi keamanan yang stabil selama pemerintahan Orde Baru.

## **Mendorong Ekspor Nonmigas**

Sidang Pleno ISEI di Batu, Malang (27–28 Maret 1985), memilih pokok bahasan tentang usaha-usaha mendorong ekspor nonmigas. Pokok bahasan itu merupakan tanggapan atas arahan Presiden Soeharto Ketika Pengurus ISEI menyampaikan laporan hasil Kongres IX di Cipanas sebelumnya (1983). Saat itu Presiden meminta kepada ISEI agar memperhatikan tiga sektor yang diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam proses pembangunan mendatang.<sup>21</sup> Pertama, mengingat luasnya batas wilayah Indonesia dalam rangka Wawasan

20 Penyerahan penghargaan berlangsung di Ball Room Hotel Hilton, Jakarta, pada 27 Januari 1985. Lihat Esmara 2000: 389.

21 Lihat Pengurus Pusat ISEI 1985: 1.

Nusantara perlu diperhatikan potensi hasil-hasil laut baik yang sedang maupun yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang. Kedua, potensi perkebunan Indonesia baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat perlu lebih dimanfaatkan. Ketiga, perlu diambil langkah-langkah untuk lebih mendayagunakan hasil-hasil kehutanan terutama kayu.

Ketiga bidang tersebut bersama dengan industri pengolahan berpotensi menjadi tulang punggung peningkatan ekspor nonmigas pada masa depan. Upaya peningkatan ekspor nonmigas bukan saja memiliki arti penting bagi penerimaan devisa untuk pembangunan tapi juga bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Selama Pelita IV (1984–89), pemerintah Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat terutama penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang diperkirakan akan bertambah sekitar sembilan juta orang. Selain itu, bidang ekspor nonmigas diharapkan menjadi salah satu bidang ekonomi untuk memenuhi tantangan tersebut mengingat bidang itu dalam banyak hal bersifat padat karya. Pemerintah Indonesia berharap ekspor nonmigas dapat ditingkatkan seiring dengan menurunnya pemasukan negara dari sektor migas sebagai dampak menurunnya harga minyak dunia pada 1982.

Hal itu membuat pembahasan mengenai upaya untuk meningkatkan usaha dan ekspor sektor nonmigas menjadi lebih penting terlebih dalam beberapa tahun mendatang terlihat bahwa tidak banyak yang dapat diharapkan dari sektor migas untuk peningkatan nilai ekspor. Secara umum para peserta Sidang Pleno menyadari berbagai kesulitan yang tengah dihadapi. Namun, belajar dari pengalaman, ISEI optimistis Indonesia berkemampuan mengatasi pelbagai kesulitan tersebut.

Sidang pleno juga mendiskusikan berbagai hal yang menghambat berkembangnya sektor nonmigas di antaranya masalah dan penanganan ekonomi biaya tinggi. Pembahasan aspek itu terlihat berlaku umum pada hampir semua bidang usaha. Ekonomi biaya



Arifin Siregar dengan J.B. Sumarlin dalam sidang bidang ekonomi, keuangan dan industri di Jakarta (1983) | Sumber: Tempo

tinggi mengakibatkan hasil produksi menjadi mahal dan selanjutnya berdampak pada sulitnya bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri tanpa banyak perlindungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi dan fasilitas lainnya untuk melakukan ekspor. Perlindungan pemerintah yang diharapkan terkait barang-barang substitusi impor adalah bea masuk yang tinggi, kuota maupun larangan impor serta pemberian jaminan pasaran dengan harga yang ditentukan.

Tingginya biaya produksi yang dikenal dengan gejala ekonomi biaya tinggi disebabkan oleh beberapa hal di antaranya kelemahan dalam pengelolaan perusahaan sehingga tingkat efisiensi yang optimal tidak tercapai. Selain itu terdapat birokrasi yang kompleks berupa prosedur pengurusan yang terlalu panjang dan banyak perizinan yang diperlukan. Kondisi tersebut semakin diperberat dengan berbagai pungutan resmi dan tidak resmi selain banyak peraturan yang kurang jelas. Ekonomi biaya tinggi juga disebabkan oleh perlindungan atau proteksi yang berlebihan dan tanpa batas terhadap bidang-bidang industri dan sejumlah kegiatan tertentu di dalam negeri. Perlindungan

tersebut biasanya berupa pemberlakuan bea masuk yang tinggi, pembatasan impor atau larangan impor untuk barang-barang sejenis dan pasaran yang dijamin dengan harga yang ditentukan.

Di sisi lain terdapat industri yang telah berhasil dan berkembang setelah melalui tahap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang semakin berkurang di antaranya adalah industri pupuk dan beberapa jenis industri tekstil. Industri pupuk bahkan telah mampu bersaing di pasar luar negeri karena memiliki keunggulan komparatif terutama dalam bentuk tersedianya bahan baku utama yakni gas alam. Untuk meningkatkan dan memperluas keberhasilan tersebut, ISEI berpandangan perlu meninjau ulang sejumlah hal terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri baik untuk kepentingan konsumen dalam negeri maupun untuk meningkatkan ekspor non-migas. Dengan demikian permasalahan yang mengemuka ialah apakah industri-industri dan kegiatan yang mendapat perlindungan merupakan industri yang pada waktunya dapat beroperasi dengan efisien sehingga dapat bersaing dengan produksi negara-negara lain tanpa memerlukan perlindungan.

## **Sidak dan Gebrak**

Setelah tiga tahun memimpin ISEI, Arifin Siregar berkali-kali meminta anggota ISEI untuk mengadakan pemilihan ketua umum yang baru. Namun, rupanya permintaan itu seperti “tidak didengar” para anggota sehingga Arifin terus melanjutkan masa kepemimpinannya hingga 1987. Hingga akhirnya pada tahun tersebut Arifin tidak lagi bersedia dicalonkan kembali sebagai ketua umum ISEI. Ia mengundurkan diri setelah memimpin ISEI selama delapan tahun dan mengusulkan kepada Emil Salim yang saat itu merupakan senior ISEI untuk mencalonkan J. B. Sumarlin sebagai kandidat ketua umum yang baru. Usul tersebut diterima sehingga Sumarlin terpilih sebagai Ketua Umum ISEI yang baru melalui Kongres X yang diselenggarakan di Denpasar, Bali (7–9 September 1987).



J.B. Sumarlin (dua dari kiri) Ketua Umum ISEI 1987 - 1993 | Sumber: Empat Dasawarsa FEUI (2000)

Di lingkaran “ekonom pembangunan” khususnya, Sumarlin tentu bukan sosok baru. Setelah lulus dari FEUI (1958), ia langsung menjadi asisten dosen (kemudian guru besar) di Kampus Salemba itu. Kemudian, ia menempuh jenjang Master di University of California, Amerika Serikat (1960); sedangkan gelar doktornya diraih dari University of Pittsburgh, Pennsylvania (1968). Kembali ke Tanah Air, Sumarlin ditunjuk sebagai staf ahli Menteri Keuangan Ali Wardhana; Deputy Ketua, kemudian Wakil Ketua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1973). Jabatannya di kabinet ialah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Ketua Bappenas (1983–88), Menteri Keuangan (1988–93), selain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *ad interim* (1973/74; dan 1985). Terakhir, Sumarlin

menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (1993–98) sebelum benar-benar pensiun dari dunia birokrasi.

Sumarlin dikenal tegas terhadap pejabat yang melakukan penyelewengan sehingga dijuluki “Harun Al Rasyid” karena kerap menyamar memantau langsung kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Gemar bermain tenis, pakar kebijakan publik kelahiran Nglegok, Blitar, Jawa Timur (1932), itu juga mendapat julukan “menteri sidak” karena kerap melakukan inspeksi mendadak selama menjadi Ketua Opstib (Operasi Tertib) dalam kedudukan sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Saat terpilih menjadi Ketua Umum ISEI, Sumarlin tengah menjabat sebagai Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan *ad interim* karena saat itu Menteri Keuangan Radius Prawiro mengikuti sidang IGGI di Amsterdam. Pada waktu itu pula, Indonesia mengalami gejolak moneter yang, apabila tidak segera ditangani, akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Pembelian dolar dan pelarian modal meningkat yang segera mengingatkan trauma masyarakat pada devaluasi.

Sumarlin segera bertindak, setelah melaporkan situasi kepada Presiden, melalui kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin I. Kebijakan tersebut mengacu pada penarikan dana sekitar 800 miliar Rupiah dari empat BUMN yakni Taspen, PLN, Pusri, dan Pertamina. Penarikan dana dari peredaran tersebut kemudian dikonversikan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kebijakan itu dinilai sebagai tindakan kuratif sekaligus membuyarkan harapan para spekulan valuta asing yang ingin meraup laba dari devaluasi Rupiah. Dengan begitu Sumarlin berhasil mengubah arus keluarnya uang menjadi masuk kembali.<sup>23</sup> Selain itu, Gebrakan Sumarlin I berhasil meng-SBI-kan dana giro dan deposito sejumlah BUMN sebesar 1,3 triliun Rupiah hanya dalam waktu dua pekan.<sup>24</sup> Melalui cara itu, uang

22 Departemen Keuangan Republik Indonesia 1991: 69,

23 Departemen Keuangan Republik Indonesia 1991: 70.

24 Pusat Data dan Analisa Tempo 2019: 19.



Marzuki Usman (kiri), Prijono Tjiptoherianto (tengah), dan Sumitro Djohodikusumo (kanan) dalam sebuah kongres ISEI | Sumber: Koleksi ISEI

yang beredar mendadak ditarik. Saat itu dana-dana bank pemerintah lebih banyak didepositokan di Singapura.

Pada 1990, ujian kembali datang. Kali ini disebabkan inflasi yang mencapai 9,5% setelah peluncuran Paket Oktober (Pakto). Jumlah kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan naik hingga 200% namun kegiatan investasi riil hanya naik sebesar 33%.<sup>25</sup> Terlebih lagi inflasi belum sempat dihentikan sehingga pada awal 1991 muncul isu akan terjadi devaluasi seiring dengan makin meredanya Perang Teluk dan prediksi akan turunnya harga minyak. Guna mengurangi jumlah uang yang beredar dan meredam spekulasi valuta asing, Sumarlin kembali mengebrak. Dalam Gebrakan Sumarlin II, ia menarik dana dari 12 BUMN senilai 8 triliun rupiah, diikuti dengan kebijakan meng-SBPU-kan 75% dari dana tersebut sehingga valuta asing kembali

<sup>25</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo 2019: 19.

teredam. Seperti halnya kebijakan uang ketat saat Gebrakan Sumarlin I, suku bunga bank kembali meningkat. Menurut Sumarlin, gebrakan keduanya lebih sebagai upaya pencegahan, berbeda dari gebrakan pertama yang bersifat penyembuhan.

Di ISEI pun, tak lama setelah terpilih sebagai ketua umum, Sumarlin “menggebrak” kembali terhadap sasaran lain. Ia melakukan pembenahan organisasi cukup signifikan, antara lain mengadakan kantor sekretariat tetap ISEI Pusat. Menurut Sumarlin—dikutip oleh Prijono Tjiptoherijanto, Sekretaris Umum ISEI—suatu organisasi baru bisa berkembang jika memiliki sekretariat tetap dan staf tetap.<sup>26</sup> Pada waktu itu, lantaran belum punya kantor sendiri, sekretariat ISEI berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pernah menumpang di sebuah ruangan di Kampus FEUI Jalan Salemba Raya karena Sumitro Djojohadikusumo, ketua pertama ISEI, waktu itu dosen di kampus tersebut. Pernah pula sekretariat ISEI “dititipkan” di rumah direktur bank swasta; lalu pindah lagi di sebuah ruangan kantor Bank Indonesia semasa kepengurusan Arifin Siregar yang juga Gubernur bank tersebut saat itu.

Akhirnya, pada 1990, Ketua Umum Sumarlin memutuskan membeli sebuah rumah berukuran cukup besar di Jalan Daksa, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai gedung kantor sekretariat ISEI. Semula, rumah itu merupakan rumah dinas milik Pertamina yang ditawarkan dijual kepada umum—terdapat empat unit rumah serupa di jalan tersebut. Sebelum resmi ditempati sebagai kantor pada 1991, rumah direnovasi pada beberapa bagian.<sup>27</sup> Di gedung sekretariat Jalan Daksa itu, Pengurus Pusat ISEI tidak berkantor sendirian melainkan berbagi dengan Pengurus ISEI Jakarta yang menempati satu ruangan di sudut lantai dasar gedung.

---

26 Wawancara dengan Prijono Tjiptoherijanto, Sekretaris Umum ISEI (1987–93), Jakarta, 4 Juni 2024.

27 Pada 2013, kantor ISEI praktis dibangun kembali pada masa kepemimpinan Darmin Nasution (2009–15). Jika semula berwujud rumah tapak satu lantai, bangunan itu dirombak menjadi dua lantai, plus satu ruangan terbatas yang menjadi lantai ketiga. Wawancara dengan Aviliani, Sekretaris Umum (2010–16), Jakarta, 21 Februari 2024.

## **Mengawal Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis**

Marzuki Usman lahir di Mersam (Mersang), Jambi pada 30 Desember 1943. Ia merupakan anak keempat dari pasangan H. Usman Abul dan Cholijah. Marzuki menyelesaikan seluruh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Pada awalnya, ia tidak pernah bercita-cita menjadi seorang ekonom dan lebih banyak menghabiskan masa kecilnya untuk mencari uang dari tumpangan perahu di Sungai Batanghari. Bahkan ia lebih tertarik untuk menjadi seorang dokter gigi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Marzuki mencoba untuk melanjutkan pendidikan ke fakultas kedokteran gigi namun ia tidak lulus seleksi untuk menempuh pendidikan di fakultas tersebut. Ia kemudian mengalihkan pilihan ke jurusan lain dan diterima untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Marzuki berhasil meraih gelar sarjana ekonomi pada 1969 dan mendapat tawaran dari Dekan FE UGM saat itu yakni Sukadji Ranuwihardjo untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di University of Philippines. Tawaran tersebut disambut Marzuki dengan antusias. Ia segera kembali ke kampung halamannya untuk memperdalam Bahasa Inggris. Warga di kampungnya tidak kalah bersemangat dan sangat bangga karena seorang putra daerah dari kampung mereka berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Mereka bahkan membantu menyiapkan bekal untuk Marzuki guna melanjutkan pendidikan di Filipina. Namun semangat untuk melanjutkan pendidikan tersebut untuk sementara tidak terwujud karena Sukadji kemudian menyampaikan pengumuman hasil seleksi dimana Marzuki dinyatakan tidak lulus sehingga batal untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Filipina.

Marzuki tidak putus asa. Kegagalan untuk melanjutkan pendidikan di Filipina tidak membuatnya patah semangat. Ia mengirimkan 40 lamaran kerja sekaligus ke sejumlah instansi dan perusahaan. Marzuki akhirnya diterima bekerja di Departemen Keuangan RI dan memulai karirnya di bidang pemerintahan sebagai staf



Marzuki Usman, Ketua Umum ISEI 1993 - 2000 | Sumber: Tempo

Direktorat Jendral Keuangan Departemen Keuangan. Setelah sekian tahun bekerja, ia kembali mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pasca sarjana. Berkat bantuan J.B. Sumarlin dan Ali Wardhana, Marzuki meraih beasiswa *Ford Foundation* untuk melanjutkan pendidikan di Duke University, Durham, North Carolina pada 1975. Tidak hanya peningkatan di jenjang pendidikan, karir Marzuki di Departemen Keuangan juga melesat. Setelah menjabat sebagai Direktur Investasi dan Kekayaan Negara, ia kemudian juga diangkat menjadi Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi di Direktorat Jendral Moneter pada 1977-1988. Marzuki kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) hingga tahun 1991.

### **Konferensi Usaha Kecil**

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberadaan usaha kecil, ISEI bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan The Asia Foundation menyelenggarakan Konferensi Nasional Usaha Kecil

dengan tema ‘Masalah-masalah di Seputar Usaha Kecil Indonesia’ di Cipanas (4–6 Agustus 1997).<sup>28</sup> Konferensi bertujuan membuka medium bagi pengusaha kecil menyuarakan berbagai masalah yang dihadapinya secara langsung dari pengusaha itu sendiri.

Dalam sambutan pembukaan konferensi, Ketua Umum ISEI Marzuki Usman menyatakan bahwa usaha kecil memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia, namun dalam menjalankan peran tersebut, usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala yang datang baik dari sisi internal maupun eksternal. Berbagai studi dan pengalaman empirik melaporkan bahwa kendala tidak saja berpotensi menghambat perkembangan usaha kecil, tetapi juga bisa mengurangi peran penting yang dapat dimainkannya.

Sementara itu, dalam kata pengantarnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Dewi Motik Pramono menyampaikan bahwa Kadin menyambut baik setiap upaya memajukan dunia usaha Indonesia, baik kecil, menengah maupun besar. Konferensi Nasional Usaha Kecil juga bisa dilihat sebagai upaya membuka jalan bagi kemajuan dunia usaha Indonesia khususnya usaha kecil. Sedangkan Stefan Pakulski, Direktur Proyek PPMD, The Asia Foundation, menjelaskan bahwa melalui proyek PPMD, The Asia Foundation telah mendukung pengembangan usaha dengan mempromosikan usaha kecil ke dalam kancah pengambilan keputusan kebijakan. Kegiatan yang diinisiasi dalam upaya ini meliputi pembiayaan riset, diseminasi, advokasi ataupun dialog kebijakan mengenai usaha kecil.

Kendala utama yang dialami banyak pengusaha kecil adalah keterbatasan modal khususnya modal kerja. Kesulitan lainnya menyangkut pemasaran dan distribusi; pemerolehan bahan baku dengan harga terjangkau dan berkualitas baik; keterbatasan sumber daya manusia; serta minimnya pengetahuan mengenai bisnis dan kurangnya penguasaan teknologi. Mengacu pada survei yang dikutip Tambunan, ternyata cukup banyak pengusaha kecil yang memiliki

28 ISEI 1998: i.

omset rata-rata tinggi yang menandakan bahwa pada tingkat tertentu mereka dapat dikategorikan sebagai *dynamic entrepreneurs*. Selain itu, peranan bank umum sangat besar sebagai salah satu sumber formal untuk dana investasi dan/atau operasi usaha.

Hal lain adalah tingkat pendidikan rata-rata pengusaha. Berdasarkan data di lapangan yang mengacu pada sejumlah *sample*, para pengusaha berpendidikan cukup tinggi atau setidaknya di atas tingkat sekolah dasar. Namun data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik atau banyak studi yang menunjukkan bahwa pada umumnya pendidikan pengusaha kecil di negara-negara berkembang adalah sekolah dasar. Selain masalah-masalah tradisional usaha kecil yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku, permodalan, pemasaran, dan lain-lain, ternyata infrastruktur dan birokrasi juga merupakan hambatan serius bagi banyak pengusaha kecil.

Persaingan menghadapi pengusaha besar menjadi persoalan tersendiri bagi pengusaha kecil. Peraturan mengenai larangan bagi pedagang eceran besar agar tidak masuk ke tingkat kabupaten pada kenyataannya tidak berjalan efektif. Sementara, dilihat dari struktur pasar, masalah usaha kecil sektor perdagangan terletak pada perbedaan struktur pasar *output* dan struktur pasar *input*. Di pasar *input*, yakni ketika mengambil barang, usaha kecil berhadapan dengan pasar yang memiliki struktur *oligopolistik* yakni pasar dengan sedikit penjual sehingga harga sangat ditentukan oleh penjual. Sebaliknya, ketika menjual barang di pasar *output*, usaha kecil menghadapi banyak pesaing dalam struktur pasar yang lebih kompetitif. Dalam situasi demikian, para pedagang kecil dipaksa menekan harga serendah mungkin agar tidak kalah bersaing dengan pedagang lain.



# Reformasi

## Memadamkan Krisis

**K**risis moneter yang melanda sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia berakibat pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Krisis mulai menimpa Indonesia sejak Juli 1997. Saat itu nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS didasarkan pada kebijakan mengambang terkendali yakni Rp 2.430,00 per 1 USD. Namun, situasi moneter Indonesia mulai mengkhawatirkan pada akhir Juli 1997 karena nilai tukar Rupiah kian melemah.

Guna mengamankan cadangan devisa, sejak 14 Agustus 1997 Bank Indonesia mengubah sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang bebas.<sup>1</sup> Perubahan sistem tersebut diikuti dengan kebijakan lain di bidang moneter. Menurut Wakil Ketua Umum ISEI Anwar Nasution yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia kala itu, kerangka dasar kebijakan ekonomi makro tidak berubah dalam mengatasi krisis 1997/98. Ia yang menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF atas nama Bank Indonesia, telah dihubungi tim IMF dan Bank Dunia, untuk membahas pokok-pokok kebijakan pemulihan ekonomi.<sup>2</sup> Terkait upaya pemulihan ekonomi, Anwar Nasution setuju menggunakan tiga pilar utama yakni kebijakan moneter, fiskal dan struktural.<sup>3</sup> Menurutnya, kebijakan moneter dan fiskal merupakan elemen utama

1 Masno M. 2021: 170.

2 Suhartono 2017: 101.

3 Suhartono 2017: 101.

pada sisi penawaran dalam perekonomian untuk memelihara stabilitas ekonomi, sementara kebijakan struktural merupakan kebijakan pada sisi penawaran untuk meningkatkan tingkat laju pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi modal swasta dan peningkatan efisiensi serta produktivitas perekonomian.

Menurut Anwar Nasution, terdapat dua elemen penting yang harus dilakukan dalam kebijakan moneter. Pertama, penggunaan sistem kurs devisa mengambang sebagai pengganti sistem kurs tetap sebelumnya. Sasaran utama kebijakan moneter Bank Indonesia dalam kurs devisa tetap ialah memelihara stabilitas kurs yang sudah ditetapkan. Upaya stabilisasi kurs dilakukan oleh Bank Indonesia melalui intervensi atau jual-beli mata uang asing di bursa valuta asing. Walau demikian, dalam sistem kurs mengambang, intervensi Bank Indonesia di bursa valuta asing hanya sekedar menjaga agar perubahan kurs tidak terlalu liar sehingga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Elemen kedua dari kebijakan moneter ialah mengakhiri *financing repression* yang mengatur pagu serta arah kredit dan menetapkan tingkat suku bunganya. Namun pada kenyataannya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah hanya mampu meredakan permasalahan tersebut untuk sementara waktu tepatnya hingga pekan pertama September 1997. Sejak itu nilai tukar Rupiah terus melemah hingga mencapai titik terendah pada akhir 1998 dimana Rupiah dengan kurs Rp 17.000,00 per USD 1. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ikut memengaruhi PDB Indonesia yang pernah mencapai USD 1.300 namun turun hingga USD 400 per kapita<sup>4</sup>

Berbeda dari Anwar Nasution, mantan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad melihat pengambangan nilai Rupiah dengan menggunakan *floating system* merupakan tindakan yang agak terpaksa pada saat itu karena berbagai upaya untuk menyelamatkan nilai Rupiah tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Menurutnya, penerapan sistem mengambang terkendali dengan membiarkan Bank

4 Gonggong dan Asy'arie (ed.) 2005: 192.

Indonesia terus-menerus melakukan intervensi pasar dengan menjual dolar hanya meredakan keadaan sementara waktu dengan biaya tinggi.<sup>5</sup> Kebijakan tersebut akan menguras cadangan devisa nasional seperti yang terjadi di Thailand saat cadangan devisanya mencapai titik kritis. Belajar dari Thailand, kebijakan devaluasi ternyata tidak memberi hasil seperti halnya juga dilakukan oleh pemerintah Argentina.

Menurut Mar'ie, sebagai negara terakhir yang mengambang nilai mata uang lantaran krisis di Asia Tenggara, Indonesia menjadi sasaran serangan para spekulan. Catatan lain berkasitan dengan ketidakpastian situasi politik pasca-pemerintahan Orde Baru. Bahkan berita mengenai jatuh sakitnya Presiden Soeharto pada Desember 1997 mengakibatkan gejolak pasar yang semakin menekan nilai Rupiah.

Selain nilai tukar Rupiah, krisis moneter berpengaruh terhadap situasi perbankan nasional terutama terkait likuiditas perbankan. Kondisi internal bank-bank nasional pada waktu itu dapat dikatakan buruk akibat dari sistem manajemen, konsentrasi kredit yang berlebihan, *moral hazard*, kurangnya transparansi dalam masalah keuangan serta belum efektifnya pengawasan Bank Indonesia. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi perbankan semakin menurun seiring dengan dicabutnya izin usaha 16 bank swasta nasional oleh pemerintah dan Bank Indonesia sesuai dengan isi LOI antara pemerintah Indonesia dan IMF. Dari sisi Bank Indonesia, maksud pencabutan izin usaha 16 bank tersebut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, namun justru ditanggapi sebaliknya. Penarikan dana secara masif oleh masyarakat mengakibatkan sejumlah bank mengalami saldo negatif pada giro mereka di Bank Indonesia.<sup>6</sup>

Guna mencegah kondisi perbankan lebih parah, pada 15 Januari 1998 pemerintah mengeluarkan program stabilisasi meliputi restrukturisasi sektor keuangan dan sektor riil. Melalui program itu, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat kembali pulih karena kebijakan tersebut menjamin pembayaran

5 Muhammad dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 338, Jilid 5.

6 Syafril 2020: 27.

semua kewajiban bank baik kepada deposan maupun kreditor melalui program penjaminan. Keputusan yang ditandatangani pada 26 Januari tersebut juga berlaku bagi nasabah kreditor 16 bank yang dilikuidasi serta bank-bank bermasalah lainnya.<sup>7</sup> Program penjaminan tersebut kemudian dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Program BLBI disambut hangat oleh pemilik dan pengelola perbankan, namun, sebaliknya, dikecam oleh pengamat dan sebagian kelompok masyarakat. Mereka yang mengancam memandang kebijakan BLBI terlalu berpihak kepada konglomerat yang secara jelas memeras dan mengeksploitasi rakyat kecil. Banyak kalangan menilai, pemerintah dan Bank Indonesia telah bertindak tidak adil terhadap rakyat kecil yang umumnya menjadi pembayar utang negara terutama melalui pajak yang mereka bayar. Dapat dikatakan sektor perbankan sejak awal 1998 tidak dapat beroperasi secara normal karena likuiditas dan permodalan perbankan tidak lagi mencukupi yang membuat ketergantungan perbankan terhadap BLBI semakin meningkat.<sup>8</sup> Berbagai masalah dalam negeri tersebut pada prosesnya merambat pada menurunnya tingkat kepercayaan perbankan dan kreditor luar negeri terhadap perbankan dan pelaku ekonomi di dalam negeri. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pembiayaan proyek-proyek yang bergantung pada dana bantuan luar negeri.

Banyak kalangan menilai bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap situasi krisis ekonomi dan moneter sangat lamban, bahkan terkesan terlalu percaya diri dan tidak memiliki kesadaran akan realitas di hadapan mata. Pemerintah pada faktanya memang mengumumkan akan melakukan reformasi namun proyek-proyek keluarga dan kroni Presiden Soeharto tetap berjalan terus dan dilindungi. Hal itu membuat ketegangan antara Presiden Soeharto dan IMF yang

---

7 Syafril 2020: 27.

8 Di samping program penjaminan BLBI, pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dengan tugas pokok menyehatkan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur ke sektor perbankan. Lihat: Hariyani 2013: 179.



Presiden Soeharto dan Michel Camdessus (*Managing Director* IMF) tanggal 15 Januari 1998 menandatangani surat perjanjian dengan IMF | Sumber: Istimewa

kemudian menjadi konsumsi publik kian meyakinkan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim Orde Baru sudah demikian parah terbingkai dalam korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai pihak mulai melancarkan seruan agar segera dilakukan reformasi, namun tidak ditanggapi dengan baik, termasuk seruan IMF yang akan menunda bantuannya jika Presiden Soeharto tidak segera mengambil langkah-langkah reformasi yang realistis.<sup>9</sup>

Januari 1998, seperti disebut ekonom Hal Hill dari Australia, merupakan bulan mengerikan dengan pelbagai peristiwa yang merugikan seiring dengan pengabaian desakan reformasi dari berbagai kalangan termasuk IMF.<sup>10</sup> Sebaliknya, pada Januari 1998 Presiden Soeharto justru mengumumkan sebuah rancangan APBN yang absurd

9 Gonggong dan Asy'arie (ed.) 2005: 193.

10 Hill 2000: 19.

karena memasukkan asumsi nilai tukar Rupiah yang berlaku enam bulan. Sebuah rencana anggaran yang tidak masuk akal sekaligus memperluas keretakan hubungan dengan IMF selain LOI kedua pada 15 Januari 1998 yang didahului oleh desakan dari negara-negara yang tergabung dalam G-7.

Pernyataan Presiden Soeharto bahwa ia akan mencalonkan kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dengan wakil B. J. Habibie juga membuat atmosfer ekonomi dan politik serta reaksi pasar semakin tidak stabil dan negatif. Pernyataan tersebut segera berpengaruh terhadap menurunnya kurs Rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai Rp 16.000,00 per USD 1. Pada satu titik waktu, Rupiah bahkan terdorong hingga ke angka Rp 17.000 yang berarti satu per tujuh tahapan menuju tingkat prakrisis.<sup>11</sup> Pada saat bersamaan aktivitas ekonomi di Malaysia dan Filipina melambat, bahkan perekonomian Singapura yang tampak tidak dapat ditembus krisis saat itu berada di bawah tekanan. Kondisi yang mulai terbalik untuk pertama kalinya mulai bersifat global ketika institusi-institusi keuangan di Jepang, Amerika Utara dan Eropa juga mulai berada di bawah tekanan.

## **Ekonomi dalam Reformasi**

Tidak hanya di bidang moneter, krisis yang dihadapi Indonesia sejak awal 1998 juga terjadi karena berbagai latar belakang yang berkelindan, di antaranya penurunan harga aset serta kesulitan para pelaku bisnis dan konsumen dalam membayar utang. Selain itu, krisis moneter dipengaruhi oleh keruntuhan gelembung keuangan spekulatif, jatuhnya pasar saham, gagal bayar pemerintah dan krisis mata uang.

Menurut Bambang Sudibyo, Ketua Umum ISEI (2000–03), kerentanan pondasi ekonomi Indonesia menjelang krisis sebenarnya sudah terlihat dari tiga variabel utama indikator kestabilan ekonomi yakni tingkat inflasi, tingkat bunga, dan kurs Rupiah.<sup>12</sup> Namun, dari

<sup>11</sup> Hill 2000: 19.

<sup>12</sup> Sudibyo 1999: 19. Tulisan yang sama disampaikan dalam seminar pada Sidang Pleno IX ISEI di Jakarta, 27 Agustus 1998.



Bambang Sudibyo, Ketua Umum ISEI 2000 - 2003 | Sumber: Tempo

ketiga indikator tersebut hanya satu yang dapat dikatakan wajar yakni tingkat inflasi. Menurut Bambang Sudibyo, tingkat bunga Indonesia selama bertahun-tahun berada di urutan tertinggi di kawasan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) dan selama dua dasawarsa terakhir kurs Rupiah terus-menerus mengalami depresi sebesar 4% hingga 5% per tahun. Dua indikator tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa pondasi ekonomi Indonesia tidak bisa dikatakan kokoh.

Lebih lanjut Bambang Sudibyo menjelaskan bahwa sistem politik Orde Baru yang mapan namun tertutup menyebabkan tidak mampu mengoreksi dan memperbarui dirinya sendiri. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu Presiden Soeharto sebagai tokoh kuat yang selama hampir tiga dekade menjadi *center of gravity* atau titik keseimbangan

dari sistem politik dan ekonomi Indonesia mulai memasuki usia lanjut pada dekade 1990-an. Kondisi itu menyebabkan pasar dan masyarakat ragu akan keefektifannya dalam memelihara dan mempertahankan keseimbangan politik dan ekonomi.

Sementara itu, pada dimensi sosial, lingkungan bisnis Indonesia terbebani oleh sentimen sosial yang disebabkan oleh tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat kelas bawah dan menengah atas. Menurut Bambang Sudibyo, kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung selama enam Pelita yang ikut mengubah struktur ekonomi namun tidak diiringi dengan keberhasilan yang setara dalam mengubah struktur sosial. Contohnya adalah sektor pertanian yang pada 1997 berperan dalam pembentukan PDB, turun menjadi sekitar 17% padahal jumlah populasi Indonesia yang masih tinggal di wilayah perdesaan masih sekitar 47%.<sup>13</sup>

Sentimen sosial yang terjadi dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 adalah sentimen etnis ketika, pada faktanya, kelas menengah baru yang terbentuk dalam pembangunan didominasi oleh kelompok etnis nonpribumi yang terkesan mendapat keuntungan dari proses deregulasi. Selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, mereka menguasai pasar uang, modal dan barang yang berakibat pada kesenjangan ekonomi sekaligus ikut memicu kerusuhan yang meluas di Jakarta.

Kesan kuat masyarakat mengenai proses deregulasi sejak 1983 lebih memberikan keuntungan bagi pengusaha besar yang kebetulan berasal dari warga keturunan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Mohamad Ikhsan, berdasarkan Survei Ekonomi Sosial Nasional (1999) yang dilakukan setiap tahun oleh BPS menunjukkan distribusi pendapatan yang diukur dengan pengeluaran rumah tangga mengalami kemunduran terutama di wilayah perkotaan yang paling banyak disentuh oleh kebijakan deregulasi. Ia menambahkan, mengacu pada hasil sensus 1996, sebanyak 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh

13 Sudibyo 1999: 19.



Potret masyarakat di Jakarta akhir dekade 1990-an | Sumber: Istimewa

hanya 0,2% (66 ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sementara selebihnya yang berjumlah 98,8% atau sekitar 33,4 juta perusahaan hanya menguasai sekitar 38,9% dari produksi nasional. Menurut Ikhsan, ketimpangan tersebut memberi kesan bahwa ada yang salah dengan kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintah. Tanggapan masyarakat atas ketimpangan tersebut beragam dan menghasilkan polarisasi pemikiran dalam kebijakan yang seharusnya diambil.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ikhsan dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 623, Jilid 5.



Kepanikan terjadi di masyarakat. Terlihat kelangkaan susu formula di sebuah toko swalayan tahun 1998 | Sumber: Istimewa

Program pembangunan pemerintah Orde Baru tidak bisa dimungkiri meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam durasi yang lama. Bank Dunia bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai *economic miracle*. Namun, pada prosesnya muncul dinamika yang menampakkan tanda-tanda adanya *bubbles* seperti ekspansi *real estates* yang terlampau besar dan pertumbuhan pasar saham yang sangat tinggi seiring dengan masuknya dana luar negeri berjangka pendek secara berlebihan.<sup>15</sup> Situasi tersebut mengakibatkan gejolak hingga

<sup>15</sup> Karmeli dan Fatimah 2008: 166.

menimbulkan *distress* dan menular secara sistemik hingga menciptakan krisis. Pada awalnya krisis tersebut terjadi pada sektor keuangan-perbankan namun kemudian meluas menjadi krisis ekonomi yang secara sistemik berubah menjadi krisis multidimensi ke ranah sosial, politik hingga menyentuh ke masalah kepemimpinan nasional. Pola eskalasi serupa secara umum juga terjadi di negara-negara Asia yang lain terutama Thailand dan Korea Selatan.

Pada awal 1998, kepanikan dan kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga-harga barang menyebabkan penarikan uang secara masif dari bank-bank diikuti pembelian barang-barang kebutuhan pokok di pasar dan supermarket sebagai langkah antisipasi kenaikan harga. Sebagian kelompok masyarakat menimbun barang sehingga menimbulkan kelangkaan di pasaran. Salah satu jenis barang yang langka di pasaran ialah makanan bayi; mungkin karena merupakan barang yang tidak banyak alternatif penggantinya. Kepanikan sempat mereda ketika pemerintah mengumumkan jaminan ketersediaan atas barang-barang langka di pasaran namun muncul kembali pada bulan Mei 1998 seiring dengan makin kerasnya turbulensi politik.

Awal 1998 juga ditandai ketidaklaziman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena hanya dalam waktu hitungan hari sejak Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) disampaikan kepada DPR pada awal Januari 1998, RAPBN 1998/99 sudah harus direvisi bahkan sebelum dilakukan pembahasan rencana anggaran tersebut. Pada 26 Januari 1998, pemerintah menetapkan kebijakan penjaminan terhadap kewajiban bank namun konsekuensi keuangan atas berlakunya penjaminan tersebut belum cukup dipahami khususnya besaran kuantitatifnya yang belum dapat diidentifikasi.

Revisi atas APBN 1998/99 kembali dilakukan pada Juni 1998 mengingat asumsi-asumsi yang semula digunakan sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan. Hal lain yang juga penting adalah penerbitan surat utang pemerintah atau obligasi. Mengacu pada pengalaman obligasi negara yang pernah dikeluarkan pada dekade 1950-an, tagihan

atas obligasi tersebut memakan waktu lama, bahkan masih berlangsung hingga akhir dekade 1980-an. Setelah itu, pemerintah memilih kebijakan tidak menerbitkan obligasi selama beberapa dekade.

Antara April hingga Oktober 1998, pemerintah mengambil sejumlah langkah penyehatan perbankan. Pemerintah menutup bank-bank yang tidak sehat, yakni bank yang memiliki kecukupan modal kurang dari negatif 25%. Selain itu, dilakukan penambahan modal bagi bank yang memiliki tingkat kecukupan modal hingga negatif 25% agar menjadi 4%. Pemerintah juga menerbitkan surat utang yang secara keseluruhan berjumlah Rp 650 triliun.<sup>16</sup> Penerbitan surat utang tersebut ditujukan untuk mengganti kewajiban bank yang ditutup, menambah modal bank, dan membayar tagihan Bank Indonesia sehubungan dengan adanya BLBI.

Kebijakan tersebut apabila dikeluarkan dalam kondisi dan suasana normal merupakan langkah dan kebijakan yang tidak lazim dilakukan oleh otoritas lokal.<sup>16</sup> Dalam kondisi normal, penutupan bank merupakan tanggung jawab dan wewenang Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengawasi bank. Dalam kondisi normal pula, penambahan modal bank merupakan tanggung jawab dari pemilik bank. Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa dalam kondisi normal adanya dukungan likuiditas kepada bank yang menghadapi tekanan likuiditas merupakan fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pengembalian fungsi *lender of the last resort* sehingga tidak secara langsung perlu adanya penggantian oleh pemerintah atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ketika situasi moneter dan ekonomi Indonesia genting pada saat krisis, ISEI bersikap “netral” dalam arti tidak mendesak pemerintah untuk mengikuti kebijakan tertentu sebab negara sudah menerima bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Menurut Ketua Umum ISEI, Marzuki Usman, sikap ISEI ialah mempertahankan posisinya sebagai organisasi profesional. Beberapa anggota ISEI yang membuat pernyataan atau kritik—berupa lisan ataupun tulisan—kepada publik

<sup>16</sup> Subianto dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 339, Jilid 5.

terhadap situasi saat itu bersifat individual yang tidak berkaitan dengan organisasi.

Kritik pribadi anggota ISEI antara lain terlihat pada risalah Rizal Ramli—pernah duduk sebagai pengurus pusat (1993–99). Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim (2015–16) itu pernah menulis mengenai IMF yang disebutnya sebagai “dewa amputasi”; bukan “dewa penyelamat” bagi perekonomian Indonesia. Ia menunjukkan, tingkat keberhasilan bantuan penyelamatan IMF di banyak negara kurang dari 30%. Itu pun dilakukan di negara-negara yang relatif kecil atau masih pada tahap awal pembangunannya seperti Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru.<sup>17</sup> Sadar atau tidak sadar, lanjutnya, upaya mengundang IMF telah mendorong kehancuran ekonomi Indonesia ke jurang krisis yang lebih dalam dari seharusnya. Krisis moneter, diikuti krisis ekonomi, yang dialami Indonesia merupakan krisis paling buruk dalam sejarah ekonomi Indonesia yang tidak lepas dari kelemahan internal bangsa Indonesia. Kelemahan itu berubah menjadi malapetaka karena terjadi salah analisis dan solusi yang ditawarkan IMF.

Kegagalan IMF, menurut Rizal—mengacu pada pengalaman program di Indonesia (1997–2002)—disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, “diagnosis” dan “obat” yang diberikan IMF nyaris sama untuk seluruh kasus di dunia yakni berdasar pendekatan *financial programming* yang sangat sederhana padahal masing-masing negara memiliki struktur ekonomi dan kompleksitas masalah yang berbeda. Dicontohkan, IMF selalu memaksakan pengetatan fiskal dan moneter jika sebuah negara mengalami krisis ekonomi. Pengetatan fiskal itu dipaksakan kepada negara berkembang agar ada surplus untuk membayar beban utang yang meningkat. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi yang sudah buruk menjadi semakin parah akibat kebijakan pengetatan fiskal dan moneter model IMF terutama pada awal krisis. Kedua, pendekatan program IMF terutama mengacu pada penambahan beban utang untuk mendukung posisi neraca pembayaran.<sup>18</sup>

17 Ramli dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005: 245, Jilid 5.

18 Ramli dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005, Jilid 5.

Menurut Rizal, “perbaikan” neraca pembayaran melalui penambahan utang hanyalah perbaikan semu. Perbaikan itu tidak nyata karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta ataupun peningkatan ekspor neto. Pinjaman IMF hanya meningkatkan cadangan devisa bruto (*gross reserves*) namun tidak meningkatkan cadangan devisa neto (*net reserves*) sama sekali. Ironisnya, peningkatan pinjaman untuk “menggelembungkan” neraca pembayaran juga menutup kemungkinan bagi pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman untuk membiayai proyek terutama proyek untuk rehabilitasi infrastruktur, irigasi serta proyek padat karya lainnya. Dengan kata lain, Indonesia mengalami *loss opportunity* karena secara terus-menerus mengajukan pinjaman untuk menggelembungkan neraca pembayaran.<sup>19</sup>

## **Tuntutan Reformasi**

Dalam gelaran Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (1988), Soeharto, atas permintaan seluruh fraksi di Majelis, menyatakan bersedia kembali dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998–2003.<sup>20</sup> Kesiediaan Soeharto untuk kembali dicalonkan sebagai presiden mendapat respons keras dari masyarakat terutama kalangan akademisi dan mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai *front* dan aliansi bergerak ke Gedung MPR untuk mengajukan tuntutan reformasi. Berbagai demonstrasi mahasiswa berujung bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga gedung parlemen tersebut.

Puncak gerakan terjadi pada 12 Mei 1998 saat sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti bersama dosen-dosennya berunjuk rasa ke DPR dan berhadapan dengan petugas keamanan. Mulanya unjuk rasa berjalan damai, namun kekacauan terjadi justru pada saat mahasiswa hendak kembali ke kampus mereka yang menyebabkan bentrokan di antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Para petugas bahkan mengejar mahasiswa hingga depan kampus mereka. Tragedi kemudian terjadi dengan tertembaknya enam orang mahasiswa Universitas Trisakti.

<sup>19</sup> Ramli dalam Soesastro, dkk. (peny.) 2005, Jilid 5.

<sup>20</sup> *Kompas*, 8 Maret 1998.

Berselang enam bulan kemudian, di Canberra, Australia, diadakan konferensi tentang Krisis Ekonomi Indonesia (23–25 November 1998). Pertemuan diselenggarakan oleh Australian National University, disponsori pemerintah Australia melalui AusAID; dirancang oleh Ross Garnaut, Direktur Research School for Pacific and Asia Studies and Asia Pacific School of Economics and Management, ANU, dan Chris Manning yang menjabat sebagai Direktur Proyek Indonesia di universitas yang sama, serta Dekan FEUI Anwar Nasution yang juga Wakil Ketua ISEL.<sup>21</sup>

Mengacu pada *Report of Conference on Indonesia's Economic Crisis*, krisis ekonomi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan saat diikuti krisis politik. Kedua krisis itu berlangsung secara paralel dan independen sehingga mengakibatkan krisis ekonomi semakin parah. Krisis yang terjadi pada sistem ekonomi dan politik juga berdampak negatif terhadap berbagai aspek sosial lainnya yakni sistem hukum, sistem pertahanan dan keamanan serta sistem sosial budaya.<sup>22</sup>

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia memasuki masa transisi yang sulit sehingga diperlukan konsensus nasional oleh para pengambil keputusan politik untuk memberikan prioritas utama pada pemulihan stabilitas ataupun kegiatan ekonomi rakyat. Program pemulihan kembali kondisi perekonomian terdiri atas tiga aspek. Pertama, kebijakan stabilisasi ekonomi makro jangka pendek. Kedua, reformasi ekonomi jangka menengah untuk memerangi distorsi, oligopoli serta monopoli yang tidak perlu. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan

---

21 Pertemuan Canberra dihadiri 12 orang dari Indonesia, 7 orang dari ANU dan 12 orang dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga keuangan internasional termasuk IMF, Bank Dunia, ADB, Bank Sentral Australia serta AusAID. Peserta Indonesia terdiri atas akademisi dari berbagai latar belakang aliran pemikiran serta ideologi partai. Laporan diskusi disusun oleh sekelompok peserta pertemuan yang diberi tugas menjadi anggota *Drafting Committee* yakni Anwar Nasution, Hal Hill, Andrew Elek, Chris Manning, Mari Elka Pengestu dan Rino Agung Effendi.

22 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1999: v.



Mundurinya Soeharto dan diikuti sumpah jabatan B.J. Habibie | Sumber: Istimewa

segelintir anggota masyarakat di samping dapat meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, aspek ketiga ialah membangun kembali lembaga perekonomian termasuk infrastruktur pasar dengan meningkatkan transparansi guna menurunkan biaya transaksi pasar. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat madani, pembangunan infrastruktur pasar memerlukan perbaikan sistem hukum, akuntansi dan sistem

politik. Hanya dengan penerapan ketiga aspek tersebut, berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dapat dicegah.

Mundurinya Presiden Soeharto dari kedudukannya sebagai kepala negara dan digantikan oleh Presiden B. J. Habibie, sebelumnya wakil presiden, sedikit-banyak mengubah kebijakan yang selama itu ditempuh pemerintahan Orde Baru termasuk memulihkan kebebasan pers. Pada masa Habibie, bermunculan media cetak baru yang berjumlah hingga 1.397 media di seluruh Indonesia seiring dengan dihentikannya kebijakan pengeluaran dan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Selain itu, Presiden Habibie berkomitmen menyelesaikan kasus Timor Timur melalui referendum hingga penyelenggaraan pemilihan umum multipartai yang diikuti 48 partai politik.

Kendati masa jabatan Presiden Habibie relatif singkat—MPR menolak pidato pertanggungjawabannya dalam Sidang MPR 1999 karena referendum yang berakibat lepasnya Timor Timur dari bagian Indonesia—berbagai kebijakannya dapat dikatakan mengikuti agenda reformasi di samping penerapan sejumlah kebijakan di bidang ekonomi terutama menurunnya impor secara drastis. Penurunan harga barang impor disebabkan apresiasi nilai tukar eksternal Rupiah yang berdampak pada penurunan tingkat laju inflasi dan meredam ekspektasi masyarakat akan tingkat laju inflasi.

Defisit APBN pada tahun 1998/99 diperkirakan mencapai 6% dari PDB. Perkiraan tersebut lebih rendah daripada perkiraan semula yakni sebesar 8,5%. Di sisi lain, penurunan impor secara drastis ikut memperbaiki posisi neraca pembayaran luar negeri yang juga berdampak pada nilai tukar Rupiah dari Rp 15.000 per USD 1 menjadi sekitar Rp 8.000 sejak November 1998. Apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut mencerminkan kemajuan pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang memungkinkan pencairan bantuan dalam rangka program IMF.

## Membangun Pondasi Baru

Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia setelah diterpa krisis moneter dan ekonomi, ISEI memberikan kontribusi pemikiran melalui Kongres XIV yang diadakan di Makassar (21–23 April 2000). Menyadari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam sistem pemerintahan yang terpusat sangat berkontribusi terhadap terjadinya dua krisis tersebut, Kongres ISEI mengangkat tema ‘Membangun Ekonomi Daerah yang Kompetitif dan Efisien dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa’.<sup>23</sup>

Ketua Umum ISEI Marzuki Usman dalam sambutannya menjelaskan bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia menghadapi tiga *megatrend* yang akan berpengaruh terhadap usaha mengatasi keterpurukan ekonomi tersebut. Pertama, di bidang politik, demokratisasi mulai berjalan. Kedua, globalisasi akan semakin mengintegrasikan ekonomi dunia. Ketiga, tuntutan yang makin intensif terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Dikatakan, globalisasi akan mendorong kompetisi dunia usaha dan dengan demikian produk-produk Indonesia harus didasarkan pada kekuatan efisiensi dalam alokasi dan realokasi sumber daya. Di sisi lain, desentralisasi akan menegakkan keadilan antardaerah selain akan mendorong unit pemerintahan memproduksi jasa pemerintahan dengan biaya lebih rendah dan bersifat mendorong efisiensi di bidang ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa globalisasi dan desentralisasi bukan hal yang bertentangan.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Marzuki menjelaskan bahwa salah satu masalah mendasar baik dalam kerangka globalisasi maupun desentralisasi ialah bagaimana mendorong daerah agar lebih awal menggunakan istilah *open economic policy*. Menurutnya, kebijakan itu dapat mendorong perdagangan dan investasi antardaerah dan dari luar daerah berjalan lancar. Dalam kerangka itu, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya sibuk dalam program restrukturisasi ekonomi dan rekapitalisasi

<sup>23</sup> ISEI 2006: xiv.

<sup>24</sup> Usman, “Sambutan Ketua Umum ISEI,” dalam ISEI 2006: vii.



Sumitro Djojohadikusumo memberikan ceramah ekonomi dalam seminar ISEI (2000) | Sumber: Tempo

perbankan, melainkan juga mampu menciptakan *environment* bagi daerah yang mampu mendorong proses pembangunan ekonomi di daerah terutama yang mengarah pada pengembangan kegiatan industri pengolahan dan jasa. Setidaknya terdapat tiga aspek yang patut mendapat perhatian pemerintah dalam mendorong dan menciptakan *environment* yakni jaminan keamanan dan usaha; mengurangi intervensi pemerintah pusat yang menghambat kegiatan perdagangan dan investasi di daerah; dan terciptanya kemungkinan mobilitas sumber daya manusia dan modal antardaerah.<sup>25</sup>

Menyambut tema Kongres, Ketua Kehormatan ISEI Sumitro Djojohadikusumo menyatakan bahwa tema tersebut sangat penting dan tepat untuk dibahas dalam dimensi waktu dan kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Menurutnya, perhatian terhadap ekonomi daerah

<sup>25</sup> Usman dalam ISEI 2006.

merupakan ciri pokok otonomi daerah meski sesungguhnya sudah jauh terlambat. Walau demikian, hal itu merupakan sesuatu yang sangat vital dan perlu diprioritaskan dengan segera. Selama beberapa dasawarsa sebelumnya, masyarakat daerah selalu diperlakukan sebagai bagian yang tersubordinasi dari sistem ekonomi nasional. Di sisi lain, berbagai kegiatan ekonomi nasional hampir sepenuhnya terpusat di Jakarta. Sumitro berpandangan agar tidak menunggu terlalu lama terkait Pemerintah Daerah seperti digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena negara akan kuat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Sumitro menjelaskan bahwa keadaan *political economy* saat itu hendaknya memberi kesadaran kepada para ahli ekonomi bahwa pemulihan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi dan hanya dapat berjalan dengan adanya keamanan dan supremasi hukum. Ia mengingatkan meski pemerintah memperkirakan PDB selama tahun 2000 akan mengalami pertumbuhan sekitar 3,7%, namun proses pertumbuhan yang terjadi pada saat itu sebenarnya masih lebih banyak terdorong oleh semangat konsumtif dan bukan oleh peningkatan investasi, baik investasi yang menggunakan dana dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa berjalan dengan kuat dan berkelanjutan apabila ada perimbangan yang wajar antara peningkatan investasi dan konsumsi sementara investasi itu sendiri tidak akan terwujud jika dana-dana yang disalurkan untuk investasi tidak terjamin oleh faktor keamanan serta kepastian hukum.<sup>27</sup>

Indikator investasi di Indonesia terlihat dari catatan BKPM dalam dua tahun terakhir yang memperlihatkan penurunan besar kecuali investasi di Pulau Batam yang menunjukkan pertumbuhan positif. Sumitro menilai bahwa membangun daerah juga dapat diidentikkan dengan memberi peluang lebih besar kepada usaha kecil dan menengah karena konsentrasi usaha-usaha kecil dan menengah lebih terpusat di daerah-daerah. Dengan demikian otonomi daerah akan memungkinkan

---

26 Djojohadikusumo, "Sambutan Ketua Kehormatan ISEI," dalam ISEI 2006: x.

27 Djojohadikusumo dalam ISEI 2006.

berbagai usaha kecil dan menengah di daerah untuk berkembang sekaligus akan mengubah struktur usaha perekonomian Indonesia dengan peran usaha mikro, kecil dan menengah lebih dominan.

Pada akhir sambutannya, Sumitro melihat bahwa masa pengelolaan kekayaan daerah oleh pusat telah berakhir. Kalaupun ada pengelolaan ekonomi di daerah yang masih perlu dikerjakan oleh pusat, maka pusat harus menjadikan daerah sebagai mitra kerja atau sebaliknya daerah dapat menjadikan pusat sebagai mitra mereka. Selain itu, pengendalian ekonomi oleh Bappenas telah berakhir. Bappenas yang selama ini sangat dominan dalam mengendalikan pengembangan ekonomi termasuk di daerah tetap diperlukan namun fungsinya semata-mata sebagai badan perencana sementara pengendalian ekonomi akan lebih banyak bertumpu di daerah. Sumitro menegaskan bahwa para ekonom jangan bermimpi akan dapat mewujudkan pemulihan ekonomi jika mengesampingkan peranan daerah.<sup>28</sup>

Duo pemakalah kunci dalam kongres, Emil Salim dan Hadi Soesastro, mengawali pembicaraannya mengenai kelemahan mendasar di bidang ekonomi. Menurut kedua pembicara, kendati ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 6–7% rata-rata per tahun selama 20 tahun terakhir, namun keberlanjutan proses pertumbuhan tersebut terancam oleh meluasnya ketidakadilan, kecurangan, melebarnya kesenjangan dan menajamnya perseteruan antara berbagai bagian dalam masyarakat. Menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik itu, pemerintahan baru mendapat tugas mewujudkan Indonesia baru. Di bidang ekonomi, pemerintah berkewajiban mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengambil langkah yang diperlukan, antara lain stabilisasi moneter, restrukturisasi utang, penyehatan perbankan, penguatan pasar dan program jaring pengaman sosial. Sementara pada saat bersamaan harus dilaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan upaya penegakan hukum serta ketertiban umum.<sup>29</sup>

---

28 Djojohadikusumo dalam ISEI 2006.

29 Salim dan Soesastro, "Kemakmuran melalui Keadilan: Kerangka Ekonomi Indonesia Baru Tekad Membangun Indonesia Baru," dalam ISEI 2006: 1.

Baik Emil Salim maupun Hadi Soesastro berpandangan bahwa Kerangka Ekonomi Indonesia Baru harus mengutamakan sepuluh ciri pokok. Pertama, mengutamakan prinsip keadilan dalam proses mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kedua, menerapkan pendekatan menyeluruh dalam arti bahwa upaya menciptakan kepastian hukum, memperkuat sistem birokrasi, mereformasi administrasi pemerintahan serta memperkokoh perangkat kelembagaan ekonomi publik dan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi. Ketiga, prinsip-prinsip ekonomi dengan tanggung jawab dan kepentingan sosial yang absah atau kepentingan nasional yang lebih besar tanpa membahayakan kelangsungan ekonomi bangsa. Keempat, memperluas akses bagi semua pelaku yakni pemerintah, dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah, sektor pertanian dan koperasi serta masyarakat sipil tanpa membedakan suku, agama dan gender, agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan tercipta kemitraan yang sehat di antara mereka.

Ciri selanjutnya, kelima, mengembangkan otonomi daerah yang semakin mendorong dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang. Keenam, mengelola ekonomi makro secara disiplin dan bertanggung jawab. Ketujuh, memberikan perlindungan sosial yang dasar guna menjamin kelangsungan hidup penduduk miskin yang ditimpa kemalangan. Kedelapan, meningkatkan secara terus-menerus upaya menyebarkan dan memperbaiki mutu pendidikan dan pelatihan di segala bidang serta kemampuan teknologi agar tercipta sumber daya manusia yang mampu menjawab perkembangan khususnya tantangan globalisasi. Kesembilan, melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan dengan menerapkan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kesepuluh, menggalang kerja sama ekonomi bilateral, regional, kerja sama antar negara-negara Selatan dan internasional untuk memperkuat kedudukan dalam dan mendapat bagian yang semakin meningkat dari globalisasi dan proses integrasi ekonomi dunia. Menurut Emil Salim dan Hadi Soesastro kebijakan dalam Kerangka

Ekonomi Indonesia Baru dirumuskan dan dilaksanakan dalam wacana demokrasi untuk menciptakan partisipasi dan dukungan maksimal dari masyarakat.<sup>30</sup>

Seorang pemakalah lain, Ichaidi Elias, mantan Sekretaris Umum dan Ketua I Pengurus Pusat ISEI, berbicara tentang masa transisi setelah tumbanganya Orde Baru.<sup>31</sup> Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan itu menyatakan bahwa kesulitan ekonomi sebagai warisan kebijakan yang diambil pada akhir pemerintahan Orde Baru telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional bahkan telah menimbulkan guncangan yang sangat serius terhadap stabilitas politik nasional yang berakibat mundurnya Presiden Soeharto. Penggantinya, Presiden B. J. Habibie meski mampu memberikan harapan yang baik bagi perekonomian nasional namun karena kesulitan ekonomi nasional sangat parah, ia tidak dapat membawa ekonomi nasional ke tingkat yang dapat menghidupkan kembali roda perekonomian nasional. Terperosoknya tatanan perbankan nasional ke tingkat yang amat memprihatinkan jadi pemicu utama memburuknya kinerja dan sistem pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Menurunnya, kinerja dan sistem perbankan nasional telah menimbulkan guncangan moneter yang kemudian mendorong merosotnya kehidupan ekonomi nasional bahkan telah mengganggu stabilitas politik yang tercermin pada pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke pemerintahan transisi.

Dalam sesi diskusi bertopik ‘Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia’ tampil Boediono—kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden (2009–14)—membawakan makalah berjudul “Perspektif Makro Pemulihan Ekonomi Indonesia.”<sup>32</sup> Mengawali pemaparannya, Boediono menjelaskan bahwa diukur dengan indikator apa pun, pemulihan ekonomi Indonesia tertinggal dibandingkan dengan

30 Salim dan Soesastro dalam ISEI 2006.

31 Elias, “Pemberdayaan ISEI sebagai Organisasi Profesi,” dalam ISEI 2006: 15.

32 Dalam ISEI 2006: 369.

Thailand terlebih Korea Selatan. Penyebabnya, krisis yang dihadapi Indonesia jauh lebih berat dan lebih kompleks daripada yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Menurut Boediono, gelombang krisis di Indonesia telah menimbulkan kerusakan sistemik yang sangat luas dan dalam, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang-bidang sosial, politik, hukum, keamanan dan ketertiban umum.

Lebih lanjut Boediono menjelaskan bahwa krisis di Thailand, Korea Selatan dan Indonesia ditandai dengan runtuhnya permintaan agregat sehingga terlihat ciri-ciri ekonomi dalam depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, hilangnya minat investasi dan meningkatnya kapasitas menganggur di berbagai sektor. Lebih dari itu, sisi suplai juga runtuh. Di Indonesia, tidak hanya produksi di berbagai sektor yang merosot seiring dengan menurunnya permintaan, tapi juga terjadi kerusakan kelembagaan yang cukup parah sehingga menyebabkan daya respons atau elastisitas suplai sangat menurun. Dalam keadaan demikian, apa yang disarankan oleh Keynes yakni mendongkrak permintaan melalui defisit fiskal tidak akan memecahkan masalah.

Disebabkan respons sisi suplai lemah, maka kenaikan permintaan mungkin justru akan lebih memicu kenaikan harga daripada kenaikan *output*. Dengan demikian stimulasi permintaan harus disertai upaya meningkatkan daya respons suplai. Adanya kelebihan kapasitas di berbagai sektor tidak menjamin adanya respons suplai karena kerusakan kelembagaan mengganggu mekanisme yang menerjemahkan kenaikan permintaan menjadi kenaikan suplai. Kerusakan kelembagaan harus dibenahi bersamaan dengan upaya peningkatan permintaan. Menurut Boediono, dalam situasi saat itu, menstimulasi permintaan bukan hal yang mudah. Stimulasi melalui kebijakan fiskal mempunyai ruang gerak yang terbatas karena beban utang pemerintah sangat besar. Di sisi lain, investasi swasta masih terhambat oleh *confidence* yang belum pulih.

Dalam pandangan Boediono, proses pemulihan ekonomi di Indonesia memang berjalan lambat, namun tanda-tanda awal sudah terlihat. Momentum itu seharusnya dikapitalisasi sebelum memudar. Kestabilan moneter mulai terkendali sejak 1999 yang diikuti dengan

kenaikan produksi pada sejumlah sektor. Dua hambatan besar terhadap pemulihan ekonomi ialah premi risiko dan biaya transaksi yang tinggi bagi pelaku ekonomi dan langkah-langkah yang diperlukan menyangkut upaya membangkitkan kembali *confidence* dan membangun kembali institusi-institusi ekonomi.

Apa yang harus dilakukan untuk pemulihan ekonomi sesungguhnya sudah jelas. *Letter of intent* sudah menjabarkan secara rinci. Masalahnya terletak pada komitmen untuk keluar dari krisis serta koordinasi yang lebih baik dalam berbagai kebijakan pada tingkat kabinet khususnya tim ekonomi, pentingnya penjabaran secara rinci pada sisi administratif/ birokrasi setiap keputusan dan kebijakan, pentingnya pemupukan kesatuan pandang dan kemitraan yang lebih mendalam antara pemerintah dan DPR bagi kebijakan-kebijakan yang menentukan proses pemulihan ekonomi serta perlunya sosialisasi dan diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.<sup>33</sup>

Belajar dari pengalaman pembangunan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru dan krisis yang menerpa Indonesia, beberapa hal penting patut dipetik pelajaran untuk pembangunan Indonesia di masa mendatang. Hal pertama dibutuhkan kebijakan stabilisasi harga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga kalangan pengusaha dapat memprediksi kelayakan investasi yang akan mereka lakukan. Selain itu, peranan sektor pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan dari sektor pemerintah ke swasta menuntut penguatan kelembagaan agar mekanisme pasar dapat berjalan baik. Tanpa diiringi pengembangan kapasitas kelembagaan secara memadai, pertumbuhan hanya akan didukung oleh penambahan modal terutama dari utang. Tanpa insentif yang cukup untuk meningkatkan efisiensi baik melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi seluruh lapisan kelompok usaha terutama usaha kecil menengah. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tidak ditopang dengan kelembagaan

---

33 Boediono dalam ISEI 2006.

yang baik dan bertumpu pada utang mengakibatkan kerentanan terhadap gejolak pasar uang dan pasar saham internasional. Unsur penting dalam kelembagaan tersebut di antaranya *good governance* baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta, transparansi, aturan main dan representasi yang jelas serta pengakuan terhadap hak kepemilikan yang dilandasi oleh sistem hukum.<sup>34</sup>

## **Mengembalikan Semangat**

Dalam pemilihan ketua umum baru pada Kongres XIV terpilih Bambang Sudibyo yang saat itu tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia dipilih aklamasi menggantikan Marzuki Usman. Lahir di Temanggung, Jawa Tengah (1952), Bambang Sudibyo berasal dari keluarga guru agama yang juga berprofesi sebagai petani tembakau dan padi. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1977), ia langsung mendapat tawaran mengajar di alma maternya hingga kemudian dikukuhkan sebagai guru besar. Bambang Sudibyo melanjutkan studi di North Carolina University, Amerika Serikat (MBA, 1980); dan mengikuti program doktor di Kentucky University, Lexington, hingga meraih Ph.D di bidang administrasi bisnis pada 1985. Kembali ke Tanah Air, ia ikut mempersiapkan pembentukan Program Magister Manajemen UGM (1988); dan menjadi direktornya (1993–99), selain beraktivitas di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta.

Selain menjabat sejumlah posisi penting di UGM, Bambang Sudibyo dipercaya menduduki jabatan di pemerintahan pusat. Pada saat Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri BUMN, Bambang Sudibyo diminta menjadi Komisaris BPPN X. Karirnya terus menanjak hingga diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Persatuan Nasional dalam pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (1999–2001).<sup>35</sup> Pada kabinet berikutnya, Bambang Sudibyo dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan Nasional (2004–09).

<sup>34</sup> Boediono dalam ISEI 2006.

<sup>35</sup> Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 1999: 571.



Bambang Sudibyo dan Srimulyani di Istana Negara (2006) | Sumber:Tempo

Bambang Sudibyo “merasa” telah mendaftar sebagai anggota ISEI sejak lulus kuliah karena ia tahu setiap lulusan baru fakultas ekonomi otomatis menjadi anggota ISEI, sekaligus tercatat sebagai anggota Ikatan Akuntansi Indonesia pada 1977.<sup>36</sup> Bukan sekadar terdaftar dan menjadi Ketua Umum ISEI, dalam posisinya itu ia diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi Utusan Golongan mewakili ISEI (2001). Meski demikian, Bambang Sudibyo boleh dikata baru benar-benar aktif sebagai anggota ISEI pada 1992, dan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pendidikan semasa kepemimpinan Marzuki Usman.

---

36 Wawancara dengan Bambang Sudibyo, Ketua Umum ISEI (2000–03), Jakarta, 12 Maret 2024.

Terpilih menjadi Ketua Umum ISEI, Bambang Sudibyo bertekad mengembalikan semangat ISEI. Dalam buku *First Fifty Years* terbitan ISEI, Bambang Sudibyo memberi catatan kritis tentang perlunya transformasi ISEI menjadi organisasi profesi yang benar-benar profesional. Untuk itu perlu revisi statuta organisasi sehingga mampu menarik ekonom untuk bergabung. Ia juga memberi contoh bandingan organisasi serupa di luar negeri yang disebutnya sangat prestisius dan memberi perasaan “sangat spesial” bagi anggotanya. Organisasi profesi, lanjutnya, harus memiliki jurnal ilmiah untuk menampung artikel, analisis dan hasil riset anggotanya. Bambang Sudibyo juga mengingatkan bahwa ISEI memiliki Yayasan Indonesia Forum sebagai pengumpul dana bagi organisasi selain iuran anggota agar ISEI bisa mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.

Selama masa kepengurusannya, Bambang Sudibyo merasakan situasi perekonomian nasional masih dibayang-bayangi suasana suram buntut krisis global. Negara dihadapkan pada darurat keuangan dan krisis kepercayaan terhadap investor akibat lemahnya penegakan hukum. Terjadi teror bom di Bali yang menewaskan ratusan orang, termasuk turis asing, sehingga makin menjauhkan Indonesia dari investasi. Belum lagi demonstrasi dan kerusuhan komunal yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi juga menakutkan bagi penanam modal.

Untuk mengatasi krisis moneter dan demi penyelamatan bangsa dari situasi keterpurukan ekonomi, pada 1997 pemerintah menerima pinjaman dana dari IMF dengan segala kontroversinya. Tentang masalah itu, Bambang Sudibyo menyerukan agar Indonesia segera mengakhiri kerja sama dengan IMF. Dalam seminar yang digelar ISEI (Oktober 2002), ia menekankan pentingnya independensi ekonomi nasional. Hal itu bisa dicapai, katanya, dengan mengerahkan segala kekuatan ekonomi, memper-sempit kesenjangan sosial dan meningkatkan upah pekerja.

Kongres XV ISEI di Kota Batu, Jawa Timur (13–15 Juli 2003) menjadi titik akhir kepengurusan Bambang Sudibyo. Memimpin satu periode, ia digantikan oleh Burhanuddin Abdullah, seorang bankir.



Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum ISEI 2003 - 2008 | Sumber:Tempo

Sedangkan Bambang Sudibyo, pada tahun berikutnya, diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

### **Kontribusi ISEI untuk Kebijakan Publik**

Kongres XV ISEI di Kota Batu, Malang (15 Juli 2003), seperti telah disebutkan, memilih Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Umum baru menggantikan Bambang Sudibyo. Pemilihan ketua umum baru saat itu menjadi menarik karena, tidak seperti “tradisi” sebelumnya, dilakukan melalui pemungutan suara. Sejak awal proses, nama Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah semakin mencuat sebagai kandidat terkuat bersaing dengan kandidat lain seperti Boediono, Menteri Keuangan; Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan Roedjito, Direktur Bank Rakyat Indonesia; serta Bambang Sudibyo sebagai petahana.



Burhanuddin Abdullah (kanan) bersama, Dorodjatun Kuntjoro-jakti, Boediono dan David Nellor usai pertemuan dengan IMF | Sumber:Tempo

Sehari sebelum pemilihan, Burhanuddin Abdullah diperkirakan telah mendapat dukungan minimal 17 dari 43 cabang ISEI. Berdasarkan sumber *Tempo News Room*, lumbung suara Burhanuddin berasal dari Forum ISEI Se-Sumatera yang baru digagas tiga minggu sebelumnya di Batam dan beranggotakan 17 cabang ISEI. Diperkirakan dukungan paling kuat bagi Burhanuddin berasal dari kalangan pengusaha yang menjadi anggota ISEI di kota dan kabupaten yang tidak memiliki perguruan tinggi. Hal itu dapat dimaklumi mengingat ketua umum yang tengah menjabat, yakni Bambang Sudibyo, dianggap terlalu kritis terhadap IMF. Melalui Kongres, peserta diharapkan berkenan mendukung pemerintah agar kembali bekerja sama dengan IMF.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> *Tempo*, 17 Oktober 2003.

Singkat cerita, setelah melalui proses yang *fair*, Burhanuddin Abdullah terpilih menjadi Ketua Umum ISEI periode 2003-2006. Terpilihnya Burhanuddin tidak lepas dari mundurnya dua kandidat lain yakni Jusuf Kalla dan Bambang Sudibyo. Pemilihan diselenggarakan secara tertutup di antara ketiga kandidat dengan 36 ketua ISEI dari seluruh cabang di Indonesia. Model pemilihan tersebut dipilih karena keabsahan jumlah anggota ISEI masih dipertanyakan. Sebanyak 28 ketua ISEI cabang secara tidak langsung memilih Burhanuddin Abdullah karena dianggap memenuhi syarat bahwa ketua umum ISEI berasal dari kalangan non-partisan atau bukan dari partai politik selain dipandang sebagai seorang profesional.

Setelah terpilih, Burhanuddin Abdullah berjanji akan memberi perhatian lebih pada pengembangan di Indonesia Timur serta akan menjadikan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi yang independen sehingga dapat menjaga jarak serta bersikap obyektif terhadap kebijakan pemerintah. Selain memilih ketua umum baru, kongres juga merumuskan sejumlah kebijakan strategis di bidang industri, perdagangan dan moneter serta jalan keluar setelah kerja sama dengan IMF berakhir pada Desember 2003.<sup>38</sup>

Ketua Umum ISEI terpilih Burhanuddin Abdullah dilahirkan di Garut, Jawa Barat (1947). Ia berasal dari keluarga yang sederhana; ayahnya seorang guru agama di Sekolah Rakyat, sementara ibunya bernama Siti Kholilah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekitar kampung halamannya yakni di Pengalengan dan Sekolah Pertanian Menengah Atas di Tanjungsari.<sup>39</sup> Barulah ketika melanjutkan studi ke Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, ia pindah ke Bandung. Lulus sebagai insinyur pertanian (1974), Burhanuddin terbang ke Banda Aceh bekerja di kantor Dinas Perkebunan. Burhanuddin kemudian memutuskan hijrah ke Jakarta, melamar bekerja di Unilever. Tak lama bekerja di perusahaan swasta itu, Burhanuddin melamar ke

---

38 *Liputan6 SCTV*, 16 Juli 2003

39 Wawancara dengan Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum ISEI (2003–09), Jakarta, 5 Februari 2024.

Bank Indonesia setelah membaca iklan lowongan kerja di koran. Ikut seleksi BI pada 1979, Burhanuddin diterima bekerja di BI dengan status calon pegawai.

Selang dua tahun kemudian, Burhanuddin melanjutkan pendidikan magister di Michigan State University, Amerika Serikat. Sejak bekerja di Bank Indonesia, Burhanuddin menjabat sejumlah posisi mulai dari Asisten Gubernur hingga pada 2001 diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia di bawah Gubernur Arifin Siregar. Karena Arifin Siregar saat itu menjabat sebagai Ketua Umum ISEI, Burhanuddin sering diminta ikut menghadiri rapat-rapat ISEI. Saat itulah Burhanuddin menjadi anggota ISEI dan terlibat dalam banyak kegiatan organisasi profesi tersebut. Namun, pada 1988 Burhanuddin diminta mengisi staf perwakilan Indonesia di IMF sehingga ia pindah bertugas ke Amerika Serikat.

Setelah lima tahun berdinis di Amerika Serikat, Burhanuddin kembali bekerja di Bank Indonesia dan ditempatkan di bagian moneter sebelum beralih ke bagian luar negeri. Pada 2000, ia diangkat menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia yang dijabatnya hanya empat bulan karena ia diminta Presiden Abdurrahman Wahid yang mengangkatnya menjadi Menteri Koordinator Perkonomian. Jabatan menteri hanya dipangkunya selama tiga bulan seiring lengsernya Presiden. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Burhanuddin menganggur selama dua tahun. Puncak karier Burhanuddin dicapai pada Mei 2003 ketika dipilih sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Pada 2004, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Terpilih sebagai presiden baru adalah Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil.<sup>40</sup> Menanggapi terpilihnya presiden baru, ISEI di bawah kepemimpinan Burhanuddin Abdullah bekerja sama dengan

---

40 Pemilihan presiden pada waktu itu diikuti Wiranto dan wakilnya Salahuddin Wahid; Megawati Sukarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi; Amien Rais dan Siswono Yudohusodo; Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla; serta Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Lihat Gonggong dan Asy'arie (ed.) 2005: 238–42.



Menyambut pemimpin baru, suasana di salah satu TPS di Jakarta saat penghitungan suara pada Pemilu 2004. | Sumber: Kompas

Yayasan Indonesia menerbitkan buku *Usulan Program Bagi Pemerintahan Baru 2004–2009* (2005). Buku usulan itu terdiri dari delapan jilid berisi isu-isu ekonomi dan moneter yang tengah dihadapi bangsa Indonesia yakni (dalam format judul) Reformasi Sosial Politik yang Mendukung Pembangunan Ekonomi; Tantangan Makro Ekonomi Pemerintah Baru; Mendorong Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia di Masa Depan; Tantangan yang Dihadapi dalam Penciptaan Lapangan Kerja; Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi; Menuju Sektor Keuangan yang Sehat; Isu-Isu Pokok Pengelolaan Utang Negara/Bantuan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; serta Mendorong Etika dan Kultur Bisnis yang Sehat.

Dalam usulan *Reformasi Sosial Politik yang Mendukung Pembangunan Ekonomi*, ISEI menyarankan agar pemerintah membangun sistem politik yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan rencana, membangun sistem ekonomi sendiri agar kegiatan ekonomi juga berjalan dengan kepastian, membangun sistem sosial yang menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan dengan kepastian serta menyerahkan agenda reformasi kepada *civil society* yang terbentuk dan bukan pada elite politik karena pada umumnya elite politik merupakan pribadi-pribadi yang tidak bersih dan terkesan oportunistik.<sup>41</sup>

Terkait isu *Tantangan Makro Ekonomi Pemerintah Baru*, ISEI memberikan tinjauan mengenai prospek ekonomi dunia yang diperkirakan akan membaik pada 2004 kendati dalam prosesnya mengalami perlambatan pada 2005/06. Membaiknya perekonomian dunia tidak lepas dari perbaikan kinerja ekonomi Jepang, Amerika Serikat dan kelompok negara berkembang di Asia, terutama Cina. Namun hal tersebut diiringi dengan bayang-bayang tekanan inflasi sebagai dampak peningkatan permintaan domestik terutama di negara maju. Hal itu direspons dengan pengetatan kebijakan moneter sejak semester II/2004 terutama peningkatan suku bunga The Fed. Kebijakan tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi dunia pada 2005/06.<sup>42</sup> ISEI menggarisbawahi faktor lain yang harus diperhatikan dari sisi perekonomian global yakni harga komoditas internasional yang masih tinggi pada 2004 dan kemudian menurun pada 2005/06.

Masih dalam tinjauan isu *Tantangan Makro Ekonomi Pemerintah Baru*, ISEI menyoroti prospek ekonomi Indonesia. Secara umum, Indonesia masih belum mampu memanfaatkan momen pertumbuhan ekonomi global. Ekspor Indonesia terutama non-migas diprediksi hanya mampu tumbuh 4,5% per tahun pada 2004–06. Perkiraan ekonomi 2004–06 juga disusun berdasarkan asumsi *baseline* dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global, regional dan domestik berikut

41 ISEI 2005a: 6–8.

42 ISEI 2005b: 3–9.

kebijakan apa yang akan ditempuh dalam periode tersebut. Walaupun demikian, situasi ketidakpastian di masa mendatang masih menyiratkan berbagai kemungkinan yang berpotensi akan terjadi baik secara global, regional dan domestik. Terkait tantangan makro ekonomi dan sektor riil Indonesia, ISEI melihat ada lima isu kritis yang patut diperhatikan yakni tingginya pengangguran dan kerentanan tenaga kerja, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental yang terkait di dalamnya, ketidakkonsistenan kebijakan, penyelesaian utang Indonesia dan penajaman orientasi kebijakan perdagangan serta peningkatan daya saing ekspor.

Usulan ISEI ketiga bagi pemerintahan baru adalah *Mendorong Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia di Masa Depan*. Pada bagian pertama usulan ini, ISEI menyetujui permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berikut faktor yang memengaruhi lambatnya usaha tersebut yakni masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan kalangan perbankan kendati beragam upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan perhatian terhadap usaha tersebut.<sup>43</sup> Upaya yang harus ditingkatkan ialah pembinaan, pengembangan dan pendanaan kepada sektor UMKM. ISEI menggarisbawahi pentingnya modal namun dalam upaya mengimplementasikan komitemennya, pemerintah baru harus terpusat pada rencana nasional. Kendala yang dihadapi adalah belum ada kejelasan kebijakan industri serta bagaimana kebijakan yang diangkat nanti dapat lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Terkait dengan kebijakan dan strategi perbankan dalam pengembangan UMKM, ISEI menyarankan sejumlah cara untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mempermudah akses UMKM kepada layanan kredit perbankan. Pertama, kebijakan kredit perbankan melalui pengaturan kredit Usaha Kecil dengan menyesuaikan ketentuan perbankan, namun tetap

43 ISEI 2005c: 1-5.

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, pemberian bantuan teknis berupa pelatihan kepada petugas perbankan dalam meningkatkan kemampuan melayani kredit UMKM, aktivitas penelitian yang mendukung penyaluran kredit bagi UMKM berikut penyediaan informasi UMKM melalui sistem informasi terpadu. Ketiga, pengembangan kelembagaan di antaranya dengan upaya memperkuat kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing BPR selain mendorong pembentukan UMKM Center Perbankan yakni penyediaan informasi UMKM dan sarana komunikasi antara bank dan UMKM. Keempat, hubungan kerja sama Bank Indonesia dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait yang selama itu bersentuhan dengan pemerintah khususnya yang berhubungan dengan kebijakan teknis pengembangan UMKM.

Pada usulan keempat terkait *Tantangan yang Dihadapi dalam Penciptaan Lapangan Kerja*, ISEI menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Mengacu pada data kuantitatif, masalah tersebut dilatarbelakangi jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari pertumbuhan lapangan kerja, sementara secara kualitatif masalah pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian kualitas penawaran dan kualitas yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kurang efektifnya fungsi bursa kerja juga dapat menjadi penyebab terjadinya pengangguran yang berdampak pada meningkatnya pengangguran friksional di pasar kerja.

Menurut ISEI, perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan remuneratif hanya bisa dilakukan melalui pembangunan yang ramah lapangan kerja atau pembangunan yang berorientasi serta berbasis pada upaya maksimal dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Upaya tersebut mengharuskan perencana dan pelaksana pembangunan memposisikan sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar sebagai *independent variabel* guna mencapai pertumbuhan dan pemerataan yang selama ini dipertentangkan. ISEI juga menekankan pentingnya memperhatikan



Kegiatan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan penyerapan tenaga kerja | Sumber: Istimewa

empat kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan asumsi-asumsi yang dibutuhkan yakni kebijakan umum, kebijakan sektoral, kebijakan regional dan kebijakan khusus. Di sisi lain banyak pihak yang berpandangan bahwa UMKM dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Kesempatan kerja baru yang dapat diperoleh melalui keberadaan UMKM hendaknya terfokus pada kegiatan dengan penciptaan nilai tambah yang tinggi.

Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah dapat mengarahkan *firms* dalam empat hal.<sup>44</sup> Pertama, mendorong investasi dan ekspor sebagai

44 ISEI 2005d: 5–8.

cara tepat untuk menciptakan kesempatan kerja sekaligus mengatasi masalah ketenagakerjaan termasuk mengatasi disparitas upah. Kedua, perbaikan iklim investasi untuk mendorong kembalinya minat investasi dan ekspor. Ketiga, menyelesaikan sejumlah kegiatan *high profile* seperti Cemex, Exxon dan Cepu untuk mengembalikan persepsi positif investor di Indonesia. Keempat, memperbaiki regulasi terutama dalam biaya *start-up*.

Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah untuk tenaga kerja, ISEI memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, menyelaraskan kenaikan upah minimum regional (UMR) sesuai dengan kenaikan tingkat produktivitas agar tingkat upah riil konstan selama dua tahun berikutnya. Kedua, finalisasi peraturan pemerintah atau Keputusan Menteri khususnya dalam mengurangi biaya *hiring* dan *firing* dengan merasionalisasi ketentuan tentang pembiayaan biaya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan fleksibilitas dalam pekerja kontrak khususnya untuk pekerja muda tanpa pengalaman kerja, mempertahankan fleksibilitas dalam *outsourcing* dengan memperbaiki supervisi dalam subkontraktor dan fleksibilitas dalam jumlah jam kerja per *shift*. Ketiga, membentuk peradilan perburuhan untuk menyelesaikan masalah sengketa perburuhan. Keempat, menunda Undang-Undang Jaminan Sosial dan membentuk komisi ahli untuk mempersiapkan *blue print* persiapan sistem jaminan sosial yang *affordable* dan konsisten dengan semangat penciptaan lapangan pekerjaan.

Usulan kelima ISEI untuk pemerintah baru 2004–09 adalah *Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pada bagian awal, ISEI memberikan tinjauan mengenai kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah. Setelah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan selama tiga tahun, ISEI memandang masih terdapat masalah yang harus dibenahi sehingga perlu dilakukan evaluasi mengenai implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ekonomi daerah setelah tiga tahun pelaksanaan otonomi daerah mencatatkan sejumlah masalah yang memperhatikan di antaranya angka kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketergantungan terhadap

keuangan pusat masih sangat besar. Sebaliknya, investasi swasta belum memberikan perkembangan yang positif, salah satu penyebabnya adalah kompleksitas peraturan pemerintah.

Menurut ISEI, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan agar desentralisasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.<sup>45</sup> Pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan lebih memperjelas distribusi dan wewenang serta klasifikasi posisi di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Selanjutnya menerapkan pemilihan langsung kepada daerah, bupati atau gubernur untuk memberikan edukasi kepada para pemilih di daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dari pemilihan tersebut. Kedua, terkait desentralisasi administrasi, ISEI menggarisbawahi tidak adanya koordinasi yang baik antar-departemen di tingkat pusat terutama departemen teknis. Menurut laporan Bank Dunia, Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia masih berbenturan dengan undang-undang sektoral yang berdampak pada tidak maksimalnya implementasi otonomi daerah karena adanya kecenderungan bahwa UU Sektoral memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 atau Undang-Undang Nomor 25/1999. Dengan demikian permasalahannya ada pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Terkait desentralisasi fiskal, ISEI melihat perlunya penguatan pajak lokal agar dapat dilakukan tanpa harus melalui sistem bagi hasil atau dengan menerapkan sistem *option*. Sebagai contoh, 15% dari PPh perseorangan sebesar 20% menjadi hak pemerintah, sementara 5% lainnya dapat dijadikan diskresi Pemerintah Daerah (Pemda). Apabila Pemda merasa bahwa pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, sementara pada saat bersamaan Pemda membutuhkan masuknya investasi, maka pajak tersebut dapat diturunkan, bahkan jika memungkinkan pajak penghasilannya hanya sebesar 0%.

Desentralisasi ekonomi juga tidak luput dari pandangan ISEI. Menurut ISEI, hal pertama yang harus diperhatikan adalah orientasi

45 ISEI 2005e: 3–8.



Bank Indonesia mendorong perbaikan ekonomi dengan menata sistem perbankan pasca krisis 1998 | Sumber: Istimewa

pelaksanaan otonomi daerah harus mengacu pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu pentingnya menciptakan iklim investasi lokal yang kondusif. Dengan adanya otonomi daerah, patut dihindari pendirian berbagai BUMD yang akan menguasai seluruh kegiatan pasar. Daerah juga diharapkan mampu menciptakan pola pertumbuhan lokal yang berbeda dengan tingkat nasional seperti DKI Jakarta dan Bali. Revisi undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah. Hal terpenting adalah UU tersebut harus mampu diimplementasikan yang dapat terlaksana apabila pemerintah pusat memiliki kepemimpinan dan kesungguhan untuk menyelesaikan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam usulan keenam dengan topik *Menuju Sektor Keuangan yang Sehat*, ISEI menggarisbawahi aspek neraca pembayaran, bahwa neraca transaksi masih mengalami defisit. Selain itu, kondisi sektor riil dan sektor perbankan juga masih rentan sehingga faktor-faktor tersebut memiliki andil yang cukup besar terhadap terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Menurut ISEI, Indonesia harus memiliki strategi pembangunan ekonomi yang terstruktur dengan meninggalkan paradigma lama. Paradigma lama tersebut mengandalkan pada modal asing dan industri besar sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mengubah paradigma tersebut diperlukan perubahan arah visi pembangunan ekonomi menuju suatu perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan atau pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, salah satunya dengan cara merevitalisasi sektor UMKM yang sebagian besar masyarakat Indonesia menyandarkan hidupnya pada sektor ini.

Untuk menciptakan struktur ekonomi Indonesia yang baik, pemerintah melalui Bank Indonesia secara aktif menyusun suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan selama rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan. Sistem tersebut dirumuskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan visi API berikut sasaran yang ditetapkan serta mengacu pada berbagai tantangan yang dihadapi perbankan, API memiliki kerangka dasar yang terdiri dari enam pilar.<sup>46</sup> Pertama, program penguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan memperkuat permodalan bank umum dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Kedua, program peningkatan kualitas pengaturan

---

46 ISEI 2005f: 4–9.

perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan ketidaktergantungan dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas, mengembangkan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas *enforcement* serta konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia.

Program keempat yang disarankan ISEI untuk mewujudkan visi API adalah Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan yang bertujuan meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tinggi standar GCG yang didukung oleh kemampuan operasional termasuk manajemen risiko yang andal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Pada program kelima, ISEI mengusulkan pengembangan infrastruktur perbankan yang bertujuan mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik dan pengembangan skim penjaminan kredit. *Credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya, sementara penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki oleh bank akan meningkatkan transparansi serta efektivitas manajemen keuangan perbankan. Satu pengembangan lainnya yakni skim penjaminan kredit diharapkan akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.

Program keenam yang diusulkan ISEI untuk mewujudkan visi API adalah peningkatan program perlindungan nasabah yang bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Menurut ISEI, sebelum dan sesudah krisis

ekonomi 1997 peranan perbankan relatif tidak berubah, perbankan masih mendominasi sektor keuangan Indonesia sehingga revitalisasi dan peranan sektor ini patut diperbaiki.

Tidak hanya isu-isu dalam negeri, melalui usulan ketujuh terkait *Isu-Isu Pokok Pengelolaan Utang Negara/Bantuan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional*, ISEI memberikan gambaran dan sejumlah saran sebagai opsi untuk mengelola utang dan bantuan luar negeri. Mengawali usulan tersebut, ISEI memaparkan dua konsep utama dalam globalisasi ekonomi.<sup>47</sup> Pertama, globalisasi produksi yang menyebabkan semua negara di dunia dapat menjadi lokasi komponen produksi karena hilangnya batas-batas seperti pajak bea masuk atas bahan-bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri. Kedua, globalisasi pemasaran yang menyebabkan semua negara di dunia dapat menjadi tempat pemasaran bagi barang dan jasa dari wilayah manapun.

Menurut ISEI, globalisasi ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan proses kerja sama perdagangan internasional yang sesungguhnya merupakan salah satu aspek penting dari proses diplomasi ekonomi yang terfokus pada tiga komunitas penting yakni North American Free Trade Area, Uni Eropa dan ASEAN. Indonesia melakukan tiga jenis pendekatan kerja sama internasional yakni kerja sama multilateral melalui organisasi perdagangan dunia atau WTO, kerja sama regional melalui ASEAN dan kerja sama bilateral. Melalui WTO Indonesia memperjuangkan *agricultural* yang mencakup perdagangan *strategic product* di bidang pertanian dan perkebunan antarnegara seperti beras, gandum, kopi, teh dan lainnya. Indonesia juga memperjuangkan sebuah sistem hukum baru yang mengatur tentang *lower tariff reduction* yang dikenal dengan Non-Agriculture Market Access. Perjuangan lain terkait *S & D* (Services and Development) juga dilakukan yakni suatu usaha untuk meningkatkan pelayanan yang meliputi *professional services, education services, financial services, health related and social services* serta keseluruhan aktivitas penjualan yang harus mampu menjadi *autonomous liberalization*. *Service and Development* umumnya mengacu pada proses

47 ISEI 2005g: 1-7.

merancang, memberikan dan meningkatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Satu hal lainnya adalah perjuangan Indonesia melalui isu-isu baru seperti *trade related investment measures* (TRIMs) dan *government procurement*.

Keterlibatan Indonesia melalui ASEAN bertujuan mempercepat liberalisasi perdagangan dunia dalam berbagai sektor. Pada 2007, diharapkan dapat terjadi percepatan integrasi ASEAN dan pemberlakuan tarif bea masuk sebesar 0%, sementara pada 2020 keseluruhan bea masuk akan mencapai 10%. Pada titik ini ASEAN diharapkan menjadi sebuah pasar tunggal (*single market*). Pada usulan ketujuh, ISEI memaparkan pula sejumlah masalah yang harus dihadapi pemerintah terkait pengelolaan utang di masa mendatang di antaranya masalah efektifitas penggunaan utang luar negeri yang terlihat dari rendahnya daya serap yang diakibatkan rendahnya *quality at entry* (aspek perencanaan dan persiapan utang), kondisional utang (terutama untuk pinjaman program) dan masalah sistemik (menyangkut aspek administrasi). Masalah lain ialah pinjaman daerah sebagai turunan kebijakan otonomi daerah, masalah kelembagaan dan integrasi pengelolaan utang, belum sempurnanya perangkat sumber pembiayaan melalui obligasi serta perkembangan ekonomi politik internasional yang memengaruhi kebijakan kreditor.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di masa mendatang, ISEI memberikan sejumlah saran. Pertama, pengamanan rencana penyerapan pinjaman luar negeri untuk mengamankan pembiayaan di tahun berikutnya. Selain itu patut dirancang matriks kebijakan yang dapat dilaksanakan sesuai rencana, sementara pinjaman proyek perlu dimatangkan dalam kesiapannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, terkait pinjaman daerah, perlu dilakukan penyempurnaan rumusan kebijakan peminjaman daerah dan hibah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah, selain penyempurnaan mekanisme penyaluran pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disesuaikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 22/1999. Ketiga, penyusunan strategi

pendanaan luar negeri yang mencakup landasan kebijakan, aspek kelembagaan, mekanisme pengelolaan utang dan kriteria program pemanfaatan utang. Keempat, pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur untuk obligasi.

Program terakhir dalam usulan program dari ISEI untuk pemerintah baru adalah *Mendorong Etika dan Kultur Bisnis yang Sehat*. ISEI mengawali pandangannya dengan penjelasan mengenai etika yang bermakna bagaimana seorang individu dapat bersikap dan bertindak secara benar, dan apabila diterapkan secara berkelanjutan atau berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari hingga dapat menjadi suatu budaya. Terkait dengan penerapan etika oleh pelaku usaha, ISEI menilai bahwa para pengusaha lebih memilih untuk menerapkan sistem *hit run* yakni tindakan untuk mendirikan usaha-usaha yang aman saja.<sup>48</sup> Apabila usaha yang sedang dijalani bergejolak, maka pengusaha tersebut beralih ke bidang usaha lainnya yang lebih aman. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak melanjutkan aktivitasnya. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana cara yang dapat ditempuh agar sebuah usaha dapat bertahan dan bagaimana kelanjutan usaha jika seorang pengusaha berhasil untuk bertahan.

Kendati mengalami mengalami dinamika, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden SBY dapat dikatakan relatif stabil. Di awal pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,69% pada 2005 walaupun pada tahun berikutnya melambat dan mengalami sedikit penurunan pada angka 5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2006 meningkat sebesar 5,5% dari tahun yang diukur dari kenaikan PDB. Seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif terutama di sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,6%, sementara angka terendah di sektor pertambangan dan penggalian yang hanya mencapai 2,2%. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2006 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.338,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 1.846,7 triliun. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada 2006 mencapai

48 ISEI 2005h: 2–6.

6,1%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan mencapai 5,5%. Semua komponen PDB penggunaan mengalami pertumbuhan pada 2006, dengan pertumbuhan tertinggi pada konsumsi pemerintah sebesar 9,6% yang diikuti oleh ekspor 9,6%, konsumsi rumah tangga 3,2%, pembentukan modal tetap bruto 2,9% serta pengaruh pertumbuhan impor sebesar 7,6%.<sup>49</sup>

Pada 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami kenaikan yakni mencapai 6,35% sementara pada 2008 kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 6% namun mengalami sedikit penurunan ke angka 6,01%.<sup>50</sup> Dalam kerangka ekonomi makro Indonesia pada 2006, pemerintah akan tetap mengarahkan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Pemerintah sendiri telah menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN 2006 yang bertujuan mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan secara bertahap.<sup>51</sup> Pemerintah menargetkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan diperkirakan berada pada kisaran 6,5 – 8,5%. Pada 2006, selain berupaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran, tantangan pokok yang dihadapi kebijakan fiskal akan lebih banyak berkaitan dengan upaya untuk terus menurunkan defisit APBN dan mengurangi tingkat rasio hutang terhadap PDB. Hal yang demikian bertujuan untuk mencapai kesinambungan fiskal dengan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber pembiayaan yang tersedia.<sup>52</sup>

---

49 <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2007/02/16/592/perekonomian-indonesia-pada-tahun-2006-mengalami-pertumbuhan-sebesar-5-5-%-.html>.

50 <https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>.

51 <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-2006-target-pertumbuhan-ekonomi-5-5-6-5-%>.

52 <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-2006-target-pertumbuhan-ekonomi-5-5-6-5-%>.

## **Kongres di Kawanua**

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami pertumbuhan terbatas, ISEI menyelenggarakan Seminar Nasional dan Kongres XVI di Manado (18–20 Juni 2006) dengan tema Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh. Kongres XVI memiliki bobot akademis agak berbeda karena panitia, untuk pertama kali dalam pelaksanaan kongres, mengundang berbagai kalangan untuk membuat makalah (*call for papers*) dan menyeleksi makalah yang layak untuk dipresentasikan. Hal ini yang membuat makalah yang masuk dan dipresentasikan pada seminar tersebut cukup banyak. Kongres XVI di Manado menjadi kian istimewa karena dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai ekonom, keduanya tidak hanya membuka dan menutup serta menyampaikan sambutan formal, tapi juga menyampaikan pemikirannya tentang ekonomi Indonesia.

Tema Seminar Nasional dan Kongres XVI ISEI seperti tersebut di atas dipilih dengan pijakan yang kuat. Dibanding dengan negara-negara lain yang tertimpa krisis, Indonesia terbilang negara yang paling lambat pulih sekaligus menunjukkan ada kesalahan dalam pondasi dasar perekonomian Indonesia yang patut diperbaiki. Dalam periode pemulihan tersebut, turut berubah iklim demokrasi Indonesia yang diawali dengan proses desentralisasi termasuk desentralisasi ekonomi yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam memacu pembangunan daerahnya terutama di sektor ekonomi. selain itu Indonesia juga memasuki pemerintahan baru yang dihasilkan dari pemilihan langsung. Desentralisasi dan berjalannya proses demokratisasi menjadi latar belakang perlunya upaya penataan kembali dasar-dasar perekonomian sehingga Pembangunan ekonomi Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan harmonis antar sektor dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Seminar Nasional dan Kongres XVI ISEI terbagi dalam lima subtema yakni Stabilitas Makroekonomi Pasca Krisis; Meletakkan Kembali Pondasi Pembangunan Ekonomi Nasional yang Baru;



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Burhanudin Abdullah di Bank Indonesia | Sumber: Tempo

Strategi Baru Menghadapi Perubahan Konstelasi Global, Strategi dan Alternatif Pembiayaan Pembangunan; dan Mendorong Desentralisasi Fiskal ke Desentralisasi Ekonomi. Seminar Nasional dan Kongres XVI ISEI ditutup dengan *dinner speech* oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pidato Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara itu, Ketua Umum ISEL, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden SBY sekaligus membarikan arahan serta membuka secara langsung Seminar Nasional dan Kongres.

Selanjutnya, Burhanuddin menyatakan bahwa selama lebih dari 50 tahun, ISEI berada di tengah masyarakat Indonesia, menyaksikan dan mengalami pasang-surut perekonomian Indonesia sejak pasca-kemerdekaan yang sangat memprihatinkan, masa ketertutupan yang

ingin menegaskan kepentingan nasional hingga ke era deregulasi dan keterbukaan. Selama itu, ISEI ikut mendiskusikan, menumbuhkan kesadaran hingga akhirnya ikut melakukan perubahan, baik pada level pelaku ekonomi maupun pemutus kebijakan termasuk di dunia usaha dan birokrasi pemerintah. Sebagai sebuah organisasi profesi tempat para ekonom berhimpun, produk yang diharapkan dari keberadaan organisasi ini adalah hasil-hasil pemikiran para ekonom profesional tentang dasar-dasar, arah, strategi, kebijakan dan program-program yang akan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi yakni level yang dapat lebih banyak menyejahterakan rakyatnya secara berkeadilan.

Lebih lanjut Burhanuddin menjelaskan bahwa di dalam negeri, kesadaran untuk tumbuh dan bergerak memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa pada tingkat wilayah dan bahkan pada tingkat individual terus bergerak sehingga proses desentralisasi ekonomi kelihatannya merupakan akhir dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pemerintah daerah yang dilakukan sekarang. Globalisasi, desentralisasi dan demokratisasi menambah kerumitan dalam pengambilan keputusan karena itu ISEI menyambut baik ajakan Presiden SBY untuk memikirkan kembali konstruksi ekonomi Indonesia di masa depan dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan pada saat bersamaan mempertimbangkan ketiga fakta tuntutan kontemporer tersebut yakni globalisasi, desentralisasi, dan demokratisasi.<sup>53</sup> Di bagian akhir sambutannya, Burhanuddin menambahkan bahwa Kongres XVI ISEI juga akan membahas dan mengesahkan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ia yakin bahwa amandemen tersebut akan bermanfaat bagi perkembangan ISEI sebagai organisasi di masa akan datang.

Dalam amanatnya di depan peserta Kongres, Presiden SBY mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan kepala daerah setempat karena telah menjadi tuan rumah yang baik. Kepala negara kemudian menyampaikan tiga hal yang dikedepankan

---

53 Yudhoyono dalam ISEI, 2006b: xi.

secara ringkas.<sup>54</sup> Pertama adalah apresiasi kepada ISEI sekaligus memberikan tantangan bagi para anggotanya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Kedua, Presiden mengajak para peserta pada Seminar Nasional dan Kongres untuk sedikit melakukan sebuah refleksi dan orientasi tentang gerak pembangunan ekonomi di Indonesia pascakrisis karena penggal sejarah pascakrisis tidak hanya memberi pelajaran, tapi juga menjanjikan banyak harapan dan peluang. Ketiga, adalah satu pemikiran agar dibahas, dikritisi dan diuji sebagai salah satu bagian upaya besar membangun ekonomi di Indonesia menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang hakiki. Presiden menaruh harapan besar pada ISEI tidak hanya karena mengenal sebagian dari pengurus dan anggotanya, tetapi juga mengetahui kapasitas masing-masing dengan beragam keahlian di antaranya *thinkers, philosophers* di bidang ekonomi, *business leaders, policy makers* dan lain sebagainya. Presiden yakin bahwa tidak hanya dalam rangkaian kongres, ISEI akan memberikan sesuatu yang benar-benar menjadi resep dan solusi dari permasalahan ekonomi yang kompleks dan tengah dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

Presiden SBY lebih lanjut menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi akan memerlukan waktu yang lama jika hanya menggantungkan pada reformasi ekonomi dan perbaikan iklim investasi yang merupakan langkah-langkah konvensional. Menurutnya dibutuhkan sebuah percepatan seperti paket kebijakan investasi. Presiden sendiri telah mengeluarkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lainnya kendati hal itu semua membutuhkan proses karena reformasi dan rekonstruksi tidak seperti membalik telapak tangan. Presiden menunggu pikiran-pikiran ISEI terkait dua hal. Pertama tentang penciptaan lapangan kerja. Ia menggambarkan sejumlah sektor yang dianalogikan sebagai sebuah pintu masuk atau jembatan seperti pembangunan bio-energi di Indonesia, sebuah wilayah yang punya lahan, punya tradisi bertani, ada pasar yang tersedia dan ada teknologi yang tersedia. Selain itu, ISEI seyogianya juga memikirkan peningkatan tenaga kerja di luar negeri.

---

54 ISEI 2006b: viii.

Presiden menjelaskan bahwa ia telah melawat ke negara-negara di Timur Tengah, Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan Jepang namun tampaknya Indonesia belum memanfaatkan peluang yang ada di negara-negara tersebut. Pada bagian akhir, Presiden menggarisbawahi pentingnya stabilitas namun yang diinginkan adalah stabilitas *plus, growth, plus* lapangan kerja dan *plus quality of life*. Ia berharap ISEI dapat melengkapinya lagi selain mengkritisi dan mendiskusikan pikiran-pikiran yang disampaikan Presiden sebagai bagian untuk meletakkan kembali dasar-dasar pembangunan ekonomi yang kokoh sekaligus menggiatkan, mengelola dan mewujudkannya untuk menuju sasaran-sasaran yang dikehendaki bersama.

Pada diskusi subtema *Strategi dan Alternatif Pembiayaan Pembangunan*, Gubernur Bank Indonesia 1988–93 Adrianus Mooy tampil membawakan makalah berjudul “Bagaimana Indonesia Memanfaatkan Sumber-sumber Pembiayaan Internasional.” Pada bagian awal pemaparannya, Mooy menjelaskan bahwa judul makalah tersebut didahului dengan kata bagaimana sehingga jawabannya dapat bersifat strategis-ekonomis dan *forward looking* serta teknis-ekonomis operasional. Menurutnya, membangun membutuhkan dana dan daya, namun tidak semua negara memilikinya dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya penerimaan ekspor tidak memadai untuk membiayai kebutuhan impor. Dengan demikian terdapat suatu *foreign exchange gap*. Dalam situasi seperti itu secara teoritis terdapat dua pilihan strategi.<sup>55</sup> Pertama, hanya membangun dengan apa yang dimiliki atau secara khusus mengadakan investasi sesuai dengan dana tabungan yang tersedia di dalam negeri yang rendah serta hanya mengimpor sesuai dengan devisa yang tersedia. Kedua, bagi negara-negara berkembang dengan ekonomi yang terbuka seperti Indonesia sebenarnya ada opsi tambahan. Di samping kemampuan sendiri, memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan internasional untuk menutup kekurangan atau *savings-investment gap* sekaligus mengisi *foreign exchange gap*. Keuntungan pada pilihan pertama adalah apapun yang akan terjadi, maka negara

---

55 Mooy dalam ISEI: 2006b: 602.

tidak memiliki utang kepada siapa pun. Sementara kerugiannya ialah Indonesia hanya dapat tumbuh dengan lamban. Keuntungan pada pilihan kedua adalah Indonesia dapat membangun dan bertumbuh lebih cepat untuk menjadi negara maju. Sementara kerugiannya ialah dana-dana pinjaman cepat atau lambat harus dibayar sehingga menuntut sejumlah pemanfaatan yang efektif agar dapat meningkatkan kemampuan terutama membayar kewajiban.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan bahwa dirinya pun agak bertanya dengan tema kongres karena dalam pemahamannya ekonomi Indonesia selama ini sudah ada dan hanya letaknya yang salah.<sup>56</sup> Dengan demikian, menurutnya, kita tinggal mencari, bagaimana dasarnya, di mana dan kita kembalikan ke tempat yang benar. Sangat mungkin yang dimaksud panitia adalah *membangun kembali dasar ekonomi Indonesia yang kokoh*. Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa selama ini perdebatan di Indonesia juga tidak pernah selesai kendati telah sering dibahas mengenai globalisasi, *capitalism*, sistem pasar di berbagai seminar. Bahkan menurutnya, ISEI sudah berkali-kali menyelenggarakan seminar, pertemuan ilmiah baik yang serius maupun bincang santai terkait masalah tersebut. Mengutip Stiglitz dalam karyanya, *Globalization and Its Discontent*, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Stiglitz telah mengatakan dengan jelas agar negara-negara berkembang dapat bertahan hidup dengan baik, mereka harus menjaga APBN secara bertanggung jawab. Selain itu, negara-negara tersebut tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Hal itu bermakna, pengeluaran harus sesuai dengan uang yang dimiliki. Walaupun demikian bukan berarti tidak boleh defisit. Terakhir, Sri Mulyani sepakat dengan Stiglitz bahwa negara berkembang harus memiliki pemerintahan yang efektif, dengan sistem yudisial yang kuat dan mandiri, *accountable*, demokratis, terbuka, transparan dan bebas KKN—korupsi, kolusi, nepotisme.

Pada kesempatan berikutnya, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyampaikan pidato dengan judul “Mempertemukan

56 Indrawati dalam ISEI 2006b: 880.



Boediono dan Burhanuddin Abdullah usai rapat di Komisi XI DPR |  
Sumber: Tempo

Pandang, Menyerasikan Langkah.” Dalam pidatonya itu, Boediono kembali mengangkat strategi pembangunan dan globalisasi, dua hal yang banyak dibahas selama seminar dan kongres berlangsung.<sup>57</sup> Terkait strategi pembangunan, ia menggarisbawahi agar jangan melupakan sejarah. Menurutnya, apapun bentuk strategi yang disepakati tidak boleh berlawanan dengan sejarah sehingga pengalaman bangsa yang kelam pada masa lalu terutama pada masa kolonial harus menjadi

<sup>57</sup> Boediono dalam ISEI 2006b: 882.

pelajaran karena dapat memberi petunjuk kepada kita apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang harusnya kita hindari. Kedua, terkait globalisasi, bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapinya. Pesan utama yang ingin disampaikan ialah bahwa globalisasi suatu kenyataan sejarah. Globalisasi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang dan cakrawala baru untuk maju lebih cepat, namun di sisi lain ia membawa risiko-risiko baru. Boediono kemudian menjelaskan pengalaman sejarah Indonesia yang telah dilalui sejak masa kemerdekaan berikut sistem politik dan ekonomi yang pernah diterapkan serta kelemahannya. Menurutnya, era reformasi merupakan reaksi terhadap pengalaman Indonesia terutama setelah krisis ekonomi membuka tabir yang sebelumnya menutupi kelemahan tersebut.

Lebih lanjut Boediono menjelaskan bahwa baik atau buruk globalisasi tergantung pada siapa kita bertanya karena baik masyarakat atau bahkan para ahli sekali pun berbeda pandangan. Sebagai pemerintah dan pelaku ekonomi nasional, Indonesia harus dapat menjalankan ekonomi pasar nasional dan perlu membangun perangkat-perangkat sistem ekonomi pasar nasional untuk memastikan agar kinerjanya mencapai standar kinerja internasional. Hal itu pula yang dilakukan oleh negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem nonpasar seperti Cina, Polandia, Hungaria, Rusia dan lainnya. Pembangunan sistem ekonomi pasar nasional yang modern dan dapat bekerja dengan baik merupakan prakondisi bagi keberhasilan Indonesia dalam bertarung di kancha ekonomi global. Yang saat ini diperlukan ialah membangun kemampuan diplomasi atau kemampuan melakukan negosiasi di forum-forum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut Boediono, kemampuan berdiplomasi Indonesia harus diakui masih tertinggal bahkan dengan beberapa negara ASEAN. Diplomasi yang efektif memerlukan *blueprint strategy* yang jelas dan dipahami oleh pelaksananya, kontingen negosiator dan staf pendukung yang handal dan terorganisir secara baik serta jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung.

Kongres di Kawanua ditutup dengan pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wakil Presiden menyampaikan bahwa sejak didirikan 51 tahun lalu, ISEI sebagai organisasi hidup di tengah masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naik-turunnya perjalanan perkembangan ekonomi Indonesia dan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan bangsa. Melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan secara aktif oleh para anggotanya, baik yang sebagai pejabat negara, anggota dewan, peneliti dan kalangan swasta, keberadaan ISEI secara terus-menerus memberikan *check and balance* terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Kendati terdapat perbedaan pemikiran dalam ISEI, hal itu menjadi kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan disadari selalu dibatasi dengan berbagai pilihan. Terlepas dari perkembangan perekonomian Indonesia, Jusuf Kalla juga menyampaikan sejumlah permasalahan lama yang belum terselesaikan seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009.<sup>58</sup> Pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan rendah dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Kedua, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Ketiga, tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Keempat, kesenjangan pembangunan antardaerah masih lebar. Kelima, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keenam, rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan. Ketujuh, belum menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggaraan negara dan lembaga kemasyarakatan.

Hasil-hasil Kongres di Manado kemudian ditindaklanjuti ISEI dengan menerbitkan berbagai buah pemikiran yang dituangkan dalam sebuah publikasi berjudul *Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh*.<sup>59</sup> Sejumlah tokoh dan ekonom ISEI terkemuka

---

58 Kalla dalam ISEI 2006b: 889.

59 Abdullah dalam ISEI 2006b: 1.

menjadi penyusun publikasi tersebut yakni Armida Alisjahbana, Bambang P. S. Brodjonegoro, Burhanuddin Abdullah, M. Hadi Soesastro, Mangara Tambunan, Muliawan Darmansyah Hadad, Pos M. Hutabarat, Prasetyono Wirdjojo Malang Joedo, Robert Simanjuntak, Sri Adiningsih dan Suahasil Nazara. Judul publikasi yang juga mengambil tema Kongres di Manado berisi berbagai saran pemikiran ISEI kepada pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dalam pengantar publikasi, ISEI memandang bahwa tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang akan datang adalah memperpendek masa transisi ekonomi yakni mensukseskan pelaksanaan (i) demokratisasi (ii) desentralisasi dan (iii) globalisasi. Upaya percepatan pemulihan ekonomi sendiri menjadi prioritas pemikiran ISEI mengingat setelah krisis ekonomi pada Juli 1997 mengalami masa transisi menuju ke arah kebangkitan ekonomi yang akan memakan waktu cukup panjang. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi melamban karena investasi tidak banyak terealisasi sementara ekonomi dunia sedang mengalami ketidakseimbangan global. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya disebabkan oleh menurunnya jumlah investasi dari dalam dan luar negeri serta tidak kondusifnya iklim usaha (biaya usaha yang tinggi), tetapi juga disebabkan oleh dinamika politik dan hukum yang berkembang di masyarakat secara harmonis atau tidak searah dengan mekanisme ekonomi atau pasar yang terjadi di masyarakat.

Selain penyelenggaraan Seminar Nasional, Kongres di Kota Manado, seperti tradisi selama itu, menjadi ajang pemilihan ketua umum ISEI untuk periode 2006-2009. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin Abdullah kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI. Ia mendapat dukungan 39 dari 44 Pengurus ISEI Cabang. Pemilihan ketua umum ISEI dipimpin oleh mantan Ketua ISEI Marzuki Usman. Selain memilih ketua umum baru, Kongres juga menetapkan Kota Padang sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres XVII yang akan diselenggarakan pada 2009 serta Kota Samarinda dan



Indonesia bangkit dalam gerak ekonomi | Sumber: Bank Indonesia

Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Pleno I dan Sidang Pleno II pada 2006.

Burhanuddin Abdullah yang tengah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan terima kasih kepada para peserta kongres dan anggota ISEI yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin ISEI. Selain itu, Burhanuddin juga mengemukakan tugas utama yang akan dilakukan ISEI yakni membuat cetak bitu pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka kongres ISEI tersebut.<sup>60</sup> Lebih lanjut Burhanuddin menambahkan bahwa ISEI juga akan memikirkan

<sup>60</sup> *Antara*, 20 Juni 2006.

konsep ideal perencanaan pembangunan kembali Yogyakarta dan Jawa Tengah usai diterpa bencana alam gempa bumi. Selain itu ia juga akan meminta perbankan di kedua daerah tersebut agar memberikan perhatian khusus dalam membantu pendanaan bagi pengembangan industri kerajinan terutama di wilayah yang mengalami kerusakan parah.

Pengurus Pusat ISEI periode 2006–2009 dilantik pada 11 Agustus 2006 di Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia. Dalam sambutan pelantikan, Burhanuddin Abdullah menganggap tahun 2006 sebagai tahun untuk mulai bangkit dan mulai bekerja keras. “Tahun 2004 kita selalu mengatakan Indonesia menangis, tahun 2005 sering orang mengundang saya, Indonesia berzikir, zikir bagus tapi di rumah saja. 2006 ini mulai besok Indonesia bekerja,” tutur Burhanuddin.<sup>61</sup> Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kerja keras tidak ada gantinya karena kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui kerja keras dan kemauan yang keras pula. Acara pelantikan pengurus baru ISEI dihadiri kalangan pemerintahan, akademisi, perbankan dan dunia usaha. Dalam kesempatan tersebut Burhanuddin juga memaparkan bahwa secara keseluruhan pada 2006 terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yakni *trend* makroekonomi, *trend* kehidupan sosial dan lingkungan serta *trend* industri. Ketiga *trend* tersebut menurutnya harus segera diselesaikan karena selama ini apa yang dilakukan oleh bangsa dinilai kurang daya dan upaya yang bekerja keras.

Semangat untuk bekerja keras juga diupayakan oleh Burhanuddin Abdullah di institusi Bank Sentral yang ia pimpin. Bank Indonesia mencanangkan 2006 sebagai tahun integritas sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia perbankan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menurutnya penancangan tersebut tidak berarti Bank Indonesia dihuni oleh malaikat, tetapi bagaimanapun ke depan kesempurnaan bisa dicapai. Hal tersebut ia sampaikan di Makassar saat menghadiri ramah tamah *A Bulu Sibatang*

61 <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-654821/gubernur-bi-2006-tahun-bekerja>.

atau kesepakatan ISEI dengan peserta seminar regional ISEI dan penancangan implementasi *Pappaseng Taro Ada Taro Gau* atau pesan-pesan adat untuk meningkatkan pengabdian dan integritas pegawai Bank Indonesia Makassar.

Ia menambahkan bahwa sebuah bangsa dan masyarakat akan besar apabila kepercayaan sudah terwujud dengan baik, kendati kondisi saat itu belum menggembirakan. Terkait pertumbuhan ekonomi, Burhanuddin berharap akan mencapai 5 – 5,7% pada 2006 dengan syarat seluruh elemen bangsa ikut memperbaiki dunia perbankan. Selain itu ia juga berharap ISEI yang menjadi wadah berhimpunnya para sarjana ekonomi dalam dua-tiga tahun akan kembali aktif setelah beberapa tahun sebelumnya kurang menggema kegiatannya. “Mungkin pada krisis lalu, ISEI dianggap tiarap, tetapi dalam tiga tahun terakhir ini kegiatan-kegiatannya sudah banyak di antaranya seminar yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.<sup>62</sup>

---

62 <https://www.antaraneews.com/berita/31655/bi-canangkan-2006-tahun-integritas>.



# Pascakrisis

## Menghadapi Disrupsi

**M**emasuki tahun 2008 dunia dihadapkan pada krisis keuangan global. Krisis tersebut berkaitan dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat yang memburuk dan berlanjut menjadi masalah yang serius. Keterbukaan ekonomi antarnegara tak pelak berpotensi pada terjadinya resesi di sebuah negara yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian di negara lain termasuk ketika perekonomian AS mengalami guncangan yang kemudian berdampak pada perekonomian global sekaligus memengaruhi stabilitas ekonomi global di sejumlah kawasan. Pada masa lalu, tepatnya pada 1925, krisis keuangan pernah menerpa AS yang berawal dari kredit perumahan.<sup>1</sup> Pemerintah Federal AS waktu itu menetapkan undang-undang tentang hipotek yang memberikan kemudahan bagi para kreditor termasuk kredit kepemilikan rumah sehingga banyak lembaga keuangan pemberi kredit di AS menyalurkan kredit kepada masyarakat termasuk kepada mereka yang sesungguhnya secara finansial tidak layak untuk memperolehnya. Kondisi tersebut memicu kasus kredit macet di sektor properti dan mengakibatkan efek domino yang kemudian mengarah pada bangkrutnya sejumlah lembaga keuangan di AS. Institusi pembiayaan sektor properti sendiri umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yakni institusi keuangan.

Perusahaan pembiayaan kredit properti memperoleh jaminan berupa surat utang yang dijual kepada berbagai institusi investasi dan

1 <https://www.antaraneews.com/berita/1801289/berawal-dari-amerika-serikat-krisis-keuangan-menyebar-ke-eropa-asia>.

investor di sejumlah negara kendati surat utang tersebut tidak didukung dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan untuk membayar kredit perumahan yang layak. Hal ini berakibat pada terjadinya tunggakan kredit properti sehingga perusahaan pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada institusi-institusi keuangan baik kepada bank investasi maupun aset manajemen. Pada titik ini, likuiditas pasar modal dan sistem perbankan terpengaruh dan mengakibatkan terkurasnya likuiditas institusi-institusi keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban. Institusi keuangan yang memberikan pinjaman mengarah pada kebangkrutan dan pada prosesnya memengaruhi likuiditas institusi keuangan yang lain baik yang berada di dalam maupun di luar AS terutama institusi yang menanamkan modalnya melalui instrumen institusi keuangan besar di negara tersebut. Dampak paling parah dari krisis tersebut adalah tidak berfungsinya sektor keuangan AS yang kemudian menjalar pada tidak berfungsinya sektor keuangan dunia.<sup>2</sup> Pada titik ini krisis global bermula.

Profil risiko pinjam-meminjam likuiditas melonjak secara mendadak sepanjang 2008 terutama setelah bank investasi terbesar keempat AS yakni Lehman Brothers mengalami kejatuhan pada 15 September 2008.<sup>3</sup> Likuiditas secara tiba-tiba mengering di seluruh dunia yang mengakibatkan kegiatan ekonomi global bergerak melambat. Dengan cepat krisis di Amerika Serikat berdampak ke negara lain melalui dua jalur utama yakni perdagangan dan sektor finansial. Di sisi perdagangan, negara-negara pengeksport komoditas sumber daya alam terdampak sangat kuat karena kinerja ekspor tertekan dengan jatuhnya harga. Sementara dari jalur transaksi finansial, dampak krisis ekonomi global menjalar ke kawasan Asia yang terlihat dari penurunan bursa saham dan depresiasi nilai tukar akibat perilaku *risk aversion* para investor asing. Situasi tersebut memengaruhi ekonomi negara maju yang diprediksi secara keseluruhan hanya tumbuh 1%

---

2 Bank Indonesia 2008.

3 Schapiro 2010: 4.

pada 2008. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan angka pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,7%. Sebagai imbas dari krisis ekonomi global, ekonomi negara berkembang turut melambat terutama menurunnya kinerja sektor eksternal. Hampir sebagian besar ekspor negara Asia jatuh akibat menurunnya permintaan khususnya dari negara-negara industri maju. Selain itu, mayoritas bursa di Asia juga mengalami tekanan yang terlihat dari menurunnya bursa saham yang menurunkan tingkat kesejahteraan dan indeks keyakinan. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2008 yang semula diperkirakan mencapai 4,1% pada awal 2008 direvisi menjadi 3,9% pada September 2008 dan direvisi kembali menjadi 3,4% pada Januari 2009. Hal itu menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia.<sup>4</sup>

Perlambatan ekonomi di beberapa negara Asia seperti Malaysia dan Thailand terlihat pada triwulan keempat 2008 sementara di sejumlah negara yang termasuk kategori negara industri baru Asia seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan mengalami kontraksi ekonomi akibat menurunnya ekspor produk teknologi tinggi atau padat modal. Pada awal 2008, harga komoditas dunia terus meningkat yang dipicu oleh masih tingginya permintaan dari negara berkembang selain dolar Amerika yang melemah. Namun, pada perkembangannya harga turun secara drastis seiring dengan krisis finansial global yang mengakibatkan resesi serta menurunnya permintaan minyak. Harga minyak bahkan terus menurun kendati OPEC sudah mengumumkan penurunan produksi sebanyak tiga kali yakni pada September, Oktober dan Desember. Di samping itu, harga komoditas turun yang dipicu oleh resesi global dan menyebabkan turunnya permintaan komoditas dunia. Menurunnya harga komoditas internasional berdampak pada melemahnya kinerja neraca pembayaran terutama di negara-negara pengekspor.

---

4 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009: 6.

## Di Ambang Krisis dan Stagnansi

Krisis keuangan di AS akhirnya berdampak di Indonesia terutama menjelang akhir 2008.<sup>5</sup> Pada triwulan ketiga 2008 perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan di atas 6%, namun memasuki triwulan keempat mulai mendapat tekanan berat. Hal itu terlihat pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena menurunnya kinerja ekspor. Pada sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sementara nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan secara drastis. Selisih risiko dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan signifikan di pasar keuangan. Peningkatan tersebut mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. Dalam situasi demikian, posisi perekonomian Indonesia tidak lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1% pada 2008.<sup>6</sup>

Awalnya, pemerintah Indonesia berkeyakinan krisis di AS tidak akan berdampak terhadap perekonomian negeri ini karena memiliki pondasi yang kuat. Ternyata hal itu tidak terbukti seperti yang terlihat dari sejumlah indikator yakni menurunnya indeks harga saham di BEI secara tajam, menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang dianggap sudah menembus ambang batas psikologis yakni Rp 12.190 per USD 1 pada Mei 2008 hingga sektor perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas.<sup>7</sup> Pemerintah bahkan menemui kesulitan mendapatkan pinjaman di pasar keuangan. Krisis keuangan dan perlambatan ekonomi mulai dirasakan masyarakat; makin banyak pemutusan hubungan kerja dalam skala besar pada sektor industri. Selama rentang Januari 2009 sebanyak 24 ribu lebih orang mengalami pemutusan itu sementara lebih dari 11 ribu orang terpaksa dirumahkan.<sup>8</sup>

5 Siswosoemarto, Hasibuan, Iskandar 2012: 24.

6 Siswosoemarto, Hasibuan, Iskandar 2012: 24.

7 "Rupiah Terus Merosot," <https://fiskal.kemenkeu.go.id>

8 *Liputan6*, 6 Februari 2009.



Momen ikonik krisis keuangan 2008 adalah kolapsnya perusahaan Lehman Brother di Aamerika Serikat | Sumber: Istimewa

Ketika terjadi krisis, titik paling rawan terletak pada sektor perbankan karena sektor ini mengalami krisis finansial terutama pada likuiditas. Walau demikian, bank BUMN dapat dikatakan masih dapat bernapas karena pemerintah menyuntikkan dana hingga 15 triliun Rupiah. Namun, tidak demikian yang terjadi pada bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas terbatas saat krisis moneter 2008 karena pada umumnya bank-bank tersebut hanya mengandalkan pinjaman di pasar uang antar-bank. Kondisi likuiditas yang demikian ketat membuat mereka mengalami kesulitan sementara bank besar memilih menjaga likuiditas. Situasi yang sulit itu semakin bertambah dengan tidak diberlakukannya peminjaman dana nasabah. Pemerintah hanya mengeluarkan keputusan yang menaikkan penjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari simpanan maksimal 100 juta Rupiah menjadi 2 miliar Rupiah.



Suasana Bursa Efek Indonesia di Jakarta sekitar Januari 2008 | Sumber: Tempo

Kendati tidak berdampak panjang, krisis moneter 2008 telah mengguncang perekonomian Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama lebih solid dalam menghadapinya karena berkaca dari pengalaman krisis sebelumnya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan pada Oktober 2008, antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2008 untuk memperketat fungsi *lender of the last resort* Bank Indonesia dengan memperluas aset yang dapat dijadikan agunan oleh bank guna mendapatkan pinjaman. Perppu tersebut diikuti dengan Perppu Nomor 3 Tahun 2008 yang berisi kebijakan untuk memperkuat peran LPS pada masa krisis dan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang menetapkan mekanisme, tata

cara dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah serta menangani krisis. Peran penting LPS ialah memberikan jaminan atas simpanan nasabah bank serta aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>9</sup>

Selain itu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan peraturan untuk memudahkan emiten melakukan *buyback*, sementara Bursa Efek Indonesia melarang transaksi *short selling* serta membatasi perdagangan marjin. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi aksi jual pada saat terjadi penurunan harga sebagai upaya untuk meredam volatilitas di pasar saham. Di sisi lain, untuk mengatasi ketatnya likuiditas, bank menghapus pembatasan saldo harian pinjaman valuta asing jangka pendek dan fasilitas *swap* guna memperoleh likuiditas yang diperpanjang dari tujuh hari menjadi satu bulan. Berbagai upaya tersebut mampu menjadikan krisis moneter 2008 tidak berdampak panjang di Indonesia. Pada semester kedua 2009 sudah terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi di Indonesia. Bahkan pada 2010 perekonomian Indonesia sudah dapat dikatakan pulih yang ditandai dengan pertumbuhan yang mencapai 5%.

## **Membincangkan Sistem Ekonomi**

Di tengah upaya pemerintah memulihkan kondisi perekonomian, ISEI melaksanakan Kongres XVII di Bukittinggi, Sumatera Barat (30 Juli – 1 Agustus 2009) dengan tema Rekonstruksi Sistem Ekonomi untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global. Sistem ekonomi Indonesia telah menjadi bahan diskusi di kalangan anggota dan pengurus ISEI dari waktu ke waktu. Sedikitnya tiga kali ISEI merumuskan dan menjabarkan sistem ekonomi Indonesia dan diwujudkan dengan terbitnya buku *Demokrasi Indonesia* (1990), *Ekonomi Pasar Terkelola* (2000) dan *Reformasi Ekonomi Indonesia Sesuai UUD 1945 yang Diamandemen* (2006).

---

<sup>9</sup> Hasyim 2024: 400.

Ketua Umum ISEI Burhanuddin Abdullah dalam sambutan pembukaan Kongres menyatakan rasa syukur bahwa di tengah krisis global yang melanda dunia, Indonesia bersama Cina dan India merupakan negara yang masih mencatat pertumbuhan cukup tinggi di kawasan Asia.<sup>10</sup> Pencapaian itu merupakan hasil kerja keras dalam membangun fondasi yang lebih kokoh dalam rangka menopang kegiatan perekonomian. Selain itu, perbaikan iklim usaha dan kebijakan perekonomian yang dilakukan secara lebih terukur dan terarah juga berkontribusi bagi bertumbuhnya gairah usaha.

Hal lain yang digarispawahi oleh Burhanuddin ialah proses desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang terus disempurnakan telah menumbuhkan pusat-pusat kegiatan otonomi di daerah. Bahkan sejumlah pemimpin daerah yang kreatif mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan hasil yang sangat signifikan bagi peningkatan ekonomi di daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang dengan keberlanjutan proses demokrasi dan terpeliharanya stabilitas politik.

Di tengah krisis global yang harus dihadapi, ISEI percaya krisis juga menawarkan kesempatan bagi Indonesia paling tidak untuk memperbaiki diri, merekonstruksi tatanan ekonomi agar dapat segera menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Burhanuddin, tantangan utama bagi perekonomian Indonesia saat itu ialah bagaimana agar dapat bertahan tumbuh sekaligus mengambil peluang dari turbulensi ekonomi. Kunci keberhasilannya terletak pada kesiapan untuk menjawab perubahan tatanan ekonomi dunia. Hal itulah mengapa Kongres XVII ISEI mengambil tema tentang rekonstruksi sistem ekonomi.

Pembukaan kongres dihadiri Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka kongres. Dikatakan, dalam kurun satu dekade terakhir, Indonesia mengalami dua kali krisis yang mengubah tatanan kebijakan,

<sup>10</sup> Abdullah dalam ISEI 2009: 5,

aturan, dan pola pikir secara mendasar. Krisis pertama pada 1997 telah mendorong terjadinya reformasi besar di bidang ekonomi dan keuangan hingga bidang politik dan sosial. Sementara krisis kedua, pertengahan 2007, yang diawali dengan membengkaknya masalah kredit perumahan di AS menjadi masalah finansial hingga akhirnya meruntuhkan perekonomian global.

Menteri mengajak ambil hikmah mengapa negara sebesar AS dengan sistem keuangan yang sangat maju bisa jatuh akibat permasalahan di bagian kecil dari seluruh kegiatan keuangan. Kasus *subprime mortgage* di AS menjadi bukti nyata bahwa tanpa aturan dan pengawasan pemerintah yang memadai akan timbulkan kegagalan pasar sehingga terjadi kegiatan manipulatif untuk mengejar keuntungan semata tanpa menghiraukan risikonya.<sup>11</sup> Butuh waktu cukup lama bagi pemerintah AS untuk memulihkannya.

Disampaikan Sri Mulyani, melalui reformasi telah dibangun tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa. Indonesia berhasil bangkit dari sebuah negara yang tata kelola pemerintahannya dipandang sebelah mata karena banyak kasus KKN, menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Menteri mengingatkan kembali tiga hal utama yang patut dibenahi dalam melaksanakan reformasi yakni aturan, sistem dan birokrasi. Aturan yang telah disusun harus tegas, jelas dan mencerminkan rasa keadilan, sementara pembenahan sistem mutlak diperlukan. Sistem otoriter dan sentralistik cenderung menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui reformasi, desentralisasi kebijakan dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan. Hal itu mendorong daerah berlomba mengembangkan potensi masing-masing untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Selain aturan dan sistem, birokrasi perlu diperbaiki. Reformasi birokrasi merupakan proses berkesinambungan oleh seluruh jajaran dari tingkat paling tinggi hingga pelaksana. Berjalannya reformasi birokrasi akan mampu memberi arti yang nyata bagi masyarakat

---

11 Indrawati dalam ISEI 2009: 14.

terutama untuk mengubah perilaku dan cara berfikir para birokrat. Menteri Sri Mulyani mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks dan tingkat persaingan dengan negara lain semakin kompetitif.

Tampil dalam diskusi kongres, antara lain, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, guru besar FEUI dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menulis makalah “Mencari Sistem Ekonomi-Politik yang Cocok bagi Indonesia di Awal Abad Ke-21.” Ia mengawali pembicaraannya dengan melakukan refleksi terhadap sejarah kebijakan ekonomi yang tidak lepas dari situasi politik pada akhir dekade 1950. Menurut ekonom senior yang pernah menjabat Duta Besar di Amerika Serikat itu, dengan berbagai manuver pada tataran normatif tampak bagaimana pemerintah demi pemerintah di Indonesia berusaha melakukan upaya legitimasi dari gerakan ke “kiri” ataupun ke “kanan”—paham aliran yang akan selalu muncul dalam politik dan ekonomi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–66), Presiden Sukarno melakukan upaya-upaya legitimasi yang mahal dan kompleks melalui berbagai kegiatan indoktrinasi Manipol/USDEK<sup>12</sup> secara luas pada hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut terus dilakukan hingga ke tingkat makin abstrak dalam indoktrinasi Nasakom<sup>13</sup> dengan tujuan mencetak kader revolusi yang loyal dan penuh dedikasi melaksanakan doktrin Ekonomi Terpimpin.<sup>14</sup> Gerakan-gerakan ke kiri tersebut, seturut Dorodjatun, melakukan penghancuran terhadap sistem ekonomi yang dijumpai pada masa Demokrasi Parlementer (1950–59) yang diwarisi dari Belanda dan diformulasikan dalam Perjanjian KMB.

Lebih lanjut Dorodjatun menjelaskan ketika terjadi peralihan kekuasaan, rezim Orde Baru membangun kembali kekuatan

12 Akronim Manifesto Politik, meliputi Undang-Undang Dasar 1945; Sosialisme Indonesia; Demokrasi Terpimpin; Ekonomi Terpimpin; Kepribadian Bangsa.

13 Akronim Nasionalis, Agama, Komunis; politik “penyatuan” paham/aliran di Indonesia versi Presiden Sukarno.

14 Kuntjoro-Jakti dalam ISEI 2009: 29.

dunia usaha swasta, termasuk mengembalik-an peranan PMA dan PMDN dengan meniru skim *Nippon Inc.* yang memanfaatkan dana dari *boom* minyak (1974 dan 1978). Dana itu disalurkan bank-bank pemerintah kepada konglomerat tertentu dan BUMN terpilih. Skim itu menyuburkan praktik politik KKN yang akhirnya menghancurkan seluruh struktur perbankan dan keuangan Indonesia yang langsung diikuti kebangkrutan ratusan ribu perusahaan swasta, bank, lembaga keuangan dan BUMN berik-ut utang negara yang mencapai ratusan triliun Rupiah. Kebangkrutan rezim Orde Baru membuka pintu perubahan melaksanakan reformasi, demokratisasi dan desentralisasi.

Namun, jelas Dorodjatun, kesulitan dalam menemukan kembali dan menerapkan suatu sistem ekonomi di Indonesia tampaknya bukan hanya disebabkan oleh penyimpangan yang terjadi di dalam sistem politik yang berdampak pada kesalahan fatal pengambil kebijakan, tapi lebih disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi pemerintah demi pemerintah dalam menguasai atau mengendalikan pasar. Indonesia tampak telah memasuki wilayah situasi kondisi *point of no return* seiring dengan proses globalisasi yang makin berkembang sehingga pilihan kebijakan nasional hanyalah bagaimana cara agar Indonesia membangun posisi daya saing yang tangguh dan menjaga keberlanjutannya di masa depan.

Sementara, dalam acara makan malam, Wakil Presiden Boediono menyampaikan pidato bahwa krisis yang berlangsung telah memberi tugas kepada profesi ekonomi mengenai bagaimana memperbaiki kinerja ilmu ekonomi yang *standing*-nya menurun karena ternyata tidak dapat memberi pedoman yang tegas mengenai cara mengatasi krisis. Wakil Presiden kemudian mengulas tiga hal. Pertama, hakikat dari krisis yang tengah berlangsung. Sejarah mencatat bahwa sepanjang 1800 hingga 2009 terdapat 66 negara yang mengalami krisis yang bersumber dari pusat keuangan dunia kemudian menjalar ke penjuru lain melalui jalur keuangan, perdagangan dan kepercayaan.<sup>15</sup> Kenaikan harga komoditas penting seperti minyak bumi atau meningkatnya suku bunga referensi utama dunia sering menjadi pemicu krisis global.

---

15 Boediono dalam ISEI 2009: 19.

Hal kedua, apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya terutama di Tanah Air. Pada tingkat global terdapat upaya agar kebijakan dilakukan secara kolektif untuk membedakan cara-cara negara di dunia dalam mengatasi krisis pada 2009 dengan era depresi 1930. Kebijakan yang lebih longgar ditempuh tidak hanya berupa penurunan suku bunga kebijakan bank sentral sampai tingkat paling rendah, tapi juga diikuti kebijakan *quantitative easing* yakni pencetakan uang. Di Indonesia, pemerintah melakukan langkah kurang-lebih sama dengan negara lain yakni menetapkan suatu kerangka koordinasi penanganan krisis yang transparan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; menjamin agar likuiditas terjaga dalam jumlah memadai dalam sistem finansial; menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan; melakukan *countercyclical fiscal policy* dengan meningkatkan defisit anggaran dan menjamin tersedianya sumber pembiayaan defisit tersebut; memitigasi dampak krisis dengan menyiapkan jaring pengaman sosial; serta menandatangani kerja sama *swap arrangements* antara Bank Indonesia dan Bank Sentral di Asia untuk memperkuat cadangan devisa.

Ketiga, pelajaran penting apa yang bisa diambil dari krisis ini. Menurut Boediono pelajaran penting adalah bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan makro yang konvensional terbukti tetap relevan dalam mengkondisikan perekonomian menghadapi badai krisis. Negara-negara yang memperhatikan dan mengawal indikator-indikator dasarnya seperti defisit anggaran negara; defisit transaksi berjalan; rasio utang terhadap kemampuan membayar; kecukupan cadangan devisa; tingkat inflasi; tingkat bunga; pertumbuhan likuiditas dan nilai tukar dalam bingkai pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, umumnya akan memiliki posisi yang lebih baik dalam menghadapi krisis.

Pada bagian akhir pidatonya, Boediono melihat bahwa krisis global 2009 telah menyingkap sisi lemah disiplin ilmu makroekonomi dan ekonomi keuangan. Jika *The Great Depression* telah melahirkan pemikiran Keynesianism, maka *The Great Recession* yang tengah berlangsung diharapkan akan melahirkan pemikiran baru. Menurutnya, tema yang



Depresi ekonomi 1930 dan resesi ekonomi tahun 2009 di Amerika Serikat seringkali dianggap cerminan peristiwa yang sama besar dampaknya | Sumber: Istimewa

dipilih dalam Kongres XVII ISEI menjadi relevan bagi para ekonom untuk berkontribusi pemikiran yang kritis dan reflektif guna menjawab tantangan zaman saat ini.

Kongres XVII ISEI di Bukittinggi merumuskan sejumlah simpulan.<sup>16</sup> Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melaksanakan serangkaian reformasi pada banyak bidang seperti politik, pengelolaan pemerintahan termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Setelah krisis 1997/98, dalam dua tahun terakhir, dunia dihantam krisis global yang tidak saja membawa pertanyaan mengenai peran pemerintah dan sektor swasta, tapi juga pertanyaan mengenai manfaat dari risiko keterbukaan ekonomi terhadap pasar global. Pertanyaan selanjutnya ialah apa gerak ideal ekonomi yang mampu membawa bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 yang terakhir, Pasal 33 telah bertambah

16 Panitia Pengarah Kongres XVII ISEI dalam ISEI 2009: 25.

menjadi lima ayat; ayat pertama menguraikan elemen utama sistem ekonomi dan ayat terakhir mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem ekonomi akan diatur oleh undang-undang. Perlunya pengaturan pelaksanaan sistem ekonomi di satu sisi dan sejarah pembangunan ekonomi Indonesia di sisi lain menjadi titik awal yang positif untuk rekonstruksi sistem ekonomi.

Sistem ekonomi Indonesia telah menjadi bahan perdebatan dalam tubuh ISEI dari waktu ke waktu. Pertanyaan mendasarnya ialah bagaimana bangun sistem ekonomi Indonesia yang dapat membawa bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam dunia yang masih terus berubah. Di sisi lain, *policy space* semakin sempit bagi pemerintah seiring dengan semakin meningkatnya peran swasta. Dalam bangun sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari bangun sistem politik dan sosial yang kita miliki dan pada saat yang sama mampu menghadapi berbagai macam krisis dan guncangan. Perlu dirumuskan faktor-faktor yang dapat menumpu keberlanjutan sistem ekonomi nasional sehingga terbentuk harmonisasi sistem ekonomi, politik dan sosial mulai dari landasan, tujuan dan bentuk-bentuk gerak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dekonstruksi, rekonstruksi dan restrukturisasi seharusnya menjadi proses berkesinambungan dalam membangun sistem ekonomi Indonesia. Saatnya mengembalikan sistem ekonomi Indonesia ke khitah nasional untuk perubahan dan kemajuan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan, dan UUD 1945. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi masalah konkret seperti tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan; persoalan energi yang tidak terbarukan; terjadinya proses deindustrialisasi; stagnasi pertanian pangan; serta kerusakan ekosistem. Sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi masalah-masalah tersebut.

Satu isu penting yang mencuat dalam seminar Kongres ialah perdebatan tentang peran negara dalam pembangunan. Harus diakui bahwa negara dan sektor publik berperan penting dalam pembangunan ekonomi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.



Suasana gerak ekonomi masyarakat. Peran negara penting dalam membangun manusia dan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi | Sumber: Bank Indonesia (Laporan Tahunan Indonesia)

Kebijakan sektor publik perlu diletakkan dalam kerangka desentralisasi ekonomi yang lebih luas dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi ekonomi menempatkan daerah sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks itu, pemerintah daerah berperan penting memberikan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Rekonstruksi Sistem Ekonomi Indonesia pada akhirnya membutuhkan reformasi pengajaran ilmu ekonomi kepada para calon ekonom masa depan. Pengetahuan teoritis sudah seharusnya dipadukan dengan pengetahuan faktual mengenai dinamika ekonomi masyarakat dan dinamika kebijakan ekonomi.

Panitia Pengarah Kongres XVII ISEI menambahkan bahwa berbagai hal yang telah mengemuka selama kongres akan terus ditindaklanjuti dalam bentuk studi yang diharapkan akan mengelaborasi sistem ekonomi tersebut melalui kerja sama ISEI dan Yayasan Indonesia Forum. Studi tersebut juga akan menyusun naskah akademik yang akan

menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Demokrasi Ekonomi.

## **Revitalisasi UMKM**

Hasil pemilihan Ketua Umum ISEI pada kongres di Bukittinggi menetapkan Darmin Nasution, ketika itu Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, sebagai ketua umum yang baru (2009–12) menggantikan Burhanuddin Abdullah yang telah berakhir masa kepengurusannya. Ekonom kelahiran Pasar Maga, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara (1948), itu bukan orang baru di ISEI karena ia sering terlibat dalam kegiatan organisasi terutama menghadiri kongres-kongres sebelumnya. Ia lulus Sarjana Ekonomi dari FEUI dan berlanjut ke Universitas Sorbonne di Prancis hingga meraih gelar Doktor. Sempat mengajar kembali di almamater dan bergiat di lembaga penelitiannya, Darmin kemudian bekerja di Departemen Keuangan; duduk sebagai Kepala Bappepam dan Lembaga Keuangan hingga mencapai jabatan tertinggi Direktur Jenderal Pajak (2006–09).<sup>17</sup>

Setahun setelah terpilih sebagai Ketua Umum ISEI, Darmin diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia (2010–13) meneruskan masa jabatan Boediono, Gubernur BI sebelumnya, yang terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Darmin Nasution ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2015–19).

Agenda kerja Darmin Nasution setelah terpilih menjadi Ketua Umum ISEI ialah mendorong anggota ISEI di daerah berperan aktif memperbaiki pelaksanaan otonomi dan melakukan perbaikan di tingkat kebijakan makro.<sup>18</sup> Menurutnya, perubahan dari sistem sentralisme ke otonomi daerah telah mengubah proses pengambilan keputusan secara tajam, tapi perubahan itu tidak disadari. “Dalam sistem yang sentralistik, pengambilan keputusan sangat teknokratis, sedangkan dengan otonomi

---

17 <https://www.ekon.go.id/profil/menteri-detail/5/dr-darmin-nasution-se>.

18 <https://tekno.kompas.com/read/2009/08/02/04552778/index-html>.



Darmin Nasution (tengah) Ketua Umum ISEI 2009 - 2015, bersama dengan para Deputy Gubernur Bank Indonesia di Jakarta (2013) | Sumber: Tempo

jadi lebih demokratis. Namun, sistem yang demokratis pun tetap perlu dikontrol,” ujarnya.<sup>19</sup> Pengawasan berlapis perlu dilakukan, baik dalam pelaksanaan tata kelola yang baik pada tiap unit pemerintahan, dukungan dari profesi independen terkait, maupun penegakan aturan. Kendati rekonstruksi, dekonstruksi dan restrukturisasi perlu dilakukan, Darmin mengingatkan bahwa perumusan sistem ekonomi jangan terlalu berpijak pada pandangan apa pun yang ekstrem.<sup>20</sup>

Dalam pandangan Darmin Nasution, ISEI harus mulai dengan membenahan organisasi dan perbaikan segi lain, termasuk gedung Sekretariat ISEI. Pendanaan menjadi hal utama agar organisasi dapat berjalan. Oleh karena itu, Darmin mengajak bankir terlibat mengurus ISEI khususnya dalam renovasi dan pembangunan kantor sekretariat. Ruangan di Sekretariat ISEI memakai nama bank yang berkontribusi

19 <https://tekno.kompas.com/read/2009/08/02/04552778/index-html>.

20 Wawancara dengan Darmin Nasution, Ketua Umum ISEI (2009–15), Jakarta, 21 Februari 2024.

merenovasi kantor tersebut. Pada masa periode kepengurusannya, ISEI berusaha meningkatkan dana abadi. Dengan memiliki dana abadi, organisasi dapat menggaji pegawai sehingga bisa beroperasi mandiri. Hal penting lain dalam kepengurusan Darmin Nasution ialah mengusahakan ISEI berstatus badan hukum pada 2013; bukan “perkumpulan” lagi.<sup>21</sup>

Pada masa kepemimpinan Darmin Nasution pula, ISEI memfasilitasi “riset kecil” (*small research*) dengan topik yang dipilih oleh lima daerah yang memiliki kantor cabang ISEI untuk dibiayai kegiatan risetnya. Selama masa kepemimpinannya, Darmin berusaha makin mendekatkan ISEI ke industri dan merangkul akademisi. Selain itu, hubungan antara Pengurus Pusat dan daerah sangat baik. ISEI berusaha membantu pengurus cabang di daerah terutama untuk pengembangan organisasi dan kegiatan termasuk mengirim “tokoh nasional” untuk berdiskusi mengenai isu-isu makro atau membahas hal-hal yang diperlukan di daerah. Pengurus Pusat selalu hadir pada waktu diadakan pelantikan pengurus daerah di mana pun di Tanah Air.<sup>22</sup>

Tema Sidang Pleno XIV ISEI yang dilaksanakan di Bandung (20–22 Juli 2010), yakni Revitalisasi UMKM untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional, menunjukkan bahwa ISEI di tangan nakhoda Darmin Nasution memberikan perhatian besar pada masalah usaha mikro, kecil dan menengah. Tema tersebut dipilih mengacu pada fakta bahwa pada 2008 sektor UMKM yang berjumlah sekitar 51,2 juta unit usaha atau 99,98% dari total pelaku ekonomi nasional telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97,04% dari total tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM telah berkontribusi secara signifikan terhadap PDB hingga mencapai 55,56% dari total PDB nasional, sementara nilai ekspor nonmigas sektor ini mencapai 20,17% dengan jumlah investasi mencapai 52,09%.<sup>23</sup>

---

21 Wawancara dengan Aviliani, 25 April 2024.

22 Wawancara dengan Darmin Nasution, 21 Februari 2024; dengan Aviliani, 25 April 2024.

23 ISEI 2010: I.

Dengan kontribusi tersebut, UMKM bahkan masih dapat berkembang terlebih jika berbagai akses permodalan dapat semakin mudah diakses. Di sisi lain, perkembangan UMKM masih terhambat oleh sejumlah masalah yang dapat ditinjau dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor masalah klasik dari UMKM yakni lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial termasuk kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Sementara faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari segi pembinaan seperti solusi yang tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring yang bersinergi dan program yang tumpang tindih antarinstitusi.

Seperti telah disebutkan, ISEI Pusat memfasilitasi riset kecil atau survei yang dilaksanakan anggota di daerah yang memiliki kantor cabang ISEI. Maka dalam Sidang Pleno di Bandung, ditampilkan hasil riset yang ditangani oleh lima kantor cabang ISEI yakni Bandung, Bali, Makassar, Yogyakarta dan Padang. Survei tersebut dimaksudkan agar pada sidang pleno diperoleh gambaran yang nyata terkait kondisi UMKM sehingga kajian yang dilaksanakan dapat memberi jawaban yang lebih tepat sasaran. Riset menghasilkan bahan dasar bagi penyusunan usulan kebijakan ISEI kepada pemerintah terkait dengan upaya revitalisasi peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Sidang Pleno ISEI di Bandung kian istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Boediono yang memberikan sambutan kontemplatif dan aplikatif keilmuan. Sebagai seorang ekonom, Wakil Presiden Boediono telah lama berinteraksi dengan ISEI dan banyak menyampaikan pemikirannya mengenai masalah ekonomi Indonesia. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa sistem politik yang solid merupakan landasan bagi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan pada gilirannya akan membuat sistem politik makin matang dan makin berakar. Sistem politik yang sesuai untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, dalam pandangannya, adalah demokrasi. Uji terakhir dari suatu sistem politik, termasuk demokrasi, ialah apakah sistem itu



Pelaku UMKM memiliki potensi besar menjadi pilar sekaligus identitas ekonomi lokal maupun nasional | Sumber: Bank Indonesia (Laporan Tahunan Indonesia)

dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat.

Di sisi lain, Ketua Umum ISEI Darmin Nasution menjelaskan bahwa dalam perkembangan ekonomi nasional, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran signifikan serta berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dikemukakan, pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku UMKM sangat penting untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada UMKM diharapkan mengantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional

yang lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Bahwa masalah UMKM mendapat perhatian sangat serius dari Sidang Pleno ISEI di Bandung terlihat dari rincian empat subtema yang dipilih. Keempat subtema tersebut ialah (i) UMKM sebagai Pilar Ekonomi yang Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-Poor di Tengah Liberalisasi Perdagangan; (ii) Potensi UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat; (iii) Daya Saing UMKM sebagai Modal Kompetisi di Era Globalisasi; dan (iv) Akses Finansial Mikro dalam Pengembangan UMKM. Selain itu, berbeda dari sidang-sidang pleno ISEI sebelumnya, pada sidang pleno di Bandung dibuka forum baru disebut *Policy Forum* pada bagian akhir sidang.<sup>24</sup> Forum tersebut membahas tentang arah kebijakan nasional dalam upaya merevitalisasi dan mengembangkan UMKM agar dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional. Forum tersebut juga menjadi kesempatan yang strategis dan signifikan bagi Menteri

Dalam *Policy Forum*, tiga pejabat negara yang memimpin instansi yang berkaitan langsung dengan UMKM menyampaikan pandangan dan peran instansi masing-masing dalam upaya merevitalisasi sektor tersebut. Pertama, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil Syarif Hasan yang menyampaikan bahwa kantor kementerian yang dipimpinnya tengah menggagas sebuah program yang bertujuan mengubah *mindset* sarjana atau para lulusan perguruan tinggi dari motivasi mencari pekerjaan menjadi motivasi *entrepreneur*. Program itu sudah dilakukan di beberapa universitas. Ia sepakat dengan penelitian yang dilakukan ISEI bahwa salah satu kekurangan yang harus diatasi para pelaku UMKM guna mengembangkan usahanya ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UMK telah membangun *venue* yang dapat digunakan pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya. Terkait masih tingginya suku bunga kredit perbankan, Syarif menilai faktor itu dapat

<sup>24</sup> ISEI 2010: vi.

menghambat para pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usahanya dan menjadi pekerjaan rumah bagi kementerian yang ia pimpin.<sup>25</sup>

Kementerian Negara Koperasi dan UMK memiliki pandangan yang sama bahwa untuk mengelola dan menumbuhkan sektor mikro diperlukan biaya yang akomodatif sesuai dengan karakter usaha sektor UMKM dan bank yang mampu menyediakan pelayanan tersebut hanya Bank Rakyat Indonesia karena dianggap sebagai bank terdepan untuk mencakup segmen mikro. Selain BRI, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga memiliki potensi untuk menggarap sektor ini mengingat jaringan bank itu menjangkau hingga ke tingkat kabupaten hingga pelosok. Syarief juga setuju jika para pelaku UMKM menetapkan harga jual yang kompetitif atas produk mereka sesuai dengan karakteristik dan skala pasarnya karena hal itu dapat menjadi celah untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Terkait NPL (*non performing loan*) yang tinggi di sektor UMKM, hal itu mungkin terjadi pada pelaku UMKM di daerah-daerah yang tertimpa bencana. Menurutnya, UMKM yang memiliki kinerja usaha cukup tinggi rata-rata tingkat NPL sangat rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berbicara tentang kebijakan pengembangan sektor UMKM.<sup>26</sup> Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan sektor UMKM cukup sesuai dengan harapan pemerintah bahwa dalam memberdayakan sektor tersebut tidak harus memberikan umpan tetapi juga kail yang dapat menjadi sarana berusaha agar mampu menghasilkan pendapatan. Sedangkan pemberian ikan dapat berupa program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan atau rentan terhadap ancaman kemiskinan. Baik program pemberdayaan sektor UMKM maupun program perlindungan sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan kelas sosial masyarakat yang lebih baik, bahkan dapat melahirkan kelas menengah baru. Hatta menyinggung perlunya program pendukung selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kesejahteraan ekonomi 400 ribu penerima KUR sejauh ini telah

25 Hasan dalam ISEI 2010: 261.

26 Rajasa dalam ISEI 2010: 263.

berhasil ditingkatkan dan seandainya program KUR terus dilanjutkan dengan alokasi dana sebesar 3 triliun Rupiah diberikan kepada 400 ribu peserta program KUR yang memiliki unit kegiatan ekonomi produktif maka jumlah pelaku usaha kelas mikro dapat meningkat.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar ditentukan dua atau tiga institusi saja yang melakukan pemberdayaan sektor UMKM; satu institusi berfokus pada pembiayaan, sementara yang lain fokus pada inkubator pembinaan. Namun penurunan suku bunga kredit memerlukan upaya tersendiri dan terkait masalah *lending rate* sudah dibicarakan dengan Bank Indonesia. Menurut Hatta, yang paling penting adalah bagaimana mengatasi NPL yang terjadi di sektor mikro dan kredit usaha tani akibat gempa bumi dan bencana alam lainnya. Hatta memandang *special treatment* tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menghancurkan masa depan perbankan Indonesia. Menutup uraiannya, ia melihat perlu kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengacu pada undang-undang.

## **Industri Manufaktur**

Pada 2015, ISEI melangsungkan Kongres di Surabaya (7–9 Oktober). Dalam sambutan pembukaan kongres, Ketua Umum Darmin Nasution berbicara tentang sektor industri manufaktur yang belum pulih kembali memainkan perannya.<sup>27</sup> Alih-alih menjadi motor penggerak, peran sektor ini praktis selalu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berarti terus menurun, sementara berbagai kegiatan eksploitasi dan ekspor hasil mineral dan batubara (minerba) dan perkebunan justru mulai menggeliat terutama di luar Jawa.

Lebih lanjut Darmin menambahkan bahwa belum pulihnya perkembangan sektor industri manufaktur membuat pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Hingga 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia

---

27 *Ibid*, hlm. vii



Darmin Nasution meninjau pabrik aluminium guna menunjang industri otomotif nasional | Sumber: Antara

setelah krisis Asia tidak pernah mencapai 7%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan puncak pertumbuhan pada masa sebelumnya yang mencapai 9%. Pertumbuhan sektor manufaktur yang rendah juga tidak mendukung peningkatan dan pendalaman struktur industri padahal landasan utama perubahan struktural adalah perkembangan sektor manufaktur karena sektor ini merupakan pilar utama bagi perkembangan penyerapan angkatan kerja dan peningkatan produktivitas secara bersama-sama. Darmin menyayangkan kelemahan infrastruktur fisik dan ekonomi dunia yang belum pulih membuat pengolahan hasil tambang mineral dan perkebunan tidak maksimal padahal kebijakan tersebut sesuai dengan berlakunya Undang-Undang tentang Minerba tahun 2014.

Menutup sambutannya, Darmin mendorong Pengurus Pusat ISEI melaksanakan seminar dan diskusi dengan tema yang berkaitan dengan upaya menggerakkan kembali industri manufaktur mendukung pertumbuhan dan transformasi ekonomi nasional. Tema tersebut dianggap tepat karena bersamaan waktunya dengan tahun pertama mandat yang diemban oleh pemerintahan baru. Selain itu mengingat situasi ekonomi nasional yang tengah berada dalam lingkungan ekonomi dunia yang belum sehat, perubahan orientasi kebijakan seyogianya dikaitkan dengan kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Industri manufaktur dibahas oleh Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam makalahnya bertajuk “Mendorong Industri Manufaktur, Memacu Pertumbuhan”<sup>28</sup> yang menjelaskan kecenderungan penurunan sektor industri penghasil barang yang berperan dalam pembangunan PDB seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan industri pengolahan. Penurunan yang cukup besar terjadi antara 2003–14 terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut memiliki pangsa 15% yang kemudian kembali mengalami penurunan hingga 11% pada 2014. Sektor tambang juga mengalami penurunan yang signifikan; pada 2003 pangsa pasar sebesar 11% menurun hingga 5% pada 2014 sementara industri pengolahan hanya mengalami sedikit penurunan yakni dari semula 27% menjadi 25% pada 2014. Namun, situasi yang kontradiktif justru terjadi pada sektor jasa yang mengalami kecenderungan peningkatan antara 2003–14 di antaranya jasa konstruksi naik dari 6% menjadi 7%. Kenaikan sektor tersebut diikuti oleh jasa keuangan yang naik dari 9% menjadi 9,5%. Dua sektor lain yakni perdagangan dan transportasi bahkan mengalami kenaikan yang signifikan dari 16% menjadi 17,5% dan dari 5,5% naik menjadi 11% pada 2014.

Berdasarkan angka-angka di atas, menurut Muliaman, telah terjadi pergeseran. Jika pada awal pembangunan, sektor penghasil

<sup>28</sup> Muliaman D. Hadad, “Mendorong Industri Manufaktur, Memacu Pertumbuhan” dalam Pengurus Pusat ISEI, *Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV: Revitalisasi UMKM Untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional*, (Jakarta: ISEI, 2015), hlm. 60

barang memiliki peran penting dalam PDB, terlihat cenderung mulai tergantikan oleh sektor jasa dan perdagangan. Hal itu tidak lepas dari perkembangan teknologi yang lebih mudah dan terjangkau pada bidang jasa yang secara aktif ikut menaikkan kompleksitas kebutuhan jasa itu sendiri. Di sisi lain, sektor penghasil barang yang cenderung membutuhkan investasi lebih besar tidak dapat menanggapi dengan cepat permintaan yang ada. Pasar dan permintaan terus beralih pada permintaan jasa yang terus meningkat sementara perhatian konsumen mulai beralih dari hal yang *tangible* seperti fisik produk ke hal yang *intangible* seperti pelayanan. Muliawan kemudian memaparkan sejumlah kelemahan dalam industri pengolahan antara lain keterbatasan dalam industri pengolahan, rendahnya produktivitas dan keterbatasan daya saing.

Keterbatasan dalam industri pengolahan, pergerakan yang lambat tidak bisa dimungkiri menjadi salah satu sebab rangsangan yang kurang. Hal itu berdampak pada masalah lain yang kemudian muncul dalam industri pengolahan yakni produktivitas yang masih rendah. Permasalahan mendasar yang dihadapi industri pengolahan dalam negeri adalah *economic scale* dan *economic scope* yang masih belum tercapai sehingga menyebabkan produktivitas dari industri tidak dapat mencapai batas optimumnya. Muliawan berpendapat bahwa permasalahan utama dalam produktivitas adalah ketenagakerjaan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih terbilang rendah.

Selain produktivitas, indikator lain menunjukkan kelemahan yang berbeda yakni *Human Development Index* (HDI). Indeks ini merupakan rangkaian penghitungan untuk melihat seberapa maju manusia dalam sebuah negara. Hal itu berkaitan erat dengan ketenagakerjaan sebagai faktor penting dalam pembangunan. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program, HDI manusia Indonesia pada 2015 berada di peringkat 108 dunia. Ketertinggalan Indonesia sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asian Tenggara sekalipun. HDI Singapura, misal,

tercatat pada angka 0,9; Brunei pada angka 0,85 dan Malaysia sebesar 0,77 sementara Indonesia baru pada 0,68. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang bekerja belum mengenyam pendidikan tinggi.<sup>29</sup>

Kelemahan lain yang menjadi keterbatasan dalam industri pengolahan adalah daya saing yang masih terbatas. Selain dari sisi produksi, ketertinggalan Indonesia terletak pada sisi daya saing secara agregat. Terbatasnya daya saing menyebabkan Indonesia surut akan pandangan investor. Pada level regional, daya saing Indonesia masih tertinggal jauh oleh Singapura yang berada di urutan pertama dan disusul oleh Malaysia pada posisi 18. Indonesia menempati posisi 114 dunia dalam hal daya saing yang diikuti oleh Kamboja (135), Laos (148) dan Myanmar (177). Daya saing tersebut secara masing-masing komponen kesederhanaan menjalankan bisnis menunjukkan nilai yang belum maksimal untuk Indonesia. Bank Dunia menggunakan 10 indikator untuk menilai *Ease of Doing Business* yakni memulai usaha (*starting a business*); pengurusan izin bangunan (*dealing with construction permits*); mendapatkan sambungan listrik (*getting electricity*); pendaftaran properti (*registering property*); memperoleh pinjaman (*getting credits*); perlindungan investor (*protecting investors*); pembayaran pajak (*paying taxes*); perdagangan lintas batas (*trading across borders*); penegakan kontrak (*enforcing contracts*); dan penutupan usaha (*closing business*).

Terlihat berbagai kelemahan dalam upaya pengembangan industri pengolahan berkaitan dengan sumber daya manusia (dalam hal ini tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia) dapat dikatakan belum banyak yang mencapai taraf pendidikan tinggi. Berkaitan dengan sumber daya manusia Indonesia, Mohammad Nasir (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), dalam makalah berjudul “Pengembangan Mutu Modal Manusia, Kelembagaan dan Inovasi” menjelaskan bahwa hingga 2015 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 121 juta orang sementara jumlah pelajar dan mahasiswa berjumlah 60 juta orang sehingga dibutuhkan pembangunan manusia. Namun, seperti

29 *Ibid*, hlm. 63

telah disinggung, HDI Indonesia mengalami ketertinggalan dibanding negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik. Tantangan lain terkait komposisi tenaga kerja adalah presentase ketidaksesuaian keterampilan dengan jenis pekerjaan. BPS mensurvei sembilan kriteria pekerjaan dan hasilnya menunjukkan masih banyak jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan pelakunya. Bidang pertanian mempekerjakan tenaga kerja yang persentase ketidaksesuaiannya paling tinggi yakni 88,9%, diikuti perajin sebesar 72,4% dan penyedia jasa 58,7%. Sebaliknya, tenaga kerja yang memiliki keterampilan paling sesuai adalah tenaga profesional yang sebesar 77,3% dan pekerjaan dasar dengan presentase 78,0 %.

Terkait dengan keterampilan, latar belakang pendidikan khususnya pendidikan tinggi dan akreditasi universitas menjadi kian penting. Universitas dengan akreditasi baik dapat menunjang lulusannya mendapatkan pekerjaan lebih baik. Ironisnya, dari total 4.274 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 164 perguruan tinggi yang telah terakreditasi, sementara 4.110 perguruan tinggi belum terakreditasi. Di sisi lain, inovasi di Indonesia sesungguhnya menunjukkan perkembangan positif. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Business Innovation Center, pada 2009 index tersebut berada pada angka 101. Angka tersebut kemudian naik satu poin setiap tahunnya hingga pada 2015 menyentuh 107.

Selain inovasi, Indonesia memiliki keunggulan demografi yang dapat memberikan kontribusi penduduk produktif semakin besar. Pada 2010, Indonesia telah memiliki bonus yang harus dimanfaatkan dimana presentase usia penduduk 0–14 berada pada angka 27% dan usia penduduk 15–64 sebesar 67%. Dengan berbagai potensi tersebut, upaya pertama yang harus dilakukan untuk mencapai prediksi masuknya Indonesia dalam kelas tinggi pendapatan perkapita adalah segi inovasi dan kepuasan. Dunia bisnis harus dibuat sedemikian rupa hingga puas dengan iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya adalah efisiensi yang dapat dicapai dengan jalan pendidikan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi serta efiseinsi pasar uang dan barang.



Pasar tradisional menjadi simpul ekonomi; menggerakkan distribusi hasil pertanian, UMKM dan konsumsi di setiap kelas ekonomi masyarakat | Sumber: Bank Indonesia (Laporan Tahunan Indonesia)

Kongres XIX merumuskan dan merekomendasikan beberapa hal. Fakta bahwa kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional masih lebih tinggi dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun persentasenya terus menurun hingga pada 2015 hanya sebesar 21,28%. Selain itu, peranan industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia menjadi isu penting karena merupakan penggerak utama perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran serta penghasil devisa. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ketertinggalan integrasi industri manufaktur ke dalam *global production network*; lemahnya keterkaitan industri hulu-hilir; lemahnya perdagangan antardaerah dan wilayah akibat tingginya biaya logistik; terbatasnya insentif pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur; kurangnya pelatihan keterampilan

tenaga kerja khususnya di Kawasan Industri; ketersediaan lembaga pembiayaan khusus industri manufaktur; *saving-investment gap* karena rendahnya mobilisasi dana masyarakat; dan kesiapan birokrasi dalam rangka investasi industri.

Berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut, Seminar Nasional dan Kongres XIX ISEI merekomendasikan kebijakan sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Kebijakan yang diarahkan pada pengembangan dan penguatan sektor industri di dalam negeri tidak hanya skala menengah dan besar tapi juga mikro, kecil dan menengah untuk mendorong kontinuitas pasokan, konsistensi kualitas produktivitas tenaga kerja agar mampu berperan dalam *global production network* sehingga meningkatkan penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
2. Penguatan industri-industri strategis dan unggulan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menguatkan basis industri di Indonesia.
3. Peningkatan populasi dan sebaran wilayah pengembangan industri manufaktur ke arah Indonesia Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. Perbaikan konektivitas antardaerah dan wilayah yang lebih efisien; pembangunan infrastruktur (pelabuhan, kereta api, jalan darat, bandara, telekomunikasi); jaminan keberlangsungan pasokan energi (listrik, air, gas); pengolahan limbah dan kemudahan aksesibilitas lahan untuk meningkatkan daya saing.
5. Peningkatan penguasaan teknologi dan kapasitas SDM melalui antara lain revitalisasi pendidikan/keterampilan seperti vokasi dan latihan kerja lainnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lokasi terbangunnya industri.
6. Mendorong kebijakan industri yang meningkatkan konsumsi produk-produk dalam negeri.

---

30 Pengurus Pusat ISEI, *Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV: Revitalisasi UMKM Untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional*, (Jakarta: ISEI, 2015), hlm. xv

## **Menjadikan ISEI Lebih Relevan**

Kongres XIX ISEI di Surabaya yang diikuti sekitar 700 peserta secara bulat menerima pertanggungjawaban kepengurusan Darmin Nasution dan selanjutnya memilih ketua umum yang baru. Terpilih sebagai Ketua Umum periode 2015–18 adalah Muliaman Darmansyah Hadad. Seperti pendahulunya, Muliaman dipilih melalui pemungutan suara bersaing dengan Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro. Akan halnya Darmin Nasution, ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju.

Berbeda dengan sejumlah mantan Ketua Umum ISEI sebelumnya, Muliaman telah mengenali kegiatan ISEI sejak masih duduk di bangku kuliah di FEUI. Ia aktif tulis-menulis di majalah kampus dan secara formal terlibat dalam organisasi profesi tersebut setelah lulus kuliah. Lahir di Bekasi, Jawa Barat (1960), ia lulus sekolah dasar lebih awal dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya dengan jalan lompat kelas. Begitu pula saat kuliah di FEUI, ia terlihat “serbacepat” dalam mencerna pelajaran sehingga lulus tepat waktu pada 1984. Ia lalu melanjutkan pendidikan magister di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Harvard University, AS pada 1990. Hanya dalam waktu satu tahun, ia berhasil meraih gelar Master of Public Administration; kemudian mengambil program pendidikan doktor di Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Monash University, Melbourne, Australia. Muliaman menggenggam gelar Ph.D (Doctor of Philosophy) dari universitas tersebut pada 1996.

Selepas dari kampus Salemba, Muliaman bekerja sebagai staf umum di Bank Indonesia kantor perwakilan Mataram pada 1986. Kariernya melesat ketika ia menduduki sejumlah posisi penting di Bank Indonesia. Berturut-turut, ia menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), kemudian menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2005. Satu tahun kemudian, Muliaman diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia pada 2006 hingga 2011 dan terpilih sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ia jabat sejak 2012 hingga 2017. Hanya satu tahun



Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Umum ISEI 2015 - 2018  
Sumber: Istimewa

menduduki jabatan tersebut, Muliaman mendapat tugas negara menjadi Duta Besar Indonesia untuk negara Swiss dan Liechtenstein pada 2018 hingga 2023. Usai mengemban amanah sebagai duta besar, ia diangkat menjadi Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia.

Selain berkiprah di sektor keuangan dan perbankan, Muliaman telah lama terlibat dalam kegiatan dan kepengurusan ISEI. Pada 2005, saat ISEI dipimpin Ketua Umum Burhanuddin Abdullah, Muliaman diangkat menjadi Sekretaris Umum. Ia kemudian kembali dipercaya untuk menduduki jabatan tersebut selama dua periode kepemimpinan Darmin Nasution. Saat ia terpilih menjadi Ketua Umum ISEI pada Kongres XIX di Surabaya, Muliaman tercatat sebagai ketua umum kedua belas sejak organisasi profesi itu didirikan.

Ketua Umum ISEI terpilih berjanji menyalurkan sumbangsih pemikiran para ekonom nasional. Menanggapi wartawan, Muliaman

berujar, "Saya ingin menjadikan ISEI sebagai mitra bagi pemangku kepentingan, terutama dalam merumuskan pemikiran ekonomi, agar bisa dimanfaatkan secara relevan dan konstruktif. Kita akan memobilisasi resources yang ada, karena ini bukan monopoli ISEI."<sup>31</sup> Lebih lanjut ia ingin lebih memberdayakan ISEI dan mendorong agar cabang-cabang lebih banyak melakukan kegiatan dan juga pengkajian terhadap persoalan ekonomi Indonesia. Terkait sektor manufaktur yang menjadi tema utama dalam Kongres XIX ISEI, Muliaman berpandangan bahwa saat ini sektor manufaktur menghadapi persoalan, yakni keteringgalan integrasi dari sektor hulu dan hilir. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian dalam kongres karena berakibat pada lemahnya daya saing produksi.

Dalam rangka penguatan ekonomi nasional, jajaran kepemimpinan baru ISEI juga diminta memfasilitasi perdagangan antardaerah karena terbukti mampu mengurangi defisit sehingga perlu didorong kendati memiliki biaya logistik yang tinggi. Muliaman juga menggagas pertemuan dengan asosiasi lain seperti insinyur dan sosiolog agar lahir masukan yang lebih komprehensif. Sementara fokus jangka pendek yang menjadi perhatian ISEI saat ini adalah mendorong sektor industri agar lebih berperan dalam memajukan perekonomian nasional. Ia menambahkan bahwa salah satu sumber kerawanan ekonomi yang berhasil diidentifikasi adalah lemahnya struktur industri Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Muliaman, ISEI menerbitkan buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Indonesia* sebanyak lima jilid. Buku yang memuat tulisan pemikiran para ekonom sejak Soemitro Djojohadikusumo hingga ekonom generasi muda dikerjakan oleh Hadi Soesastro dari CSIS dan kawan-kawan. Ia mengkoordinir dan menyeleksi urutan tulisan mulai dari Soemitro. Tulisan-tulisan tersebut diklasifikasi secara sektoral, industri, kemiskinan dan ekonomi regional. Buku tersebut memberikan gambaran perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia termasuk tulisan anggota dan pengurus ISEI dari masa ke masa.

---

31 <https://www.antaraneews.com/berita/522648/muliaman-hadad-jadi-ketua-isei-2015-2018>

Pada masa kepemimpinan Burhanuddin, muncul diskusi mengenai Ekonomi Pancasila. “Kita sedang mencari bentuk ekonomi Indonesia pascakrisis. Ternyata perkembangan ekonomi kita pragmatis saja. Kemudian kita merumuskan ekonomi pasar yang terkendali, tidak terlalu pasar, tapi terkendali,” kata Muliaman.<sup>32</sup> Sebagai Sekretaris Umum kala itu, ia mempromosikan lebih lanjut diskusi tersebut. Menurut Muliaman, perlu ada keseimbangan sehingga tidak murni pasar, tapi harus lebih ramah dengan kepentingan yang lebih luas secara keindonesiaan. ISEI kemudian mendefinisikan bentuk tersebut dengan ekonomi pasar yang terkelola. “Itu saya kira periode ketika pikiran-pikiran itu mengemuka, bagaimana kita mencari bentuk sistem ekonomi di Indonesia. Itu yang paling saya ingat dari beberapa kali pertemuan dan diskusi, sampai akhirnya dikukuhkan sebagai satu pemikiran ISEI,” kata Muliaman.

Pada masa kepemimpinan Darmin Nasution, Muliaman diminta khusus untuk menjabat sebagai Ketua Harian ISEI sepanjang dua periode. Menurut Muliaman, jabatan tersebut mengubah AD/ART ISEI karena jabatan itu belum pernah ada sebelumnya. Ia menyaksikan pada masa kepengurusan Darmin Nasution, ISEI banyak menyelenggarakan diskusi dan melakukan koordinasi dengan kantor-kantor ISEI di daerah secara intens serta mendorong munculnya ekonom muda. Menurutnya, saat itu ISEI masih terbelenggu dengan para ekonom senior dengan nama-nama besar sehingga yang lain seolah tidak tampak sehingga pemberdayaan ISEI daerah dan ekonom muda menjadi Lambat. Kaderisasi tersebut dilakukan selain secara rutin ISEI memberikan masukan kepada pemerintah. Pada masa itu pula, ISEI memperluas cakupan sehingga tidak hanya bidang ekonomi, tetapi juga akuntansi dan manajemen. Hal lain yang berkaitan dengan sisi akademis, ISEI menyelenggarakan kolokium dengan nama-nama besar seperti Emil Salim dan J. B. Sumarlin dijadikan tolok ukur dalam pengajaran ekonomi. Sebagai organisasi profesi, ekonom harus memiliki sertifikasi.

---

32 Wawancara dengan Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Umum ISEI (2015–18), Jakarta, 6 Februari 2024.



Sementara di sisi administrasi, selama menjadi Ketua Umum ISEI, Muliaman dibantu ekonom Aviliani yang menjabat sebagai Sekretaris Umum. Pada masa itu, pengurusan surat menyurat dan Gedung Sekretariat ISEI berjalan lebih baik. Selain berbagai upaya memperbaiki administrasi internal, ISEI aktif menggagas pertemuan ekonom Asia Tenggara, bahkan dapat dikatakan lebih aktif dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pertemuan yang diselenggarakan dengan model *call for papers* tersebut menjadi ajang pertukaran pikiran kendati yang paling sering didiskusikan secara keseluruhan mengenai ASEAN.

Satu hal yang harus diperbaiki pada masa kepemimpinan Muliaman adalah pembenahan masalah administrasi terutama pengarsipan di kantor ISEI. Hal tersebut sudah menjadi isu lama dan ia ingin pengarsipan tersebut dilakukan dengan sentuhan teknologi. Selain itu, ia juga menyinggung perihal keanggotaan termasuk pembayaran iuran anggota selain masalah kedisiplinan daerah terutama periode kepengurusan ISEI cabang yang kini dibatasi selama dua periode. Selain kedua masalah tersebut, Muliaman juga ingin membangun sebuah *platform* sebagai suatu lanjutan kolaborasi antarprofesi.

Periode kepemimpinan Muliaman belum selesai ketika ia diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Namun, pada masa kepemimpinan yang menurutnya singkat itu, ISEI telah berkontribusi pemikiran pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta agar ISEI memberikan pemikiran ekonomi dan membawanya ke forum yang lebih besar. Saat itu Muliaman diangkat menjadi Ketua OJK. Ia yang mempresentasikan berbagai pemikiran tersebut namun ada tim yang menyiapkan materi untuk disampaikan kepada pemerintah yang intinya berisi dorongan agar lebih melibatkan peran swasta dalam agenda-agenda presiden. Lebih lanjut Muliaman menjelaskan bahwa pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, siklus ekonominya sedang baik karena hampir semua mudah di antaranya akses likuiditas, harga saham naik dan inflasi terkendali.

ISEI saat itu mendiskusikan bagaimana ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5% dari *middle income trend*. Pascapandemi, menurut Muliaman, isu yang mengemuka adalah teknologi karena bencana wabah itu mengubah banyak hal terutama dalam berekonomi khususnya kebijakan jangka panjang yang dapat lebih berkelanjutan meliputi isu produktivitas, teknologi, ekonomi hijau, transisi energi dan lainnya. ISEI pada masa kepemimpinan Muliaman bahkan pernah menyelenggarakan acara bersama untuk mendiskusikan masalah ekonomi pertanian bersama Bustanul Arifin, guru besar dan tokoh ilmu ekonomi pertanian. Dikatakan, tema-tema ekonomi pertanian terkadang kurang menarik padahal harusnya nomor satu. Dapat dikatakan ISEI menjadi *opinion provider* kepada siapa saja baik kepada pemerintah maupun masyarakat serta relevan bagi banyak pemangku kepentingan termasuk dinas-dinas yang ada di daerah di mana ISEI dapat menyumbangkan kontribusinya.

Muliaman juga menyinggung tentang Indonesia Forum yang sudah hadir sejak lama. Ide mengenai keberadaannya adalah lebih kepada bisnis grup agar dapat lebih terlibat dalam kegiatan ISEI terutama para pebisnis dan konglomerat. Mereka diharapkan dapat membantu pemikiran yang *mainstream* dan sejalan dengan ISEI dan karena itu pula banyak para pengusaha dilibatkan dalam struktur kepengurusan Indonesia Forum, sementara struktur ISEI lebih banyak diisi oleh para akademisi. Idenya adalah praktisi bisnis dan pemikiran ekonomi dapat bersinergi. Namun sejauh mana ISEI dapat dikatakan sebuah *think-tank* masih perlu pembenahan kendati dapat dikatakan bahwa ISEI sebagai mitra atau pemberi masukan.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana *platform* karena harus ada satu *platform* yang *fix* seperti halnya American Economic Association dengan berbagai *event* yang ditunggu. Menurut Muliaman, mungkin ISEI bisa menawarkan *platform* kepada pihak lain sehingga profesional lain dapat bergabung dan terintegrasi ke dalam satu *platform* profesi. Dengan demikian akan ada kesempatan untuk menggabungkan ide, menyelaraskan pikiran untuk membahas topik tertentu. Lebih

lanjut Muliaman menjelaskan pentingnya membangun ekosistem, misalnya tema produktivitas yang dibicarakan oleh para pakar secara lintas profesi. ISEI sendiri mendorong agar ada ruang-ruang pribadi untuk maju kendati sedapat mungkin tetap dalam *platform* organisasi.

Terkait pemikiran siapa yang mewakili ISEI menurut Muliaman sepanjang itu disepakati oleh ekonom lain di dalam ISEI, maka pemikiran tersebut dapat diklaim sebagai pemikiran ISEI. Terkadang sulit untuk membedakan antara pemikiran individu atau pemikiran organisasi karena seorang tokoh ISEI yang berbicara dalam kapasitas pribadi akhirnya seakan-akan menjadi pemikiran ISEI, sesuatu yang tampaknya masih terus terjadi. Walau begitu, Muliaman berpendapat bahwa terdapat pula pemikiran orisinal ISEI berupa pendekatan terkait masalah industrialisasi dan kemiskinan yang banyak diadopsi oleh kementerian atau teknis terkait untuk dijadikan kebijakan kendati hal itu tidak bisa diklaim sebagai pemikiran ISEI sendiri. Menurutnya, banyak pemikiran yang sejalan dan kemudian diambil oleh kementerian di antaranya masalah pengentasan kemiskinan, isu-isu struktural dan rasio kontribusi perindustrian, deindustrialisasi, manufaktur dan tenaga kerja.

Pada masa kepemimpinannya pula ISEI membentuk bidang ekonomi syariah. Menurutnya, ilmu ekonomi awalnya dari filosofis, sama seperti halnya ekonomi syariah yang bersumber pada syariah dan kemudian dijadikan prinsip-prinsip berekonomi. Kendati ada persoalan yang abstrak dalam ekonomi syariah, misalnya dalam akad yang landasannya agak rumit, tapi hal itu bisa dipelajari dan dikembangkan untuk memodernkan sistem ekonomi syariah tersebut.

## **Pariwisata untuk Pembangunan**

Satu tahun setelah terpilihnya Muliaman Hadad sebagai Ketua Umum ISEI, Pengurus Pusat menyelenggarakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVIII ISEI di Gorontalo (28–30 September 2016) dengan mengambil tema Merealisasikan Potensi Sektor Pariwisata



Muliaman Hadad mendampingi Ratu Maxima dari Negeri Belanda dalam Indonesia Fintech Festival & Conference (2016) | Sumber: Tempo

untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif. Tema tersebut dipilih mengingat potensi industri pariwisata Indonesia yang juga berkorelasi dengan angka pengangguran yang tinggi. Pada 2015, diperkirakan angka wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai target 10 juta, namun jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dari jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura dan Malaysia dengan jumlah masing-masing 15 juta dan 27 juta orang.

Wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama—bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya—selain untuk bekerja di negara

yang dikunjungi.<sup>33</sup> Dengan berbagai potensi yang dimiliki, industri pariwisata Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PDB karena mampu meningkatkan lebih banyak devisa. Diperkirakan setiap wisatawan mancanegara menghabiskan antara USD 1.100 hingga USD 1.200 setiap kunjungan. Kedatangan para wisatawan tersebut dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang, menurut BPS, tingkat penganggurannya mencapai 5,81% (Februari 2015), sementara hampir 9% dari total angkatan kerja nasional bekerja di sektor pariwisata.<sup>34</sup>

Dalam sambutan pembukaan seminar di Gorontalo, Ketua Umum ISEI Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan bahwa posisi geografis yang strategis dengan ragam budaya serta iklim tropisnya, Indonesia memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan di mancanegara seperti wilayah Aceh, Bali dan Raja Ampat, bahkan Gorontalo yang dikenal dengan Kota Serambi Madinah dan julukan lain sebagai *The Hidden Paradise* sudah dikenal dengan keindahan alamnya. Menurutnya, potensi besar pariwisata Indonesia harus dikelola dengan sungguh-sungguh agar sektor ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan BPS tahun 2014, sektor pariwisata telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 4,19% dan menjadi kontributor devisa negara paling banyak keempat setelah sektor pertambangan dan perkebunan.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Muliaman berpandangan bahwa pengembangan industri pariwisata nasional membutuhkan modal yang besar. Objek wisata memerlukan pengembangan infrastruktur yang memadai berikut dukungan promosi dalam skala luas dan berkesinambungan. Sektor pariwisata tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tapi juga sebagai sektor ekonomi yang dapat mendorong penurunan tingkat ketimpangan. Objek-objek pariwisata yang tersebar di berbagai

---

33 Biro Pusat Statistik Indonesia 2021: xii.

34 <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?>

35 ISEI 2016: xvii.

daerah dapat bersinergi dengan banyak pihak termasuk UMKM, penyedia jasa transportasi, penjual makanan dan minuman, penyedia jasa hiburan, penjual *fashion* dan cenderamata. Namun, pengembangan industri pariwisata tidak difokuskan pada objek wisatanya semata, tapi juga memerlukan sokongan dari pengembangan sektor pendukung lain seperti industri perhotelan, transportasi, kuliner, kerajinan, teknologi informasi dan sebagainya.

Seminar Nasional dan Sidang Pleno di Gorontalo dibuka dengan pidato kunci oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pada kesempatan itu, Menteri Darmin menjelaskan situasi perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara. Menurutnya, dalam situasi perekonomian yang belum pulih, Indonesia harus mampu merebut kesempatan agar tidak terseret dalam kemerosotan kebanyakan ekonomi dunia. Indonesia telah mencoba mengundang investor asing dan membangun infrastruktur karena dana APBN dan APBD hanya membiayai 35–40% atau sepertiga dari kebutuhan sementara sisanya berasal dari berbagai negara atau investor. Dalam masalah sektoral, selama 70 tahun ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% beberapa tahun yang terjadi adalah transaksi berjalan mengalami defisit atau mengalami *overheated economy* sehingga hal tersebut perlu diperlambat.

Sebaliknya, terdapat sejumlah hal yang perlu dilakukan yakni memiliki tiga kelompok industri jika ekonomi Indonesia ingin tumbuh di atas 6%.<sup>36</sup> Pertama, industri petrokimia dan turunannya. Industri tersebut di tingkat hulu menghasilkan gas, tapi di tingkat hilir menghasilkan *polyester* sehingga bisa memproduksi sejumlah produk di antaranya pipa plastik, paracetamol dan lain-lain. Kedua, industri besi dan baja karena jika hanya mengandalkan Krakatau Steel, Indonesia masih akan menemui kesulitan untuk bersaing dengan negara lain. Ketiga, industri *petrochemical* dan farmasi. Menurut Darmin, tiga kelompok industri ini harus ada untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

---

36 ISEI 2016: xxvii.



Danau Toba sebagai salah satu ikon wisata Indonesia | Sumber: Kemenpar

Selain ketiga industri tersebut, menurut Darmin Nasution ada industri lain yang murah dikembangkan dan hasilnya cepat diperoleh untuk berkontribusi bagi devisa negara yakni sektor pariwisata. Terlepas dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia pada sektor ini, terdapat kelemahan di bidang infrastruktur, higienis dan lingkungan. Ia kemudian memberikan salah satu contoh terkait ketiga kelemahan tersebut pada objek wisata Danau Toba. Ketika Indonesia mendorong Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata, pada saat yang sama masih terdapat pemasangan karamba yang cukup besar dan airnya tidak jernih. Hal ini akan menghambat wisatawan untuk datang.

Indonesia memang menjadi destinasi wisata di Asia Tenggara setelah Malaysia dan Thailand, namun Indonesia hanya memiliki satu destinasi utama wisata yakni Bali. Tantangan ke depan adalah apakah Indonesia mampu untuk melahirkan tujuan wisata lainnya selain Bali. Menteri Pariwisata tengah mencoba untuk menyiapkan tujuan wisata yang dibantu oleh para ahli. Selain keindahan alam, potensi historis mungkin dapat dijadikan aspek untuk dikembangkan agar dapat menarik kedatangan wisatawan untuk kedua kalinya mengunjungi

objek wisata yang sama. Namun, menurut Darmin, Indonesia belum memiliki modal yang cukup baik dalam mempersiapkan destinasi wisata yang mencakup infrastruktur, kebersihan, kesenian dan lainnya.

Sementara itu, Mari Elka Pangestu membawakan topik bertajuk “Pengembangan Pariwisata: Peran dan Strategi Pengembangan.” Guru besar FEUI itu menekankan dua hal yakni memaknai pentingnya peran pariwisata di Indonesia dan strategi pengembangannya, serta ISEI yang beranggotakan semua *stakeholders* termasuk akademisi dapat melakukan kajian tentang pariwisata mengenai isu-isu yang mendalam.<sup>37</sup> Menurut Mari Pangestu—pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—pariwisata penting karena, pertama, Indonesia memiliki potensi dan aset pariwisata alam, budaya dan sosial sehingga pemerintah pusat dan daerah harus mengidentifikasi sumber daya alam, budaya dan sosial untuk mengetahui keunggulan Indonesia serta keunggulan masing-masing daerah. Kedua, pariwisata sudah menjadi prioritas pembangunan pemerintah berkat perjuangan Kementerian Pariwisata sehingga menjadi salah satu dari lima prioritas pemerintah selain sektor maritim, energi, pangan dan industri.

Kenaikan kunjungan wisatawan juga memengaruhi langsung meningkatnya pemasukan devisa. Pada 2014, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencapai kurang-lebih 10 juta orang dengan devisa sebesar 133,9 triliun rupiah atau setara dengan 13 juta rupiah per wisatawan. Angka tersebut naik menjadi 20 juta wisatawan dengan devisa 275 triliun rupiah pada 2019 atau setara dengan 12 juta rupiah per wisatawan.<sup>38</sup> Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berpengaruh terhadap kenaikan devisa, infrastruktur menjadi penting bagi pengembangan pariwisata. Namun sebelum membicarakan masalah infrastruktur, perlu diketahui rencana tata ruang yang dapat menjadi *starting point* bagi pengembangan di daerah. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pariwisata dan Undang-Undang Tata Ruang yang harus menjadi pedoman dan *guidelines* termasuk *masterplan*

---

37 Pangestu dalam ISEI 2016: 1.

38 Pangestu dalam ISEI 2016.

yang terintegrasi dan pembicaraan serta rancangan pengembangan sebuah destinasi wisata.

Menurut Mari Pangestu, keberadaan dan kebersihan sebuah objek wisata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang berlokasi di sekitar destinasi wisata tersebut sehingga diperlukan koordinasi antar-pemerintah daerah tingkat kabupaten. Selain itu, kegiatan promosi juga menjadi penting dan seharusnya promosi sebuah destinasi wisata juga sekaligus mempromosikan bahwa destinasi tersebut merupakan bagian dari daerah atau wilayah apa yang kemudian pada tingkat negara nama Indonesia dapat ikut terangkat. Mari memberikan contoh terkait promosi wisata di Pulau Flores agar promosi tersebut tidak hanya Labuan Bajo, tapi juga sekaligus dapat mengangkat Flores dan delapan kabupaten di pulau itu.

Pada bagian akhir Seminar dan Sidang Pleno XVIII, ISEI merumuskan dan memberikan sejumlah rekomendasi untuk merealisasikan potensi sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Rumusan hasil dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Sektor pariwisata penting menjadi motor penggerak pembangunan sosial Ekonomi Indonesia karena terbukti mampu menciptakan *indirect* dan *induced effect* kepada sektor terkait lainnya terutama di sektor jasa yang nilainya hampir sama dengan *direct effect*.
- Sektor pariwisata berpotensi menyerap 3 juta lapangan kerja baru, khususnya bagi pemuda dan perempuan dan berpotensi mendatangkan devisa 16 miliar dolar AS.
- Potensi pariwisata sejatinya ada di setiap daerah dan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah.
- Saat ini pariwisata di Indonesia masih terlalu berkonsentrasi di beberapa daerah seperti Bali. Dengan demikian, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional pariwisata Indonesia dengan menetapkan 10 kawasan strategis pariwisata nasional, pemerintah perlu mengembangkan destinasi wisata di wilayah Indonesia lainnya.

- Tantangan pengembangan sektor pariwisata Indonesia ke depan tidak hanya sekedar mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga menciptakan sektor pariwisata yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
- Masalah sisi permintaan harus dikaji lebih mendalam terutama perilaku wisatawan baik domestik maupun asing seperti jarak perjalanan, lama tinggal dan pola pengeluaran.
- Pembiayaan perbankan kepada sektor pariwisata, khususnya sektor akomodasi perhotelan dan penyedia makanan dan minuman, hanya 2% dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- ISEI berperan penting terutama dalam melakukan berbagai kajian yang membantu merencanakan pembangunan sektor pariwisata dengan urutan yang tepat, misalnya pembangunan infrastruktur harus didahului dengan penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah yang jelas di setiap daerah.
- Berdasarkan kajian akademik terbatas di beberapa daerah di Indonesia, kondisi secara umum daerah masih memiliki kesenjangan atau ketertinggalan di bidang *enabling environment* terutama untuk *health and hygiene* serta *Travel and Tourism Policy and enabling condition* dan *infrastructures*.
- Selain dukungan infrastruktur merupakan hal utama yang segera harus diperbaiki, untuk mendorong sektor pariwisata sangat diperlukan pula implementasi berbagai strategi yang sudah ada untuk meningkatkan efektivitas promosi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempercepat dan mempersingkat perizinan dan lain sebagainya.
- Oleh karena itu, masalah koordinasi dan sinergi menjadi sangat krusial karena pengembangan destinasi wisata ke depan akan berbasis klaster yang melewati batas wilayah provinsi dan kota/kabupaten. Sinergi tidak hanya di kalangan pemerintah, namun diperlukan juga dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi dan media.



# Globalisasi

## Tantangan Milenium Baru

**M**ahun 2018 dapat dikatakan sebagai tahun yang berat bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari sejumlah faktor yang menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. Kekhawatiran terus membayangi ekonomi Indonesia meski pertumbuhan ekonomi berada di atas 5% dan angka kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia berada dibawah 10% dari total populasi. Menurut Rainer Heufers, *Executive Director* Center for Indonesian Policy Studies kekhawatiran tersebut mengemuka karena adanya trauma akan berulangnya krisis ekonomi pada 1998 seiring dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat padahal kondisi krisis ekonomi 1998 sangat berbeda dengan situasi pada 2018.

Depresiasi mata uang jauh lebih rendah daripada 1998. Bank-bank di Indonesia sudah lebih kuat dan sektor keuangan Indonesia jauh lebih kuat dalam menghadapi tekanan global. Lebih lanjut Rainer menjelaskan bahwa cadangan devisa negara jauh melebihi cadangan devisa pada 1998 dan rasio utang terhadap PDB kurang dari setengah dari 74% yang dialami Indonesia pada 1998. Selain itu defisit anggaran dan tingkat utang secara umum tetap terkendali dan berada dalam batas aman yang diatur oleh undang-undang. Keadaan ini bahkan tetap terjadi setelah Bank Indonesia mengikuti kebijakan normalisasi The Fed yakni dengan menaikkan suku bunga tujuh kali dengan total 1,75% pada 2018. Rainer menyarankan agar pemerintah memfokuskan diri pada penerapan strategi ekonomi jangka panjang

yang menitikberatkan pada teknologi, produktivitas dan peningkatan daya saing guna mewujudkan agenda *nawacita* pemerintah yakni meningkatkan infrastruktur, pembangkit listrik dan kesejahteraan rakyat.

Selain berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, tahun 2018 menjadi kian krusial karena bertepatan dengan tahun penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif dan presiden. Pesta demokrasi tersebut akan menambah kepekaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, terdapat sejumlah kebijakan yang melapangkan hati masyarakat, di antaranya tarif impor terhadap 1147 komoditas kendati tidak memberikan dampak signifikan untuk menyeimbangkan neraca berjalan. Selain itu, pemerintah tidak memotong subsidi bahan bakar minyak untuk mengurangi pengeluaran dan tetap mengikuti kebijakan agar Pertamina menjual bahan bakar di bawah harga pasar nasional. Hal ini menjadi faktor penting mengapa defisit pada neraca berjalan mencapai 3,37% pada PDB 2018. Di bidang investasi, masih terdapat peraturan yang tidak konsisten dan tidak efisien sehingga para investor menahan diri dalam menanamkan modalnya. Investasi asing turun lebih dari 20%. Pertumbuhan *output* melambat sementara permintaan gagal membaik secara signifikan serta penjualan ekspor menurun sepanjang tahun.

Pada awal 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan dialog perkembangan makro fiskal 2017 berikut langkah-langkah kebijakan makro fiskal 2018 bersama kalangan pengusaha dan pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah tersebut.<sup>1</sup> Menteri meminta agar para pengusaha optimistis dalam menghadapi tantangan ekonomi baik dalam lingkup global maupun nasional. Organisasi Ekonomi Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi negara-negara berkembang pada 2018 bisa tumbuh lebih baik pada kisaran 4,9% meski ekonomi di negara-negara maju diprediksi hanya mampu tumbuh sebesar 2%. Namun, institusi ekonomi dunia

1 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180108191250-4-929/kondisi-perekonomian-indonesia-2018-menurut-sri-mulyani>

tersebut memproyeksikan ekonomi dunia bisa tumbuh hingga 3,7%. Dampak positif bagi sejumlah negara yang mengandalkan komoditas untuk tumbuh diharapkan dapat dirasakan dengan perbaikan harga komoditas dan meningkatnya harga minyak dunia. Di sisi lain, Sri Mulyani menilai potensi risiko yang perlu diwaspadai pada 2018 adalah normalisasi kebijakan moneter negara maju yang memungkinkan penarikan modal dari negara berkembang, moderasi ekonomi Cina dan isu geopolitik yang terjadi di Eropa, Timur Tengah dan Korea Utara.

Situasi ekonomi di dalam negeri Indonesia pada 2018 diperkirakan cukup stabil. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17% atau lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07% dan tahun 2016 yang hanya sebesar 5,03%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi 2018 merupakan capaian terbaik sejak 2014 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik di tengah pertumbuhan ekonomi global yang tidak pasti. Jika mengacu pada PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.837,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 56,0 juta atau USD 3.927. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga yakni sebesar 9,08%. BPS mencatat pada triwulan pertama perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% yang bermakna lebih baik dari periode sebelumnya (2017) yang hanya mencatat 5,01%. Pertumbuhan PDB tertinggi berdasarkan lapangan usaha pada triwulan pertama dialami oleh sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 8,69% yang diikuti transportasi dan perdagangan sebesar 8,59%.

## **Membaca Tantangan Baru**

Pengurus Pusat ISEI menyelenggarakan Seminar Nasional dan Kongres XX ISEI di Bandung (8–10 Agustus 2018) dengan tema

Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal. Selain seminar, kongres di Bandung melaksanakan pemilihan ketua umum yang baru. Dalam pemilihan tersebut, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum periode 2018-21 menggantikan Muliaman Hadad yang mendapat tugas menjadi Duta Besar di Swiss.<sup>2</sup>

Perry Warjiyo terpilih dalam rapat pleno ISEI yang dihadiri sejumlah pengurus pusat dan cabang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya, ISEI akan berkontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi nasional melalui rumusan kebijakan, riset dan kualitas akademis serta pengembangan profesionalisme. Menurutnya, peran aktif organisasi profesi diperlukan dalam mewujudkan target Indonesia sebagai negara yang memiliki penghasilan tinggi pada 2045.

Mengacu pada studi Bank Indonesia, pendapatan Indonesia pada 2045 bisa mencapai USD 15,911 per kapita dengan PDB sebesar 6,4%. Proyeksi tersebut bisa tercapai manakala bonus demografi bekerja produktif. “Kalau bonus demografi justru menjadi masalah, Indonesia bisa masuk jebakan pendapatan menengah,” kata Perry. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini setidaknya terdapat tiga tantangan terberat yang harus dihadapi Indonesia, yakni kondisi ekonomi dan keuangan global yang tidak kondusif; upaya membangun perekonomian bersama termasuk peningkatan produktivitas; serta mempersiapkan dan memanfaatkan potensi ekonomi dan keuangan digital. Semua tantangan tersebut bisa dihadapi jika terjalin sinergi antara pemerintah, asosiasi profesi dan pengusaha.

Senada dengan itu, pada pembukaan Kongres ISEI, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa ekonomi nasional tumbuh secara konsisten, namun peningkatan bisa lebih optimal jika kualitas

2 <https://www.antaraneews.com/berita/735376/aklamasi-perry-warjiyo-jadi-ketua-umum-isei-2018-2021>. Ketika Muliaman Hadad bertugas menjadi duta besar, Bambang Sumantri Brodjonegoro diangkat menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum ISEI hingga pemilihan ketua umum baru diselenggarakan pada kongres di Bandung tersebut (lihat uraian selanjutnya dalam subbab ini).



Kongres ISEI XX di Bandung, terpilih Perry Warjiyo sebagai Ketua Umum untuk Periode 2018 - 2021 | Sumber: Tempo

penggunaan anggaran bisa diperbaiki. Biaya internal pemerintah daerah seyogianya tidak lebih tinggi dari alokasi anggaran pembangunan daerah karena pendorong utama produktivitas adalah kemajuan infrastruktur. Pemerintah sendiri harus mengakui keunggulan ekonomi Malaysia, Thailand dan Vietnam; karena selain produktivitas domestik relatif rendah, Indonesia dinilai terlambat menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan sejumlah negara tujuan ekspor. Kondisi itu mengakibatkan ekspor beberapa komoditas seperti sawit dan garmen terhambat.

Sekitar lima bulan sebelum pelaksanaan Kongres XIX di Bandung, Bambang Brodjonegoro diangkat menjadi Pelaksana Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI menggantikan Muliaman D. Hadad pada 8 Maret 2018. Acara serah terima Pelaksana Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI dilaksanakan di Kementerian Program Perencanaan Nasional/Bappenas.<sup>3</sup> Sekretaris Umum Pengurus Pusat ISEI kala itu, Aviliani,

3 <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/menjabat-plt-ketua-umum->

dalam sambutannya berharap Menteri Bambang dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan posisinya sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum ia mampu membuat Kementerian PPN/Bappenas atau individu dari kementerian aktif dalam kegiatan ISEI. Selain itu, ia akan memanfaatkan sisa masa tugas untuk menyelesaikan program dan kegiatan ISEI yang belum tuntas. Lebih lanjut, ia berharap masukan dari ISEI kepada pemerintah kendati beberapa pengurus ISEI sudah menjadi bagian dari pemerintah, termasuk dirinya sendiri. Pada acara serah terima Pelaksana Tugas Ketua Umum tersebut sekaligus diadakan Seminar Nasional dengan tema Prioritas Pemerintah untuk Menyelesaikan Masalah Ekonomi Jangka Pendek dengan pembicara Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih; Dekan FEBUI Ari Kuncoro; Direktur Jenderal Kementerian Desa Ahmad E. Yustika; Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dan Guru Besar FEBUI M. Ikhsan.

Setelah terpilih sebagai Ketua Umum ISEI, Perry Warjiyo menyampaikan sambutan yang diawali dengan doa agar ISEI dapat berperan memajukan perekonomian Indonesia. Secara khusus ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan pengurus ISEI sebelumnya yakni Bambang Brodjonegoro sekaligus mengajak semua elemen ISEI baik pusat maupun daerah bersinergi memajukan ekonomi Indonesia. Perry akan memperkuat sinergi ISEI dengan berbagai lembaga untuk berkontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi Indonesia melalui tiga pilar, yakni penguatan peran serta ISEI dalam perumusan kebijakan; penguatan peran aktif ISEI untuk meningkatkan kualitas akademis dan riset perguruan tinggi; serta penguatan kerja sama ISEI dengan lembaga profesi lain di tingkat nasional dan internasional. Terpilih pula pengurus inti dalam susunan kepengurusan ISEI Pusat yakni Solikin M. Juhro sebagai Sekretaris Umum dan Jahja Setiaatmadja sebagai Bendahara Umum.

---

menteri-bambang-dorong-isei-beri-masukan-kepada-pemerintah.



Perry Warjiyo, Ketua Umum ISEI 2018 - 2027 | Sumber: Bank Indonesia

Sebagai Ketua Komisi Strategis adalah Eko B. Supriyanto, sementara Anggito Abimanyu diberi amanah sebagai Ketua Bidang I, Dody B. Waluyo sebagai Ketua Bidang II, Ari Kuncoro sebagai Ketua Bidang III dan Muhammad Edhie Purnawan sebagai Ketua Bidang IV.

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah (1959). Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Gawok, Sukoharjo, kemudian pendidikan menengah pertama di SMP Negeri Gatak Sukoharjo dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Surakarta. Pendidikan tingginya ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1982. Tidak sampai di situ, Perry melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Master of Science di bidang ekonomi moneter dan internasional di State University of Iowa, Amerika Serikat, pada 1989. Berselang dua tahun kemudian, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang ekonomi moneter dan internasional di universitas yang sama pada 1991.

Perry Warjiyo memiliki perjalanan karier yang cemerlang di Bank Indonesia sejak 1984 khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri serta kepala Biro Gubernur. Perry Warjiyo mengawali kariernya di Bank Indonesia sebagai staf di *desk* penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit hingga diangkat menjadi Staf Gubernur Bank Indonesia (1992–95). Pada 1998 ia diangkat menjadi Kepala Biro Gubernur dan pada 2001 memegang peran sebagai *project leader* Unit Khusus Program Transformasi. Kariernya terus menanjak; pada 2003 ia menduduki posisi sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan hingga 2005, kemudian Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia hingga 2007.

Tidak hanya berkiprah di dalam negeri, Perry Warjiyo diangkat menjadi Direktur Eksekutif Southeast Asia Voting Group, IMF (2007–09). Ia dikenal sebagai pakar yang menguasai isu ekonomi yang telah melakukan berbagai riset di bidang kebijakan moneter, isu internasional dan pendidikan kebanksentralan selain banyak menulis buku dan artikel di berbagai jurnal terkait masalah-masalah ekonomi, moneter dan isu-isu internasional.

Ketua Umum Perry Warjiyo melantik Pengurus Pusat ISEI pada 21 September 2018. Ia berharap, pengurus baru ISEI dapat memberikan kontribusi nyata dengan memperkuat keanggotaan baik di pusat maupun di daerah sehingga dapat dimobilisasi secara konkret dalam memberikan kontribusi pemikiran di bidang ekonomi. “ISEI akan meningkatkan kualitas akademis, publikasi riset dan pendidikan vokasi. Lalu mendorong eksistensi ISEI secara internasional. ISEI juga diharapkan dapat menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga profesi internasional,” jelas Perry<sup>4</sup>

Salah satu tantangan pada masa kepemimpinan Perry Warjiyo adalah dinamika perekonomian pada era digital yang kemudian

4 <https://infobanknews.com/ini-struktur-pengurus-isei-periode-2018-2021/>

direspons ISEI pada penyelenggaraan Sidang Pleno XX ISEI dan Seminar Nasional dengan mengambil tema Menavigasi Era Digital: Tantangan dan Strategi Mengawal Stabilitas dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Bali (27–28 Agustus 2019). Menurut Perry Warjiyo, ISEI memiliki peran strategis dalam memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah terpilih. Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Menurut Perry, sumbangsih pemikiran ISEI akan mengusung sejumlah strategi kebijakan baik di sisi permintaan, penawaran dan reformasi struktural, selain pengembangan potensi ekonomi digital. Sidang Pleno XX disesuaikan dengan kompleksitas tantangan yang tengah dihadapi oleh perekonomian nasional, baik dalam perspektif jangka pendek, menengah-panjang maupun perspektif permasalahan ke depan terkait dengan kemampuan Indonesia dalam menavigasi era digital.

Lebih lanjut Ketua Umum ISEI menyampaikan bahwa kontribusi pemikiran ISEI merupakan satu dari lima hal strategi. Pertama, di bidang organisasi dan kelembagaan ISEI telah menyelesaikan amandemen AD/ART ISEI yang lebih terstruktur, terpadu dan menatap ke depan yang mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta penguatan peran ISEI di pusat maupun daerah. Kedua, Bidang Kajian dan Perumusan Kebijakan menyusun *White Paper* sebagai sumbangsih pemikiran ISEI bagi pemerintah terpilih untuk mendukung strategi kebijakan ekonomi nasional ke depan. Ketiga, Bidang Pengembangan Akademi, Riset dan Profesi telah menerbitkan kembali *Jurnal Ekonomi Indonesia* yang memuat riset serta kajian akademis ekonomi sebagai kontribusi pemikiran anggota ISEI dalam pembangunan ekonomi. Bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Ikatan Akuntan Indonesia dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, ISEI meluncurkan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (Lamemba).

Keempat, Bidang Kerja Sama Internasional telah memperluas kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia dan OECD. Kelima, Bidang Kesekretariatan mengembangkan situs ISEI yang lebih representatif, interaktif dan proaktif yang bisa memuat berbagai kegiatan dan publikasi ISEI, selain pengembangan media sosial. Sidang Pleno XX ISEI dan Seminar Nasional dihadiri oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota dari 52 Cabang ISEI dengan komposisi ABG, yakni *academician, business, government* atau akademisi, pelaku usaha dan pemerintah.<sup>5</sup>

Pada 19 Desember 2019, Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo dan Sekretaris Umum Solikin M. Juhro secara resmi menandatangani revisi AD/ART terbaru. Penandatanganan AD/ART ISEI yang telah disempurnakan tersebut juga dihadiri Ketua Bidang Organisasi Anggito Abimanyu dan Sekretaris Pengurus Pusat ISEI Anika Faisal. Rencana penyempurnaan AD/ART itu sendiri telah dimulai pada 2018 yakni pada awal kepemimpinan Perry Warjiyo. Ia berharap ISEI mampu menjadi wadah bagi sarjana-sarjana ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Penyempurnaan AD/ART ISEI telah direncanakan pada awal kepemimpinan Perry Warjiyo yang berharap ISEI mampu menjadi wadah bagi sarjana Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Setelah melalui proses panjang, Pengurus Pusat ISEI Bidang Organisasi berhasil menyelenggarakan perhelatan Kongres Luar Biasa di Denpasar, Bali (30 Agustus 2019).<sup>6</sup> Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan AD/ART dan dihadiri oleh Pengurus Pusat ISEI serta para ketua dan anggota dari berbagai cabang. Perubahan AD/ART mengacu Pasal 33 yang memberikan wewenang Kongres untuk melakukan perubahan AD/ART dan Pasal 13 untuk melakukan Kongres Luar Biasa serta mengatur mekanismenya.<sup>7</sup>

5 <https://isei.or.id/berita/tantangan-dan-strategi-isei-dalam-menavigasi-era-digital>.

6 <https://isei.or.id/berita/ikatan-sarjana-ekonomi-indonesia-isei-resmi-sahkan-penyempurnaan-ad-art-baru>.

7 <https://isei.or.id/berita/ikatan-sarjana-ekonomi-indonesia-isei-resmi-sahkan>

**SIDANG PLENO ISEI XX & SEMINAR NASIONAL**  
Menavigasi Era Digital : Tantangan Dan Strategi Mengawal  
Stabilitas Dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional

# SIDANG PLENO

Bali, 28 Agustus 2019



Perry Warjiyo dalam Sidang Pleno ISEI XX di Bali tahun 2019 | Sumber: Koleksi ISEI

Penyempurnaan AD/ART ISEI mencakup sejumlah hal. Pertama, penyempurnaan visi dan misi ISEI dalam mukadimah AD. Kedua, penguatan komposisi kepengurusan ISEI di pusat dan daerah yang meliputi unsur akademisi, bisnis/pelaku usaha, dan regulator atau pemerintah. Ketiga, penguatan pemberdayaan cabang yang mencakup perluasan kewenangan cabang dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Keempat, penguatan organ kepengurusan pusat dan cabang dengan penunjukan koordinator wilayah dan Dewan Penasihat serta Dewan Profesi dan Keahlian. Kelima, penguatan tata kelola pada organ pusat dan cabang. ISEI berharap penyempurnaan AD/ART tersebut dapat menjadikan ISEI sebagai organisasi perkumpulan tepercaya serta mampu berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dengan didukung oleh penguatan sinergi akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun di daerah termasuk para pelaku usaha.

[penyempurnaan-ad-art-baru.](#)

## Meniti Arus Global

Pandemi Covid-19 yang menghampiri Indonesia dan banyak negara di dunia tak pelak memengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing. Penurunan investasi tersebut terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari semula 5,02% pada 2019 menjadi 2,97% pada 2020.<sup>8</sup> Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran meningkat. Menurut Bank Dunia, angka pengangguran meningkat dari semula 5,28% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Sementara, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, angka pengangguran di Indonesia selama pandemi hingga Maret 2021 meningkat dari semula 4,9% menjadi 7%.<sup>9</sup>

Selain berdampak terhadap sektor ekonomi, penyebaran virus Covid-19 ikut mengubah kehidupan sosial masyarakat dunia termasuk harus menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut secara langsung membatasi berbagai aktivitas ekonomi termasuk terganggunya proses produksi barang, distribusi produk hingga proses pemasaran barang dan jasa pada hampir semua negara di dunia.

Di tengah situasi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tengah menurun akibat pandemi Covid-19, Pengurus Pusat ISEI menyelenggarakan Seminar Nasional dan Kongres XXI di Makassar (31 Agustus – 1 September 2021). Mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan pertemuan tatap muka, Kongres XXI diadakan secara virtual. Terdapat sejumlah agenda dalam rangkaian kegiatan kongres tersebut, antara lain pelaksanaan Seminar Nasional dan pemaparan karya ilmiah *Jurnal Ekonomi Indonesia* yang seluruhnya dilaksanakan secara virtual. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Kongres XXI, Anggito Abimanyu, kongres kali ini mengangkat tema Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi

8 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.

9 Asropi dan Silitonga (ed.) 2021: 215.

Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital. Menurutnya, tema tersebut dipilih untuk menggambarkan kristalisasi pemikiran ISEI selama tiga tahun terakhir, selain untuk memperkuat sinergi dalam mendorong momentum pertumbuhan dengan menjaga stabilitas dan reformasi struktural perekonomian khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 serta perkembangan di era digital. Lebih lanjut, Anggito menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Kongres XXI adalah sebagai pertanggungjawaban kepengurusan Pengurus Pusat ISEI periode 2018–21 dan penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI periode 2021–24.<sup>10</sup>

Kongres XXI ISEI diikuti oleh 52 cabang ISEI aktif yang seluruh kepengurusannya telah dilantik. Menurut Anggito, ISEI Cabang telah melaksanakan kajian terapan dan menyusun rekomendasi ISEI kepada pemerintah. Bersama seluruh cabang ISEI di seluruh Indonesia, tim agregator telah menganalisis hasil kajian dengan basis data keuangan dan sektor riil daerah. Tim tersebut juga telah menyampaikan simpulan menarik bahwa perekonomian Indonesia di masa pemberlakuan PPKM pada 2021 lebih *resilien* dan tahan menghadapi pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan masa pemberlakuan PSBB pada 2020. Kendati di seluruh daerah terkena dampak pandemi yang menurunkan mobilitas perekonomiannya, namun dampak negatif bagi kegiatan ekonomi sektor riil semakin berkurang.<sup>11</sup>

Pengurus Pusat ISEI selama tiga tahun terakhir telah banyak melakukan kegiatan baik yang bersifat akademik termasuk sejumlah penerbitan maupun keorganisasian, di antaranya penguatan AD/ART yang lebih terstruktur, terpadu dan *forward looking* serta terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) yang telah beroperasi secara aktif. Di bidang publikasi, ISEI menerbitkan Kajian Kebijakan Publik (KKP) yang merupakan kontribusi pemikiran ISEI *White Paper* kepada pemerintah

10 <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/88762/gelar-kongres-isei-bakal-punya-ketum-baru>.

11 Abimanyu dalam ISEI 2021: xxi–xxii.

selain meluncurkan kembali *Indonesian Economic Journal* (IEJ). Periode Kepengurusan ISEI Pusat 2018–21 juga memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkemuka baik di tingkat regional maupun internasional.

Menurut Ketua Panitia Pengarah yang juga Sekretaris Umum Pengurus Pusat ISEI Solikin M. Juhro, Kongres XXI juga bertujuan meningkatkan silaturahmi antaranggota dan pengurus serta memperkuat basis pengelolaan organisasi, di samping meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan tinggi.<sup>12</sup> Terkait dengan situasi ekonomi di tengah merebaknya pandemi, Kongres XXI diharapkan dapat mendorong peran serta ISEI dalam perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional. Di antara pembicara yang akan hadir dalam seminar tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri M. Arsjad Rasjid yang dilanjutkan dengan pemaparan karya-karya ilmiah peserta seminar nasional dan disiarkan secara virtual.

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pembukaan Kongres XXI menyampaikan sambutan secara virtual seraya berharap agar ISEI mampu menjadikan kondisi perekonomian nasional dan global yang membaik sebagai momentum untuk bersama-sama melakukan percepatan transformasi ekonomi. “Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan sinergi berbagai pihak. Melalui Kongres XXI ISEI ini diharapkan lahir gagasan dan pemikiran-pemikiran maju untuk membantu bangsa dalam melalui masa-masa sulit pandemi Covid-19 ini,” kata Presiden.<sup>13</sup> Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya melalui penerapan *online single submission* (OSS) untuk menyederhanakan proses perizinan dalam membuka usaha di Indonesia. Digitalisasi, menurut Presiden, sangat penting untuk mendorong perekonomian nasional

<sup>12</sup> Juhro dalam ISEI 2021: xi.

<sup>13</sup> <https://infobanknews.com/isei-berpartisipasi-aktif-dukung-percepatan-pemulihan-ekonomi/>

dan daerah agar dapat terus tumbuh. Melalui digitalisasi diharapkan juga membantu pengembangan badan usaha, termasuk milik petani, membuka akses pemasaran melalui kemitraan dan penyederhanaan akses pembiayaan. Presiden memberikan contoh transformasi pada sektor industri yang telah dilakukan dengan hilirisasi komoditas nikel yang akan diolah menjadi komoditas lain yang memiliki nilai tambah seperti baterai litium, baterai listrik dan baterai mobil listrik. Di sisi lain, pemerintah secara konsisten melakukan transformasi struktural untuk memastikan upaya-upaya dalam menciptakan iklim investasi yang lebih adil.<sup>14</sup>

Sementara dalam sambutannya, Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menyampaikan rasa syukurnya bahwa sejak didirikan, ISEI telah berperan besar dalam turut memajukan ekonomi Indonesia dan selalu hadir dalam memberikan berbagai pemikiran atau rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkualitas. Selama kepemimpinannya, ISEI berpartisipasi secara aktif melalui berbagai terobosan program maupun pemikiran dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif ke depan. Menurut Perry, hal itu sejalan dengan manifesto ISEI untuk mengambil peran positif guna kemajuan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ilmu ekonomi dan menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila. Lebih lanjut Perry menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, telah terjadi perubahan global yang sangat dinamis meliputi *turbulence, uncertainty, novelty, ambiguity*—lazim disingkat TUNA. Ia mengingatkan bahwa di tengah pesatnya peran teknologi digital dalam perekonomian global dapat menyebabkan disrupsi jika tidak dikelola dengan baik, muncul krisis yang dahsyat akibat pandemi Covid-19 yang, selama dua tahun, telah memperlemah sendi-sendi perekonomian global dan nasional.<sup>15</sup>

---

14 Widodo dalam ISEI 2021: xxxii.

15 Warjiyo dalam ISEI 2021: xxvii.

Selanjutnya Perry Warjiyo mengemukakan tiga aspek penting yang perlu diperkuat untuk menghadapi peradaban baru akibat pandemi Covid-19. Pertama, digitalisasi; akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional menjadi *game-changer* selama pandemi, selain digitalisasi di berbagai bidang lainnya. Kedua, inklusi; diperlukan akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan yakni pada UMKM dan sektor pertanian terutama klusterisasi, kewirausahaan, akses pembiayaan dan digitalisasi. Ketiga, ekonomi hijau; tekanan untuk ramah lingkungan semakin tinggi sehingga perlu ditanggapi melalui kebijakan reformasi struktural ataupun digitalisasi. Selain tiga aspek itu, Perry menyampaikan empat strategi pokok yang perlu dijadikan program konkret ISEI di masa mendatang yaitu, pertama, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan reformasi struktural untuk mencapai Indonesia maju; ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan serta bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan sosial secara menyeluruh; dan terakhir, keempat, mengoptimalkan program pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI baik di pusat maupun daerah.

Rangkaian kegiatan Kongres XXI terdiri dari Seminar Nasional dengan narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid yang dilanjutkan dengan kegiatan *call for paper Indonesian Economic Journal, Joint International Conference, workshop* riset dan *public lectures*. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa sejumlah negara pada 2021 sudah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi. Negara-negara di kawasan ASEAN diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 4,3<sup>0</sup>% dan meningkat menjadi 6,3<sup>0</sup>% pada 2022.<sup>16</sup> Namun menurutnya, pertumbuhan tersebut harus kembali dikalibrasi dengan potensi penyebaran virus Covid-19 varian baru yang muncul. Sepanjang 2020 banyak negara mengunci wilayahnya sendiri (*lockdown*) dan berakibat pada menurunnya perdagangan internasional. Dengan

---

16 "Ringkasan Eksekutif Paparan Narasumber" dalam ISEI 2021: xxiii.



Covid 19 mengubah tatanan ekonomi dunia, termasuk Indonesia | Sumber: Reuters

adanya tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang pesat di sejumlah negara, kinerja perdagangan internasional diharapkan dapat segera pulih dengan jaminan berbagai stimulus yang dilakukan masing-masing negara. Menteri Keuangan menegaskan pemerintah optimistis bahwa indikator sisi permintaan yang menopang perekonomian akan membaik, bukan hanya belanja pemerintah. Menurutnya, stimulus dari pemerintah masih dibutuhkan mengingat dunia usaha belum sepenuhnya bangkit seiring dengan pengurangan produksi akibat penurunan belanja masyarakat. Pemerintah sendiri terus berfokus pada penggunaan instrumen fiskal (APBN) untuk mengendalikan Covid-19 serta memulihkan perekonomian yang dilakukan dengan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, meningkatkan *tracing testing* dan *treatment* serta menyalurkan bantuan sosial untuk 50,40% dari total masyarakat yang kondisi perekonomiannya rentan terdampak Covid-19.



Pembangunan ekonomi dengan mempersiapkan sumber daya manusia. |  
Sumber: Istimewa

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif UN-ESCAP, Armida S. Alisjahbana, menjelaskan bahwa tantangan utama adalah instabilitas, khususnya pembangunan secara keseluruhan. Menurutnya, stabilitas tetap diperlukan dan mempercepat reformasi struktural sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dari krisis pandemi secara bersama-sama. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa instabilitas beberapa tantangan dari kawasan Asia Pasifik secara rata-rata salah satunya adalah indikator pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 yang mulai pulih. Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi 5,9% pada akhir 2021.<sup>17</sup> Menurut Armida, sebagian

<sup>17</sup> ISEI 2021: xxxv.

besar kawasan Asia Tenggara pada 2022 belum bisa pulih kembali ke pertumbuhan ekonomi seperti sebelum pandemi kendati sejumlah negara sudah mulai mendekati level tersebut. Salah satu upaya yang dapat mempercepat pemulihan ialah menciptakan kesempatan kerja. Armida menambahkan bahwa selama pandemi 2020, terdapat 140 juta pekerjaan yang hilang di Asia Pasifik, dan 24 juta jenis pekerjaan yang hilang di Asia Tenggara. Seiring dengan itu, kemiskinan di Asia Pasifik meningkat yakni sebanyak 89 juta orang dengan pendapatan per kapita USD 1,9 per hari. Selain itu, kemiskinan juga meningkat terhadap 158 juta orang dengan penghasilan per kapita USD 3,2 per hari selain berdampak pada 172 juta orang dengan pendapatan USD 5,5 per kapita per hari.

Armida kemudian menjelaskan bahwa pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak akan menjadikan perekonomian Indonesia stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian yang harus diprioritaskan adalah model ekonomi yang resilien, inklusif dan berkelanjutan. Armida menilai, di sejumlah negara Asia Pasifik sebenarnya telah mengarah dengan tepat yakni memprioritaskan perbaikan kesehatan publik dan pemulihan ekonomi ke arah yang lebih baik, selain menginginkan adanya kerja sama dalam mengatasi pandemi. Masih terkait dengan masalah kesehatan dan pencemaran, Armida meminta agar Indonesia menurunkan emisi karbon untuk memenuhi target *net zero carbon emission* pada 2050. Agar target tersebut tercapai, Indonesia harus terlebih dulu membuat satu konsep besar yang diterapkan secara serentak oleh setiap kementerian dan lembaga nasional. Sementara untuk perekonomian yang berkelanjutan, Armida menyarankan agar pemerintah melanjutkan kebijakan penanganan Covid-19 dalam jangka panjang, selain memasukkan kebijakan pelestarian lingkungan ke dalam proses dan analisis investasi. Menurutnya, pemerintah harus mengakselerasi investasi publik yang hijau termasuk pengadaan energi bersih dan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim.<sup>18</sup>

---

18 ISEI 2021: xxxvi.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid menyatakan bahwa dunia usaha nasional belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Situasi yang sama juga dihadapi oleh Kadin di pusat dan daerah berikut semua anggotanya dari korporasi hingga skala UMKM dan pengusaha. Mereka terpaksa mengurangi produksi karena belanja masyarakat menurun akibat pembatasan ruang mobilitas untuk mencegah penularan virus Covid-19. Pada titik ini Kadin Indonesia sepakat dengan pemerintah bahwa kesehatan adalah prioritas, sementara kegiatan ekonomi adalah sebuah keharusan. Menurut Arsjad, Kadin melihat ada segitiga yang utama yakni kesehatan, ekonomi dan sosial karena ketiganya saling berkaitan. Kadin selalu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kesehatan sangat penting namun roda ekonomi harus berputar, terutama lantaran mayoritas pelaku usaha di Indonesia berasal dari kalangan UMKM serta para pekerja harian yang tidak memiliki tabungan.

## **Empat Strategi**

Selain penyelenggaraan seminar, Kongres XXI ISEI mengadakan pemilihan Ketua Umum ISEI masa bakti 2021–24. Dalam pemilihan itu, Perry Warjiyo kembali terpilih untuk periode keduanya. “Kami sampaikan hasilnya [pemilihan], proses penetapan pemilihan ketua umum berjalan demokratis dan sesuai tata kelola AD/ART. Hasilnya menyepakati saya, Perry Warjiyo, untuk periode ke depan yakni 2021 sampai 2024,” kata Ketua Umum terpilih dalam konferensi pers virtual pada 1 September 2021.<sup>19</sup> Ia kemudian menyatakan akan segera menyusun jajaran kepengurusan ISEI pusat dalam 30 hari. Menurutnya, kepengurusan ISEI Pusat yang baru akan terdiri dari kalangan akademisi, bisnis dan pemerintahan. Ia menambahkan bahwa ke depan, ISEI sepakat untuk melangkah sesuai dengan visi misi yang telah disetujui dan semakin bisa memberikan kontribusi

<sup>19</sup> <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qyqw5o457/perry-warjiyo-kembali-terpilih-sebagai-ketua-isei-2021-2024?>

nyata bagi kemajuan ekonomi melalui rumusan kebijakan, akademis, pengembangan, profesionalisme, penguatan peran ISEI dalam perumusan kebijakan, selain berupaya meningkatkan kemampuan akademis daerah, nasional maupun global yang diikuti dengan penguatan organisasi.

Setelah terpilih menjadi Ketua Umum ISEI termin kedua, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dirinya akan fokus melanjutkan program kebijakan yang mengacu pada empat strategi pokok. 20 Pertama, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal itu, ISEI akan memberi rekomendasi kebijakan untuk membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi domestik. “Bagaimana sinergi kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah, Bank Indonesia dan berbagai daerah bisa mendorong pemulihan ekonomi. Itu bisa disinkronkan juga dengan kebijakan kesehatan, seperti PPKM, vaksinasi dan pembukaan sektor produktif dan aman,” jelasnya. Kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju terutama pada sektor riil, di antaranya dengan memperkuat transformasi kebijakan, baik yang berkaitan dengan sektor UMKM dan pertanian, hilirisasi sumber daya alam di bidang manufaktur dan penguatan mata rantai ekonomi lokal, nasional dan global, selain pengembangan infrastruktur fisik maupun digital, pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan serta bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan sosial secara menyeluruh. Akhirnya, keempat, mengoptimalkan program pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI baik di pusat maupun daerah melalui sejumlah kegiatan seperti *workshop*, seminar dan peningkatan koordinasi.

Dalam Kongres XXI, Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa ISEI memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.

---

20 <https://nasional.kontan.co.id/news/perry-warjiyo-kembali-terpilih-jadi-ketua-umum-isei>

Capaian yang berhasil diraih ISEI dalam tiga tahun terakhir di antaranya adalah amandemen dan penguatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang lebih terstruktur, terpadu dan *forward looking*. Seiring dengan itu, ISEI bertransformasi secara menyeluruh dan lebih inklusif baik dari segi organisasi, riset, kebijakan, akreditasi maupun kerja sama di dalam dan di luar negeri. “Keanggotaan ISEI makin tertata dengan adanya kartu anggota visual yang sudah kita luncurkan beberapa waktu yang lalu,” jelas Ketua Umum.<sup>21</sup> Ia menambahkan bahwa ISEI mengambil peran aktif untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ilmu ekonomi dan menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila. Selain itu, ISEI juga telah menerbitkan publikasi baru buku kajian kebijakan publik sebagai kontribusi pemikiran ISEI kepada pemerintah, baik pemikiran strategi utama maupun tematik untuk pemerintah pusat dan daerah.

Arah pemikiran membangun sumber daya manusia ISEI juga disampaikan Yoga Affandi sebagai Sekretaris Umum ISEI 2022 - 2024. Ada dua hal utama, yaitu (1) merawat institusi; dan (2) menyebarkan rasionalitas ekonomi. Dalam sebuah wawancara, Yoga menganalogikan kemajuan suatu negara, secara jangka panjang, ditentukan dari pekerjaan besar membenahi institusinya.<sup>22</sup> Sejalan membangun ISEI, berbagai ruang untuk pengembangan kapasitas dan kualitas intelektual anggotanya telah disediakan, antara lain melalui Warta ISEI. Wadah menulis ini dapat dimanfaatkan untuk mempertajam *skill* literasi bagi anggota ISEI di pusat dan daerah. Menulis, menurutnya adalah fungsi praktis dari membaca. Warta ISEI juga dapat menjadi kekuatan baru bagi ISEI karena di samping mendorong anggota untuk pandai menulis; juga sebagai wahana berbagi perkembangan ilmu ekonomi; dan mewacanakan situasi aktual dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kultur intelektual inilah yang menghidupkan ISEI dari

21 <https://nasional.kontan.co.id/news/perry-warjiyo-banggakan-capaian-isei-dalam-3-tahun-terakhir>;

22 Wawancara dengan Yoga Affandi (Sekretaris Umum ISEI 2022–24), Jakarta, 31 Oktober 2024.



Soft Launching Warta ISEI di kantor sekretariat (JI Daksa) | Sumber: Koleksi ISEI

masa ke masa. Dengan sumber daya manusia yang diisi para cendikia, diharapkan mampu memberi arah dan menyampaikan rasionalitas ekonomi kepada masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

Rasionalitas ekonomi, sambung Yoga, adalah semangat yang disebarkan dari para perintis ISEI, seperti Sumitro Djojohadikusumo. Sejatinya, rasionalitas ekonomi bisa menjadi dasar kerangka berpikir

23 <https://isei.or.id/berita/soft-launching-warta-isei-vol1-no1>



Perry Warjiyo dalam rangkaian Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional ISEI 2023 di Bengkulu | Sumber: Koleksi ISEI

untuk mendapat keputusan ekonomi yang optimal. Dalam praktik dan teorinya, rasionalitas ekonomi akan beriringan dengan ekonomi politik yang mempertimbangkan stabilitas secara holistik. Namun, tugas ISEI yang diisi para ekonom dari kalangan akademisi, pelaku usaha dan pemerintah bisa memberi pemikiran rasionalitas ekonomi yang berimbang dari sudut pandang ilmu ekonomi itu sendiri, serta realita sumber daya yang dimiliki. Internalisasi kultur dan semangat ini harus merata ke anggota ISEI, baik di pusat ataupun daerah. Dengan demikian, membangun dan merawat institusi ISEI, dapat memberi dampak bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa-masa mendatang.

## **Menuju Kongres di Surakarta**

Seiring komitmen membangun serta merawat keorganisasian, ISEI juga harus mampu menjawab tiga tantangan berat ekonomi Indonesia ke depan. Pada Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Ketua Umum ISEI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa ketiga tantangan itu adalah rentannya ketahanan pangan di Indonesia yang dapat memicu terjadinya inflasi pangan, semakin maraknya kecenderungan digitalisasi di dunia dan upaya mendorong pengembangan ekonomi serta keuangan hijau sebagai respons dari perubahan iklim yang dapat mengganggu tidak hanya aspek kemanusiaan, tetapi juga perekonomian secara masif. Selain itu, perubahan iklim juga dapat menjadi tantangan ke depan. Dengan begitu, kepengurusan ISEI Pusat masa bakti 2021-2024 fokus melanjutkan program-program kebijakan berlandaskan empat strategi pokok. Pertama, penguatan sinergi untuk memperkuat ketahanan dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional. Kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan kontribusi untuk mempercepat implementasi kebijakan reformasi struktural dalam mencapai Indonesia Maju 2045. Ketiga, perluasan inovasi dan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan serta bidang-bidang lain khususnya pendidikan, kesehatan dan sosial. Keempat, optimalisasi pelaksanaan program-program pemberdayaan pengurus ISEI Pusat dan Daerah. Selain pelaksanaan program-program di atas, ISEI juga akan tetap menjaga tiga manifesto yakni mengoptimalkan peran organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ilmu ekonomi bagi pembangunan dan menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila.

Selanjutnya, pada 15 September 2023 ISEI menyelenggarakan Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional 2023 yang berlangsung di Bengkulu. Sidang Pleno dan Seminar Nasional tersebut mengambil tema Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Indonesia Maju. Pemilihan tema tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang

mengalami penurunan tajam sejak dunia dilanda Pandemi Covid-19. Menurut Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo, pemilihan tema Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional 2023 diberikan judul "7-5-5" yang bermakna 7 capaian, 5 tantangan dan 5 peran serta respons kebijakan. Sebagai sebuah kota historis yang berkaitan dengan perjuangan Presiden Republik Indonesia pertama yakni Ir. Sukarno, Bengkulu juga mewarisi semangat kepada ISEI dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Peran Akademisi, Bisnis dan Government (ABG) berjalan baik dan berdampak signifikan terhadap 7 capaian ISEI. Pertama adalah reformasi atas AD/ART ISEI yang mewadahi ABG dalam visi baru untuk berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional. Kedua adalah kontribusi yang telah dilakukan ISEI dalam merekomendasi kebijakan dalam bentuk buku Kajian Kebijakan Publik 4.0. Ketiga adalah Jurnal Ekonomi Indonesia yang terbit kembali dan kini telah berindeks Sinta-4. Keempat, ISEI telah bersinergi dengan IAI dan AFEBI dalam menjalankan LAMEMBA. Kelima adalah capaian ISEI Index. Keenam adalah berbagai capaian internasional yang telah diraih ISEI, dan ketujuh adalah inklusivitas ISEI.

Menurut Ketua Panitia Pengarah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum ISEI Yoga Affandi, penyelenggaraan Sidang Pleno ISEI XXIII dan Seminar Nasional 2023 bertujuan untuk melaksanakan rapat anggota tahunan ISEI dan membahas rekomendasi kebijakan ekonomi ISEI kepada Pemerintah sekaligus meningkatkan silaturahmi antara anggota dan pengurus ISEI di seluruh Indonesia serta meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan penelitian di level perguruan tinggi. Selain menysasar sejumlah tujuan yang bersifat internal, Sidang Pleno dan Seminar Nasional ISEI juga bertujuan untuk mendorong peran serta ISEI dalam perumusan-perumusan kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional serta memperkuat ketahanan termasuk pangan dan energi. Hal lain yang juga menjadi sasaran tujuan penyelenggaraan Sidang Pleno dan Seminar Nasional tersebut adalah mempercepat akselerasi digital terutama pada sistem keuangan serta mendukung



Kongres ISEI XXII di Solo | Sumber: Koleksi ISEI

ekonomi berkelanjutan. Pada ranah regional di Asia Tenggara, penyelenggaraan Sidang Pleno dan Seminar Nasional bertujuan untuk mendukung Presidensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-42 yang juga diselenggarakan di tahun yang sama.

Sidang Pleno ISEI XXIII diikuti oleh 51 utusan pengurus cabang ISEI, sementara penyelenggaraan Seminar Nasional memilih tiga subtema diskusi yakni sinergi kebijakan nasional, memperkuat transformasi sektor riil dan akselerasi inklusi ekonomi digital.

Berbeda dengan penyelenggaraan Sidang Pleno dan Seminar Nasional sebelumnya, kegiatan Seminar Nasional ISEI di Bengkulu dilanjutkan dengan penyelenggaraan Seminar Ekonomi Daerah yang memilih tema "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan." Kegiatan lain yang juga disematkan dalam Sidang Pleno dan Seminar Nasional ISEI di Bengkulu adalah Call for Papers untuk Jurnal Ekonomi Indonesia di mana sebanyak 20 makalah terpilih dari 195 makalah akan dipresentasikan. Sidang Pleno dan Seminar Nasional di Bengkulu juga menjadi kesempatan untuk penyampaian hasil kajian terapan dalam bentuk ekspektasi kondisi ekonomi Indonesia sekaligus menjadi peluncuran lagu Mars ISEI yang diharapkan akan menjadi simbol kekuatan, sinergi dan kebersamaan. Lagu Mars tersebut adalah hasil pemilihan dari lomba cipta lagu dimana terdapat 15 lirik Mars ISEI yang tersebar dari sejumlah cabang ISEI yakni Medan, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, Manado dan Ambon. Pemilihan lirik lagu Mars dilakukan oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum yang memilih 4 lirik yakni Wildan Syafitri dari Cabang ISEI Malang, Eduard Michelis Adventa Wardana yang berasal dari ISEI Cabang Solo, Arif Rahman dari ISEI Cabang Medan dan Indriayu Afriana dari ISEI Cabang Jakarta.

## **Lima Tantangan Emas**

Pada 19-20 September 2024, ISEI menyelenggarakan Kongres XXII dan Seminar Nasional di Surakarta, Jawa Tengah. Penyelenggaraan seminar nasional tersebut merupakan amanat dari pelaksanaan Sidang Pleno XXIII dan Seminar Nasional ISEI di Kota Bengkulu (2023). Kongres dan seminar di Surakarta mengambil tema Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan memiliki nilai strategis karena akan menyoroti lima kompleksitas tantangan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.<sup>24</sup>

24 <https://www.antaraneews.com/berita/4338279/kongres-xxii-isei-2024-soroti-lima->

Kegiatan lain yang termasuk dalam rangkaian kegiatan kongres adalah *call for paper Jurnal Ekonomi Indonesia*, *Workshop BMEB* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret, *workshop* internasional untuk penulisan jurnal ilmiah berstandar internasional yang bekerja sama dengan BMEB *workshop*, pemaparan Kajian Terapan ISEI Cabang seluruh Indonesia dan rapat umum anggota LAMEMBA. Menurut Anggito, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di berbagai perguruan tinggi, selain mendorong peran serta ISEI dalam perumusan kebijakan guna menjawab berbagai tantangan ekonomi di tingkat daerah, nasional dan global terutama dalam rangka menghadapi tantangan geofragmentasi serta siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan rentan. Ia kemudian menjelaskan bahwa hasil perumusan kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai perspektif dan pemikiran ISEI.

Kongres XXII dan Seminar Nasional ISEI 2024 dibuka resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2024. Turut hadir dalam acara pembukaan kongres tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit, Gubernur Bank Indonesia yang juga Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo dan Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nana Sudjana.<sup>25</sup> Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak mudah. Pandangan tersebut relevan dengan situasi dunia yang penuh ketidakpastian selain adanya konflik Rusia-Ukraina serta situasi perang di Timur Tengah yang kian memanas dan berdampak pada melambatnya perekonomian. Presiden memberikan contoh salah satu negara maju yang saat ini tengah mengalami resesi yaitu Inggris. Selain itu terdapat 96 negara yang tengah menjadi pasien IMF sehingga Indonesia harus fokus dalam

---

[kompleksitas-tantangan-ekonomi](#)

25 <https://setkab.go.id/buka-kongres-isei-presiden-jokowi-tekankan-pembentukan-pasar-kerja/>

bekerja mengelola dan meningkatkan perekonomian. Presiden juga mengingatkan bahwa di masa depan penting menciptakan lapangan kerja dan tidak larut dan terbawa dalam situasi global. Terkait dengan bonus demografi, Presiden menilai hal tersebut bisa menjadi kekuatan sekaligus bisa menjadi beban. Pembukaan lapangan kerja menjadi syarat agar bonus demografi dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun mendatang.

Presiden Joko Widodo lebih lanjut menyampaikan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang pada 2023 dicatat oleh Bank Dunia bahwa perekonomian dunia hanya tumbuh 2,7% sementara pada 2024 justru mengalami sedikit penurunan yakni 2,6%. Dengan memperhatikan situasi dunia saat ini, Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian dunia hanya akan naik sedikit hingga mencapai 2,7%. Pada titik ini, seluruh negara akan memperketat kebijakan moneternya agar inflasi tidak semakin meningkat kendati aktivitas produksi akan menurun. Kedua adalah peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja yang berdampak pada akan hilangnya pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia sehingga tuntutan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja semakin tinggi. Ketiga adalah *gig* ekonomi atau ekonomi serabutan yang tengah menjadi *trend*. Presiden mengingatkan bahwa sistem tersebut memungkinkan perusahaan memilih untuk mempekerjakan karyawan paruh waktu untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Pada titik ini Presiden berharap ISEI dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa rancangan dan strategi taktis secara rinci. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Presiden menilai bahwa hilirisasi menjadi sebuah kata kunci seperti pada pengembangan kegiatan penambangan di Indonesia terutama nikel.

Sementara itu, Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo dalam sambutannya menyampaikan lima tantangan yang harus diantisipasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi untuk

mencapai Indonesia Emas. Tantangan pertama adalah perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan berisiko menimbulkan kerentanan. Tantangan kedua adalah terjadinya pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dunia dari Eropa dan Amerika Serikat ke Cina, Indonesia dan India. Tantangan ketiga adalah perubahan demografi yang semakin menua di negara maju dan milenial di Indonesia. Kondisi ini membawa perubahan di sektor pertumbuhan ke sektor jasa, perdagangan eceran dan UMKM. Tantangan keempat adalah digitalisasi yang ikut berperan dalam menahan dampak pandemi dan perlu dimaksimalkan manfaat sekaligus memitigasi risikonya. Tantangan kelima adalah ekonomi keuangan inklusi dan hijau yang perlu direspons dengan baik.

Pada kesempatan pembukaan Kongres, Ketua Umum ISEI menyampaikan secara langsung kepada Presiden buku Kajian Kebijakan Publik edisi ke-5 yang mengambil tema *Akselerasi Transformasi Indonesia: Strategi Penguatan Hilirisasi Pangan*. Tema tersebut relevan dengan program pemerintah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan pangan. Hilirisasi sendiri merupakan upaya untuk mengolah bahan baku atau komoditas menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dengan demikian komoditas yang dijual tidak hanya sebatas bahan mentah, melainkan juga produk setengah jadi atau produk jadi yang telah mengalami nilai tambah tinggi. Sebagai organisasi profesi sarjana ekonomi, ISEI diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan penguatan ekonomi, terutama pada upaya penyerapan tenaga kerja melalui program-program padat karya yang berpotensi mengurangi pengangguran.

Seminar Nasional ISEI di Surakarta terbagi dalam lima subtopik diskusi yakni (1) *Green Economy and Climate*; (2) *Macroeconomy*; (3) Ketahanan Pangan, Energi dan Sosial; (4) Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga; dan (5) *Banking and Finance*. Selain seminar, Kongres juga menggelar pemilihan Ketua Umum periode 2024–27. Dalam pemilihan ketua umum, Perry Warjiyo secara aklamasi kembali terpilih sebagai Ketua Umum

ISEI untuk ketiga kalinya. “Dalam Kongres ini, secara aklamasi musyawarah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Umum periode 2024–2027,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers sesuai terpilih.

Ia mengapresiasi para pengurus yang telah berperan aktif memajukan ISEI sekaligus menegaskan pentingnya melakukan kolaborasi antara akademisi, pebisnis dan masyarakat. Berbagai kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. ISEI menurutnya akan terus berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan moneter. Bahkan melalui Kongres XXII, ISEI mengusulkan hilirisasi pangan yang diharapkan dapat mendorong kebijakan Pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi.

Kongres ISEI XXII menghasilkan tiga hal. Pertama adalah tinjauan atas pencapaian dan kemajuan ISEI termasuk sejumlah program yang berhasil diimplementasikan hingga tahun 2024. Hingga penyelenggaraan kongres tersebut, ISEI memiliki 52 cabang di berbagai daerah dengan jumlah anggota lebih dari 13.227 orang.<sup>26</sup> Selain itu, ISEI menghasilkan riset akademis berupa indeks ISEI mengenai persepsi ekonomi yang disusun berdasarkan pandangan ekonom di daerah dan nasional. Berbagai pandangan tersebut memberikan indikasi kondisi ekonomi saat ini berikut ekspektasi ke depan. Program lain yang berhasil diselesaikan adalah penerbitan Kajian Kebijakan Publik secara reguler per tahun dan mendorong pengembangan mutu jurnal yang terakreditasi pada level nasional mengacu pada *rating* SINTA dan internasional. Di sisi akademis, ISEI terus berupaya meningkatkan kualitas akademis di fakultas ekonomi dan bisnis bekerja sama dengan LAMEMBA dan Asosiasi Manajemen Bisnis.

Kedua, ISEI memperkuat kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi melalui penyampaian Kajian Kebijakan

26 [https://isei.or.id/storage/files/shares/Siaran%20Pers%20-%20Kongres%20ISEI%20XXII%20Solo%202024%20final\\_editWM%20copy.pdf](https://isei.or.id/storage/files/shares/Siaran%20Pers%20-%20Kongres%20ISEI%20XXII%20Solo%202024%20final_editWM%20copy.pdf)

Publik. Fokus kajian edisi ke-5 bertemakan *Akselerasi Transformasi Indonesia: Strategi Penguatan Hilirisasi Pangan*. Hilirisasi pangan penting dikembangkan dengan sejumlah pertimbangan, karena berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan impor. Hilirisasi pangan juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan dampak yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga, penguatan tata kelola melalui akuntabilitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ISEI serta keberlanjutan kepemimpinan organisasi dengan menetapkan kembali Perry Warjiyo sebagai Ketua Umum ISEI periode ketiga secara aklamasi.



# Epilog

Perjalanan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi tak pelak ikut mempengaruhi perjalanan pembangunan perekonomian bangsa. Sejak didirikan, ISEI telah memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi lainnya termasuk pengembangan ilmu ekonomi melalui para ekonom yang berbicara di berbagai forum akademik selain melalui media tulisan. Seperti telah dipaparkan dalam buku ini, melalui banyak tokoh yang juga duduk di pemerintahan terutama pada era Orde Baru dan masa Reformasi baik sebagai individu maupun organisasi, ISEI berkontribusi terhadap perumusan kebijakan yang kemudian diimplementasikan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kendati dalam beberapa hal terjadi perbedaan pandangan diantara para ekonom, ISEI menghormati perbedaan pandangan tersebut sebagai sebuah wacana ilmu yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan peran dan kontribusi ISEI untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat dari masa ke masa menunjukkan sebuah realitas zaman dan dinamika pemerintahan di Indonesia. Pada masing-masing periode pemerintahan, ketua dan pengurus ISEI senantiasa berupaya untuk menjalankan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi organisasi di tengah kesibukan berbagai aktivitas lain.

Dibandingkan dengan organisasi profesi lainnya di Indonesia, sejarah perjalanan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi para sarjana yang umumnya lulus dari fakultas ekonomi justru mengalami dinamika yang bersentuhan dengan masalah-masalah politik dan terkadang demikian krusial bagi keberadaan organisasi itu sendiri. Hal yang demikian justru membuat konsistensi sikap para ketua dan pengurus menjadi tantangan tersendiri. Sejak didirikan, ISEI sudah dituntut untuk menunjukkan kemandirian dan profesionalisme ditengah

perbedaan pandangan pemikiran ekonomi dan atmosfer politik yang tinggi pada masa Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer hingga masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Para pendiri dan ekonom ISEI di masa awal, termasuk salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia yakni Mohammad Hatta, menyadari bahwa tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di tengah situasi dan kondisi perekonomian bangsa pada masa awal kemerdekaan yang demikian memperhatikan, maka kontribusi pemikiran ekonomi patut dikedepankan untuk ikut mencari opsi solusi guna membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.

Satu hal yang menarik dicatat, perkembangan struktur organisasi ISEI dan kemudian juga infrastruktur berupa kantor dengan alamat yang tidak lagi berpindah, terus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman seiring dengan makin bertambahnya usia organisasi. Rekonstruksi sejarah organisasi dan pemikiran para pengurus serta ekonom ISEI memperlihatkan dinamika tersebut. Para ketua dan pengurus ISEI yang pada umumnya melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral di sejumlah universitas Amerika dan Eropa juga menjadi satu hal penting untuk dicatat. Perkembangan ilmu ekonomi yang dipelajari di negara-negara tersebut sangat pesat, sehingga mereka yang di kemudian hari mendapat amanah untuk memimpin organisasi ini dapat membandingkan perkembangan ilmu ekonomi sekaligus mengadaptasikan dan memberikan opsi yang lebih tepat dan sesuai untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang tengah dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Sementara dalam hal regenerasi kepengurusan dan proses pemilihan ketua umum, ISEI juga mengalami dinamika seiring dengan perubahan pemerintahan yang berbeda sejak organisasi ini didirikan. Kelenturan metode dan proses pemilihan ketua umum yang seringkali krusial di sejumlah organisasi lain karena terkadang rawan akan intervensi politik, menunjukkan bahwa ISEI menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baik secara internal maupun eksternal. Ditinjau dari

rekonstruksi sejarah organisasi, tidak ada catatan proses pemilihan ketua umum ISEI yang menyebabkan keretakan hubungan antar anggota, sebaliknya peralihan dari satu kepengurusan ke kepengurusan berikutnya berjalan dengan baik. Hubungan baik antar pengurus dan anggota dibina melalui acara-acara informal seperti halal bi halal dan kegiatan silaturahmi lainnya.

Kegiatan sidang pleno dan kongres yang diiringi dengan seminar nasional menjadi salah satu kegiatan penting ISEI dalam menjalankan fungsinya yakni memberikan saran dan pandangan terhadap masalah-masalah ekonomi yang tengah dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan kepedulian ISEI terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi yang tengah berjalan, tetapi juga sebagai ajang untuk menjaga relasi yang positif dengan pemerintah sekaligus sarana untuk bertukar pikiran serta memberikan rekomendasi terkait program-program pemerintah yang akan dijalankan atau tengah berjalan. Pada titik ini, kegiatan seminar nasional memberikan kesempatan kepada para anggota ISEI baik pada tingkat pusat maupun daerah yang hendak mempersentasikan berbagai penelitian yang telah mereka lakukan. Pada umumnya berbagai penelitian tersebut juga menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi termasuk di daerah-daerah. Sejauh ini, Pengurus Pusat ISEI telah memberikan kesempatan kepada sejumlah pengurus ISEI di daerah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang-sidang pleno dan kongres yang berjalan dengan sukses. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat pada sisi pengembangan akademis, tetapi juga menjadi sarana yang dapat digunakan untuk saling memahami permasalahan ekonomi di sejumlah daerah.

Selain melalui penyelenggaraan seminar nasional, penyebaran ilmu di bidang ekonomi juga diupayakan melalui penerbitan buku, jurnal dan prosiding seminar. Sejumlah buku seperti seri Kajian Kebijakan Publik dan Jurnal Ekonomi Indonesia serta penerbitan lainnya dapat diakses di situs resmi ISEI sehingga memudahkan

bagi mereka yang ingin membacanya. ISEI juga mempublikasikan Warta ISEI yang diharapkan dapat menjadi media untuk menyajikan pemikiran-pemikiran terkini seputar kemajuan ekonomi Indonesia. Media tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan tokoh ISEI di pusat dan daerah selain menghadirkan berbagai perspektif dalam menyikapi dinamika ekonomi daerah, nasional dan global. Disamping itu, ISEI mengadakan kerjasama dengan sejumlah institusi dalam menyelenggarakan pelatihan. Berbagai program yang dijalankan oleh Pengurus Pusat ISEI sesuai dengan Manifesto ISEI yakni mengambil peran positif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ilmu ekonomi dan menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana refleksi terutama bagi para pengurus, anggota ISEI dan secara umum para lulusan fakultas ekonomi di seluruh universitas di Indonesia bahwa pendirian dan keberadaan ISEI sebagai sebuah organisasi profesi telah mengarungi sejumlah pemerintahan dalam waktu yang cukup lama. Keberadaan organisasi yang telah mencapai usia 70 tahun telah memberikan berbagai kontribusi pemikiran serta catatan keberadaan sejumlah ekonom yang terlibat dalam kepengurusan sekaligus menjadi ketua umum yang ikut mengubah jalannya sejarah organisasi. Melalui buku ini, sekelumit sejarah kontribusi dan peran para pendahulu ISEI diharapkan dapat menginspirasi para pengurus ISEI pada masa kini dan masa akan datang untuk tetap konsisten dalam memberikan kontribusi pemikiran, terlebih tantangan ekonomi nasional dan global semakin kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang terstruktur di tengah persaingan yang semakin ketat diantara negara-negara di dunia.

# Daftar Acuan

- Abdullah, Burhanuddin (2006), *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pemba-ngunan Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdullah, Taufik dan Adrian Bernard Lopian (ed.) (2012), *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdullah, Taufik, Sukri Abdurrachman, Restu Gunawan (ed.) (2012), *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional*, Bagian 3: Berakhir dan Bermula. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri (2014), *Bank Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press,
- Amalia, Lia dan Deddy Supriady Bratakusumah (2023), *Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan*. Solok: CV Mitra Cendekia Media.
- Amrullah, M. Arief (2022), *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Aning, Floberta (2007), *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Anwar, Rosihan (2004), *Sejarah Kecil “Petite histoire” Indonesia*, Jilid 3. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Anwar, Syaiful (2022), *Bank dan Lembaga Keuangan*. Cirebon: CV Green Publisher.
- Asropi dan Mala Sondang Silitonga (ed.) (2021), *Geliat di Masa Sulit: Tinjauan Kritis dan Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Boediono (2016), *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Booth, Anne (2001), “Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan,” dalam Emerson (ed.) [lihat dalam daftar ini].
- Booth, Anne dan Peter McCawley (ed.) (1982), *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: PT Djaya Pirusa.
- Bresnan, John (2006), *At Home Abroad: A Memoir of the Ford Foundation in Indonesia 1953–1973*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Dahlan, Vidya dan Lukman Hakim (2005), *ISEI: Indonesian Economists*

- Association, The First Fifty Years 1955–2005*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dhakidae, Daniel (2003), *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diposastro, Soemarno (1977), *Tritura & Hanura: Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Menegakkan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Yanense Mitra Sejati.
- Djiwandono, Soedradjat (2006), *Sejarah Bank Indonesia Periode IV 1983–1997: Bank Indonesia pada Masa Pembangunan dengan Pola Deregulasi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djojohadikusumo, Sumitro (1988), “Kelemahan-kelemahan Sukarno,” dalam Feith dan Castles (ed.) [lihat dalam daftar ini].
- (1989), “Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap Pelita 1969/1970 – 1988/1989, Makalah Sidang Pleno ISEI. Bukittinggi, 29 Juni.
- Dwipayana, G. dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed.) (2003), *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983–11 Maret 1988*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.
- G. Emerson, Donald K. (ed.) (2001), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation Indonesia.
- Esmara, Hendra (2000), *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Exotix Capital (2019), *Exotic Developing Markets Guide: Debt and Risk Across the Frontier*. London: Springer International Publishing.
- Feith, Herbert dan Lance Castles (ed.) (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945–1965*. Jakarta: LP3ES.
- Fachrizal, Moch. Ricky (2022), *Jejak Riwayat Penyakit di Indonesia 1655–2020*. Surabaya: CV Media Edukasi Creative.
- Gonggong, Anhar dan Musa Asy'arie (ed.) (2005), *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Gouda, Frances (2007), *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900–1942* (terj.). Jakarta: Serambi.
- Grant, Bruce (1996), *Indonesia*. Melbourne: Melbourne University Press, 1996.
- Gunanegara (2019), *Hukum Perkebunan Sejarah dan Latar Belakangnya*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- Hakim, Cecep Lukmanul (2018), *Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan Perkebunan Teh di Daerah Bandung Selatan 1870–1929*. Ciamis: Vidya Mandiri.
- Hakiem, Lukman (2012), *Utang Republik pada Islam: Perjuangan Para Tokoh Islam dalam Menjaga NKRI*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Hariyani, Iswi (2013), *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasyim, Fadli Agus Triansyah (2024), *Bank dan Lembaga Keuangan Modern*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Hatta, Mohammad (1953), *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- (1966), *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.
- (1988), “Kediktatoran yang Didukung oleh Kelompok-kelompok Tertentu,” dalam Feith dan Castles (ed.) [lihat dalam daftar ini].
- (2005), “Ekonomi Indonesia di Masa Datang,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 1 [lihat dalam daftar ini].
- Hill, Hal (2000), *The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ikhsan, Mohammad (2005), “Deregulasi Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 5 [lihat dalam daftar ini].
- Kaluma, Peter Opondo (2009), *Judicial Review Law Procedure and Practice*. Kampala: LawAfrica Publication.
- Karmeli, Elly dan Siti Fatimah (2008), “Krisis Ekonomi Indonesia,” *Journal of Indonesian Applied Economics*, Volume 2 (2), Oktober.
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar (1975), “Pendidikan Tinggi dalam Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia,” *Masyarakat Indonesia*, Tahun II (1).
- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (1999), *Apa & Siapa Sejumlah Alumni UGM*. Jakarta: LP3ES.
- Lembaga Publikasi Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan Indonesia (1978), *Album Pem-bangunan Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Lembaga Publikasi Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan Indonesia.
- Lewis, W. Arthur (1965), *Dasar-dasar Perentjanaan Ekonomi Negara* (terj.). Jakarta: Bhartara.
- Majid, Ruslan (2021), *Dasar Kependudukan*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Mallarangeng, Rizal (2002), *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986–1992*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Manning, Chris dan Hadi Soesastro, Mohammad Ikhsan (ed.) (2002), *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru: 80 Tahun Mohammad Sadli*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Masno M. (2021), *Pengantar Keuangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Mas'ood, Mohtar (1989), *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966–1971*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, Yahya (1991), *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950–1980*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Mar'ie (2005), “Kebijakan Fiskal di Masa Krisis,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 5 [lihat dalam daftar ini].
- Mukhlisin, Murniati (2023), *Ekonomi Politik Industri Halal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustapadidjaja AR (ed.) (1966), *The Leader, The Man, and The Gun*. Jakarta: PT Matoa.
- Muzakar, Abdullah (2017), *Gerakan Sosial: Telaah Aksi Perlawanan Pengamen*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Nurdin, Bahri dan Mohammad Iskandar (2000), *FEUI dalam Kancah Perjuangan Bangsa Indonesia (1950–2000)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Oemarjati, Boen S. (1992), *Warna Warni Pengalaman Hidup R. Slamet Iman Santoso*. Jakarta: UI Press.
- Paauw, Douglas S. (1978), “Universitas-universitas Indonesia Generasi Pertama,” *Prisma*, Tahun VII (2), Maret.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto (ed.) (2008), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942–1998. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poeze, Harry A., Cees van Dijk, Inge van der Meulen (1986), *In het land van de overheerser*, Jilid I: Indonesiërs in Nederland 1600–1950.
- Pratama, Agung Rifqi (2018), “Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *VEJ*, Volume 4 (2).
- Prawiranegara, Sjafruddin (2005a), “Membangun Kembali Ekonomi Indonesia,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 3 [lihat dalam daftar ini].
- (2006b), “Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 3 [lihat dalam daftar ini]
- Prijono, dkk. [M. Yasin, Bakir Hasan, Djunaedi Hadisumarto (1981), *Profesi, Partisipasi & Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardjo, M. Dawam (1992), *Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- (2017), *Nasionalisme, Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: LP3ES.

- Rahman, Abdul (2023), *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Ramli, Rizal (2005), “Mengakhiri Malpraktik IMF di Indonesia,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 5 [lihat dalam daftar ini].
- Roeder, O. G. (1969), *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Salim, Emil (1997), “Recollections of My Career,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 33 (1), April.
- Salman, Budi, Didik Djumadiono, Nani Mulyani (1995), *50 Tahun Indonesia Merdeka: 1965–1995*. Jakarta: Citra Media Persada.
- Samsudin (2004), *Mengapa G.30.S/PKI Gagal? Suatu Analisis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Schapiro, Mary L. (2010), *Lehman Brothers Examiner’s Report Congressional Testimony*. Collingdale: Diane Publishing.
- Setiawan, Agus, Rita Krisdiana, Allan Akbar (2003), *Konferensi Meja Bundar: Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Asropi, Mala Sondang Silitonga (ed.) (2021), *Geliat di Masa Sulit: Tinjauan Kritis dan Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Siregar, Arifin Mohammad (2017), *Aneka Zaman dalam Renungan: Sebuah Autobiografi*. Jakarta: Suara Harapan Bangsa.
- Siregar, Edison (2021), *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Siregar, Sori (2007), *FEUI: Lintas Perjalanan, Percik Pemikiran*. Jakarta: LP3ES.
- Siswosoemarto, Rubijanto, Victor Hasibuan, Dadang Iskandar (2012), *Intelijen Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahrir (1989), *Menuju Masyarakat Adil Makmur: 70 Tahun Prof. Sarbini Sumawinata*. Jakarta: Gramedia.
- (1992), *Refleksi Pembangunan Orde Baru: Ekonomi Indonesia 1968–1992*. Jakarta: Gramedia.
- Soesastro, Hadi (1991), *Japan’s ODA and Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Soesastro, Hadi, dkk. [Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Alisjahbana, Sri Adiningsih] (peny.) (2005), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1945–1959*, Jilid 1. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Kanisius.
- (2005), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1966–1982*, Jilid 3. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Kanisius.

- (2005), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1997–2005*, Jilid 5. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Kanisius.
- Subianto, Bambang (2005), “Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Krisis,” dalam Soesastro, dkk. (peny.), Jilid 5 [lihat dalam daftar ini].
- Subroto (1966), “Kebidjaksanaan Ekonomi Dibidang Perdagangan Internasional Tahun 1966,” dalam Mustapadidjaja AR. (ed) [lihat dalam daftar ini].
- Subekti, Valina Singka dan Hanta Yuda A.R. (2014), *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudibyoy, Bambang (1999), “Pemulihan Lingkungan Usaha,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 14 (1),
- Suharyanto, Her, Edy Sasmito, Bangun Sarwito Kusmuljono (2004), *Making Things Happen*. Jakarta: Arga Bangun Aksara.
- Suhartono (2017), *Anwar Nasution: Bukan Ekonom Biasa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suleman, Zulfikri (2010), *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumawinata, Sarbini (1989), “Repelita,” dalam Sjahrir (ed.) [lihat dalam daftar ini].
- Swasono, Sri-Edi (peny.) (1985), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syafril (2020), *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Tulus T. H. (2015), *Perekonomian Indonesia: Era Orde Lama Hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thee Kian Wie (ed.) (2003), *Recollections: The Indonesian Economy 1950s–1990s*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wanandi, Jusuf (2014), *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965–1998*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wardhana, Ali (1966), “Beberapa Tjatatatan Mengenai Tindakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Moneter,” dalam Mustapadidjaja AR. (ed) [lihat dalam daftar ini].
- Wardhono, Adhitya, dkk. (2019), *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Wuryandari, Ganewati, dkk. (2015), *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

## **Dokumen/Terbitan Resmi Tercetak**

- Bank Indonesia (2008), Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008.
- Biro Pusat Statistik Indonesia (2021), *Tourism Satellite Account Indonesia 2016–2019*. Jakarta: Biro Pusat Statistik Indonesia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia (1991), *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah: 45 Tahun Uang Republik Indonesia 1946–1991*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Departemen Pertahanan-Kemampuan (1975), *Pengertian Pembangunan Bidang Politik*, Volume 1. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Dewan Kekayaan B.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1970), *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999), *Laporan Konferensi tentang Krisis Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (2009), *Indonesia Economic Outlook 2010*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Joint Publications Research Service (1976), *Translations on South and East Asia*, Volume 675–690. Virginia: Joint Publications Research Service.
- Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat (1977), *Focus on Indonesia*, Volume 1, No. 5. Washington D.C.: Information Center Embassy of Indonesia in Washington.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia (1959), *Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya, 9 April 1957 – 9 April 1959*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2000), *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955–1999*. Jakarta: Biro Humas Komisi Pemilihan Umum.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1972), *Laporan Pimpinan MPRS Tahun 1966–1972*. Jakarta: Penerbitan MPRS.
- Panitia Penerbitan Buku 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990), *Empat Dasawarsa Perjalanan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Partai Komunis Indonesia (1963), *Madju Terus: Dokumen-dokumen Kongres Nasional ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia, Djakarta 25–30 April 1962*. Jakarta: Jajasan Pembaruan.
- Pusat Data dan Analisa Tempo (2019), *Membidik Arah Kabinet Soeharto*. Jakarta: Tempo Publishing.
- (2020), *Rekaman Perekonomian Indonesia Ketika Pemerintah Memutuskan Devaluasi Rupiah 1983*. Jakarta: Tempo Publishing.

Taman Siswa (1982), *Buku Peringatan Tamansiswa 60 Tahun, 1922–1982*. Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa.

### **Prosiding/Terbitan ISEI**

ISEI (1985), *Hasil Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Tanggal 27 dan 28 Maret 1985 di Batu, Malang*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

— (1998), *Masalah-masalah di Seputar Usaha Kecil Indonesia: Prosiding Konperensi Nasional Usaha Kecil Cipanas, 4–6 Agustus 1997*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia; Kamar Dagang dan Industri; The Asia Foundation.

— (2005a), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Reformasi Sosial Politik yang Mendukung Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005b), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Tantangan Makro Ekonomi Pemerintah Baru*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005c), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Mendorong Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005d), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Tantangan yang Dihadapi dalam Penciptaan Lapangan Kerja*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum

— (2005e), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005f), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Menuju Sektor Keuangan yang Sehat*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005g), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Isu-isu Pokok Pengelolaan Utang Negara/Bantuan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2005h), *Usulan Program bagi Pemerintahan Baru 2004–2009: Mendorong Etika dan Kultur Bisnis yang Sehat*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Yayasan Indonesia Forum.

— (2006a), *Prosiding Kongres XIV ISEI: Membangun Ekonomi Daerah yang Kompetitif dan Efisien dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

— (2006b), *Prosiding Kongres XVI ISEI: Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

- (2009), *Prosiding Kongres XVII ISEI: Rekonstruksi Sistem Ekonomi untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- (2010), *Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV: Revitalisasi UMKM untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- (2016), *Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVIII: Meralisasikan Potensi Sektor Pariwisata untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- (2021), *Prosiding Kongres ISEI XXI & Seminar Nasional 2021: Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

### **Jurnal/Media Massa/Media Lain**

*Antara*, 1957; 2006.

*Ekonomi*, 1959.

*Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 1960.

*Forum Ekonomi*, 1981; 1985.

*Kompas*, 1969; 1976; 1981; 1985.

*Liputan6 SCTV* 2003; 2009.

*Mediakarya* (Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya), 1986.

*Het nieuwsblad voor Sumatra*, 1959.

*Prisma*, 1980.

*Tempo*, 1986; 2003.

*Warta Perdagangan* (Departemen Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia), 1965; 1966.

### **Wawancara**

Aviliani, Jakarta, 21 Februari 2024; 25 April 2024.

Bambang Sudibyo, Jakarta, 12 Maret 2024.

Burhanuddin Abdullah, Jakarta, 5 Februari 2024.

Darmin Nasution, Jakarta, 21 Februari 2024.

Muliaman Darmansyah Hadad, Jakarta, 6 Februari 2024.

Prijono Tjiptoherijanto, Jakarta, 4 Juni 2024.

Solikin M. Juhro, Jakarta, 28 Maret 2024.

Yoga Affandi, Jakarta 31 Oktober 2024

### **Sumber Arsip dan Internet**

(Telah disebutkan secara lengkap dalam catatan kaki).





**Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia**  
Jalan Daksa IV/9, Jakarta  
[www.isei.or.id](http://www.isei.or.id)